

1

PROCEEDINGS

EVALUASI HASIL PENELITIAN ARKEOLOGI

BEDEGUL, 14 - 17 JULI 2000



PROYEK PENINGKATAN PENELITIAN ARKEOLOGI JAKARTA
JAKARTA 2000

BUKU 1

ISBN 979-8041-25-9

PROCEEDINGS

**EVALUASI HASIL
PENELITIAN ARKEOLOGI**

BEDUGUL, 14--17 Juli 2000

**PROYEK PENINGKATAN PENELITIAN ARKEOLOGI JAKARTA
JAKARTA 2000**

copyright
Pusat Arkeologi 2000

ISBN 979-8041-25-9

Dewan Redaksi

Penanggungjawab : Dr. Haris Sukendar
Ketua : Dra. Naniek Harkantiningasih
Sekretaris : Nurlaila
Anggota : Dr. Machi Suhadi
Bagyo Prasetyo, M.Hum
Drs. Sugeng Riyanto
Drs. Agus Indirjanto
Dra. Vita

ISBN 979-8041-25-9

PROCEEDINGS
**EVALUASI HASIL
PENELITIAN ARKEOLOGI**

BEDUGUL, 14--17 Juli 2000

KATA PENGANTAR

Penerbitan (*proceeding*) makalah-makalah yang telah dipresentasikan dalam Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi (EHPA) 2000 di Bali dianggap tepat dalam rangka penyebarluasan kinerja Pusat Arkeologi beserta UPT (Balai Arkeologi) di daerah, khususnya jika dikaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia dewasa ini. Penelitian arkeologi berusaha memberikan sumbangannya kepada bangsa dalam menghadapi tantangan abad XXI, khususnya melalui peningkatan apresiasi nilai budaya nasional. Beberapa makalah menengahkan tema yang berkaitan dengan kondisi bangsa saat ini (demokrasi, otonomi daerah, bahaya disintegrasi, keharmonisan bermasyarakat, dan sebagainya) melalui studi terhadap masa lampau.

Bahasan dalam Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi (EHPA) 2000 meliputi 4 pokok, yaitu:

1. Arkeologi Indonesia Dalam Persepektif Global,
2. Arkeologi Indonesia: Harapan dan Kenyataan,
3. Mencermati Nilai Budaya Masa Lalu Dalam Menatap Masa Depan,
4. Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Sumber Daya Arkeologi.

Makalah EHPA yang berjumlah 93 ini tidak dapat tertampung seluruhnya dalam satu penerbitan, sehingga diterbitkan dalam dua jilid. Untuk menyeimbangkan jumlah makalah dalam setiap jilidnya, maka untuk *proceeding* jilid I memuat makalah-makalah yang membahas pokok bahasan butir 1 dan 2. Setiap pokok bahasan diawali dengan makalah kunci. Prof.Dr. Edi Sedyawati dan Prof.Dr. R.P. Soejono mengawali pokok bahasan 1; dan Prof.Dr. Mundardjito mengawali pokok bahasan 2. Selain itu, untuk mempermudah dalam menyimak *proceeding* ini, makalah-makalah diurutkan berdasarkan abjad penulisnya.

Harapan kami semoga *proceeding* ini dapat bermanfaat dalam mencermati nilai budaya nasional melalui tinggalan arkeologi.

Redaksi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ARKEOLOGI INDONESIA: DALAM PERSPEKTIF GLOBAL	
1. Arkeologi Indonesia Dalam Perspektif Global <i>Edi Sedyawati</i>	1
2. Arkeologi di Indonesia Dalam Perspektif Global <i>R.P. Soejono</i>	8
3. Studi Kawasan Megalitik : Tantangan ke arah globalisasi <i>Bagyo Prasetyo</i>	31
4. Interaksi Global Masa Lalu di Situs-situs DAS Karama, Mamuju; Berdasarkan ciri artefak dan geografis <i>Budianto Hakim</i>	43
5. Penelitian Arkeologi Dalam Perspektif Global <i>Diman Suryanto</i>	59
6. Hubungan Luar Negeri dan Perkembangan Arkeologi di Indonesia <i>Goenadi Nh</i>	70
7. Proses Migrasi Masa Prasejarah : Suatu Hipotesis Berdasarkan Kajian Lukisan Cadas di Indonesia Timur <i>Indah Asikin Nurani</i>	83

- | | | |
|-----|--|-----|
| 8. | Eksistensi Arkeologis Indonesia dan Legalitas Kerja sama Penelitian Arkeologi Menyongsong Era Globalisasi Abad ke-21
<i>Kristantina Indriastuti</i> | 107 |
| 9. | Modernisasi Dalam Visi Global Bugis dan Makassar : Perspektif Arkeologi Sejarah
<i>Moh. Ali Fadillah</i> | 120 |
| 10. | Masa Klasik Indonesia Dalam Lingkup Asia Tenggara
<i>Sri Soejatmi Satari</i> | 143 |
| 11. | Perspektif Global Prasejarah Indonesia
<i>Truman Simanjuntak</i> | 165 |

ARKEOLOGI INDONESIA: HARAPAN DAN KENYATAAN

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Di Balik Lima Tema Utama Penelitian Arkeologi Indonesia
<i>Mundarjito</i> | 181 |
| 2. | Bio-Arkeologi, Harapan dan Kenyataan
<i>Arfian</i> | 193 |
| 3. | Pemahaman Masyarakat Terhadap Arkeologi Indonesia : Antara Harapan dan Kenyataan
<i>E.A. Kosasih</i> | 203 |
| 4. | Sumberdaya Arkeologi "Problematikanya Dalam Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999"
<i>Lutfi Yondri</i> | 229 |
| 5. | Ketika Bidang Arkeometri Di Lebur Laboratorium Harapan Terakhir
<i>M. Fadlan S</i> | 238 |
| 6. | Pemanfaatan Penelitian Arkeologi Bagi Pembangunan Daerah
<i>Muhammad Hidayat</i> | 256 |
| 7. | Penelitian Arkeologi, Dari GBHN ke GBHN
<i>Nurhadi</i> | 264 |

ARKEOLOGI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GLOBAL

Edi Sedyawati

Arkeologi sebagai sebuah bidang ilmu, di manapun itu dilaksanakan, tidak akan dapat dan tidak boleh menyalahi kaidah-kaidah keilmuan modern yang transparan dan senantiasa siap untuk diuji, “subyektivitas” (dalam tanda petik) yang dimungkinkan hanyalah, *pertama*, dalam hal pemilihan teori sebagai dasar untuk menyusun interpretasi, serta *kedua*, dalam hal penyikapan dalam kaitan dengan keputusan-keputusan yang dapat atau harus diambil berkenaan dengan penentuan prioritas penelitian, ataupun dalam kaitan dengan pemanfaatan hasil-hasil penelitian, untuk kepentingan pendidikan dan pembinaan rasa kebangsaan.

“Arkeologi Indonesia” adalah pengetahuan arkeologi tentang Indonesia. Indonesia dapat difahami sebagai pembatas wilayah maupun sebagai pokok bahasan. Pembatas wilayah ini mengikuti cakupan dari apa yang telah atau pernah menjadi wilayah negara yang bernama Indonesia, yaitu khususnya Republik Indonesia. Namun dalam hal ini tentulah tak dapat dielakkan bahwa pada masa-masa sejarah tertentu cakupan wilayah jelajah subbangsa Indonesia tertentu di satu sisi hanya meliputi sebagian atau bahkan sebagian kecil saja, dari wilayah R.I. sekarang. Pada waktu yang sama, jelajahnya itu ke arah mata angin tertentu melampaui batas-batas negara Indonesia masa kini. Hal ini dapat dicontohkan pada cakupan kerajaan Majapahit, Sriwijaya maupun Melayu Kuna.

Adapun pokok bahasan “yang Indonesia” lebih ditentukan oleh ciri-ciri bentuk ataupun teknologi yang menandai budaya atau “bikinan Indonesia”, artinya yang dibuat di wilayah Indonesia sekarang ini. Tempat penemuannya dapat saja di luar Indonesia. Sebagai contoh dapat dikemukakan arca-arca perunggu dengan ciri-ciri Jawa Tengah masa Mataram Kuna yang ditemukan di bekas wihara kuna agama Budhha di Nalanda, Bengal. Tinggalan-tinggalan itu tentu masuk ke dalam pembahasan arkeologi Indonesia.

Namun, di samping itu, para ahli arkeologi seringkali juga menjumpai temuan-temuan di lapangan yang memberikan petunjuk bahwa benda tersebut dibuat di luar Indonesia. Dapat disebutkan dalam hubungan ini beberapa contoh seperti nekara-nekara perunggu tertentu, manik-manik, keramik (dari Vietnam, Siam, Cina India dll), serta arca tertentu seperti arca Budha bergaya Amaravati yang ditemukan di Sempaga, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini tentulah temuan-temuan tersebut termasuk ke dalam obyek studi arkeologi Indonesia, dengan pengertian bahwa benda-benda tersebut, meskipun bukan ‘bikinan Indonesia’ pernah digunakan atau mempunyai arti bagi manusia sezaman yang tinggal di Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan “ahli arkeologi Indonesia” adalah semua sarjana arkeologi yang berkebangsaan dan merupakan warga negara Indonesia. Dalam hal ini yang diharapkan adalah ahli-ahli ini dapat diandalkan untuk mewakili keseluruhan bangsa Indonesia dalam bidang keahliannya itu, yaitu ilmu arkeologi. Citra keilmiah serta mutu karyanya yang senantiasa diperlukan adalah “*capacity building*” yang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Peningkatan itu perlu dilakukan dalam hal jumlah (kurang lebih sudah cukup memadai dewasa ini) maupun dalam kualitas (seperti yang sedang diupayakan melalui berbagai program studi kelanjutan strata-2 maupun strata-3, serta berbagai program pelatihan dan kerjasama ilmiah dengan para ilmuwan berkualitas dari negara-negara lain). Dalam hal ini, Pusat Arkeologi bersama Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia dapat merancang suatu penjenjangan kemahiran profesional dilihat dari sudut pendidikan dan dari sudut pengalaman penelitian. Jenjang-jenjang keahlian dalam pelaksanaan kerja ini harus dititi dengan sistematis,

seperti yang pernah digagas oleh mantan Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Prof.Dr. R.P. Soejono, yang juga pendiri dan ketua umum pertama IAAI. Prinsip-prinsip dasar yang harus dikuasai oleh seorang sarjana arkeologi adalah metode penelitian arkeologi beserta seperangkat konsep dengan peristilahannya yang khusus dalam disiplin ilmu ini. Kapasitas masing-masing dapat dikembangkan melalui pelatihan yang intensif, perluasan bacaan, pengembangan pemikiran dalam menemukan permasalahan baru, dan merancang strategi penelitian yang khusus untuk pemecahannya. Dalam arkeologi, akurasi dalam membuat deskripsi dan kemampuan menilai akurasi pencatatan suatu data adalah kapasitas dasar yang tak dapat ditinggalkan sekali pun ketika penggunaan teori telah dilambungkan ke tingkat yang paling tinggi.

Dalam menggarap setiap permasalahan ilmiah, setiap ahli arkeologi perlu membuat paparan dan penilaian terlebih dahulu mengenai *"state of the art"* dari permasalahan tersebut. Ini berarti semua kajian yang telah mendahuluinya, berkenaan dengan pokok yang sama harus lebih dahulu dikemukakan dan dibahas. Apabila dalam penulisan suatu karya ilmiah terdapat kesengajaan untuk mengesampingkan apa yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, baik karena tidak menghargai maupun karena kesulitan memahami bahasa sumbernya, maka itu adalah suatu cela yang dapat mengurangi nilai dari karya ilmiah itu sendiri. Hal ini memang hanya akan dapat diketahui oleh sesama peneliti yang mendalami bidang yang bersangkutan.

Sudah semakin mendesak pula kebutuhan akan jaringan informasi untuk pemutakhiran pengetahuan di bidang arkeologi, dengan mengesampingkan egoisme pribadi maupun kelompok, tetapi dalam waktu yang sama juga meningkatkan sensitivitas untuk menghargai hasil karya dan kerja orang atau pihak lain. Dalam dalam penghimpunan informasi ini tak boleh dilupakan juga bahan-bahan yang ditulis dalam bahasa yang 'sukar' (di luar Indonesia dan Inggris), seperti bahasa-bahasa daerah tertentu yang memuat informasi yang terkait dengan pokok kajian arkeologi.

TINJAUAN ATAS ARAH DAN MINAT PENELITI PUSAT ARKEOLOGI

Tinjauan berikut ini semata-mata didasarkan pada apa yang hendak disajikan dalam pertemuan Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi kali ini. Sejumlah peneliti mencoba untuk mencari relevansi pengetahuan arkeologi Indonesia dengan permasalahan bangsa Indonesia dewasa ini, khususnya yang berkenaan dengan multikulturalitas, toleransi, persatuan, maupun desentralisasi dan disintegrasi. Kejadian-kejadian ataupun arca-arca penanganan terhadap keadaan-keadaan tertentu di masa lalu, dapat dijadikan cermin untuk melihat persoalan-persoalan masa kini. Hal ini tentu dapat amat bermanfaat apabila benar-benar didukung oleh data yang dapat diandalkan dan bukan semata-mata suatu spekulasi. Kajian dengan arahan ini juga dapat dilandasi dengan acuan perbandingan, artinya, tidak hanya untuk melihat persamaan-persamaan, melainkan juga perbedaan-perbedaan. Adapun perbedaan itu dapat dilihat pada sisi perkembangan teknologi, kerangka-kerangka acuan yang dikenal di zaman masing-masing, serta berbagai situasi sosial-politik-ekonomi yang boleh dikatakan selalu bersifat partikular untuk setiap masa. Hasil-hasil kajian semacam itu, apabila dibaca secara luas akan dapat memberikan sumbangan yang nyata untuk meningkatkan kesadaran sejarah khalayak ramai.

Kecenderungan positif lain yang tampak adalah berkembangnya minat untuk mengkaji lebih mendalam dan lebih meluas mengenai hubungan-hubungan budaya antarwilayah di masa-masa lalu, mulai dari masa prasejarah. Bahkan cakupan luas tentang kajian budaya Austronesia di kawasan Pasifik telah diberi perhatian khusus. Dilakukan pula kajian-kajian ciri-ciri rasial pada sisa-sisa manusia purba untuk melacak keluasan jelajahnya. Analisis bandingan lukisan pada batu cadas pun dicoba untuk diberi interpretasi tentang migrasi. Terdapatnya penggambaran fauna 'asing' di candi-candi pun dilihat sebagai fungsi mobilitas meskipun sudah tentu tidak dengan sendirinya juga berkesejajaran dengan mobilitas penduduk. Analisis teknik pembuatan perahu pada tinggalan perahu kuna dijanjikan dapat menerangi masalah hubungan antarbangsa pula. Di samping itu juga, diberi-

kan perhatian kepada persamaan gaya seni arca untuk menerangi hubungan Sriwijaya-Cola.

Arah perhatian lain adalah untuk mengkaji kontinuitas dan perubahan dengan mengambil kasus-kasus khusus. Beberapa studi etnografi, misalnya mengenai penguburan sekunder dan fungsi *sapandu* di Kalimantan (pada suku-suku bangsa Dayak tertentu) dimaksudkan sebagai penduga adat kebiasaan di balik artefak-artefak kuna dari berbagai masa dan daerah lain. Sudah tentu dalam hal ini kehati-hatian diperlukan agar kita tidak terjerumus ke dalam simplikasi permasalahan. Studi etnografi lain berkenaan dengan perubahan pola makan orang Irian pada masa kini dapat memberikan sumbangan kepada pemahaman proses-proses perubahan serupa yang mungkin terjadi di masa lalu, yang didorong oleh perubahan-perubahan kependudukan serta tersedianya kemudahan-kemudahan lain. Suatu studi etnografi lain yang menjanjikan pendalaman pemahaman adalah mengenai kemampuan adaptasi dan inovasi orang-orang Bugis dan Makassar yang melatari keluasan jelajahnya.

Analisis atas kekuatan-kekuatan sosial yang menggerakkan perubahan, pembaruan, dan pemapanan, adalah suatu ranah kajian yang menantang, baik berkenaan dengan masa prasejarah yang semata-mata didasari data artefaktual, maupun lebih-lebih berkenaan dengan masa sejarah yang ditunjang oleh sumber-sumber tertulis, yang pada gilirannya membutuhkan suatu kemampuan kritis tersendiri untuk dapat menggunakannya dengan tepat. Kajian pada kelompok-kelompok sosial tertentu (seperti “kalang” dan “limaratus”) dapat memberikan suatu sumbangan yang berarti untuk pemahaman fungsi dan struktur sosial pada zaman dan masyarakatnya masing-masing. Tinjauan atas perkembangan “masa perundagian” sebagai kebangkitan peradaban, juga memerlukan akumulasi kajian atas berbagai kasus. Perubahan maupun pemapanan yang tertinggal dalam ‘situs-situs’ perkotaan tertentu, yang dapat memberikan karakteristik “wajah kota”, adalah suatu arah perhatian yang selalu perlu diikuti dengan kajian-kajian kasus, yang pada gilirannya dapat memberikan sumbangan kepada pihak yang berwenang untuk pengambilan kebijakan pelestarian di masing-masing kawasan.

Pengkayaan dalam pengetahuan arkeologi juga didapat dari penemuan situs-situs baru yang tidak jarang mencuat pula suatu permasalahan baru ataupun sejumlah pertanyaan baru. Kesertaan dalam jaringan-jaringan informasi ilmiah (konvensional dan elektronik) akan selalu dapat membantu para peneliti arkeologi berada dalam posisi terinformasi secara mutakhir. Pemantauan atas perkembangan yang terjadi dalam bidang ilmu arkeologi itu sudah tentu tidak harus berarti bahwa pendirian-pendirian ilmiah juga serta-merta harus atau patut mengikuti 'isu terakhir'. Masing-masing peneliti tetap mempunyai otoritas untuk memilih teori, pendekatan, maupun metode yang hendak digunakannya. sepanjang itu laik untuk pokok kajiannya. Suatu hal yang perlu ditumbuhkan di antara para peneliti adalah kesadaran bahwa ada berbagai disiplin ilmu lain yang dapat bergandeng tangan dengan arkeologi, namun masing-masing disiplin ilmu itu mempunyai paradigmanya sendiri, yang perlu dikenali baik-baik dahulu apabila peneliti arkeologi hendak ber-interdisiplin dengannya. Pemahaman konsep, teori, dan metodologi ilmu-ilmu antropologi, filologi, sejarah, dan sosiologi, rupa-rupanya merupakan tuntutan yang mendesak bagi sebagian peneliti.

Peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja arkeologi diharapkan muncul dari analisis organisasi kerja serta perancangan program yang dibuat oleh sejumlah staf pimpinan Pusat Arkeologi. Dalam hal ini yang juga diperlukan adalah pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa yang telah, sedang dan direncanakan untuk dikerjakan oleh pihak-pihak lain, baik di dalam negeri, seperti Direktorat Purbakala (sic!) dan jurusan-jurusan arkeologi di perguruan tinggi, maupun di luar negeri. Jangan sampai apa yang sudah dikerjakan oleh salah satu pihak tidak diketahui oleh pihak lain yang sama-sama bergerak di bidang arkeologi.

Untuk mengakhiri bahasan ini dapat disebutkan suatu arah perhatian yang pada dasarnya memperluas cakupan studi arkeologi, yaitu untuk meneliti masyarakat yang 'menggunakan' tinggalan-tinggalan masa lalu. Studi atas *komuniti* di Sangiran yang mengalami perubahan sikap terhadap fosil-fosil yang ditemukan, pada dasarnya merupakan rintisan kajian Arkeo-Sosiologi (untuk dibedakan dari Sosio-Arkeologi) sedangkan studi atas per-

ubahan fungsi mata uang Cina (kepeng) merupakan kasus perubahan makna yang dapat dilihat sebagai salah satu aspek dalam permasalahan perubahan budaya secara umum.

Fungsi sosial dari ilmu arkeologi itu sendiri dapat dilihat dari kaitannya dengan bidang-bidang kegiatan lain, seperti pariwisata dan pembangunan daerah. Dalam hal ini analisis perlu dilakukan dengan seksama agar dampak positif dan negatifnya dapat diperhitungkan sehingga apabila kemudian disusun program dan proyek, kepentingan ilmu arkeologi sendiri tidak terkorbankan.

Demikianlah sejumlah janji yang dapat disimak dari berbagai ringkasan makalah dalam EHPA 2000 ini. Semoga dapat dipenuhi dengan memuaskan.

ARKEOLOGI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GLOBAL

R.P. Soejono

GLOBAL DAN GLOBALISASI

Arti substansial dari dua kata tersebut adalah sama, yaitu merujuk kepada dunia atau sesuatu yang mendunia, tetapi jika masing-masing dikaitkan sebagai unsur kalimat-kalimat tersendiri, akan berimplikasi lain. Global adalah kata sifat yang menunjuk ke ciri dunia yang inheren dalam sesuatu hal (tradisi global, teknik global) sedangkan globalisasi adalah suatu situasi yang tercipta parsial di dunia melalui pengertian bersama tentang hal-hal yang pada dasarnya tidak bersifat inheren (globalisasi dalam pendidikan, perdagangan dan sebagainya). Kupasan saya di sini nanti akan berhubungan dengan arkeologi di Indonesia dalam memasuki era globalisasi dalam abad ke-21.

Kata globalisasi kini di mana-mana mulai memberikan dampak serius dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Sebagian merasa memperoleh keberuntungan dalam menyebarluaskan pengaruh serta hasil-hasil ciptaan, lahiriah-batiniah mereka sebagian khawatir akan kehilangan kedua bentuk milik mereka yang sudah lama berakar dalam kehidupan mereka karena tidak adanya kemampuan menahan/menghindari arus globalisasi yang menjerpa kehidupan mereka. Ini adalah gambaran secara umum yang dapat dijumpai pada saat-saat menjelang abad ke-21, baik dalam negara-negara maju maupun di dunia ketiga atau yang sedang berkembang.

GERAK GLOBALISASI

Ciri-ciri utama dalam gerak globalisasi diwarnai oleh sifat global pada beberapa bidang kehidupan masyarakat, khususnya bidang-bidang ekonomi dan teknologi, serta bidang-bidang yang terkait dengan kedua bidang itu. Gerak globalisasi ini diprediksikan akan membawa perubahan-perubahan besar dalam beberapa sektor kehidupan. Nurhadi (1997) menggambarkan akan terjadinya perubahan-perubahan besar yang sangat menghantui kita, khususnya dalam tatanan ideo-politik dan ekonomi yang mendunia. Sutaba (1997) melihat bahwa globalisasi akan ditandai oleh persaingan yang amat ketat, terutama yang menyangkut kualitas SDM, dan menganggap bahwa kearifan nenek moyang dalam tatanan kehidupan pada masa megalitik perlu diteladani agar kita mampu berhasil menghadapi arus globalisasi yang besar ini.

Memasuki abad ke-21 ini, sebagian dunia sudah mulai melaksanakan tindakan-tindakan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dalam beberapa dekade sebelum abad ke-20 berakhir, khususnya oleh negara-negara yang mempunyai kepentingan bersama dalam kawasan-kawasan tertentu. Negara-negara tersebut telah bersepakat untuk saling membantu memajukan perekonomian serta meningkatkan perdagangan antarnegara masing-masing. Dalam rangka persekutuan ekonomi dan perdagangan ini terjadilah perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang yang menunjang dan mengiringi program-program kerjasama terutama pengembangan teknologi informatika, khususnya dalam jaringan telekomunikasi dan internet yang akan dapat menimbulkan transformasi kebudayaan dan peradaban serta akan menembus pula batas-batas antarnegara.

Dalam rangka kerjasama yang coraknya menuju global atau mendunia ini, muncullah blok-blok organisasi ekonomi regional seperti Benelux (Belgium, Netherlands, Luxemburg), EEC (*European Economic Committee*), AFTA dan (*Asian Free Trade Area*), APEC (*Asia Pacific Economic Co-*

peration), EFTA (*European Free Trade Area*), NAFTA (*North American Free Trade Area*). Masyarakat negara yang bersekutu dalam bidang ekonomi-perdagangan itu memerlukan pandangan ke depan atau visi untuk dapat memprediksi kenyataan-kenyataan yang dihadapi dalam masa transisi besar. Masyarakat negara yang memiliki visi ke depan akan dapat lebih berperan dalam menentukan nasibnya sendiri dan tidak akan lenyap disapu oleh gelombang globalisasi yang sedang bergulir. Telah digambarkan sejak semula bahwa globalisasi akan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan (negara-negara) besar sehingga dapat melemahkan masyarakat negara yang masih lemah.

Dengan tiadanya visi yang independen akan kehidupannya di masa depan dan tanpa berpikir panjang atau semena-mena mengikuti arus globalisasi akan merupakan kekalahan suatu bangsa dalam persaingan atau benturan peradaban dalam perjalanannya ke masa depan.

Oleh beberapa kalangan dinyatakan bahwa dalam proyek-proyek yang multinasional atau setidaknya dilaksanakannya bersama oleh dua bangsa yang berbeda akan timbul perbedaan-perbedaan. Dalam rangka globalisasi ini harus dilakukan negosiasi-negosiasi global yang meliputi pengertian terhadap budaya-budaya lain untuk mencapai target yang dapat memenuhi pihak-pihak bersekutu secara bersama.

Peranan budaya sangat besar dalam arus globalisasi karena menyangkut watak dan tradisi bangsa-bangsa yang berbeda-beda yang masing-masing telah terbentuk dalam kurun waktu lama. Sikap kita terhadap arus globalisasi harus positif, ini berarti bahwa kita harus memanfaatkan sebanyak mungkin hal-hal yang baik bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan di lain pihak harus menolak hal-hal yang negatif agar tidak merusak dan merugikan bangsa dan negara.

Arkeologi sebagai salah satu komponen penegak kebudayaan bangsa harus menentukan langkah-langkah yang menguntungkan bagi kehidupan bangsa kita, sekarang dan di masa depan. Beberapa aspek yang urgen untuk disadari dan diterapkan adalah peningkatan dan perbaikan kualitas SDM serta sarana dan prasarana kerja, penyempurnaan manajemen kerja lem-

baga, dan memiliki program serta visi yang positif sebagai anggota masyarakat global tanpa kehilangan jatidiri dan arah dalam arus globalisasi.

GERAK ARKEOLOGI AWAL HINGGA KINI

Arkeologi adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang memberikan gambaran tentang beberapa aspek kebudayaan yang berkembang di masa lampau atas dasar penelitian terhadap peninggalan-peninggalan materiil maupun nonmateriil suatu negara. Dewasa ini, arkeologi sudah merupakan suatu bentuk ilmu pengetahuan global yang berkembang di banyak negara di dunia yang sangat peduli akan masa lampaunya. Dalam peristiwa-peristiwa masa lalu itu, tampak adanya kesamaan bentuk benda-benda ciptaan yang mengarah pada kesamaan pikiran dan tingkah laku manusia penciptanya (Perhatikan: Daniel 1952, 1978; Malino & Vasicek 1990; Whitley 1998). Pada tahap yang sudah maju ini terjadilah usaha-usaha yang mendorong para peminat arkeologi merekonstruksi masa lalu itu melampaui batas-batas negara masing-masing dalam mencari kesinambungan atau kaitan-kaitan dengan situasi perkembangan lokal negaranya yang bersangkutan, atau dalam rangka pencarian dan pemecahan peristiwa/gejala-gejala yang pada dasarnya dianggap bagian dari situasi universal yang perlu diketahui demi kemajuan ilmu pengetahuan/arkeologi itu sendiri. Dengan demikian, timbul dalam dunia arkeologi kecenderungan di kalangan para peminatnya berbagai kegiatan yang terbatas dalam lingkup negaranya, begitu pula dalam lingkup yang lebih luas melampaui negaranya sendiri. Usaha-usaha itu berbentuk konseptual yang merangkum situasi global tanpa keluar dari kegiatan dalam batas negara masing-masing atau dengan melakukan kegiatan aktif-arkeologis di luar batas negaranya sendiri.

Pada waktu arkeologi mulai berkembang sebagai ilmu pengetahuan (*archaeology as science*) maka pengetahuan ditujukan terutama kepada data yang berada dalam batas negara-negara yang bersangkutan sehingga ciri orientasi arkeologi adalah pada umumnya nasionalistik. Ciri nasionalistik

ini mengupas benda-benda purbakala suatu negara secara teliti dengan memberikan gambaran/latar belakang datanya dalam rangka perkembangan sejarah-budaya negara yang bersangkutan. Negara-negara Eropa yang mula-mula (sekitar pertengahan abad 19) menerapkan orientasi nasionalistik ini adalah negara-negara Skandinavia, Denmark khususnya, Jerman, serta Inggris, dan sikap seperti ini kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lain (Daniel 1978:33-54).

TIPE ARKEOLOGI

Ada pemikiran di kalangan pakar arkeologi bahwa arkeologi dewasa ini dapat dibagi dalam beberapa tipe berdasarkan konteks/keadaan sosial yang berbeda-beda, yaitu arkeologi nasionalistik, kolonialistik dan imperialistik atau yang berorientasi dunia. Masing-masing jenis secara ringkasnya memberikan titik-berat sebagai berikut: **a. Tipe arkeologi nasionalistik** memberikan titik-berat pada peninggalan sejarah-budaya suatu negara yang dapat menggugah rasa kebesaran bangsa dan negara bersangkutan; **b. Tipe arkeologi kolonialistik** memberikan titik-berat pada peninggalan di suatu negara yang penduduk aslinya tersingkir dan orang-orang pendatang yang tidak memiliki ikatan kultur-historik dengan penduduk aslinya lebih mementingkan peninggalan-peninggalan yang berkaitan dengan sejarah orang pendatang karena merekalah yang dominan berkuasa, misalnya Amerika, Canada, Australia, New Zealand; dan **c. Tipe arkeologi imperialistik** memberikan titik-berat pada peninggalan-peninggalan yang tersebar di luar batas negara-negara tertentu akibat pengaruh politik-ekonomi yang dominan di negara-negara lain yang berada dalam jangkauan pengaruh mereka. Arkeologi dari tipe ini sangat banyak melakukan kegiatan di negara-negara lain serta melatih arkeolog-arkeolog yang akan dipekerjakan di negara-negara lain itu. Termasuk dalam tipe ini adalah Inggris, Rusia, dan Amerika (Trigger 1996: 615-631). Pada waktu sekarang ini negara-negara maju lainnya yang tergolong dalam tipe ini, ialah Perancis, Australia, dan beberapa negara Eropa lain.

Indonesia dapat dimasukkan dalam salah satu tipe itu, yaitu arkeologi nasionalistik. Ini berarti bahwa arkeologi di Indonesia berwawasan nasionalistik serta patriotik, yaitu kegiatannya berorientasi nasionalistik dengan menggambarkan masa lampainya berdasarkan peninggalan-peninggalan yang diakui bertaraf tinggi secara universal. Berdasarkan data yang diperoleh selama arkeologi berkembang di Indonesia sejak abad ke-19 yang lalu, pakar dan ahli non-Indonesia memberikan sumbangan cukup besar dalam pembentukan arkeologi yang berhasil meningkatkan corak arkeologi Indonesia ke taraf nasionalistik yang diakui lingkup internasional. Sangat terkenal dalam ilmu arkeologi Indonesia ini ialah konsep “*local genius*” yang dikembangkan para pakar Barat dalam usaha menggambarkan kemandirian bentuk usaha materialistik dan nonmaterialistik yang dijumpai dalam kreasikreasi masa lampau (Soejono 1986).

ARKEOLOGI INDONESIA DALAM EKSISTENSI

Sesuatu yang akan menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah arkeologi yang tumbuh dan berkembang sebagai bentuk gagasan asing di bumi Indonesia sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya arkeologi di Indonesia berciri amatiristis dan berkembang seterusnya hingga menduduki taraf sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang kegiatannya diatur dalam struktur instansional. Perkembangan ini dapat dibedakan dalam beberapa tahap (perhatikan Soejono 1968, 1976, 1983, 1984, 1987). **Tahap pertama** adalah tahap pencatatan (deskripsi) terhadap peninggalan-peninggalan kuna oleh perorangan-perorangan tanpa koordinasi oleh institusi yang berwenang melakukan kegiatan tersebut. Tahapan ini berlangsung dari abad ke-15 hingga abad ke-20, secara sporadik pada masa awalnya dan semakin padat serta beragam sasaran kepurbakalaannya pada abad ke-18 dan abad ke-19. Kegiatan arkeologi pada tahapan ini pada umumnya dilakukan oleh orang-orang Barat. Pernah dalam tahapan awal ini diusahakan pembentukan “*Commissie tot het opsporen van oudheidkundige voorwerpen*”

pada tahun 1822 dan pembentukan “*Archaeologische Vereeniging*” pada tahun 1855. Tetapi kedua usaha institusional ini gagal dan kemudian berhenti berhubung tidak adanya dana untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan kepurbakalaan. **Tahap kedua** ditandai dengan penyaluran kegiatan arkeologi secara terarah, baik segi administratif profesinya maupun segi substansi ilmiahnya, dalam struktur institusional yang mula-mula bersifat “sektoral terbatas” dalam bentuk komisi pemerintah kolonial serta bergiat terutama di Jawa dan Madura (*Commissie in Nederlandsch Indie voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madura*). **Tahap ketiga** merupakan tahap akumulasi data dari berbagai jenis kegiatan arkeologi dari periode-periode sebelumnya sehingga dipandang sudah cukup saatnya untuk menampung kegiatan-kegiatan tersebut dalam suatu wadah institusional. Wadah ini dibentuk oleh Pemerintah Kolonial pada tahun 1913 dan dinamakan “*Oudheidkundige Dienst*”. Pada tingkat ini dilakukan konsolidasi kegiatan arkeologi meliputi penyusunan data arkeologi dan pemantapan hipotesa tentang berbagai bidang arkeologi. Tahap ini berlangsung hingga pecahnya Perang Dunia II. **Tahap keempat** mempunyai ciri meneruskan, menyempurnakan serta mengisi “gaps” kegiatan arkeologi, dan menyempurnakan serta menciptakan berbagai hipotesa/teori dan metode kerja. Tahap ini dialami sesudah kemerdekaan hingga masa sekarang dan tahap perkembangan arkeologi di Indonesia ini sebagai suatu tahap besar dapat dibagi lagi dalam beberapa tingkat, yaitu tingkat-tingkat “awal berdikari”, tingkat “pemecahan dan pembangunan”, dan yang sekarang dialami adalah tingkat “pencarian bentuk sepadan”.

Menilik sejarah perkembangan arkeologi dari sejak permulaan ilmu ini diterapkan di Indonesia (lihat Soejono 1976) maka kegiatan arkeologi dipusatkan pada tiga aspek utama, yaitu: 1. Pencarian data (*reconnaisance*); 2. Penelitian; dan 3. Perlindungan terhadap artefak. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan baik oleh perorangan dari bermacam-macam profesi maupun badan-badan swasta dan pemerintahan. Banyak sekali data yang terkumpul dari kegiatan-kegiatan arkeologis tersebut berhasil diterbitkan oleh pihak-pihak swasta dan pemerintah, yang khusus memperhatikan dan

menunjang kegiatan ilmiah. Pencarian data diarahkan kepada registrasi dan deskripsi artefak. Penelitian ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan interpretasi terhadap artefak serta pembentukan atau penyempurnaan hipotesa arkeo-historis dan perlindungan terhadap artefak menghasilkan kegiatan pemugaran dan pemeliharaan.

Kegiatan arkeologis yang meliputi ketiga aspek tadi menjadi lebih terarah, setelah *Oudheidkundige Dienst* (OD) sebagai badan pemerintah secara resmi mulai tahun 1913 menangani kegiatan-kegiatan arkeologi.

Sesudah OD melaksanakan fungsinya sebagai lembaga ilmiah yang bergerak dalam kegiatan arkeologi maka banyaklah hasil yang tercapai yang dapat dianggap sebagai tonggak-tonggak dalam perkembangan arkeologi di Indonesia. Pertama-tama adalah organisasi lembaganya sendiri yang bercorak sederhana (hanya ada sebuah kantor pusat dengan satu bagian bangunan di Prambanan), tetapi diisi oleh beberapa tenaga yang ahli dan tangguh untuk melakukan pekerjaan lapangan. Walaupun keadaan operasional OD serba terbatas bahkan kegiatannya pernah dihambat bertahun-tahun oleh peristiwa kemunduran ekonomi yang melanda dunia sekitar tahun tigapuluhan, namun hasil-hasil karyanya tampak menonjol dalam masa kerja yang relatif singkat (\pm 29 tahun). Dasar-dasar lain yang telah diletakkan oleh OD adalah pengaturan-pengaturan yang sebaik-baiknya dalam:

- a. Penelitian-penelitian yang umumnya diimbangi oleh penerbitan laporan pada waktunya.
- b. Pemugaran dan pemeliharaan monumen-monumen.
- c. Dokumentasi foto dan gambar.
- d. Penulisan laporan-laporan dan artikel-artikel secara berkala.
- e. Penyelenggaraan administrasi yang menunjang kegiatan arkeologi.

Banyak perhatian diberikan kepada bidang Arkeologi Klasik, tetapi lambat laun bidang-bidang Prasejarah dan kekunoan Islam mulai ditangani sesuai dengan tenaga ahli yang tersedia untuk bidang-bidang tersebut yang

pada waktu itu masih terbatas sekali. Tugas wewenang OD pada tahun 1913 dikukuhkan oleh berlakunya "Monumenten Ordonantie" pada tahun 1931 sehingga lengkaplah OD sebagai suatu lembaga arkeologi secara fisik dan hukum.

Selama OD ini berdiri berkembanglah suatu tradisi arkeologi di Indonesia yang berciri khas dan peminanya berada di tangan para ahli yang terutama menguasai pengetahuan di bidang sejarah dan seni bangunan kuno Indonesia. Ciri ini adalah gerak dinamis di dalam pengumpulan serta pengolahan data dan di dalam penyusunan dan penyesuaian teori terhadap hasil-hasil baru sehingga arkeologi di Indonesia ini tampak meningkat dalam pengembangan segi interpretasi data. Pemugaran yang berhasil dengan baik merupakan usaha untuk melengkapi bagan teori yang disusun secara luas mengenai masa lampau Indonesia, seperti halnya studi epigrafi, arsitektur kuno, ikonografi, prasejarah dan sebagainya. Kelemahan pada OD yang akibatnya terasa dalam jangka waktu panjang hingga beberapa dekade sesudah kemerdekaan, ialah tidak adanya persiapan kader di kalangan bangsa Indonesia untuk melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan keahlian dalam bidang-bidang arkeologi. Hanya beberapa tenaga teknik dididik dengan baik untuk membantu pekerjaan-pekerjaan di lapangan.

Dengan kondisi seperti tersebut tadi, organisasi dan ketenagaan yang ahli dikuasai oleh bangsa Belanda maka tidaklah heran struktur arkeologi dan kegiatan-kegiatan ilmiahnya sekaligus gugur ketika kekuasaan Belanda runtuh di Indonesia pada jaman perang di Asia Timur dan Pasifik.

Tetapi boleh dinyatakan di sini bahwa kegiatan arkeologi di Indonesia yang bercorak institusional dan ilmiah pada abad ke-20 sampai pecahnya Perang Dunia II di Asia Timur, sangat berhasil, walaupun hanya sekelompok tenaga profesi Belanda berkecimpung dalam bidang ini. Organisasi yang mengurus tugas-tugas arkeologi tidak besar, tetapi terdiri dari inti pelaksana-pelaksana Belanda yang mampu bergerak di bidang-bidang kegiatan dan mencakup wilayah yang cukup luas.

Kegiatan arkeologi di Indonesia mengalami stagnasi selama masa pendudukan Jepang dan masa revolusi. Selama pendudukan Jepang hanya

staf teknik di Prambanan yang masih mampu menggiatkan tugas-tugas pemugaran dan ekskavasi, terutama di Candi Prambanan dan candi-candi lain sekitarnya, yang berlangsung terus sampai pada masa revolusi. Dalam pada itu, tentara Belanda yang menduduki Jakarta mengorganisir kembali OD pada tahun 1947. Perlu dicatat bahwa pada tahun 1945 ketika terjadi perlawanan terhadap Belanda, banyak dokumen yang terkumpul di Jakarta sejak permulaan dilakukan kegiatan arkeologi di Indonesia (arsip, foto, negatif kaca, gambar, buku-buku, koleksi benda-benda penelitian) rusak atau hilang. Organisasi gaya OD itu mempunyai bagian-bagian tekniknya di Ujung Pandang dan Gianyar.

EKSISTENSI DALAM UJIAN

Pada tahun 1950 terbentuk instansi “Dinas Purbakala RI” yang berkedudukan di Jakarta di bawah pimpinan A.J. Bernet Kempers dengan staf teknik yang berlokasi di Prambanan dan Gianyar. Staf teknik di Ujung Pandang ditarik kembali untuk memperkuat staf-staf di pusat dan di kantor-kantor daerah (disebut: Seksi Bangunan Dinas Purbakala RI). Di sini jelaslah bahwa penyempurnaan organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan arkeologi sangatlah urgent, di samping pengadaan tenaga-tenaga ahli dan tenaga-tenaga teknik yang cukup sebagai pelaksana-pelaksana.

Arkeologi sudah mencapai taraf pengembangan yang memiliki ciri-ciri kedewasaan di Indonesia, tetapi mengalami banyak sekali hambatan dalam pengembangan seterusnya.

Pada tahun 1953 Dinas Purbakala RI diletakkan di bawah pimpinan R. Soekmono, seorang ahli arkeologi Indonesia, sehingga kegiatan arkeologi untuk seluruh wilayah Indonesia berada di tangan orang Indonesia sendiri (Soejono 1996). Didampingi oleh Satyawati Suleiman dan beberapa tenaga muda, yaitu Buchari, R.P. Soejono dan Uka Tjandrasasmita, arkeologi Indonesia mulai digugah dari masa hegemoni penjajah dan suatu masa lena. Tenaga-tenaga ahli Belanda masih terus bergiat sampai masa antara

tahun 1956-1960. Ini berarti bahwa untuk pertama kali dalam sejarah tenaga bangsa Indonesia bertanggung jawab langsung dalam kegiatan arkeologi, khususnya dalam perkembangan bidang-bidang arkeologi yaitu Pra-sejarah, Klasik, Islam dan Epigrafi yang hasilnya diterbitkan oleh para ahli Indonesia tersebut.

Dengan kembalinya ahli-ahli Belanda ke tanah air mereka, terjadilah suatu kelambatan, karena kekurangan tenaga bangsa kita sendiri untuk bekerja dalam skope (ruang lingkup) tugas yang sedemikian luas. Walaupun budget operasional untuk arkeologi sangat minimal serta sarana pekerjaan untuk pengembangan arkeologi hampir-hampir atau praktis tidak terpenuhi, kelompok tenaga Indonesia yang dibebani tugas untuk melanjutkan tugas-tugas OD dan meningkatkan pengembangan arkeologi, sesuai dengan tuntutan-tuntutan kemajuan arkeologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang pesat sekali berkembang sesudah Perang Dunia II, tetap bertahan. Adalah suatu ironi, justru pada saat ahli-ahli bangsa Indonesia mulai berusaha melangkah sendiri dalam pengembangan arkeologi dan ilmu ini makin cepat meningkat kemajuannya, ahli-ahli kita ini ditimpa berbagai kesulitan dan rintangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Banyak daya-upaya dilakukan untuk mengisi "gaps" di seluruh bidang arkeologi dan dengan kemampuan yang terbatas, para arkeolog Indonesia berusaha mengikuti kemajuan-kemajuan yang berlangsung di kalangan profesi arkeologi tingkat internasional. Hubungan dengan kalangan-kalangan internasional dilangsungkan melalui konferensi-konferensi regional/internasional dengan membuat karangan-karangan di media-media internasional dan menyelenggarakan joint-programs arkeologi dengan tim-tim luar negeri.

MELANJUTKAN EKSISTENSI

Memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai di bidang-bidang arkeologi di Indonesia maka apa yang dihasilkan tenaga-tenaga ahli Belanda sangat berarti dan patut dihargai segala ketekunan dan buah-buah pikiran mereka yang telah mendudukkan Indonesia sebagai wilayah kerja arkeologi yang menonjol di Asia Tenggara. Walaupun masih banyak kekurangan,

baik dalam hal melengkapi data arkeologi, dan kurang adanya keseimbangan pengembangan bidang-bidang arkeologi dengan peletakan titik berat pada bidang percandian/klasik, maupun metode dan teknik kerja yang dalam beberapa segi ketinggalan, hasil-hasil yang dicapai ahli-ahli Belanda merupakan sebuah fondasi bagi kita kini untuk meneruskan pengembangan arkeologi di Indonesia.

Kelemahan utama ahli-ahli Belanda yang akibatnya terasa dalam jangka waktu lama adalah tidak adanya niat orang Belanda (inipun dapat disaksikan di negara-negara jajahan lain waktu itu di Asia Selatan dan Asia Tenggara) untuk mendidik kader bangsa Indonesia dalam bidang arkeologi, khususnya untuk menduduki jabatan pimpinan atau untuk mencapai taraf keahlian di bidang-bidang arkeologi. Seluruh perhatian dipusatkan kepada pengembangan arkeologi dalam batas ruang lingkup yang luas dan hanya kepada tenaga teknik yang diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan di lapangan, diberikan pendidikan atau pengarahan seperlunya demi menunjang perencanaan dan pemikiran orang Belanda sendiri. Arkeologi sebagai ilmu dikembangkan oleh Belanda di Indonesia, di luar perhatian dan minat bangsa Indonesia.

Satu hal yang patut dicatat di sini ialah arkeologi dalam taraf pengembangan yang lanjut, jauh sebelum Perang Dunia II, memberikan pula sumbangan besar dalam orientasi/pemikiran yang memberikan titik berat pada inspirasi dan ciri Indonesia yang antara lain ditampakkan oleh peninggalan-peninggalan purbakala. Kegiatan menulis hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas arkeologi, hasil-hasil pikiran/hipotesa, dan penyelesaian karya-karya tulisan yang fundamental, hingga kini masih dinilai penting untuk kelanjutan proses pengembangan arkeologi.

Ketika tugas-tugas arkeologi mulai ditangani oleh ahli-ahli kita sendiri timbullah sangat banyak masalah karena tidak cukup jumlah kader arkeolog yang disiapkan untuk sekaligus menyelesaikan tugas-tugas administrasi/organisasi, kerja-lapangan, dan tugas-tugas ilmiah. Di samping itu, sa-

rana untuk melakukan tugas-tugas arkeologi tidak bertambah atau dapat dikatakan malah mengalami kemunduran.

Dalam masa kegiatan pengembangan arkeologi sepenuhnya ditangani bangsa Indonesia (sejak 1956/1957) kita dihadapkan kepada suatu keadaan yang serba kurang, yaitu keadaan yang dapat dinilai sebagai di bawah tingkat yang sudah dicapai arkeologi sesudah Perang Dunia II. Keadaan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak ahli-ahli Belanda berusaha meneruskan kegiatan arkeologi di Indonesia segera sesudah Perang Dunia II berakhir (1945-1956).

Masalah-masalah yang kita hadapi banyak sekali dan saling bertalian dalam usaha penerapan tugas-tugas arkeologi dalam ruang lingkungannya yang semaksimal mungkin. Seperti telah dinyatakan di atas, arkeologi sudah mencapai taraf kematangan di Indonesia yang menghendaki kelengkapan syarat dalam penerapannya untuk dapat mencapai hasil yang bermutu baik. Syarat-syarat tersebut adalah organisasi yang efisien, tenaga-tenaga spesialis/teknis yang cukup serta terdidik baik, dan sarana kerja yang memadai. Syarat-syarat tersebut telah secara umum tercakup oleh badan pelaksana kegiatan-kegiatan arkeologi (yaitu Dinas Purbakala/Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional), tetapi dalam batas-batas yang minimal sekali.

Hal yang memperoleh perhatian besar sebagai syarat pertama adalah organisasi yang menjelaskan tentang struktur dan rencana kegiatan dari pusat ke daerah. Menjalankan dan merencanakan organisasi arkeologi ini telah menyerap tenaga dan pikiran kita yang tidak sedikit. Hasilnya adalah suatu konsolidasi formil di pusat, berupa struktur arkeologi yang meliputi bidang-bidang spesialisasi/khusus, dan perluasan jumlah kantor lapangan (cabang-cabang; hingga 1980 meliputi empat buah). Akibat dari pengkonsolidasian organisasi ini adalah pengendalian pekerjaan-pekerjaan administrasi secara intern dan ekstern yang tiada terbatas. Penyediaan sarana dan biaya yang minimal (untuk pusat dan cabang-cabang) memaksa pelaksanaan kegiatan teknis arkeologi (survei, ekskavasi, pemugaran dan sebagainya) di lapangan bersifat selektif sehingga selama hampir 25 tahun sejak arkeologi dalam pengelolaan bangsa Indonesia sendiri tidak terjadi pe-

ngembangan yang pesat. Bukan hanya pada pekerjaan di lapangan terasa adanya kelambatan, tetapi pekerjaan di lingkungan kantor (dokumentasi foto/gambar, pencatatan dan pendaftaran kekunoan, analisis, penyusunan laporan-laporan, penulisan karya-karya ilmiah, penerbitan majalah-majalah arkeologi dan sebagainya) juga mengalami stagnasi.

Penggiatan pekerjaan arkeologi secara menyeluruh, mula-mula didukung oleh tenaga spesialis yang kecil jumlahnya. Volume kerja yang semestinya ditingkatkan ke taraf internasional tidak diimbangi dengan jumlah tenaga spesialis/teknis/administratif yang cukup. Di samping kekurangan tenaga pelaksana untuk tiap bidang spesialisasi di pusat dan daerah, sebagian tenaga-tenaga inti yang menjadi penggerak kegiatan-kegiatan tidak sepenuhnya mempunyai kesempatan mengumpul dan mengolah data baru. Tampaklah adanya tendensi penggeseran ciri suatu badan ilmiah ke badan administratif semata. Tenaga pelaksana administrasi yang seharusnya membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan arkeologi banyak yang kurang atau tidak memenuhi syarat; hal ini menjadi faktor penghambat pengembangan pula. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tenaga-tenaga pelaksana arkeologi belum dapat mencukupi, baik kuantitatif maupun kualitatif, guna pengembangan arkeologi ke arah yang bermutu baik. Pengadaan tenaga pelaksana yang akademis pada waktu itu terpenuhi dengan lambat sekali.

Kini, ditinjau dari segi jumlah sarjana arkeologi yang terdapat di lembaga-lembaga arkeologi maka jumlahnya jauh melebihi keadaan kuantitatif pada jaman sebelum Perang Dunia II. Faktor sarana kerja pun sudah cukup memadai untuk pelaksanaan kegiatan arkeologi. Terdapatlah kekurangan besar dalam sektor fisik yang menempatkan arkeologi di Indonesia dalam taraf yang tidak dapat disejajarkan dengan tingkat yang dicapai di negara yang teknologinya sudah maju. Di negara-negara tersebut, *arkeometri* yang mengkhususkan diri dalam penggunaan dan perlengkapan alat-alat kerja lapangan dan kerja laboratorium, menjadi penunjang kegiatan arkeologi yang tak dapat lagi dikesampingkan, bahkan metode kerjanya menjadi syarat mutlak untuk mencapai hasil-hasil yang lebih sempurna.

Beberapa peristiwa yang menyangkut usaha peningkatan suatu kegiatan arkeologi Indonesia adalah: penetapan pemugaran candi Borobudur sebagai proyek nasional yang ditunjang dengan dana-dana khusus, pelaksanaan joint-programs dengan tim-tim arkeologi luar negeri dan pengiriman arkeolog-arkeolog Indonesia ke luar negeri untuk menambah pengetahuan, baik di bidang teknis maupun teoritis. Hal-hal tersebut jelas telah menambah kemampuan kita dalam penggunaan alat-alat dan metode-metode survei/ekskavasi serta menambah pengetahuan dalam segi teori pada berbagai bidang arkeologi.

USAHA PENINGKATAN EKSISTENSI

Peristiwa yang timbul pada tahun 1975 telah menyangkut segi organisasi kegiatan arkeologi di Indonesia. Peristiwa yang pertama kali terjadi dalam sejarah pengembangan arkeologi di Indonesia adalah pemecahan struktur dan organisasi kegiatan arkeologi dalam dua unit kegiatan yang masing-masing ditetapkan fungsi dan tugasnya. Surat-surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22/o/1975 dan No. 79/o/1975 pada dasarnya: pertama bersifat administratif dan kedua bersifat ilmiah. Badan yang menampung kegiatan administratif ialah Direktorat Purbakala dan Sejarah (DSP, kini Ditlinbinjarah) dan yang melakukan kegiatan ilmiah adalah Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (P4N, kini Puslitarkenas).

Jika ditinjau dari makna pemecahan ini, akan kita jumpai dua kenyataan yang kontroversial. Kenyataan pertama ialah kegiatan dapat dipusatkan kepada penyempurnaan dua masalah pokok arkeologi. Suatu fakta ialah, sebelum ini (seperti dikatakan di atas) ada kecenderungan kesangkut-pautan terlalu dalam dan luas dalam masalah-masalah administratif yang menyerap separuh atau lebih perhatian dari seluruh kegiatan arkeologis. Pemecahan ini akan memberikan kemungkinan lebih banyak dalam berprestasi di bidang ilmiah dan penanganan yang lebih sempurna terhadap

masalah-masalah pengaturan administratif. Kenyataan kedua adalah suatu pemisahan formil dalam arkeologi yang sebenarnya merupakan kesatuan, sehingga kegiatan-kegiatan harus berjalan seiring dan saling menjalin. Syarat utama dalam meninjau arkeologi sebagai satu kesatuan ini adalah jumlah tenaga pelaksana yang cukup besar serta *qualified*, struktur organisasi yang luas pula dan pemanfaatan sarana kerja yang cukup besar. Di dalam sebuah unit arkeologi yang besar seperti ini dapat dicegah pula “*overlapping*” (tumpang-tindih) kegiatan-kegiatan.

Jika sudah dipilih pemisahan dalam pelaksanaan kegiatan arkeologi ini maka haruslah dijaga jangan sampai terjadi kesimpang-siuran tugas-tugas pelaksanaan. Telah dapat diduga bahwa dalam fase-fase pertama pemisahan tugas ini berjalan akan terjadi kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan batas-batas wewenang antara Ditlinbinjarah dan Puslitarkenast sehingga koordinasi perlu terus-menerus dipelihara.

Yang penting bagi kita sekarang ialah, dua instansi resmi ini terus berusaha meningkatkan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang sudah digariskan sehingga tujuan arkeologi dapat tercapai dalam rencana pembangunan yang menyeluruh.

KEMBALI KE BENTUK AWAL EKSISTENSI

Eksistensi formal arkeologi di Indonesia, yaitu dengan terbentuknya “*Oudheidkundige Dienst*” atau Dinas Purbakala sebagai kelanjutan dari masa penjajahan adalah hasil dari tiga faktor besar: 1. adanya pengaruh pengembangan gagasan dan penelitian di Eropa Barat tentang peninggalan masa lalu; 2. kulminasi seluruh kegiatan para peneliti Barat selama beberapa abad di Indonesia; 3. pengaruh struktur penanganan kegiatan kepurbakalaan yang diterapkan di India dan Indo-Cina oleh Inggris dan Perancis sebagai negara penjajah. Eksistensi formal itu di Indonesia berlangsung dalam kurun waktu pendek, kurang lebih 30 tahun, tetapi hasil yang tercapai dalam waktu singkat itu dapat dijadikan pedoman dan landasan bagi pengembangan arkeologi di masa-masa seterusnya di Indonesia.

Dalam masa pengembangan arkeologi di Indonesia selama 55 tahun setelah kemerdekaan terlihat adanya periode-periode yang menggambarkan situasi yang bergerak secara lambat dan mencapai suatu tingkat kemajuan, baik dalam segi sarana maupun gagasan menuju ke taraf mutakhir dalam pengembangan arkeologi secara internasional. Segi fisik pengembangan, yaitu sarana dan prasarana (ketenagaan, dana, peralatan) dan segi abstraknya (gagasan/teori/metode) belum terjangkau secara keseluruhan. Secara politis-strategis, arkeologi belum diperlakukan proporsional karena tidak dipandang sangat urgent untuk pembangunan hingga usaha pemerintah untuk mencapai kemajuan di bidang arkeologi sangat terbatas. Demikian pula dalam segi gagasan yang di kalangan internasional terus menuju ke pembaharuan serta peningkatan, dunia arkeologi Indonesia mengalami suatu "setback" (kemunduran) karena kurangnya usaha untuk menyerap pembaharuan-pembaharuan melalui pertemuan-pertemuan ilmiah internasional dan untuk menyerap serta mengikuti pemikiran baru/maju di dunia arkeologi. Meskipun kesempatan telah terbuka untuk melakukan hubungan-hubungan internasional, masih belum tampak arkeolog-arkeolog Indonesia memanfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini untuk ikut meningkatkan posisi arkeologi Indonesia setaraf dengan negara-negara yang sudah maju. Dalam suasana reformasi yang belum memberikan gambaran jelas tentang kedudukan dan arti penting arkeologi di Indonesia, namun hasrat untuk meningkatkan arkeologi perlu terus dipupuk. Kini perlu dipikirkan kembali perjalanan arkeologi itu sebagai suatu cabang ilmu yang universal menyebar di dunia dan mencapai Indonesia seraya berkembang selama beberapa abad di Indonesia. Sebagaimana halnya awal perkembangannya serta pada akhirnya mencapai kedudukan institusional-formal maka arkeologi Indonesia perlu dipikirkan untuk **dipersatukan kembali** dalam **satu wadah** yang akan berkembang dalam jangkauan lebih besar daripada sekarang ini. Satu lembaga (setingkat Direktorat Jenderal) yang meliputi semua kegiatan arkeologi (penelitian, pemugaran, laboratorium, dokumen-

tasi, perlindungan, publikasi, humas, dsb.) perlu diselesaikan secara koordinatif, simultan, dan sistematis. Dalam kondisi seperti adanya sekarang ini dengan *manpower*, sarana dan prasarana, struktur pusat dan daerah, program dan pengalaman selama beberapa dekade maka pengembalian kegiatan arkeologi dalam satu wadah di Indonesia sudah sangat memungkinkan.

KEMANDIRIAN DALAM SKOPE NASIONAL

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi perkembangan arkeologi di Indonesia, khususnya yang dapat diketahui pada saat ini, maka kita di sini masih berada dalam proses melengkapi, baik dalam segi praktis (pelaksanaan) maupun teori yang sekiranya dapat disesuaikan dengan kecenderungan global, yang pada tingkat sekarang ini sangat maju. Arkeologi di Indonesia sekarang masih dalam taraf membentuk, baik struktural maupun konseptual. Kesenjangan masih terasa dalam pemanfaatan peralatan arkeologis yang vital (terutama alat-alat untuk dating dan analisis) dan ketenagaan (*man power*) yang memadai. Harus diperhatikan bahwa dalam masa pengembangan sekarang ini secara umum terdapat tiga strata dalam tenaga pelaksana arkeologi yaitu: 1. stratum bawah yang belum berpengalaman dalam struktur (arkeolog junior); 2. stratum tengah yang sudah mulai berpengalaman dalam jalinan struktur arkeologi; dan 3. stratum atas yang termasuk senior dan sudah berpengalaman dalam pola struktur arkeologi.

Dalam pelaksanaan tugas arkeologi harus diperhatikan pembagian tugas di antara tiga strata ini, khususnya dalam menangani aspek-aspek yang bersifat teoretis/konseptual dan praktis, ataupun yang praktis-teoretis/konseptual. Tugas pertama yang utama bagi arkeologi ialah tugas praktis yaitu penanganan data artefaktual berupa deskripsi yang cermat untuk memudahkan interpretasi kemudian, disamping kerja lapangan (*fieldresearch*, rekonstruksi, restorasi, dsb.) dan kerja laboratoris (analisis, klasifikasi, dsb.). Tugas ini dibebankan kepada **stratum pertama**. **Stratum kedua** selain tugas-tugas praktis sudah pula memikirkan soal-soal teori dan

konsep berkaitan dengan data artefaktual. **Stratum ketiga** selain tetap melakukan tugas-tugas praktis, perhatian menjurus lebih banyak kepada masalah-masalah teori dan konsep. Sasaran dari masing-masing stratum itu dapat dipisah-pisah/diperinci lagi dalam unsur-unsur yang berkaitan dengan data tentang hasil budaya, manusia, dan lingkungan.

Sehubungan dengan tema sajian ini, maka stratum dua dan tiga diharapkan dapat memberikan masukan dalam konteks studi wilayah yang menghendaki perbandingan data dalam wilayah arkeologi yang lebih luas dari situs atau situs-situs menjadi sasaran penelitian dan mengandung kesamaan-kesamaan data artefaktual yang dibuat dalam lingkungan dan oleh sekelompok manusia tertentu yang memiliki kesamaan dalam perilaku (David Clark 1977: 9). Dengan terbentuknya balai arkeologi (balar) di daerah-daerah penelitian maka konsentrasi tugas arkeologis dapat dilakukan oleh ketiga strata ketenagaan itu, jika tenaga-tenaganya tersedia. Sebelumnya pada taraf awal pengembangan balar-balar baru, studi artefaktual yang lebih rinci dan mendalam dapat diselenggarakan bersama oleh ketiga strata dan hasilnya akan sangat berarti sebagai penguatan data arkeologi seluruh wilayah Indonesia. Interpretasi dalam konteks wilayah internal (wilayah balar) dan eksternal (antar balar), maupun nasional (kawasan Indonesia) kemudian dapat dilaksanakan atas dasar data yang masuk dari balar-balar. Data yang masuk itu perlu dievaluir/dinilai untuk membuat perencanaan sistematis terhadap unsur-unsur atau aspek-aspek arkeologis yang akan dikaji lebih lanjut. Dengan demikian ini maka tiap unsur dan tiap aspek arkeologis dalam kawasan Indonesia dapat diidentifikasi dan ditangani secara lokasional, regional atau nasional, serta profesional.

ARKEOLOGI INDONESIA DALAM UJIAN

Ketekunan, ketrampilan, dan dedikasi mengisi jiwa pelaksana arkeologi yang telah merintis kelanjutan ilmu ini sejak runtuhnya kekuasaan penjajah demi menegakkan sejarah dan budaya bangsa. Dapatkah semangat "kepahlawanan" pengabdian ini dilanjutkan di hari-hari esok serta terus memupuk tujuan nasionalistik dalam pengembangan arkeologi Indonesia

secara konsekuen? Apakah garis perjalanan arkeologi Indonesia akan terus dirintis dalam suatu gambaran masa depan yang makin canggih sesuai dengan ciri pengembangan global?

Arkeologi di Indonesia bukan hanya ilmu yang bertugas untuk menyingkapkan masa lalu guna menyadarkan manusia Indonesia akan nilai dan harga dirinya semata, akan tetapi pengembangan ilmu ini dituntut lebih dari itu. Ian Hodder (1995) adalah salah satu tokoh arkeologi masa kini yang berpendapat bahwa pengertian-pengertian yang pernah disimpulkan pada masa lalu (*past meanings*) dapat diterapkan (diberlakukan) terhadap data arkeologis dan dapat pula memberikan sumbangan yang efektif kepada praktek-praktek sosial umat manusia masa kini. Jika disimak, selain kemampuan yang tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan ilmunya sesuai dengan kemajuan-kemajuan yang tercapai secara universal, pengembangan ilmu ini harus memiliki moral **kebangsaan**, moral **humanistik** dan rasa pengabdian pada ilmu yang tinggi pula. Ia membuka tabir sejarah dan harus menyajikan secara nyata (realistik) kepada bangsanya bahkan kepada dunia, akan nilai-nilai kebesaran bangsanya. Di tengah-tengah pergolakan dunia yang menghendaki sajian obyek-obyek arkeologis secara menarik tanpa menyimpang dari kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, ia harus mengantarkan arkeologi ke jenjang yang setidak-tidaknya setingkat dengan perkembangan di dunia internasional.

Sejak arkeologi berada sepenuhnya di tangan pengembangan bangsa, kita telah dihadapkan oleh berbagai kendala, seperti sarana kerja yang minim, *manpower* yang masih di bawah standar, dan dana penunjang yang berada di bawah minim. Dengan perencanaan dan cara kerja yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi umum di tanah air, perkembangan dan perubahan berlangsung secara bertahap, tetapi belum berhasil mencapai apa yang diharapkan pada mulanya, yaitu kondisi arkeologi Indonesia yang berada di puncak pengembangannya di Asia Tenggara.

Manpower, melalui pendidikan di dalam dan luar negeri, berangsur-angsur memperoleh kemajuan ke arah peningkatan kualitas kemampuan kerja, tetapi sarana yang dianggap sangat utama, yaitu pendirian **Laboratorium Arkeologi yang lengkap dan memadai**, yang telah dituntut eksistensinya sebagai alat ampuh bagi interpretasi data yang terpercaya, sejak awal arkeologi mulai ditangani Bangsa Indonesia sendiri hingga kini tidak terlaksana. Lain daripada itu, pendirian Laboratorium Arkeologi tersebut telah direncanakan pula pendirian sebuah **Laboratorium Bioantropologi dan Paleoantropologi** untuk meningkatkan penelitian tentang eksistensi manusia purba, seperti genus *Homo erectus*, *Homo sapiens* dll. Hal ini mengingat bahwa Indonesia di **Asia Timur** merupakan daerah yang sangat menonjol dalam penemuan fosil manusia purba, disamping Republik Rakyat Cina. Keberadaan kedua jenis laboratorium penelitian ini menemui jalan buntu meskipun gedung-gedung laboratorium dan *manpower* yang diperlukan sebagai sarat utama laboratorium-laboratorium tersebut telah dipersiapkan, kecuali pengadaan alat-alat laboratorium yang sulit diperoleh, baik melalui dana rutin, proyek maupun bantuan dana dari pihak-pihak dalam dan luar negeri. Akibatnya ketergantungan kepada pihak-pihak luar, terutama dari luar negeri, masih belum dapat dihindari. Ketidakmandirian dalam bentuk kegiatan analisis dan interpretasi melalui penelitian laboratoris akan mendorong intervensi dari luar (eksternal) secara terus menerus, yang akhirnya dapat menyapakan identitas Arkeologi Indonesia sebagai aset ilmiah nasional yang patut disegani. Bila ketidakmandirian Arkeologi Indonesia tidak teratasi secara keseluruhan, pengaruhnya terhadap generasi penerus pengemban ilmu ini akan berakibat hilangnya pribadi pengemban Arkeologi Indonesia yang **mandiri** serta berciri **nasionalistik** dan **humanistik** dalam rangkuman kekuatan-kekuatan eksternal, khususnya dari luar negeri, yang akan berusaha mendominasi situasi, sehingga kita di Indonesia tergantung kepada pandangan-pandangan eksternal.

Dedikasi, tanggung jawab, dan tanpa pamrih melakukan tugas-tugasnya, moral yang tinggi dalam pengabdian ilmu di kalangan generasi penerus pengemban arkeologi Indonesia, akan membantu peningkatan arkeologi

serta menjunjung tinggi nama dan harkat bangsa kita di dunia internasional.

Demikianlah sekelumit gambaran yang dapat saya sajikan tentang arkeologi Indonesia menghadapi era globalisasi ini. Yang harus kita laksanakan dengan sadar dan sungguh-sungguh adalah retrospeksi mendalam tentang seluruh kegiatan arkeologi dari sejak eksistensi awalnya, kesadaran-kesadaran akan kekurangan-kekurangannya (dalam *manpower*, sarana dan prasarana, serta konsepsi).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Clark, David L

1977 **Spatial Archaeology**. London: Academic Press.

Daniel, Glyn.

1978. **A Hundred and Fifty Years of Archaeology**. London: Duckworth.

Hodder, Ian.

1995 **Theory and Practice in Archaeology**. London and New York: Routledge.

Malina, Jaroslav and Vasicek, Zdenek.

1990 **Archaeology Yesterday and Today. The Development of Archaeology in the Sciences and Humanities**. Cambridge University Press.

Soejono, R.P.

- 1968 "Retrospect and Prospect of Archaeology in Indonesia". Dalam **The Journal of the Oriental Society of Australia**, Vol. 6/1-2: 114-121.
- 1976 "Syarat dan Ruang Lingkup Pengembangan Arkeologi di Indonesia". **Seminar Arkeologi**, 35-52. Jakarta: Puslit Arke-nas.
- 1983 "Tinjauan tentang Metode Kerja di Pusat Penelitian Arkeo-logi Nasional". **Rapat Evaluasi Metode Penelitian Arkeo-logi**, di Yogyakarta, Maret 1982.
- 1984 "On the Conditions and Scope of the Development of Ar-chaeology in Indonesia". Dalam Pieter van de Velde (ed.) **Prehistoric Indonesia. A Reader**. Verh. KITLV, 104. Dordrecht - Holland, 15-28.
- 1986 "Local Genius dalam Sistem Teknologi Prasejarah". Dalam Ayatrohaedi (ed.). **Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)**. Jakarta: Pustaka Jaya. Hlm. 130-140.
- 1987 "Archaeological Research in Indonesia". Dalam **Journal of Southeast Asian Studies**, Vol. XVIII, No. 2: 212-216. Singapore: University Press.
- 1996 "Arkeologi Indonesia dalam Perspektif". Dalam **Nalar dan Naluri. 70 Tahun Daoed Joesoef**. Jakarta: CSIC.

Trigger, Bruce C.

- 1996 "Alternative Archaeologies: Nationalist, Colonialist, Impe-rialist". Dalam Robert Preucel and Ian Hodder (ed.): **Con-temporary Archaeology in Theory**. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. Hlm. 615-631.

Whitley, David S.

- 1998 **Reader in Archaeological Theory. Post-Processual and Cog-nitive Approach**. London: Routledge.

STUDI KAWASAN MEGALITIK: TANTANGAN KE ARAH GLOBALISASI

Bagyo Prasetyo

PENALARAN DAN PERMASALAHAN

Studi kawasan merupakan disiplin yang belum lama dikembangkan dalam ilmu arkeologi di Indonesia. Berbeda dengan studi kawasan yang berkembang di mancanegara, yang telah diawali pada dekade tahun 40-an oleh Gordon Willey berupa penelitian berskala regional di Lembah Viru kawasan Pantai Peru sehingga proyek ini kemudian dikenal sebagai **Viru Valley Project** (Willey 1953: 1974). Studi ini juga dikembangkan oleh Hodder yang kemudian dirumuskannya sebagai **Towards Mature Archaeology** dan dijadikannya sebagai salah satu paradigma. Pada perkembangannya, pelaksanaan studi kawasan memunculkan paradigma-paradigma lain yang dilakukan oleh para peneliti asing, seperti Christaller dan Joyce Marcus dalam paradigma analisis lokasi (*locational analysis*) (Mundardjito 1993; Heddy 1995), David Thomas dan Robert Bettinger dengan paradigma ekologi (*ecological paradigm*) (Thomas 1973;1979), Vita-Finzi dan Higgs (1970) serta Flannery (1976) dengan paradigma cakupan situs (*site catchment*).

Analisis lokasi yang dilontarkan oleh Joyce Marcus digunakan untuk mengenali pola permukiman Suku Indian Maya di masa lampau dengan memanfaatkan data ekologi serta data etnografi yang berkaitan dengan ide-ide atau pandangan orang Maya. Analisis ini lebih menekankan pada pendekatan

antara data etik dan emik yang mengkaji hubungan situs-situs pusat (primer) dengan situs-situs bukan pusat (sekunder). Komposisi situs-situs acapkali berbentuk heksagonal dengan pola berdasarkan prinsip minimisasi biaya transportasi barang dan jasa antara situs primer dan situs sekunder (Mundardjito 1993:29). Christaller mengembangkan model analisis ini sebagai **central place theory** (1933).

Determinan ekologi yang dikembangkan oleh David Thomas dan Robert Bettinger digunakan untuk menguji teori Steward, yang diterapkan pada pola permukiman Suku Indian Shoshoni di Lembah Sungai Reese, Nevada serta Suku Indian Maya di Amerika Tengah (Thomas 1973). Penelitian seperti ini sepenuhnya menggunakan data etik dan tidak menganggap bahwa suatu lingkungan fisik menentukan seluruh aspek kebudayaan, tetapi dalam penempatan situs-situs arkeologi lebih melihat sekumpulan faktor lingkungan yang khas (Thomas 1979:300; Mundardjito 1993:18).

Pendekatan melalui daerah cakupan yang diterapkan oleh Vita-Finzi dan Higgs terhadap situs-situs paleolitik dan awal neolitik di Laut Tengah bagian timur dan kemudian disempurnakan oleh Flannery berdasarkan hasil penelitian pada situs San Jose Mogote di Kawasan Etna di Lembah Oaxaca, Meksiko. Pendekatan ini memberikan asumsi bahwa manusia cenderung memperkecil kemungkinan perjalanan antara tempat tinggal dengan daerah sumberdaya alam mereka. Sumberdaya alam (daerah tangkapan) dibagi dalam serangkaian lingkaran konsentrik yang berpusat pada situs habitasi primer. Apabila jarak situs terhadap daerah tangkapan jauh maka situs tempat tinggal baru akan ditempatkan di dalam satu daerah yang lebih dekat dengan pusat.

Paradigma-paradigma semestinya dapat diterapkan pada penelitian arkeologi di Indonesia untuk menghasilkan sejumlah interpretasi tentang kajian kawasan. Berkaitan dengan pengembangan studi megalitik di Indonesia, tentu saja penerapan melalui paradigma tersebut dapat juga diberlakukan. Sejauh ini penelitian tentang megalitik di Indonesia sudah banyak dilakukan seiring dengan tantangan globalisasi yang mulai marak, tentu saja pengembangan penelitian perlu lebih banyak ditingkatkan terutama dalam pengembangan studi kawasan megalitik di Indonesia. Sudah mulai banyak peneliti

asing yang melirik situs-situs prasejarah terutama tinggalan-tinggalan megalitik untuk dilakukan penelitian. Oleh karena itu, tantangan bagi para peneliti khususnya dalam bidang kajian megalitik perlu adanya peningkatan mutu terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, mengingat pengembangan studi kawasan situs-situs arkeologi di mancanegara sudah jauh dilakukan. Walaupun demikian bukan berarti bahwa selama ini studi kajian kawasan tentang megalitik belum pernah dilakukan di Indonesia. Beberapa tulisan karya ilmiah memang telah mengarah pada kajian tersebut, namun upaya yang dilakukan dirasa masih belum optimal.

PEMBAHASAN

Penelitian tentang peninggalan megalitik di Indonesia sudah sejak lama dilakukan, yaitu sejak masa penjajahan Belanda pada tahun 1800-an yang dilakukan pertama kali oleh Verbeek (1891). Laporan Verbeek ini sebetulnya memuat data inventarisasi situs-situs arkeologi yang ada di Indonesia termasuk di antaranya adalah situs-situs yang bercorak megalitik. Kemudian Krom (1915) dan Bosch (1918) menerbitkan hasil-hasil pendataan oleh Bosch, Knebel, Ijzerman dan Hoepermans di **dalam Rapporten Oudheidkundige Dienst Nederlandsch Indie** jilid I dan II, yang memuat situs-situs megalitik di Indonesia. Namun demikian Krom dan Bosch tampaknya hanya memuat daftar inventaris situs-situs yang ada di Jawa dan Madura saja (Krom 1915; Bosch 1918). Perkembangan selanjutnya muncul peneliti seperti Moojen, Ullman, Tricht, Kruyt, Westenenk, Willem, Zwaan, Bertling, Adam, de Bie, Bont, Kaudern, Kuperus, van der Hoop, dan Sierevelt yang melakukan pendataan situs arkeologi termasuk peninggalan megalitik yang ada baik di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan (Bagyo 1987). Setelah itu penelitian demi penelitian tentang megalitik terus bermunculan dan berkembang serta dilakukan oleh peneliti bangsa Indonesia sendiri sehingga makin memperkaya perbendaharaan situs-situs beserta hasil temuan tinggalan megalitik yang ada.

Melalui data yang berhasil dikumpulkan, baik hasil penelitian dari peneliti mancanegara maupun Indonesia, sementara ini baru diidentifikasi 591 buah situs megalitik dengan berbagai corak dan variasinya di 19 provinsi. Tabel 1 di bawah ini memberikan gambaran mengenai jumlah data situs-situs megalitik yang ada di Indonesia:

TABEL 1 JUMLAH DATA SITUS MEGALITIK DI INDONESIA

No	Provinsi	Jumlah Situs
1	Sumatera Utara	20 buah
2	Sumatera Barat	33 buah
3	Bengkulu	6 buah
4	Jambi	16 buah
5	Sumatera Selatan	39 buah
6	Lampung	12 buah
7	Jawa Barat	92 buah
8	Jawa Tengah	50 buah
9	Daerah Istimewa Yogyakarta	5 buah
10	Jawa Timur	62 buah
11	Bali	66 buah
12	Nusa Tenggara Barat	4 buah
13	Nusa Tenggara Timur	78 buah
14	Kalimantan Timur	5 buah
15	Sulawesi Utara	39 buah
16	Sulawesi Tengah	42 buah
17	Sulawesi Selatan	11 buah
18	Maluku	9 buah
19	Papua	3 buah
	Total Keseluruhan	591 buah

(Data ini dikumpulkan pada tahun 1998; Bagyo Prasetyo 1987)

Tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi sejumlah tingkat kepadatan situs megalitik yang bervariasi. Variabel kepadatan tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu sangat jarang (0-25 situs), agak jarang (26-50 situs), agak padat (51-75 situs), dan padat (76-100 situs). Variabel pertama adalah wilayah dengan tingkat kerapatan situs yang sangat jarang terdapat di Papua (3 situs), Nusa Tenggara Barat (4 situs), Kalimantan Timur (5 situs), Daerah Istimewa Yogyakarta (5 situs), Bengkulu (6 situs), Maluku (9 situs), Sulawesi Selatan (11 situs), Lampung (12 situs), Jambi (16 situs), dan Sumatera Utara (20 situs). Variabel kedua adalah wilayah dengan kerapatan situs agak jarang, terdapat di Sumatera Barat (33 situs), Sumatera Selatan (39 situs), Sulawesi Utara (39 situs), Sulawesi Tengah (42 situs), dan Jawa Tengah (50 situs). Variabel ketiga adalah wilayah dengan tingkat kerapatan situs agak padat, yang ditunjukkan pada wilayah Jawa Timur (62 situs) dan Bali (66 situs). Adapun variabel keempat adalah wilayah dengan tingkat kerapatan situs padat, yaitu di wilayah Nusa Tenggara Timur (78 situs) dan Jawa Barat (92 situs).

Keberadaan situs-situs megalitik yang ada di 19 provinsi tersebut menunjukkan tingkat sebaran jenis megalitik yang bervariasi. Sejumlah jenis mempunyai sebaran yang sangat luas dan ada juga yang sifatnya sporadis saja. Sebagai contoh bentuk menhir merupakan jenis yang paling luas sebarannya, mencakup 19 provinsi, kemudian jenis-jenis lumpang batu di 14 provinsi, dolmen di 13 provinsi. Selain itu terdapat jenis-jenis seperti arca megalit, altar batu, dan punden berundak yang mempunyai sebaran di 12 provinsi, temu gelang batu di 9 provinsi, batu berhias di 8 provinsi, monolit, peti kubur batu, dan kursi batu di 6 provinsi, sarkofagus dan lesung batu berada di 5 provinsi, arca hewan di 4 wilayah provinsi, phallus batu dan kubus batu di 3 wilayah provinsi, sedangkan kubur bilik batu, kenong batu, tong batu di 2 provinsi. Secara lebih gamblang visualisasi variabel jenis megalitik yang tersebar di 19 buah provinsi dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

TABEL 2 VARIABEL KUANTITAS BENTUK PENINGGALAN MEGALITIK DI INDONESIA

No	Jenis Peninggalan	Jumlah (Provinsi)
1	Menhir	19 buah
2	Lumpang batu	14 buah
3	Dolmen	13 buah
4	Arca megalit	12 buah
5	Altar batu	12 buah
6	Punden berundak	12 buah
7	Temu gelang batu	9 buah
8	Batu berhias	8 buah
9	Monolit	6 biaj
10	Peti kubur batu	6 buah
11	Kursi batu	6 buah
12	Sarkofagus	5 buah
13	Lesung batu	5 buah
14	Arca hewan	4 buah
15	Phallus batu	3 buah
16	Kubus batu	3 buah
17	Kubur bilik batu	2 buah
18	Kenong batu	2 buah
19	Tong batu	2 buah

Hasil pengamatan terhadap situs-situs yang sudah diteliti, tampaknya baru beberapa situs megalitik yang sudah dilakukan penelitian secara intensif. Penelitian tersebut meliputi:

1. Komplek menhir di Kawasan Lima Puluh Koto
2. Komplek megalitik di Besuki (Kawasan Segitiga Situbondo-Bondowoso-Jember)
3. Komplek megalitik di Kawasan Lembah Besoa

Selain situs-situs di atas, pengamatan tentang studi kawasan belum dilakukan secara intensif. Beberapa kompleks seperti Pasemah maupun Komplek Megalitik Gunung Kidul, serta megalitik di wilayah Bali dan Sumba (Barat dan Timur) pernah diteliti dan diamati, namun hasil tentang studi kawasannya perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut.

1. Komplek Megalitik di Kawasan Lima Puluh Koto

Schnitger pertama kali menyebutkan adanya situs megalitik di Wilayah Lima Puluh Koto (Sumatra Barat) yang dikaitkan dengan bentuk menhir. Salah satu daerah Lima Puluh Koto adalah Kenagarian Mahat dengan sejumlah situs megalitik berupa situs-situs: Bawah Parit, Kayu Keciak, Tiga Saka-to, Ronah, Puso, Bawah Bukit Maliun, Padang Ilalang, Bukit Domo, Balai-balai batu, Tanjung Mesjid, Kampung, serta Ampang Gadang merupakan suatu kompleks yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian secara intensif yang dilakukan di Situs Bawah Parit paling tidak telah dapat membuka sejarah budayanya, mencakup waktu penghunian dan jenis-jenis rasnya. Penelitian terhadap sisa-sisa manusia yang dikuburkan di bawah batu tegak Situs Bawah Parit yang didasarkan pada bentuk gigi dan tengkorak mengacu pada ciri Ras Monggolid walaupun beberapa unsur Australomelanesid masih tampak jelas (Aziz dan Darwin 1997). berdasarkan pertanggalan radiokarbon terhadap salah satu rangka dari Situs Bawah Parit menunjukkan kisaran 2070-2130 Sebelum Masehi (3500 ± 100 BP).

2. Komplek Megalitik di Besuki (Situbondo-Bondowoso-Jember)

Penelitian yang intensif terhadap situs-situs di kawasan tersebut telah memberikan data sebaran yang cukup luas baik dari aspek hunian maupun aspek penguburannya. Puluhan situs telah didata dari ketiga kawasan tersebut dan untuk sementara waktu masih terus berjalan dalam pengembangan penelitian studi kawasan. Situs-situs yang berhasil didata dan diamati meliputi:

- a. Wilayah Bondowoso meliputi 17 situs, yang terdiri atas situs-situs: Gentong, Pakisan., Patemon, Jebung Lor, Jebung Kidul (Kecamatan Tlogosari), Kesemek, Maskuning Kulon (Kecamatan Pujer), Tanah Wulan dan

Dawuan (Kecamatan Maesan), Banyuputih, Wringin, Glingseran, Jatisari (Kecamatan Wringin), Karangsegon, Karanganyar dan Besuk (Kecamatan Klabang), Lombok Kulon (Kecamatan Wonosari), Pakauman (Kecamatan Grujugan) dengan jenis temuan berupa dolmen, batu kenong, umpak batu, menhir, sarkofagus, kubur bilik, batu datar, lumpang batu dan monolit. (Bagyo 1995c; 1996)

- b. Wilayah Jember meliputi 7 situs yang terdiri atas situs-situs: Doplang, Kendal, Tegalo (Kecamatan Arjasa), Sumberpakem dan Plalangan (Kecamatan Mayang), Sumberpakem dan Sempolan (Kecamatan Silo) dengan variasi jenis tinggalan megalitik berupa arca megalit, menhir, dolmen, batu kenong, batu silinder, batu datar, monolit, lesung batu dan lumpang batu (Bagyo 1997; Amelia 1994/5).
- c. Wilayah Situbondo meliputi 15 situs yang terdiri atas situs-situs: Selobanteng (Kecamatan Banyuglugur), Plalangan, Tamansari, dan Tlogosari (Kecamatan Sumbermalang), Lesung (Kecamatan Banyuputih), Krajan (Kecamatan Arjasa), Krajan Timur dan Tambak Ukir, Krajan (Kecamatan Kendit), Lamparan, Krajan Dua dan Pandhusa (Kecamatan Bungatan), Dakon dan Karangsukun, (Kecamatan Suboh), Ngabinan Barat (Kecamatan Besuki) dengan tinggalan megalitik berupa sarkofagus, punden berundak, lumpang batu, batu berlubang, batu dakon, dolmen dan menhir (Bagyo 1999).

Hadirnya budaya megalitik di kawasan ini banyak mendapat pertentangan dari para ahli tentang kronologi perkembangannya. Khusus mengenai punden berundak yang ditemukan di Argopuro, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya, Kohlbrugge sebagai orang pertama yang menyatakan bahwa bangunan ini mempunyai karakter Hindu dan menganggap tempat tersebut digunakan sebagai kuil untuk pemujaan Dewa Siwa (Geldern 1945). Adapun Stutterheim lebih menekankan bahwa bangunan di Argopuro berasal dari masa pra-Hindu yang dibandingkan dengan bentuk-bentuk bangunan **ahu** dan **Marae** di Wilayah Polinesia. Hasil penelitian sementara, pertanggalan karbon di Situs Krajan, Bayeman yang dilakukan oleh laboratorium P3G Bandung menunjukkan hasil pertanggalan 1250 ± 240 BP atau

sekitar 1000-15000 sebelum sekarang (sekitar Abad V-X Masehi). Tampaknya tinggalan megalitik di wilayah ini telah berkembang cukup lama, hal ini dibuktikan oleh adanya inskripsi angka tahun 1324 Çaka (1402 Masehi) pada salah satu wadah kubur batu berbentuk seekor sapi. Inskripsi ini menggunakan aksara Jawa Kuna dengan jenis huruf kuadrat yang dicirikan oleh huruf-huruf yang timbul (Bagyo 1999). Sebagai bahan perbandingan dilakukan pula pertanggalan karbon terhadap sisa-sisa pembakaran hasil temuan di Situs Dopleng (Jember). Hasil analisis yang dilakukan oleh P3G Bandung memberikan angka 580 ± 100 BP (sekitar Abad XIII-XV Masehi) lebih muda dibandingkan dengan hasil pertanggalan di Situs Krajan.

3. Komplek Megalitik di Lembah Besoa

Penelitian secara intensif terhadap komplek megalitik di Lembah Besoa telah memberikan data sebaran yang cukup banyak dengan berbagai tipologi megalitik yang berkenaan dengan hunian maupun penguburan. Penelitian di wilayah ini tampaknya masih mencapai tahapan studi kawasan keruangan dan belum mencapai pada tahapan jenis masyarakat yang menghuni maupun rentang waktu penghuniannya.

Hasil penelitian terhadap Komplek Megalitik Besoa telah memberikan sebaran yang cukup luas meliputi situs-situs Tadulako, Pokekea, Entovera, Tunduwana, Padang Hadoa, Padang Taipa, dan Mungkudana, dengan jenis variasi peninggalan megalitik berupa arca megalitik, kalamba, dolmen, menhir, batu lumpang, batu dakon, altar, batu silinder, serta tetralit (Bagyo 1995a; 1995b).

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, memberikan gambaran bahwa banyak sekali situs megalitik yang belum ditangani secara intensif sehingga data yang diterima sangat minim untuk pengembangan studi kawasan. Hasil penelitian di ketiga contoh di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya situs-situs megalitik untuk dilakukan pengembangan studi kawasan, mengingat pengaruh megalitik mempunyai sifat yang universal dengan persebaran yang sangat luas. Pengembangan penelitian dapat diartikan

sebagai pengembangan penelitian yang meliputi aspek-aspek ruang, bentuk, dan waktu dalam kaitannya secara regional.

Penelitian yang sepotong-sepotong, tidak terarah, dan tidak sistematis, tidak akan mampu mengungkapkan sejarah budaya secara makro. Oleh karena, arah pengembangan penelitian yang diperlukan untuk menghadapi tantangan globalisasi adalah:

1. Sasaran penelitian situs megalitik yang berwawasan nasional-regional (Asia Tenggara-Pasifik) untuk mengetahui keterkaitannya keruangan secara regional di masa lampau.
2. Hasil analisis pertanggalan karbon terhadap situs-situs megalitik yang mewakili dari seluruh wilayah di Indonesia untuk mengetahui secara pasti konteks arus migrasi dan kontak hubungan dengan Asia Tenggara-Pasifik .
3. Diperlukan kerjasama dalam konteks eksternal untuk dapat menyerap kemajuan-kemajuan yang ditawarkan. Kerjasama tersebut dapat berupa antardisiplin ilmu baik dalam maupun luar negeri sebagai contoh dalam hal pengenalan DNA bagi sisa-sisa rangka manusia di situs megalitik (melalui Lembaga Eijkman) untuk dapat menelusuri jalur migrasi persebaran megalitik di Indonesia dan lain sebagainya..

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Aziz, Fadhila Arifin dan Darwin A. Siregar

- 1997 Pertanggalan Kronometrik Sisa Rangka Manusia dari Situs Bawah Parit, Mahat, Sumatra Barat, **Siddhayatra, Jurnal Arkeologi 1/II/Mei**. Palembang: Balai Arkeologi Palembang.

Bagyo Prasetyo

- 1987 **Inventarisasi Data Sebaran Tradisi Megalitik Indonesia Tahun 1987**. Bidang Prasejarah: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

- 1995a **Laporan Penelitian Arkeologi Situs Megalitik Tadulako dan Pokekea, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 1995.** Balai Arkeologi Manado.
- 1995b **Laporan Penelitian Arkeologi Situs Megalitik di Lembah Besoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah Tahap II Tahun 1995.** Balai Arkeologi Manado.
- 1995c **Survei Keruangan Situs Megalitik Bondowoso Tahap I, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur 1995.** Bidang Prasejarah: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- 1996 **Survei Keruangan Situs Megalitik Bondowoso Tahap II, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur 1996.** Bidang Prasejarah: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- 1997 **Survei Keruangan Situs Megalitik Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Tahun 1997.** Bidang Prasejarah: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
- 1998 **Arus Sebaran dan Potensi Sumberdaya Budaya Megalitik di Indonesia, Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi, Cipayung Februari 1998.** Pusat Penelitian Arkeologi.
- 1999 **Survei Keruangan Situs-situs Megalitik di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur Tahun 1999.** Bidang Prasejarah: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Bosch, F.D.K.
- 1918 **Rapporten van den Oudheidkundige Dienst Nederlandsch Indie II 1915.** s'Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Christaller, W.
- 1933, **Die Zentralen Orte in Suddentschland.** Karl Zeiss: Jena. Diterjemahkan oleh C.W. Baskin, **Central Places of Southern Germany** (1966)

Flannery, K.V

- 1976 *Empirical Determination of Site Catchments in Oaxaca and Tehuacan*, **The Early Mesoamerican Village**, K.V. Flannery (ed.). New York: Academic Press.

Heddy Shri Ahimsa Putra

- 1995 *Arkeologi Pemukiman Titik Strategis dan Beberapa Paradigma*, **Manusia dalam Ruang: Studi Kawasan dalam Arkeologi Berkala Arkeologi**, tahun XV Edisi Khusus. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta.

Krom, N.J.

- 1915 *Inventaris der Hindoe Oudheden*, **Rapporten van den Oudheidkundigen Dienst Nederlandsch Indie I**. s'Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Mundardjito

- 1993 **Pertimbangan Ekologi dalam Penempatan Situs Masa Hindu-Buda di Daerah Yogyakarta: kajian Arkeologi-Ruang Skala Makro**. Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia.
- 1995 *Kajian kawasan: Pendekatan Strategis dalam Penelitian Arkeologi di Indonesia Dewasa Ini*, **Manusia dalam Ruang: Studi Kawasan Dalam Arkeologi Berkala Arkeologi**, tahun XV Edisi Khusus. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta.

Thomas, David Hurst

- 1973 *An Empirical Test for Steward's Model of Great Basin Settlement Patterns*, **American antiquity** 8. Hal 155-176.
1979. **Archaeology**. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Vita-Finzi, C dan E.S. Higgs

- 1970 *Prehistoric Economy in the Count Carmel Area of Palestine Site Catchment Analysis*, **Proceedings of the Prehistoric Society** 36. Hal. 1-37.

INTERAKSI GLOBAL MASA LALU DI SITUS-SITUS DAS KARAMA, MAMUJU; BERDASARKAN CIRI ARTEFAK DAN GEOGRAFIS

Budianto Hakim

PENDAHULUAN

Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa tidak ada satupun bangsa atau negara di muka bumi ini yang secara utuh dapat mempertahankan kemurnian budayanya. Sebab satu bangsa atau negara biasanya memiliki keterkaitan budaya yang saling mengisi atau mempengaruhi. Di Asia Tenggara, sejak masa prasejarah hingga masa sejarah, budaya yang berkembang merupakan satu-kesatuan yang saling terkait. Dalam pengertian corak budaya di Asia Tenggara menunjukkan interaksi yang global, baik dari segi teknologi, ekonomi, sosial, maupun kepercayaan.

Walaupun akar budaya di Asia Tenggara itu boleh dikatakan sama, namun masing-masing bangsa dan negara tersebut juga memperlihatkan corak budaya asli (*local genius*). Budaya asli yang dimaksud merupakan daya kreasi yang tercipta dari adanya usaha mengatasi hidup yang disesuaikan dengan lingkungannya sehingga memberi corak tersendiri dari suatu bangsa. Maka hal yang paling mendasar yang membedakan suatu etnis adalah adanya batas geografis yang nyata.

Indonesia dalam posisi geografisnya yang terletak pada persimpangan antar benua menjadikan tempat persilangan budaya (Lohanda, Mona 1999:140). Fakta ini selain melahirkan adanya beberapa persamaan budaya antar etnis di Nusantara juga melahirkan perbedaan yang khas. Salah satu daerah di Nusantara yang mencerminkan adanya persilangan budaya di masa lalu adalah Mamuju, Sulawesi Selatan. Mamuju dengan posisi geografis yang berada di pesisir barat Selat Makassar serta ditunjang oleh potensi alam yang memadai menjadikan daerah ini sebagai pintu gerbang masuknya unsur budaya luar. Unsur budaya tersebut tercermin pada artefak yang ditemukan pada beberapa situs di sepanjang DAS Karama, mulai dari hilir (Sempaga) hingga hulu (Kalumpang).

POTENSI SUNGAI KARAMA DAN GEOGRAFIS MAMUJU

Salah satu jalur yang paling mendukung terjadinya kontak antar daerah atau antar satu suku adalah laut dan sungai (Halina 1986 :241). Variabel ini sangat mungkin terjadi jika suatu daerah letaknya strategis secara geografis. Mamuju sebagai misal, menempati pesisir barat Selat Makassar atau langsung berada di pintu gerbang laut Sulawesi yang menghubungkan dengan Kalimantan. Banyak ahli menduga pesisir barat Sulawesi (Mamuju) merupakan salah satu jalur utama terjadinya kontak budaya di masa lalu. Kontak budaya ini secara tidak langsung membawa pengaruh terhadap seni-di-seni kehidupan masyarakat yang kelihatan dari formasi tinggalkan arkeologisnya.

Laut Sulawesi, umumnya maupun Selat Makassar khususnya sejak lama telah dikenal sebagai daerah yang sering mengalami kontak budaya serta segala akibat yang ditimbulkan. Keadaan tersebut dimungkinkan oleh adanya beberapa faktor yang berpengaruh. Sekarangpun kita masih dapat menyaksikan bahwa di Selat Makassar, khususnya di sekitar Tanjung Mandar berlangsung sekelompok gejala alamiah yang cukup menguntungkan bagi komunikasi dan transportasi manusia di masa lalu, baik dari pantai ke pantai, dari pantai ke pedalaman ataupun sebaliknya. Faktor tersebut ditunjang misalnya;

- Tanjung Mandar yang berada di pesisir barat Selat Makassar secara geografis adalah pintu gerbang laut Sulawesi di bagian utara yang menghubungkan dengan laut Kalimantan dan merupakan akses utama terjadinya difusi budaya, migrasi manusia, atau terjadinya perdagangan jarak jauh.
- Sungai Karama yang bermuara di Selat Makassar (Tanjung Mandar) merupakan sungai besar yang sangat mungkin dilayari oleh kapal-kapal besar sampai ke pedalaman yang memiliki sumberdaya alam yang sangat potensial, seperti hasil hutan, dan hasil tambang. Kondisi alam yang demikian menyebabkan tumbuhnya kantong pemukiman atau mungkin bandar-bandar lokal atau regional di sepanjang DAS Karama di masa lalu.

Keberadaan Sungai Karama ini yang membelah Mamuju tersebut membuka keterisolasian situs-situs yang terdapat di pedalaman Kalumpang. Sungai Karama berhulu di sekitar Pengunungan Toraja dan bermuara di Selat Makassar (Tanjung Mandar) hingga sekarang masih menjadi sarana transportasi utama penduduk pedalaman Kalumpang dan sekitarnya jika hendak ke kota Mamuju. Besarnya peran sungai Karama dalam penghunian daerah di sepanjang DAS Karama tersebut terlihat jelas polanya, yaitu cenderung berada di sekitar tepian sungai. Pola ini tentunya tidak tercipta sekarang, tetapi juga dalam kehidupan pada masa prasejarah (Simanjuntak 1994:2).

SITUS-SITUS DI SEPANJANG DAS KARAMA

Situs-situs yang akan diuraikan di bawah ini tidak terbatas pada situs dari masa prasejarah tetapi juga dari masa yang lebih muda (sejarah). Hal ini dilakukan untuk mencari benang merah kesinambungan penghunian di sepanjang daerah aliran Sungai Karama, sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya migrasi manusia, kontak perdagangan atau

difusi budaya yang pernah terjadi di masa lalu. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan pengamatan terhadap situs-situs dan lingkungannya.

a. Situs Sempaga

Situs ini terletak persis di muara Sungai Karama atau berjarak kurang lebih 90 km dari Kalumpang dan merupakan tempat penemuan sebuah arca Budha yang bahannya terbuat dari perunggu. Temuan ini oleh para ahli arkeologi dianggap sebagai arca Budha tertua yang pernah ditemukan di Indonesia. Arca tersebut bergaya Amarawati yaitu gaya arca yang berkembang di India Selatan sekitar abad II—V M yang biasanya dipakai sebagai Amulet bagi para pelaut. Jenis arca yang demikian juga ditemukan di Palembang dan Jawa Timur.

Kehadiran arca itu telah menjadi perdebatan para ahli sejarah dan arkeologi yang hingga kini masih belum terpecahkan. Pendapat yang berkembang mengatakan bahwa arca ini merupakan barang bawaan para pelaut India yang terdampar ketika melakukan perdagangan langsung dengan kerajaan-kerajaan pesisir dan pedalaman di daerah Kalimantan pada awal masehi. Sedang pendapat lainnya mengatakan bahwa arca ini merupakan bukti koeksistensi Siwa-Budha di pesisir barat Sulawesi dalam pengertian bahwa bangsa India sudah menjalin hubungan dengan suku-suku di pesisir barat tersebut. Khusus untuk para ahli arkeologi kehadiran arca Budha tertua ini telah menjadi perhatian khusus sehingga pada tahun 1930 AA.Cense melakukan penggalian di sekitar lokasi penemuan arca tersebut. Dari penggalian itu tidak ditemukan adanya bukti-bukti pendukung dari arca tersebut, bahkan dalam penggalian hanya ditemukan artefak dari masa yang lebih tua (neolitik), seperti fragmen gerabah, dan beliung persegi (Simanjuntak 1994:3). Terlepas dari masalah transformasi data dalam konteks ruang dan fungsinya, untuk sementara dapat menjadi indikator tertua tentang adanya pengaruh agama asal India di Sulawesi.

Jika didasarkan dari letaknya, yaitu di muara Sungai Karama, diduga situs ini pernah menjadi sebuah pelabuhan lokal, sebagai tempat pertukaran antara orang-orang dari pedalaman dengan orang-orang yang bermukim di

pesisir atau mungkin orang dari luar. Indikator yang mendukungnya selain ditemukan arca juga di situs tersebut ditemukan banyak fragmen tembikar dan beliung persegi.

b. Situs Bukit Kamasi

Situs ini berada di sebelah barat Desa Kalumpang atau berada di tepi sebuah kali kecil (Beto'ong) yang bermuara di Sungai Karama. Situs tersebut merupakan salah satu bukit yang menyatu dengan gugusan pegunungan yang ada di selatannya dengan ketinggian antara 70—110 meter dpl. Sebagian besar situs Kamasi telah berubah fungsi menjadi lahan perladangan penduduk untuk menanam palawija. Di sekitar bukit ini juga tumbuh berbagai vegetasi lain seperti, jati, kemiri, enau, dan lontoro (Balar Makassar 1999).

Dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan diketahui bahwa situs ini merupakan salah satu situs di daerah Kalumpang yang memiliki temuan yang cukup banyak. Penelitian situs ini dirintis oleh van Stein Callenfels pada tahun 1933 dengan mengadakan ekskavasi pada lereng bagian timur bukit. Penggalan itu berhasil mengumpulkan temuan yang cukup padat dan bervariasi, seperti alat-alat batu Hoabinhian, kapak batu, beliung, mata panah, dan fragmen gerabah (polos dan hias). Selanjutnya pada tahun 1949 van Heekeren melanjutkan penelitian di situs tersebut. Dari penelitiannya dikumpulkan temuan yang kurang lebih sama dengan jenis temuan sebelumnya. Hanya dalam penelitian van Heekeren itu temuannya lebih bervariasi, yaitu mata tombak, batu asah, pahat batu, batu pipisan dan alat pemukul kulit kayu (Heekeren 1972). Semenjak penelitian di atas, barulah pada tahun 1969 penelitian dan peninjauan situs tersebut dilanjutkan oleh Soejono dan Mulveney dan kemudian pada tahun 1970 kembali diteliti oleh Uka Tjandrasasmita dan Abu Rihdo. Di era 80-an hingga 90-an potensi situs tersebut kembali diangkat tercatat pada tahun 1987 dengan diteliti oleh tim mahasiswa arkeologi UNHAS, selanjutnya pada tahun 1994 Puslit Arkenas dan Balar Makassar mengadakan eksplorasi di situs ini. Terakhir,

tahun 1999 penelitian situs tersebut dilakukan oleh tim dari Balar Makassar.

c. Situs Patondokan

Berdasarkan namanya, situs ini disebut pemukiman di tepi lereng yang terletak di sebelah utara Kalumpang dengan ketinggian 275 dpl. Untuk mencapai situs ini diperlukan waktu \pm 1jam dengan berjalan kaki melalui jalan setapak pada beberapa bukit batuan yang ditumbuhi alang-alang. Vegetasi di situs tersebut adalah beringin, kemiri, kopi, enau, mangga, kelapa, dan beberapa tanaman palawija.

Indikator arkeologis di situs ini adalah beberapa umpak batu yang membentuk sebuah denah persegi panjang. Oleh penduduk Kalumpang dipercaya bahwa batu umpak ini adalah merupakan bekas pelandas tiang-tiang rumah dari nenek moyang mereka. Di sekitar umpak tersebut juga ditemukan beberapa artefak seperti fragmen tembikar polos, calon kapak, dan beberapa fragmen keramik asing (Cina dan Eropa). Dari variasi temuannya dapat diduga penghunian situs ini dilakukan secara berkesinambungan dari masa prasejarah hingga masa sejarah. Populasi manusia yang pernah mendiami situs tersebut kemungkinan tidak terlalu banyak, sebab secara kuantitas artefak yang ditemukan tidak banyak. Menurut informasi penduduk bahwa situs tersebut dianggap sebagai pemukiman awal dari nenek moyang mereka sebelum menetap di Kalumpang sekarang. Jika dikaitkan dengan variasi temuannya, maka hal tersebut ada benarnya sebab unsur calon kapak lonjong ditemukan di situs ini. Demikian juga jenis gerabahnya memperlihatkan unsur yang lebih sederhana dan juga diperkuat dengan tidak ditemukannya unsur beliung persegi.

d. Situs Gua Tabuun

Situs ini merupakan situs kubur yang berada pada ceruk Gunung Tabuun di sebelah utara Desa Lebani, Kecamatan Kalumpang. Orientasi ceruk menghadap ke selatan dengan ketinggian 650 meter dari permukaan laut. Pada permukaan ceruk dijumpai peti-peti mati yang berserakan, baik yang

masih utuh maupun yang sudah hancur atau lapuk. Bentuk wadah (peti) memiliki persamaan dengan peti mati yang ada di situs Loko Katappe yang terletak tidak jauh dari situs tersebut. Tipe wadahnya berbentuk perahu, rumah dan binatang. Hiasan yang dapat diamati yang tertera pada dinding wadah tersebut antara lain geometrik (menyerupai arah mata angin) yang umum ditemukan pada hiasan rumah orang Kalumpang (Balar Makassar 1999).

Adapun bekal kubur yang dapat diamati dari beberapa peti mati yang ada, yaitu keramik, gelang perunggu, gelang kerang, manik-manik, gading, gerabah, dan batu asah (Balar Makassar 1999). Selanjutnya dari pengamatan yang dilakukan terhadap peti-peti mati tersebut diketahui bahwa pada satu peti terdapat banyak tulang, yang berarti setiap peti dimakamkan lebih dari satu orang. Hal ini juga memberi petunjuk bahwa sistem penguburannya adalah secara tidak langsung (sekunder). Tradisi pemakaman seperti ini tidak berlanjut lagi. Dan berdasarkan informasi penduduk bahwa yang dimakamkan di situs tersebut adalah nenek moyangnya. Bahkan dari cerita rakyat setempat dikatakan bahwa nenek moyang mereka menyebar ke-6 penjuru, salah satu diantaranya ke daerah Toraja. Itulah sebabnya di daerah tersebut ditemukan juga tradisi penguburan ceruk.

e. Situs Minanga Sipakko

Situs ini berada di tepi persimpangan sungai kecil dengan Sungai Karama dan terletak kurang lebih 3 km ke hilir dari Desa Kalumpang. Situs tersebut merupakan sebidang tanah yang tidak diusahakan pada lereng perbukitan yang landai memanjang mengikuti arah sungai. Tampaknya sebagian dari situs ini sudah terkikis habis akibat erosi air sungai jika musim hujan. Berdasarkan sebaran temuan pada permukaannya, areal yang tersisa dari situs tersebut hanya mencapai radius kurang lebih 50 meter persegi yang dimulai dari pertemuan sungai kecil di sebelah timur ke arah baratnya (Simanjuntak, et.al 1994).

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap situs ini, baik yang dilakukan oleh Heekeren (1949) maupun yang dilakukan oleh Balar Makassar dan Puslit Arkenas (1994-1995), serta yang dilakukan oleh Mahasiswa Unhas (1987) telah diketahui bahwa situs tersebut merupakan salah satu situs di Kalumpang yang memiliki temuan cukup banyak seperti halnya temuan dari situs Kamasi, temuannya antara lain adalah fragmen kereweng (hias dan polos), beliung batu, kapak batu, pisau batu, pahat batu, serpih obsidian, batu giling, pemukul kulit kayu, batu asah, sisa tulang-tulang binatang, sisa arang, dan gelang tembaga (Simanjuntak, et.al 1994). Secara umum temuan tersebut dapat dibedakan menjadi tinggalan yang bercorak neolitik dan paleometalik. Tinggalan bercorak neolitik terdiri dari beliung persegi, kapak, pisau batu, dan serpihan obsidian, sementara temuan yang bercorak paleometalik antara lain berupa kereweng dan benda logam (1995: 11).

PEMBAHASAN

Situs-situs yang berada di DAS Karama khususnya Kalumpang sangat identik dengan masa bercocok tanam (neolitik). Sebab situs ini merupakan salah satu situs neolitik yang memiliki temuan paling lengkap di Indonesia. Oleh karena itu, situs neolitik Kalumpang tersebut menjadi barometer penelitian budaya neolitik di Indonesia bahkan di negara lainnya.

Dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa situs tersebut memiliki variasi temuan yang cukup banyak, khususnya temuan dari masa neolitik di samping temuan dari masa yang lebih muda (sejarah). Kehadiran dari beberapa jenis temuan itu memberi indikasi adanya interksi secara global di situs-situs DAS Karama. Jenis temuan yang dimaksud antara lain kapak lonjong, beliung persegi, gerabah, artefak logam, manik-manik dan keramik.

Khusus temuan kapak lonjong secara tekno-morfologis oleh ahli arkeologi dianggap temuan yang paling tua di antara temuan lainnya dari masa neolitik. Hal ini didasarkan dari berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan di Asia-Pasifik dimana kapak lonjong ditemukan pada lapisan

tanah yang menunjukkan pertanggalan antara 8000 tahun (Serawak) sampai 10.000 tahun yang lalu (Papua New Guine). Sedang pertanggalan temuan kapak lonjong dari Kalumpang, hingga sekarang masih menjadi permasalahan tersendiri, selain seringkali ditemukan di permukaan tanah berasosiasi dengan temuan lainnya, juga lapisan tanah situs-situs di sepanjang DAS Karama sudah mengalami gangguan akibat aktivitas perladangan penduduk sekitar dalam waktu yang cukup panjang. Untuk sementara pertanggalan yang dapat dijadikan standar adalah hasil penelitian geologi yang dilakukan oleh W.F. van Beers yang memberi petunjuk bahwa umur Kalumpang tidak lebih dari 1000 tahun yang lalu (Soejono 1984: 175). Dan pertanggalan terbaru tentang penghunian situs Kalumpang diperoleh dari hasil analisis laboratorium yang dilakukan oleh David Bulbeck terhadap temuan gerabah dan arang dari situs Minanga Sipakko yang menunjukkan pertanggalan antara 2500-1500 BP (Bulbeck and Nasaruddin 1999).

Persebaran kapak lonjong di Indonesia hanya terbatas pada bagian timur seperti Sulawesi (Sangihe Talaud), Flores, Maluku, Leti, Tanimbar, Kalimantan, dan Irian. Sedangkan di luar Indonesia tersebar luas meliputi, Birma, Cina, Manchuaria, Taiwan, Jepang, Philipina, India, Kep. Mikronesia dan Malenesia (Soejono 1984: 180). Atas dasar kapak lonjong tersebut, diduga Mamuju (Kalumpang) telah terlibat langsung dalam jaringan interaksi teknologi kapak lonjong yang berkembang di Asia. Temuan ini sampai di Kalumpang melalui jalur Utara yang dimulai dari Cina atau Jepang melewati Taiwan, Philipina hingga Indonesia dan terus ke Melanesia (Soejono 1984; Nurani 1993:2). Pendukung budaya tersebut hingga sekarang masih belum jelas asalnya. Terlepas dari siapa pendukungnya manusia pembawa tradisi kapak lonjong tersebut juga telah mengenal teknologi pembuatan gerabah dengan teknik pilin dan juga mengenal cara pembudidayaan tanaman (keladi dan sagu) serta sudah menjinakkan hewan (babi, unggas dan anjing) yang merupakan jenis hewan yang berasal dari Asia Tenggara Daratan (Soejono 1984: 181).

Selanjutnya artefak yang paling menonjol dari situs-situs di sepanjang DAS Karama adalah Beliang persegi. Beliang persegi di Indonesia maupun daerah lain di Asia Tenggara juga selalu menjadi temuan paling dominan. Jenis temuan tersebut identik dengan persebaran atau migrasi bangsa Austronesia ke Kepulauan Indonesia, karena beliang persegi adalah produk teknologi dari bangsa tersebut (Duff 1970; Sofion 1989; Nurani 1993).

Di situs-situs DAS Karama beliang persegi sangat banyak ditemukan dan umumnya terbuat dari batuan sekis yang berwarna kehijauan, batu lempung dan batu sabak yang banyak tersedia disekitar situs. Secara morfoteknologi beliang persegi dari situs tersebut cukup bervariasi, namun ada juga memperlihatkan bentuk yang memanjang persegi dengan tajaman yang monofasial (Simanjuntak 1994: 15). Bentuk beliang yang demikian disebut beliang sederhana yang merupakan tipe umum diantara tipe beliang yang ada (Duff 1970). Dari beberapa penelitian yang dilakukan terhadap situs-situs di DAS Karama telah diketahui bahwa variasi beliang persegi yang berkembang di situs tersebut adalah jenis beliang bahu, beliang biola, dan beliang tangga serta beliang sederhana. Khusus beliang bahu di Indonesia hanya ditemukan di situs Kalumpang, sedang di Asia ditemukan di Cina, Jepang, Taiwan dan Philipina (Soejono 1984:178; Simanjuntak 1994).

Secara umum beliang persegi hampir ditemukan di seluruh wilayah Indonesia, namun yang menjadi pusat perkembangan adalah di Indonesia bagian Barat. Hal yang paling menarik dari perkembangan beliang persegi di Indonesia adalah ditemukannya pusat perkembangan tradisi beliang di Kalumpang. Kehadiran tradisi beliang persegi di situs-situs DAS Karama diperkirakan sampai melalui jalur kedua (menurut von Heine Galdren), yaitu Kalimantan, Sulawesi (Kalumpang), Philipina, Taiwan hingga Jepang. Sampainya tradisi beliang di situs Kalumpang sehingga banyak ahli arkeologi yang menduga bahwa situs tersebut merupakan salah satu pusat perkembangan di Asia. Selain frekuensinya sangat tinggi juga di sekitar situs banyak tersedia bahan bakunya serta beliang umumnya ditemukan bersama-sama dengan batu asah yang dianggap sebagai alat untuk menghaluskan atau melicinkan beliang tersebut. Dengan Indikasi itu, maka sangat

kelas Kalumpang adalah sebagai pusat perkembangan beliung di Indonesia, bahkan Solheim menduga juga bahwa Kalumpang merupakan pusat persebaran bangsa Austronesia di samping Philipina dan Mikronesia (Nurani 1993; Solheim II 1973).

Selanjutnya artefak yang juga banyak ditemukan di situs-situs di sepanjang DAS Karama ialah gerabah. Dari berbagai penelitian dan analisis yang pernah dilakukan diketahui bahwa gerabah yang berkembang di situs-situs DAS Karama secara morfo-teknologi menunjukkan adanya 2 fase pembuatan, yaitu gerabah jenis proto-neolitik dan paleometalik. Proto-neolitik dicirikan dengan bagian permukaan polos dan berhias gores berupa garis-garis pendek dan pola lingkaran. Sedang yang berciri paleometalik permukaannya berhias dengan pola geometris (tumpal, meander, segi empat, pilin, titik). Dari jejak teknologi, tipologi, dan konteksnya diketahui bahwa tradisi pembuatan gerabah yang berkembang di Kalumpang dan sekitarnya telah memiliki persamaan dengan jenis gerabah yang ada di kompleks Sahuyhn Kalanay (Vietnam) dan Bau Malayu (Philipina). Persebaran teknologi gerabah Kalumpang hampir ditemukan pada semua situs neolitik di Sulawesi Selatan, bahkan hingga sekarang masih dapat dijumpai industri gerabah di daerah Takalar. Selain Kalumpang sebagai pusat perkembangan kedua tradisi pembuatan gerabah tersebut, juga ditemukan pusat pembuatan gerabah yang sejenis di situs Buni (Jawa Barat) dan Gilimanuk (Bali). Wilayah persebarannya di Indonesia juga luas. Demikian halnya di Asia Daratan tersebar di beberapa situs seperti, Muangthai, Philipina, Vietnam, dan Cina.

Artefak lain yang ditemukan di situs-situs DAS Karama yang menunjukkan adanya persamaan dengan temuan sejenis di situs lain di Asia-pasifik adalah artefak logam. Adapun artefak logam yang ditemukan di situs Kalumpang dan sekitarnya berupa gelang perunggu (6 buah) dan gelang tembaga (2 buah). Gelang perunggu tersebut ditemukan dalam konteks sebagai bekal kubur di situs Tabuun. Ukuran diameternya rata-rata 7.2 cm dan tebalnya 4 mm dengan bentuk melingkar yang kedua ujungnya meny-

tu. Bagian dalamnya rata dan bagian luarnya cembung tanpa hiasan. Temuan ini berasosiasi dengan temuan lainnya seperti manik-manik kaca, keramik, dan gelang dari kerang (Balar Makassar 1999). Gelang tembaga merupakan temuan dari situs Minanga Sipakko yang merupakan koleksi pribadi dari bapak Pendeta Kalumpang, memiliki ukuran diameter masing-masing 6.5 dan 7.5 cm, tebal 1 cm. Pada permukaan gelang tersebut terdapat hiasan bermotif lingkaran. Motif semacam ini sangat umum dalam hiasan budaya Dongson, bahkan dalam budaya perunggu Eropa (Simanjuntak 1995: 24). Keberadaan gelang logam ini jelas memberi petunjuk bahwa masyarakat pendukung budaya Kalumpang telah melakukan interaksi secara langsung dengan daerah asal dari temuan tersebut, apakah ditempuh melalui kegiatan perdagangan (pertukaran) atau mungkin sebagai pemberian. Karena hal ini sudah lazim dilakukan pada masyarakat kuno di dunia (Marcel Mauss 1992). Selain gelang logam dari masa paleometalik tersebut, di situs Sikendeng, Sempaga juga ditemukan artefak logam dari masa yang lebih muda (klasik), yaitu sebuah arca Budha dari bahan perunggu yang memiliki ciri ikonografis bergaya amarawati merupakan gaya arca yang berkembang di India pada abad II-V M. Keberadaan temuan tersebut walaupun belum jelas tetapi untuk sementara telah memberi indikasi adanya pengaruh agama asal India yang sampai di pesisir barat Sulawesi. Dengan demikian kemungkinan Sulawesi (Mamuju) pernah menjadi salah satu daerah tujuan persebaran agama Budha seperti halnya yang berkembang secara global di Asia.

Selain temuan-temuan tersebut di atas, di situs-situs DAS Karama juga ditemukan manik-manik dan keramik yang menunjukkan pengaruh budaya luar (*Alloctone*). Khusus manik-manik, di situs Tabuun ditemukan dalam konteks kubur. Temuan tersebut berasosiasi dengan temuan bekal kubur lainnya, seperti gelang perunggu, gelang kerang, dan keramik. Bahan manik-manik ini terbuat dari bahan kaca yang berwarna coklat dan biru (Balar Makassar 1999). Jika berdasarkan konteksnya, temuan manik-manik tersebut kemungkinan dari masa paleometalik, sebab ditemukan bersamaan dengan artefak logam. Umumnya manik-manik kaca dari masa paleo-

metalik yang ditemukan di Indonesia selalu berkaitan dengan konteks kubur (sebagai bekal kubur). Fungsi umum manik-manik adalah sebagai perhiasan, benda pusaka, dan alat jual-beli (alat tukar). Oleh sebab itu, manik-manik hanya dimiliki orang-orang yang berstatus sosial tinggi atau kaya. Indikasi tersebut dapat terlihat pada situs Tabuun dimana dari beberapa peti mati yang ada, hanya satu peti yang ditemukan adanya manik-manik. Bahkan ada peti yang bekal kuburnya cuma berupa gerabah. Ini berarti bahwa masyarakat pendukung budaya Kalumpang sudah mengenal sistem pelapisan sosial. Manik-manik kaca pada masa perundagian di Indonesia memperlihatkan daerah persebaran yang luas begitupula di Asia dan Eropa. Oleh sebab itu, keberadaan manik-manik di Situs Tabuun dapat dijadikan sebagai indikator perdagangan atau kontak budaya yang berlangsung dimasa lalu, khususnya masyarakat pendukung budaya Kalumpang dengan daerah lainnya. Adapun keramik yang ditemukan pada situs-situs Das Karama hanya terbatas pada situs Tabuun dan Pattondoka. Kehadiran keramik di kedua situs tersebut memberi petunjuk bahwa penghunian situs tersebut berlangsung hingga masa sejarah. Temuan ini satu konteks dengan temuan lainnya, antara lain artefak batu, logam, kaca, maupun tanah liat. Berdasarkan atribut kuat yang dimiliki oleh beberapa keramik yang ditemukan itu telah diketahui daerah asal pembuatan dan jamannya, yaitu Cina (Ming dan Ching) dan Eropa (abad XIX M). Dengan demikian sangat jelas bahwa masyarakat yang bermukim di sekitar Kalumpang hingga masa sejarah masih tetap menjalin hubungan dengan masyarakat lainnya, apakah dengan masyarakat pesisir barat Mamuju sendiri atau dengan masyarakat dari daerah lain.

Seperti yang diutarakan pada bagian terdahulu bahwa di Kalumpang selain ditemukan artefak yang merupakan perkembangan budaya dari luar (*Allochtone*) juga ditemukan artefak yang memperlihatkan ciri khas perkembangan budaya lokal (*auchtone*). Jenis artefak itu, antara lain mata panah dan mata tombak yang upam halus serta pisau batu. Keseluruhan artefak ini hingga sekarang belum pernah dilaporkan adanya jenis temuan

yang sama pada daerah lain, baik di Indonesia maupun di negara lain. Keberadaan temuan tersebut dengan sendirinya pendukung budaya yang berkembang di kalumpang memiliki identitas budaya tersendiri.

PENUTUP

Dari berbagai jenis artefak yang telah dikemukakan di atas, khususnya yang ditemukan di situs Das Karama, Mamuju, menunjukkan bahwa Kalumpang (Mamuju) dengan letak geografisnya merupakan sebuah titik pertemuan atau persilangan budaya khususnya di masa neolitik maupun masa sejarah. Secara khusus, artefak neolitik-paleometalik yang ditemukan secara global di Asia-Pasifik maupun Eropa. Hal ini memberi indikasi bahwa interaksi antara satu pendukung budaya di masa tersebut telah berlangsung secara intensif, namun perkembangannya berbeda tergantung kondisi geografis dimana unsur budaya tersebut ditradisikan atau bertahan. Oleh sebab itu, walaupun ras yang berkembang di Asia Tenggara atau secara khusus di Indonesia boleh dikatakan sama (Austronesia dan Mongoloid) tetapi karena adanya perbedaan geografis yang nyata sehingga melahirkan unsur-unsur budaya baru yang pada gilirannya telah membentuk etnis maupun sub-etnis tersendiri.

Kenyataan ini dapat dilihat atau disaksikan dimana di beberapa daerah di Nusantara boleh dikatakan memiliki kesamaan sebagai pusat persilangan berbagai peradaban besar seperti, Islam, Kristen, Hindu-Budha namun tetap saja melahirkan etnis maupun sub-etnis yang berbeda (Jawa, Bugis, Melayu, Batak, Dayak, dll). Kesemuanya ini tidak lain karena adanya perbedaan geografis, yang pada prinsipnya sebagai faktor utama mendorong lahirnya daya kreasi-inovasi setiap kelompok manusia pada setiap *setting* lokasi tertentu yang berlangsung cukup lama dan berevolusi serta beradaptasi.

Oleh karena itu, Indonesia dalam situasi dan kondisi sekarang dimana ada kecenderungan mengarah pada perpecahan bangsa (*disintegrasi*), maka arkeologi dituntut untuk berperan dalam mengatasi hal tersebut. Walaupun kita sadari bahwa diantara daerah di Nusantara memang terdapat perbedaan

yang nyata, namun dikaitkan dengan ras yang berkembang di Indonesia atau Asia-Tenggara memiliki kesamaan. Maka di sini arkeologi dapat menampilkan artefak-artefak yang memiliki ciri global, seperti yang telah diutarakan pada makalah ini, dimana artefak yang ditemukan di Kalumpang dan sekitarnya telah menunjukkan ciri global disamping terdapat unsur budaya lokal. Tentunya dengan cara ini dapat memberi sedikit kesadaran nasionalis yang kuat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Bulbeck, David and Nasruddin

1999. "Description and preliminary analisis of the Minanga Sipakko pottery, Mamuju, South Sulawesi, Indonesia", Paper dalam **PIA VIII** Yogyakarta.

Budi Santoso, Halina

1986. "Kemungkinan dan keterbatasan nisan kubur masa Indonesia Islam sebagai indikator pemukiman, studi banding pendahuluan", **PIA IV**, Cipanas, Jakarta: Puslit Arkenas

Balar Makassar

1999. **Laporan Survei Situs Prasejarah Kalumpang**, Makassar: Balar Makassar.

Duff, Roger

1970. "Stone Adzes from Southeast Asia: An Illutrated Typology", **Bulletin**, no. 3. Canterbury Museum.

Heekeren, H.R. van

1972. **The Stone Age of Indonesia**, The Hague: Martinus Nijjhof.

Lohanda, Mona

1999. "Studi minoritas dalam spektrum kajian sejarah Indonesia", dalam Henri Chambert Loir, Hasan Muarif Ambary (Ed.): **Panggung Sejarah (Persembahan kepada Prof. DR. Denny Lombard)**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mauss, Marcell (terjemahan Suparlan)

1992. **Pemberian: Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nurani, Indah Asikin

1993. "Persebaran tradisi beliung persegi dan kapak lonjong perpaduan di Kalumpang", **Berkala Arkeologi**, Tahun XIII No.1, Yogyakarta: Balar Yogyakarta.

Soejono, R.P. (Editor)

1984. **Sejarah Nasional Indonesia I**, Jakarta: Balai Pustaka

Simanjuntak, Truman

- 1994-1995. "Kalumpang: Hunian Sungai Bercorak Neolitik-Paleo-metalik di Pedalaman Sulawesi Selatan" **Aspek-aspek Arkeologi Indonesia No. 17**, Jakarta: Puslit Arkenas

Simanjuntak, Truman, et.al

1994. **Laporan Penelitian Kalumpang**, Jakarta: Puslit Arkenas.

Sofion, Hendari

1989. "Tradisi neolitik Indonesia dalam perbandingan dengan Asia Tenggara", **PIA V**, Jakarta: Puslit Arkenas.

PENELITIAN ARKEOLOGI DALAM PERSPEKTIF GLOBAL

Diman Suryanto

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan judul yang diajukan, makalah ini mencoba melihat penelitian arkeologi dalam perspektif global. Uraian makalah akan berupa jabaran garis besar tentang orientasi penelitian arkeologi dalam menghadapi fenomena penduniaan (globalisasi) yang sebentar lagi akan melanda berbagai aspek kehidupan bangsa.

Penelitian arkeologi dalam makalah ini adalah upaya untuk mengkaji dan kemudian merekonstruksi kehidupan manusia masa lampau melalui peninggalan materi yang tersisa. Mengenai apa yang harus direkonstruksi itu dengan sendirinya mencakup segala aspek kehidupan masa lalu atau singkatnya kebudayaan. Sistem global adalah sistem nilai budaya yang berlaku secara global. Sistem ini digambarkan penuh dengan persaingan dan kebebasan. Persaingan dalam merebut sumber daya dan kebebasan dalam memilih merupakan tuntutan sistem budaya ini. Pada sisi lain peluang untuk merebut masa depan diperlukan kemampuan dan daya saing yang tinggi. Dalam menghadapi tantangan globalisasi sekarang ini, perlu upaya antisipasi terhadap dampak yang akan timbul antara lain adalah perubahan tata nilai budaya dalam bentuk seleksi, adopsi, dan adaptasi nilai-nilai budaya luar

untuk dapat dipadukan dengan tata nilai budaya baru, tanpa kehilangan nuansa nilai semula (Nurhadi 1997).

Masalah aktual yang akan dicoba, dicari solusinya adalah menghadapi tantangan globalisasi yang akan melanda berbagai aspek kehidupan bangsa: apa sumbangan dan bagaimana peranan arkeologi bagi bangsa untuk memanfaatkan berbagai peluang yang menguntungkan namun sekaligus juga menangkal dampak negatis yang timbul. Masalah tersebut hakekatnya mempertanyakan kemaknaan (*significancy*) dan relevansi arkeologi bagi kehidupan bangsa pada umumnya dan pembangunan nasional pada khususnya. Tantangan tersebut juga bermakna pula sebagai acuan bagi arah pengembangan arkeologi Indonesia sebagai suatu disiplin.

Masalah kemaknaan dan relevansi arkeologi dalam kehidupan bangsa pada hakekatnya adalah masalah penelitian berwawasan pemanfaatan, dan masalah tanggung jawab arkeologi. Tanggung jawab arkeologi Indonesia adalah melaksanakan kebijakan pembangunan bidang kebudayaan, seperti yang telah dirumuskan dalam GBHN. Hal tersebut untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, jati diri dan kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri, kebangsaan nasional, serta memperkukuh jiwa persatuan dan kesatuan sebagai pencerminan pembangunan yang berbudaya.

Dengan demikian tanggung jawab yang sangat penting dalam penelitian arkeologi adalah mengaplikasikannya untuk pembangunan nasional dan kepentingan masyarakat. Penelitian arkeologi sudah saatnya diletakkan pada perspektif yang lebih luas atau perspektif global, tidak hanya untuk kepentingan akademik, namun juga untuk kepentingan ekonomik dan ideologi. Dalam rangkaian manajemen sumberdaya arkeologi, penelitian arkeologi diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan sekaligus acuan bagi aktivitas pembangunan (Diman Suryanto 1996). Selanjutnya hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang pada umumnya diterjemahkan ke dalam peningkatan intensitas pembangunan fisik di berbagai jenis kegiatan (Salim 1986:125).

2. GLOBALISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT.

Seperti yang telah disinggung di bagian depan, bahwa globalisasi adalah sistem nilai budaya yang berlaku secara mendunia atau global. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) dalam PIA VIII tahun 1999 di Yogyakarta menyatakan bahwa dampak fenomena globalisasi dalam ilmu dan teknologi modern akan mengimbas pula kepentingan di Indonesia. Oleh karena itu sumbangan ilmu-ilmu sosial budaya khususnya arkeologi sangat penting untuk dijadikan penyaring, pemilah, dan pemilih pelbagai corak kemajuan yang sesuai dengan kejiwaan bangsa kita.

Sejalan dengan pernyataan Menristek tersebut, perlu segera ditingkatkan upaya menumbuhkan pengertian dan persepsi masyarakat mengenai kemaknaan arkeologi, kita akui bersama bahwa masyarakat pada umumnya belum mema'ami sepenuhnya kemaknaan arkeologi dalam kehidupan.

Pada sisi lain upaya menumbuhkan pengertian dan persepsi masyarakat juga dapat dilakukan dengan pengenalan dini di kalangan para siswa tentang arkeologi dan kemaknaannya dalam kehidupan suatu bangsa. Untuk itu perlu dipikirkan inovasi-inovasi kurikuler dan proses belajar mengajar di sekolah yang dapat menampung "muatan" arkeologi. Peningkatan fungsi/kemaknaan seperti ini memang perlu dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan "harga jual" arkeologi dalam era globalisasi.

Tantangan globalisasi mengharuskan dilakukannya berbagai perubahan baik di sektor pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya. Pada sektor ekonomi misalnya, dalam waktu dekat akan diberlakukan pakta ekonomi regional AFTA tahun 2003 dan APEC tahun 2020. Pada sisi lain struktur pemerintahan harus pula dimodifikasi (baca dirubah) agar lebih sesuai terhadap perubahan yang akan terjadi. Perubahan tersebut adalah dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju ke bentuk pemerintahan yang memberikan otonomi kepada daerah lebih luas seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang diharapkan dapat dimulai pada tahun 2001 yang akan datang.

Menghadapai berbagai perubahan tersebut, arkeologi sebagai suatu disiplin ilmu budaya harus mampu mengkondisikan diri (siap menerima berbagai perubahan) yang akan segera terjadi, tanpa meninggalkan misi arkeologi yang sebenarnya yaitu membangun informasi arkeologi dan sejarah budaya bangsa (Harry Widiyanto 2000).

Dengan demikian, 5 (lima) tema utama orientasi penelitian yang telah dirumuskan tahun 1993 di Kaliurang (Yogyakarta) dan dipertegas di Palembang tahun 1994 yang terdiri : "*proses dan aliran migrasi nenek moyang dan keturunannya, proses persentuhan budaya Nusantara dengan tradisi besar (Hindu, Budha, Islam, dan Eropa), adaptasi kultural budaya lokal yang diperkaya oleh anasir budaya luar (local genius), proses terjadinya diversifikasi kultural, serta proses integrasi budaya*" ; harus dilaksanakan secara lentur dan bijak. Kelenturan dan kebijakan tersebut, misalnya: (1) melaksanakan 5 (lima) tema utama dan dikaitkan dengan mekanisme penelitian yang berwawasan pelestarian dan pemanfaatan terhadap hasilnya bagi kepentingan masyarakat luas, serta (2) mengkombinasikan dengan mengakses pola dasar pembangunan daerah, baik untuk kebijakan Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II.

Kebijakan tersebut dipilih dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional di era globalisasi. Hal ini sejalan dengan maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang menyatakan bahwa "Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan Nasional".

3. ORIENTASI PENELITIAN DAN MANFAAT ARKEOLOGI

Orientasi Penelitian

Seperti telah disebut pada bagian pendahuluan, yaitu pada pernyataan permasalahan disebutkan bahwa, menghadapi tantangan globalisasi, apa sumbangan arkeologi bagi bangsa dan bagaimana memanfaatkan berbagai peluang yang menguntungkan dan sekaligus juga menangkal dampak ne-

gatif yang timbul. Hal tersebut pada hakekatnya mempertanyakan kemaknaan arkeologi bagi kehidupan bangsa dan masyarakat. Tantangan tersebut juga bermakna pula sebagai arah pengembangan (orientasi) arkeologi Indonesia sebagai suatu disiplin.

Memperhatikan hal tersebut maka perlu pelaksanaan orientasi penelitian arkeologi yang dapat menghadapi : (1) tantangan globalisasi, (2) tantangan pengembangan kebudayaan nasional, (3) tantangan pembangunan, serta sekaligus (4) tantangan pengembangan akademik. Orientasi penelitian tersebut secara sederhana dapat dikatakan, bahwa tanpa mengurangi arti dan peran kajian arkeologi sebagai ilmu “murni” (kepentingan akademik) kiranya kajian-kajian arkeologi terapan, dimana sumbangannya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat perlu dikembangkan lebih mendalam dan meluas lagi. Kajian arkeologi terapan adalah penelitian berwawasan manfaat, seperti menghadapi berbagai tantangan tersebut di atas. Pada sisi lain hasil-hasil penelitiannya dapat menunjang berbagai kepentingan masyarakat antara lain kepentingan pembangunan, ideologi/geolitik, akademik, pariwisata.

Selanjutnya berikut ini akan diulas secara singkat kemaknaan dan relevansi arkeologi bagi kehidupan bangsa pada umumnya dan kehidupan masyarakat pada khususnya, karena pada dasarnya masyarakat (pihak non arkeologi) belum memahami sepenuhnya kemaknaan arkeologi dalam kehidupan.

Paparan di bawah ini diharapkan dapat menggambarkan seberapa jauh produk penelitian arkeologi untuk menunjang berbagai kepentingan masyarakat.

PEMASYARAKATAN MANFAAT ARKEOLOGI

Menunjang Kepentingan Akademik

Arkeologi dalam upayanya menelusuri (*trace back*) kebudayaan dan kehidupan masyarakat masa lalu dengan segala aspeknya, melalui tinggalan

materi yang amat terbatas telah merumuskan kebijakan umum penelitiannya ke dalam tiga tujuan pokok yaitu: (1) merekonstruksi sejarah kebudayaan, (2) merekonstruksi cara-cara hidup, dan (3) penggambaran proses budaya (Binferd 1972). Dalam melaksanakan tujuan pokok yang pertama, yaitu rekonstruksi sejarah kebudayaan, diperlukan data tentang berbagai bentuk kebudayaan materi yang ditemukan, kemudian menempatkannya pada ruang yaitu bidang geografi (peta) serta menyusun berdasarkan tarikhnya, maka dapatlah tergambar suatu persebaran dari bentuk-bentuk tinggalan arkeologi dalam dimensi ruang dan waktu. Tiga dimensi bentuk-ruang-waktu adalah merupakan tiga pilar utama (*three main pillars*) dalam penelitian arkeologi (Sharer dan Ashmore 1979; Mundardjito 1996)

Tujuan kedua, yaitu rekonstruksi cara-cara hidup masyarakat masa lalu dapat dicapai dengan memperhatikan aspek fungsi dengan cara menganalisis bentuk-bentuk tinggalan arkeologi, serta hubungannya satu sama lain dalam konteks temuannya. Kemudian disertai dengan keterangan-keterangan dari bahan etnografi dan sejarah, maka akan diperoleh rekonstruksi cara-cara hidup berupa sistem teknologi, sistem sosial, dan sistem ideologi masyarakat masa lalu.

Tujuan pokok ketiga, yaitu penggambaran proses budaya dapat dicapai dengan memahami proses dan perubahan budaya. Pencapaian kedua tujuan arkeologi tersebut yaitu merekonstruksi sejarah budaya dan rekonstruksi cara-cara hidup, sangat memungkinkan tercapainya tujuan ketiga tersebut.

Pencapaian tiga tujuan pokok (paradikma) arkeologi tersebut merupakan tanggung jawab arkeologi Indonesia pada arkeologi dunia, karena tiga tujuan arkeologi tersebut sudah disepakati oleh arkeologi dunia.

Dengan menggabungkan "payung penelitian arkeologi nasional" (5 tema utama penelitian) dengan "payung penelitian arkeologi dunia" (tiga tujuan pokok arkeologi), mudah-mudahan arkeologi Indonesia mampu melaksanakan misinya secara maksimal.

Menunjang Kepentingan Pembangunan

Penelitian arkeologi pada hakekatnya bertujuan memproduksi pengetahuan mengenai masa lampau, sedangkan masa lampau adalah komponen

penting dari kehidupan masa kini (Cleere 1989:5-6). Dengan prinsip tersebut sebagai landasan, maka pada dasarnya penelitian arkeologi dan sumberdaya budaya harus diorientasikan untuk melayani keinginan-keinginan masyarakat masa kini.

Berdasarkan keinginan masyarakat, kiranya dapat dirumuskan secara singkat bahwa penelitian arkeologi dan pengelolaan warisan budaya pada dasarnya ditentukan oleh tiga kepentingan pokok dalam pembangunan (Cleere 1989:5-10). Kepentingan pokok tersebut adalah; (1) kepentingan ideologi guna memantapkan identitas budaya yang berhubungan dengan pembangunan pendidikan. Titik berat pembangunan pendidikan dalam hal ini adalah peningkatan apresiasi dan pengertian kemaknaan arkeologi pada kehidupan bangsa dan masyarakat. (2) Kepentingan akademik terutama dalam hal pengembangan penelitian arkeologi. (3) Kepentingan ekonomi dalam hubungannya dengan pariwisata.

Menunjang Kepentingan Ideologi/Geopolitik

Kebangkitan nasionalisme yang mengakhiri kolonialisme di bekas negara-negara terjajah (termasuk Indonesia) telah mendorong peran positif arkeologi dalam menunjang kepentingan ideologi. Pada hasil penelitian, diletakkan harapan agar jatidiri budaya bangsa dapat diketahui sebagai landasan persatuan dan kebangsaan Nasional.

Pada sisi lain hasil penelitian dan sumberdaya arkeologi lainnya dapat dikaitkan dengan situasi geografis dan politik pemerintahan, khususnya dalam konsep wawasan Nusantara. Mengenai hal ini Richard L. Ford (1973) menyatakan bahwa nasionalisme tumbuh bersamaan dengan perhatian studi prasejarah. Bahkan ada satu fase dimana hasil-hasil penelitian dimanfaatkan sebagai bahan propaganda politik, sehingga muncul istilah *Nasionalisme archaeology* atau *political archaeology*.

Menunjang Kepentingan Pariwisata

Kepentingan pariwisata dalam kaitannya dengan pemasyarakatan peninggalan budaya suatu bangsa, secara khusus pernah disoroti dan mendiskusikan pada suatu seminar *Swiss-Indonesian Forum on Culture and International Tourisme* tahun 1994 di Lausanne (Haryati Soebadio 1996). Dalam kaitan dengan hal tersebut, betapa pariwisata di masa awal dikawatirkan sekali akan merusak tinggalan budaya suatu bangsa. Namun karena pariwisata sebagai industri memang diperlukan untuk mengumpulkan devisa negara, maka kemudian diupayakan untuk mengambil segi-segi positif kedatangan wisata asing pada suatu wilayah yang mengandung peninggalan sejarah budaya bangsa.

Kunjungan ke situs arkeologi atau museum, juga merupakan upaya pemahaman kesejarahan pada siswa sekolah usia muda (Cleere 1989:9). Hal tersebut juga berfungsi sebagai sarana peraga guna mengefektifkan proses belajar-mengajar (Macleod 1977). Obyek wisata budaya meliputi: museum-museum antropologi dan arkeologi, bagian-bagian kota yang bersejarah, situs-situs arkeologi, festival-festival kesenian dan upacara tradisional, dan berbagai kerajinan dan cendera mata yang berbau khas tradisi lokal (De Kadt 1977:15). Pada akhirnya melalui pengembangan sumberdaya budaya akan sangat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi regional (Braden dan Wiener 1980).

4. PENUTUP

Sebagai penutup dari semua yang telah dikemukakan, kiranya dapat disampaikan ringkasan bahwa masalah aktual dalam makalah adalah, menghadapi fenomena penduniaan (globalisasi), apa sumbangan arkeologi bagi bangsa, dan bagaimana arkeologi memanfaatkan peluang yang menguntungkan dan sekaligus menangkal dampak negatif yang timbul. Permasalahan tersebut pada hakekatnya mempertanyakan kemaknaan (*significansy*) arkeologi bagi kehidupan bangsa dan masyarakat di era globalisasi.

Tantangan tersebut juga bermakna pula sebagai acuan bagi arah pengembangan penelitian arkeologi Indonesia sebagai suatu disiplin. Pada sisi lain menghadapi perubahan global, diharapkan arkeologi mampu mengkondisikan diri (siap menerima dan menyesuaikan perubahan), sehingga rumusan kebijakan penelitian tidak semata-mata bersifat akademik, tetapi mengacu pada kepentingan masyarakat luas. Sehingga orientasi penelitian tidak hanya 5 tema utama (“payung penelitian arkeologi Nasional”) tetapi juga memperhatikan tiga tujuan (paradikma) arkeologi (“payung penelitian arkeologi dunia”), serta dikombinasikan dan dikaitkan dengan penelitian yang berwawasan pemanfaatan. Dengan mengacu pada berbagai orientasi tersebut, diharapkan arkeologi Indonesia menjadi mendunia. Orientasi Penelitian tersebut merupakan penyesuaian terhadap perubahan global.

Selanjutnya untuk meningkatkan apresiasi dan pengertian tentang ke-maknaan arkeologi, diberikan gambaran bahwa arkeologi menunjang berbagai aspek kehidupan seperti : peningkatan ekonomi dalam kaitannya dengan pariwisata, menunjang kepentingan pembangunan, akademik, ideologi/geopolitik dan lain-lain.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Anom, I.G.Ng.

1996 Pengamanan Benda Cagar Budaya, Jakarta : **PIA VII**, Proyek Penelitian Arkeologi. (jilid 2)

Anonim

1999 **Undang-Undang Otonomi Daerah**, Jakarta : Sinar Grafika

Binford, L.R.

- 1972 **An Archaeological Perspective**. New York and London : Academic Press.

Braden, Paul V. dan Louise Wiener

- 1980 "Bringing Travel, Tourism, and Cultural Resource Activities in Harmony With Regional Economic Development" dalam **D.E. Hawkins (ed). Tourism Marketing and Management Issues**, Washington DC : George Washington University.

Cleere, H.F. (ed).

- 1989 **Archaeological Heritage Management in the Modern World** London : Unwin Hyman.

Haryati Soebadio

- 1996 "Arkeologi dan Dinamika Masyarakat" **PIA VII** (jilid 2), Jakarta: Proyek Penelitian Arkeologi Jakarta.

Macleod, Donald G.

- 1977 "Peddle or Perish : Archaeological Marketing from Concept to Product Delivery", dalam Schiffer M.B dan G.J. Gumerman (ed), **Conservation Archaeology**, London : Academic Press.

Mundardjito

- 1996 "Perlukah Reorientasi Kebijakan Penelitian Arkeologi Indonesia?" **PIA VII**. Jakarta : Proyek Penelitian Arkeologi Jakarta, jilid 1.

Nurhadi

- 1997 "Arkeologi dalam Globalisasi Abad 21", **Cinandi**, Yogyakarta : Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra UGM.

Salim, Emil

1986 **Pembangunan Berwawasan Lingkungan**. Jakarta : LP3ES

Sharer, Robert J. dan Wendy Ashmore

1979 **Fundamentals Of Archaeology**. California : The Benjamin.
Cummings Publishing Company. Inc.

HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN PERKEMBANGAN ARKEOLOGI DI INDONESIA

Goenadi Nh.

I. PENDAHULUAN

Arkeologi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari arkeologi di dunia, baik kemunculannya maupun perkembangannya. Munculnya arkeologi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari masa kolonial Belanda, karena kemunculannya sebagai akibat dari salah satu aktivitas pemerintah kolonial tersebut. Demikian pula, awal perkembangannya. Menurut R.P. Soejono (1998: 7--13), arkeologi Indonesia dapat dibagi menjadi empat tahapan, yaitu tahap pencatatan, tahap institusional, tahap konsolidasi, dan tahap lanjutan. Pada tahap pencatatan masih bersifat deskriptif tanpa adanya koordinasi institusional, terjadi sekitar abad ke-18--abad ke-19. Perhatian terhadap benda-benda prasejarah muncul lebih awal. Tahapan ini ditandai pula oleh perhatian yang berciri ilmiah, khususnya yang bercorak Hinduis-tik berupa laporan deskriptif tentang kompleks Candi Prambanan oleh C.A. Alons pada tahun 1733 dan pengukuran Candi Prambanan yang dilakukan oleh Francois van Boeckholt. Kemudian dibentuk sebuah lembaga ilmiah yang dinamakan *Genootschap van Kunsten en Wetenscappen* pada tahun 1778.

Keanekaragaman penelitian pada abad ke-19 meliputi benda-benda prasejarah, candi, dan prasasti. Survei dan ekskavasi yang dilakukan pada waktu itu ditangani secara ilmiah dan bertujuan untuk mengetahui latar be-

lakang peninggalan-peninggalan tersebut. Untuk meningkatkan hasil kegiatan penelitian arkeologi didirikan panitia untuk meneliti dan melindungi peninggalan-peninggalan arkeologi pada tahun 1822 dan sebuah perkumpulan arkeologi (*Archeologische Vereeniging*) pada tahun 1875. Dengan demikian, Indonesia sebagai salah satu koloni negeri-negeri Barat di Asia Timur telah menerima dampak pertumbuhan *scientific archaeology* Eropa Barat pada abad ke-19.

Tahap institusional meliputi perkembangan arkeologi di Indonesia dalam paruh pertama abad ke-20. Pada tahap ini di Indonesia terjadi konsolidasi arkeologi dalam berbagai segi, yaitu teori dan konsep serta segi hukum dan organisasi yang pada abad ke-19 telah diterapkan di Eropa. Pada tahap perkembangan ini lahir suatu organisasi yang disebut *Commissie in Nederlandsch-Indie voor oudheidkundig Dienst op Java en Madura* pada tahun 1901 yang kemudian pada tahun 1913 namanya diganti menjadi *Oudheidkundige Dienst* (Dina Purbakala). Hasil yang menonjol dari tahapan itu berupa monografi candi seperti Borobudur, Candi Jago, Candi Singasari, sejarah kesenian Jawa Kuna, penemuan situs baru, berbagai macam peninggalan arkeologi, yaitu prasejarah, klasik, dan Islam, laporan berkala, peningkatan metode dan teknik kerja arkeologi.

Tahap konsolidasi berlangsung antara abad ke-20 sampai menjelang Perang Dunia II, yang pada tahapan itu prinsip arkeologi memiliki tujuan tegas, yaitu mempelajari keseluruhan peristiwa manusia di masa lampau. Dengan demikian, diperlukan koordinasi dalam penelitian dengan cabang ilmu-ilmu lain, antara lain geologi, paleontologi, linguistik, dan arsitektur. Selain itu, diterapkan pula metode dan teknik kerja dari Eropa Barat. Pada tahap ini ditandai oleh peristiwa administrasi dan politis dalam arkeologi, yaitu diundangkannya *Monumenten Ordonantie* pada tahun 1931. Pendidikan tenaga arkeologi yang mencakup bangsa Indonesia dimulai sejak jatuhnya pemerintah Jepang dan untuk pertama kalinya pula bangsa Indonesia menduduki jabatan tertinggi dalam Dinas Purbakala pada tahun 1953.

Tahap lanjutan dan penyempurnaan terjadi mulai tahun 1953 dan ditandai oleh perintisan bangsa Indonesia untuk mengembangkan arkeologi dengan sarana yang sangat terbatas. Dengan sarana yang sangat terbatas itu, maka diusahakan untuk mengejar keterbelakangan dengan usaha-usaha eksperimental di bidang analisis dan pengembangan konsep yang meliputi hampir setiap segi kegiatan arkeologi, antara lain pertanggalan, cara pendekatan data, teknik kerja lapangan dan laboratoris, pengembangan hipotesis, dan teori arkeologi. Pendidikan arkeologi dilakukan di beberapa universitas untuk membentuk kader yang akan menangani kegiatan arkeologi yang lebih luas. Berdasarkan perkembangan itu, pemerintah menganggap perlu untuk memisahkan instansi arkeologi menjadi dua unit besar pada tahun 1975, yaitu Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala agar masing-masing unit dapat lebih berkembang (Soejono 1998: 7--13).

Berdasarkan uraian tersebut diperoleh gambaran bahwa munculnya arkeologi Indonesia sebagai akibat penjajahan Belanda dan berkembang terus sampai sekarang ini. Dilihat dari perkembangan arkeologi secara umum, maka kelahiran arkeologi Indonesia dan perkembangannya terjadi pada penjajahan sampai dengan masa kemerdekaan, kemudian pada masa pascakemerdekaan sampai sekarang mengalami perkembangan lagi menyesuaikan perkembangan arkeologi dunia. Selama masa perkembangan yang pertama dan masa perkembangan selanjutnya tidak dapat dipisahkan dari pengaruh negara-negara lain, sehingga keadaan arkeologi Indonesia seperti yang dapat dilihat sekarang. Arkeologi Indonesia yang telah berumur sekitar 90 tahun, yaitu sejak lahirnya *Oudheidkundige Dienst* dan selama 47 tahun sejak dipegang oleh bangsa Indonesia, menunjukkan adanya perkembangan yang cukup berarti.

Sesuai arahan Direktur Jenderal Kebudayaan, terdapat beberapa faktor yang menunjukkan arah perkembangan penelitian arkeologi, yaitu pendekatan, polemik, tinjauan buku, terbitan luar negeri, forum internasional, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Sedyawati 1998: 7--8). Berdasarkan tujuh aspek arah perkembangan tersebut, pada dasarnya sebagai akibat ada-

nya hubungan dengan luar negeri, tetapi dalam kesempatan ini penulis ingin membahas kerjasama luar negeri yang meliputi kerja sama penelitian, pendidikan keade, terbitan ke luar, dan forum internasional. Faktor perkembangan lainnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu hasil dari hubungan kerja sama tersebut.

II. HUBUNGAN LUAR NEGERI

Meskipun secara resmi Belanda telah meninggalkan Indonesia, tetapi beberapa ahli arkeologi seperti H.R. van Heekeren, G.J. Bartstra, A.J. Bernet Kempers, J.G. de Casparis, dan yang terakhir P. van de Velde, sering datang ke Indonesia sesudah tahun 1953 untuk mengadakan penelitian dalam bidang mereka sendiri. Van Heekeren misalnya, seorang ahli Prasejarah sering datang selain melengkapi data prasejarah di Indonesia juga memberikan pendidikan secara tidak resmi kepada kader-kader prasejarawan Indonesia pada sekitar tahun 1970-an. Selain itu, Van Heekeren melakukan penelitian prasejarah antara lain di bengkel neolitik di Situs Kendenglermbu sekitar tahun 1960-an. Hasil akhir dari kunjungannya ke Indonesia itu, van Heekeren merevisi bukunya berjudul *The Stone Age of Indonnesia* dan *The Bronze Iron Age of Indonesia*. Kedua buku itu van Heekeren itu sampai sekarang masih digunakan oleh prasejarawan Indonesia, meskipun sudah agak ketinggalan apabila dibandingkan dengan munculnya temuan-temuan baru yang makin lama makin menumpuk.

Bartstra melakukan beberapa penelitian di sepanjang Kali Baksoko mulai tahun 1970-an dan menghasilkan buku yang berjudul *Contributions to the Study of the Palaeolithic Patjitan Culture, Java, Indonesia* yang terbit pada tahun 1976. Kempers, selama penelitiannya di Indonesia menghasilkan beberapa buku antara lain berjudul *Ancient Indonesian Art* yang diterbitkan tahun 1958 yang memuat tentang gambar-gambar relief candi dan dalam masa pensiunnya masih menulis buku yang terbaru *The Kettledrums of Southeast Asia. A Bronze Age world and its aftermath*, yang terbit pada tahun 1988, yang beberapa Bab dari buku itu mengulas tentang nekara pe-

runggu dari Indonesia. De Casparis menghasilkan tulisan besar tentang *Prasasti Indonesia* yang masih menjadi acuan para ahli epigraphi Indonesia sampai saat ini. Van de Velde yang datang ke Indonesia, khususnya penelitian Gunungwingko, Yogyakarta, pertama kali pada tahun 1982 dan yang kedua pada tahun 1985, yang jumlah kunjungannya tidak lebih dari dua bulan menghasilkan sebuah buku tentang prasejarah Indonesia meskipun buku tersebut disusun secara kompilatif. Selain itu, masih banyak penulis Belanda lain yang menulis arkeologi Indonesia meskipun dalam kunjungan yang relatif singkat, tetapi penulis-penulis tersebut menunjukkan kemampuannya dalam bidang *scientific writing*.

Selain hubungan penelitian lapangan dengan Belanda, dijalin pula hubungan kerjasama penelitian dengan beberapa ahli arkeologi dari beberapa negara antara lain Australia, Amerika, Perancis, dan Selandia Baru. Kerja sama penelitian dengan Australia pada umumnya merupakan ekskavasi gua-gua di luar Jawa, yaitu gua-gua di Sulawesi Selatan pada tahun 1960-an, situs prasejarah di Sangir Talaud pada tahun 1970-an, dan situs-situs gua di Maluku Utara dan Tengah sekitar tahun 1990-an. Ekskavasi gua di Sulawesi Selatan dilakukan oleh D.J. Mulvaney dan R.P. Soejono yang mewakili Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. Sebagai akibat dari kerja sama penelitian itu, menghasilkan laporan penelitian yang bagus dengan publikasi cukup menarik. Kerja sama antara Indonesia dan Australia selanjutnya terjadi sekitar tahun 1970-an di Sangir Talaud, kemudian diteruskan lagi pada tahun 1990-an di Maluku Utara dan Maluku Tengah di beberapa gua di daerah itu. Hasil penelitiannya dan publikasinya cukup bagus.

Kerja sama dalam penelitian lapangan dengan Amerika terjadi sekitar tahun 1970-an dengan The University of Pennsylvania Museum dengan sasaran situs-situs terbuka dan situs gua di Jawa dan Sumatera. Di Jawa penelitian dilakukan di Situs Ratu Baka sedangkan di Sumatera dilakukan di Palembang dan situs gua di daerah Jambi. Hasil kerja sama tersebut berupa teknik pelaksanaan kerja lapangan, khususnya survei dan ekskavasi dan mendapatkan contoh yang baik tentang cara-cara pengolahan data dan pem-

buatan laporan penelitian. Tahap selanjutnya dijalin hubungan kerja sama penelitian dengan University of Hawaii yang terjadi tahun 1970-an di beberapa situs gua di Irian Jaya. Keuntungan dari kerja sama tersebut adalah pengumpulan data dari daerah Indonesia bagian paling timur terhadap beberapa gua, antara lain gua-gua di Pulau Biak, Sorong, dan Fak-Fak.

Kerja sama dengan Perancis terjadi sekitar tahun 1980-an dan perhatiannya dipusatkan pada peninggalan prasejarah dari Plestosen Atas, khususnya aspek lingkungan alam dan aspek budaya. Kerja sama tersebut berlangsung terus hingga tahun 1990-an bahkan sampai tahun 2000. Pada periode itu, perhatian ditujukan pada situs-situs gua di daerah Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta. Hasil yang mencolok dari kerja sama tersebut adalah pertanggalan absolut dari situs-situs gua dari kedua daerah provinsi tersebut dapat diketahui dengan lengkap. Selain pertanggalan relatif, laporan penelitian, dan hasil penelitian cukup bagus. Dalam waktu yang hampir bersamaan dijalin pula kerja sama penelitian dengan University of Auckland, Selandia Baru, sekitar tahun 1990-an di daerah Jawa Timur dengan situs gua sebagai objek penelitiannya. Hasil penelitian ini pun menghasilkan pertanggalan absolut pada situs yang telah diekskavasi dan laporan cukup lumayan.

Uraian itu merupakan contoh kerja sama dalam penelitian lapangan dengan negara-negara Eropa, Amerika, Australia, dan Selandia Baru. Hubungan luar negeri selain penelitian lapangan, diwujudkan pula dalam bentuk pendidikan kader arkeologi Indonesia yang dikirim ke beberapa negara untuk memperdalam keilmuan. Negara-negara tersebut antara lain adalah Perancis, Amerika, dan Australia yang menghasilkan lulusan S-2 dan S-3. Tenaga arkeologi yang dikirimkan berasal dari beberapa instansi arkeologi dan perguruan tinggi. Kerja sama dalam bidang pendidikan dengan Perancis terjadi sejak sekitar tahun 1980-an dan berlangsung terus hingga tahun 2000. Kerja sama dengan Amerika dalam pendidikan kader terjadi sejak tahun 1980-an yang hampir bersamaan waktunya dengan pendidikan kade di Perancis. Hasil yang diperoleh adalah lulusan S-2. Pengiriman kade ar-

keologi ke Australia pada umumnya di Australian National University dan menghasilkan beberapa tenaga sarja lulusan S-2 dan S-3, baik dari instansi arkeologi maupun dari perguruan tinggi.

Terbitan luar negeri masih belum banyak dilakukan oleh peneliti arkeologi Indonesia. Sampai saat ini terbitan luar negeri oleh penulis Indonesia untuk artikel yang berbobot pada umumnya sebagai penulis kedua atau ke jenjang yang lebih kecil. Penulis artikel ke majalah ilmiah di luar negeri pada umumnya merupakan artikel berskala kecil sebagai hasil pertemuan ilmiah atau artikel terpisah. Beberapa arkeolog Indonesia sering mengikuti simposium, seminar atau yang sederajat dengan itu di luar negeri dalam skala ASEAN, Pasific-rim, Asia Pasifik, Nonblok, dan forum global. Pada umumnya peserta dan pemakalah pada forum internasional itu didominasi oleh beberapa arkeolog senior dan jarang diikuti oleh arkeolog semisenior, lebih-lebih yang berstatus junior.

III. PEMBAHASAN

Penjajahan masa lampau merupakan hubungan luar negeri tidak langsung dan salah satu dampak positifnya adalah kelahiran arkeologi Indonesia. Kondisi arkeologi Indonesia dan dunia pada saat kelahirannya bila dibandingkan dengan kondisi sekarang jauh berbeda. Perbedaan yang semakin sempurna itu disebut perkembangan. Pengamatan terhadap sejarah arkeologi dan proses perkembangannya yang telah diuraikan sebelumnya, menunjukkan bahwa peranan hubungan luar negeri tidak dapat dikesampingkan. Dalam rangka kerja sama penelitian lapangan makin meningkat. Sebagai contoh dapat dikemukakan, bahwa sistem spit yang digunakan dalam ekskavasi pertama kali diperkenalkan oleh Soejono kepada para mahasiswa pada tahun 1963 di Situs Gilimanuk masih digunakan sampai sekarang. Sistem spit itu kemudian diperkenalkan kepada para kader arkeologi dari seluruh Indonesia. Sistem tersebut diperkenalkan kepada para kader arkeologi dari seluruh Indonesia pada tahun 1972 di Situs Pasirangin, Bogor. Dalam waktu-waktu berikutnya sistem spit tersebut telah memasyarakat di kalangan arkeologi Indonesia sampai sekarang. Sebelum tahun 1960-an,

ekskavasi yang dilakukan menggunakan sistem layer yang pada umumnya diterapkan pada situs-situs prasejarah.

Pada sekitar tahun 1973, dilakukan kerja sama dengan The University of Pennsylvania Museum dengan tujuan untuk ekskavasi dan survei serta analisis temuan dan pembuatan laporan. Kegiatan penelitian tersebut dilakukan di Situs Ratu Baka pada tahun 1973, situs arkeologi klasik di Palembang, situs gua prasejarah di Jambi pada tahun 1974, dan penelitian di Rembang pada tahun 1975. Keuntungan yang diperoleh dari kerja sama tersebut adalah pengembangan sistem ekskavasi dan teknik pembuatan laporan. Sejak itu dikenal sistem lot dan pendalaman sistem layer dalam pelaksanaan ekskavasi di samping sistem spit dan cara-cara analisis artefak dan nonartefak lainnya. Pemetaan yang lebih sederhana untuk mengatasi keadaan darurat diperkenalkan *plain table* dan pemetaan paling sederhana dengan *pace and compass* dan cara penggambaran stratigrafi yang lebih terinci diperkenalkan pula pada waktu aktivitas itu

Dalam pendidikan kader arkeologi dalam negeri, khususnya pendidikan di Perguruan Tinggi, kedatangan J.N. Miksic pada sekitar tahun 1980-an sebagai tenaga pengajar di Jurusan Arkeologi U.G.M. juga dapat dianggap menyumbangkan andil dalam perkembangan arkeologi di Indonesia. Sebagai akibat dari mata kuliah yang diberikan oleh Miksic tersebut menghasilkan lulusan arkeologi yang lebih memahami teori dan metodologi dalam menghadapi fenomena arkeologi di lapangan dan sejak itu skripsi S-1 dari tahun 1980-an apabila dibandingkan dengan skripsi tahun-tahun sebelumnya terdapat perbedaan yang cukup mencolok terutama dalam hal teori, metodologi, dan analisisnya.

Pendidikan kader ke luar negeri dilakukan dengan cara mengirim beberapa mahasiswa ke Perguruan Tinggi. Tenaga tersebut berasal dari jurusan arkeologi dari beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia dan yang berasal dari instansi arkeologi untuk meningkatkan pengetahuannya ke beberapa negara Eropa, Amerika, dan Australia. Beberapa dari tenaga tersebut mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh untuk kepentingan penelitian arkeo-

logi, sehingga perkembangan arkeologi Indonesia lebih meningkat lagi. Di antara sarjana tersebut sebagaimana telah *go international* dan sebagian lagi masih berskala nasional dengan konsep pemikir yang lebih bagus. Beberapa sarjana yang telah *go international* tersebut memiliki pengetahuan tambah dalam forum internasional, tetapi masih jarang terbitan luar negeri yang memuat tulisan mereka, kecuali hasil pertemuan ilmiah. Mereka belum menulis buku tentang arkeologi Indonesia yang menjadi bidang studinya, sehingga kemampuannya belum dikenal oleh dunia.

Berdasarkan uraian itu, perlu dipertanyakan perkembangan penelitian arkeologi Indonesia apakah telah sesuai dengan ukuran perkembangan arkeologi di dunia internasional. Untuk mengetahui perkembangan itu perlu diketahui kualitas *actors* (pelaku/peneliti) atau sumber daya manusia. Paling tidak ada tiga hal pokok yang harus dimiliki oleh *actors* yang berkualitas dalam proses penelitian, yaitu logika, kognisi, dan skill. Logika memegang peranan yang sangat penting dalam proses penelitian, karena meliputi teori dan metodologi, sehingga logika dapat diibaratkan sebagai energi dari suatu penelitian. Apabila energi penelitian lemah, maka hasil penelitian yang diperoleh merupakan hasil yang lemah pula. Kritik terhadap logika tersebut banyak dilontarkan oleh ahli disiplin lain di luar arkeologi.

Keketatan konsep, ketelitian, dalam merumuskan hipotesa, dan konsistensi dalam metode penelitiannya merupakan hal-hal yang tidak dapat diabaikan sama sekali dan semuanya harus diperhatikan dengan seksama. Demikian pula halnya dengan prosedur dalam operasionalisasi konsep, pengujian hipotesa, dan penarikan kesimpulan. Hal-hal itu dianggap penting dan harus jelas bagi orang lain, agar pakar lain dapat menguji kembali hasil-hasil penelitian yang dikemukakan (Ahimsa-Putra 1998:1). Dalam penggunaan pendekatan, D.A. Tanudirjo (1987) meneliti pendekatan etnoarkeologi yang digunakan dalam pertemuan ilmiah dan skripsi, sampai pada suatu kesimpulan bahwa dua di antara 11 karya tulis menyebutkan model pendekatan, sedangkan sembilan karya tulis lainnya tidak menyebutkannya dan bahkan sifat kesinambungan budayanya masih samar-samar yang

mengakibatkan tidak dapat dinyatakan secara eksplisit. Pernyataan eksplisit tersebut sangat penting dalam penelitian, terutama dalam proses penelitian (Tanudirjo 1987: 56--7).

Pendekatan lain yang diusulkan adalah pendekatan strukturalisme yang dipelopori oleh Claude Levi-Strauss ahli antropologi bangsa Perancis. Pendekatan itu diusulkan untuk mengatasi kelemahan Arkeologi Baru yang dianggap kurang memperhitungkan bahwa benda-benda arkeologi juga makna dari pembuatnya atau pemilikinya di masa lampau dan benda-benda tersebut juga merupakan simbol. Alasan kedua tentang penerapan penggunaan pendekatan tersebut adalah analisis yang lebih simbolis dan semiotis pada umumnya tidak sangat eksplisit kerangka teorinya, sehingga kajian tidak mampu menghasilkan penajaman berbagai konsep arkeologi yang penting. Analisis struktural ala Levi-Strauss merupakan salah satu pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan situasi arkeologi di Indonesia, dan pendekatan tersebut tidak menuntut kecanggihan analisis material seperti dalam Arkeologi Baru (Ahimsa-Putra 1998: 2).

Kognisi dan *skill* pada umumnya telah dimiliki oleh para arkeolog Indonesia, terutama oleh arkeolog senior dan semisenior. Pengetahuan tentang temuan dari beberapa situs, keletakannya dalam periodisasi arkeologi, dan kemampuan mengingat temuan dari suatu situs cukup menonjol, tetapi kognisi arkeologi tidak berhenti sampai di situ. Pengetahuan untuk mensintesis suatu temuan dalam situs besar, masih sangat kurang. Apabila dalam suatu situs yang berskala lokal dan regional saja belum dapat diperoleh sintesanya, maka apabila dihadapkan pada situs-situs yang berskala kawasan akan lebih membingungkan. Oleh karena penguasaan kognisi perlu pula ditingkatkan. Sementara itu, seorang arkeolog tidak harus trampil dalam ekskavasi, tetapi harus memiliki ketrampilan lain, misalnya pemetaan. Seorang arkeolog harus menguasai teknik pemetaan dengan beberapa jenis instrumen, sehingga dapat mengarahkan kepada para penggambarannya dan apabila dalam keadaan terdesak harus mampu mengoperasikan instrumen tersebut.

Ketiga hal penting dalam penelitian arkeologi yang telah diuraikan itu, tidak dapat dipisahkan dari pembinaan yang terarah. Hubungan luar negeri hanya merupakan salah satu aspek dalam pembinaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana pembinaan arkeologi di Indonesia, khususnya pada Pusat Penelitian Arkeologi? Menurut hemat penulis, pembinaan yang dilakukan selama ini cenderung pada pembinaan administratif dan pembinaan kader belum mendapat porsi yang memadai. Salah satu contoh pembinaan kader sebaiknya dilakukan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengalami pelatihan di Pusat. Dalam pengamatan terhadap pembinaan tersebut, para CPNS kurang mendapatkan pengarahan tentang keilmuan dan pada umumnya diberi tugas untuk pembuatan label, sehingga pengetahuan ilmiah tambahan tidak mereka peroleh. Apabila hal ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dibenahi niscaya akan mengalami degradasi kader, terutama yang berkaitan dengan logika, kognisi, dan *skill*. Akibat kurangnya logika tersebut sampai saat ini pun belum pernah terbit sebuah buku mengenai arkeologi Indonesia yang ditulis oleh para arkeologi senior atau semisenior. Kalaupun ada buku-buku yang diterbitkan hasil beberapa penulis, khususnya yang terdapat pada Sejarah Nasional Indonesia.

Peningkatan kemampuan berbahasa asing harus ditingkatkan, karena selain sebagai alat komunikasi dalam hubungan luar negeri juga merupakan alat untuk menyampaikan hasil informasi penelitian pada majalah luar negeri agar arkeologi Indonesia lebih mendunia. Penguasaan bahasa asing sangat terasa pada kalangan arkeolog Indonesia, karena hanya beberapa orang saja yang telah menguasainya. Sebagai akibat dari kurangnya penguasaan bahasa asing tersebut, maka jarang artikel yang berbahasa asing hasil karya ilmiah arkeolog Indonesia terbit pada majalah-majalah arkeologi di luar negeri apabila dibandingkan dengan arkeolog dari negara tetangga seperti Malaysia, Philipina, dan Thailand. Sementara itu, penulis arkeologi Indonesia tidak mungkin habis mengingat sumber daya arkeologi di Indonesia sangat besar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, penerbitan majalah berbahasa asing, baik dalam negeri maupun luar negeri,

lebih-lebih penulis tunggal sebuah buku dapat dijadikan salah satu tolok ukur dalam perkembangan arkeologi di Indonesia.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut, tidak dapat diingkari bahwa arkeologi Indonesia telah mengalami perkembangan, khususnya disebabkan oleh adanya hubungan luar negeri sejak arkeologi Indonesia lahir hingga sekitar tahun 1960-an. Pada sekitar tahun 1970-an hingga tahun 2000 perkembangannya lebih meningkat lagi. Peningkatan perkembangan tersebut, selain unsur hubungan luar negeri juga adanya keinginan untuk maju dengan cara mengirim kader ke luar negeri untuk meningkatkan pengetahuan atau mendatangkan tenaga pengajar dari luar. Meskipun demikian, dalam masa perkembangan itu terdapat beberapa kelemahan yang menonjol, yaitu yang meliputi teori dan metodologi. Faktor lain yang dapat dianggap sebagai salah satu faktor penghambat perkembangan itu adalah penguasaan bahasa asing yang baru dikuasai oleh beberapa orang saja. Kelemahan-kelemahan yang menghambat perkembangan tersebut dapat diatasi dengan pembinaan ilmiah bagi para kader. Berkaitan dengan adanya kelemahan-kelemahan itu, pada kesempatan ini perlu diusulkan adanya beberapa hal. Pertama, kerja sama luar negeri perlu diteruskan dan ditingkatkan. Tidak perlu menunggu tawaran penelitian di Indonesia oleh orang asing, tetapi harus aktif untuk menawarkan kerja sama penelitian, baik di Indonesia sendiri maupun kerja sama penelitian di luar negeri. Dengan peningkatan kerja sama tersebut diharapkan diperoleh nilai tambah dalam kemampuan praktis di lapangan yang meliputi logika dan aspek lainnya. Kedua, pembinaan kader perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal teori, metode, dan penguasaan bahasa asing. Untuk itu perlu diadakan pelatihan-pelatihan, baik arkeolog yunior maupun bagi arkeolog lulusan sebelum tahun 1980-an yang merasa kemampuannya masih kurang. Pelatih dapat diambil dari tenaga-tenaga yang telah berhasil mencapai jenjang S-2 dan S-3, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Demikian ilmu yang telah diperoleh dapat di-

wariskan pada arkeolog lainnya yang belum sempat meningkatkan kemampuannya di luare negeri.

Penerbitan majalah berbahasa asing, misalnya Bahasa Inggris yang isinya lebih komprehensif dan bersifat internasional perlu segera diwujudkan dengan dewan redaksi dari beberapa institusi yang dipilih, agar sosialisasi hasil penelitian arkeologi segera mendunia. Hal tersebut tidak berarti mengecilkkan keberadaan *Aspect of Indonesian Archaeology*, tetapi menurut pengamatan penulis majalah tersebut distribusinya kurang luas dan isinya masih bersifat kasual dan belum meliputi tema besar dalam setiap edisinya. Distribusi majalah tersebut masih kalah dengan journal terbitan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei atau negara tetangga lain.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ahimsa-Putra, Heddy Shri.

1998. *Strukturalisme Levi-Strauss Untuk Arkeologi Semiotik. Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi Cipayung.*

Sedyawati, Edi.

1998. *Perangkat Penelitian Arkeologi dan Data Arkeologi. Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi Cipayung.*

Soejono, R.P.

1998. *Menuju Efisiensi Multidimensional Penelitian Arkeologi di Indonesia. Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi Cipayung.*

Tanudirjo, Daud Aris.

1987. **Laporan Penelitian Penerapan Etnoarkeologi di Indonesia.** Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**PROSES MIGRASI MASA PRASEJARAH :
SUATU HIPOTESIS BERDASARKAN KAJIAN LUKISAN CADAS
DI INDONESIA TIMUR**

Indah Asikin Nurani

I. PENDAHULUAN

Dalam tema utama penelitian arkeologi Indonesia yang telah terumuskan di Kaliurang, Yogyakarta tahun 1993 terutama tema pertama yaitu proses dan aliran migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dan keturunan-keturunannya sampai dengan tumbuhnya puak-puak, telah dilakukan penelitian oleh beberapa balai arkeologi dan Pusat Arkeologi. Namun kenyataannya hal tersebut sampai saat ini belum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, ada hal penting yang sebenarnya memiliki tingkat keabsahan yang tinggi namun belum dilakukan seoptimal mungkin yaitu kajian lukisan cadas yang sebagian besar berada di Indonesia Timur. Selain lokasi situs yang sulit dijangkau, minat peneliti dalam mendalami hal tersebut juga kurang. Sementara itu, prospek kajian lukisan cadas sebenarnya sangat tinggi mengingat kajian ini dapat membuka cakrawala baru untuk menyingkap proses migrasi nenek moyang khususnya pada masa prasejarah. Daud Aris Tanudirjo dalam makalahnya yang disampaikan pada Seminar Prasejarah I di Yogyakarta menawarkan

beberapa pendekatan yang dapat dikembangkan antara lain melalui pendekatan model normal, etnoarkeologi, arkeologi murni, linguistik-struktural, dan biologis-psikologis (Tanudirjo 1997).

Lukisan cadas sebagaimana diketahui merupakan perwujudan hasil seni manusia masa prasejarah yang sarat dengan simbol dan lambang. Dalam konteks demikian lukisan cadas dapat disejajarkan dengan fungsi bahasa yaitu sebagai media komunikasi budaya yang simbolis sifatnya. Lukisan cadas merupakan serangkaian simbol yang apabila dikontemplasikan akan dapat difahami maknanya, sehingga beberapa pesan yang tersembunyi yang diwujudkan dalam suatu motif dan tanda akan dapat diketahui dengan suatu kajian yang mendalam.

Selama ini penelitian yang telah dilakukan oleh Balar-balar berkaitan dengan kajian lukisan cadas menunjukkan belum luasnya publikasi maupun deskripsi secara lengkap. Hasil penelitian yang ada baru sebatas inventarisasi lokasi-lokasi temuan dengan menyebutkan motif-motif yang digambarkan. Pendeskripsian yang dilakukan masih sangat terbatas tanpa menyebutkan keletakan gambar dalam suatu gua/ceruk, selain itu belum juga disertai ilustrasi sebagai gambaran bagi pembaca mengenai bentuk lukisan cadas. Berdasarkan hal tersebut, tampaknya penelitian lukisan cadas di Indonesia masih dalam tahap awal. Dalam berbagai keterbatasan data sekunder yang terkumpul baik dari literatur maupun berbagai laporan penelitian, tulisan ini mencoba memberi gambaran mengenai proses migrasi yang berlangsung pada masa prasejarah, berdasarkan kajian lukisan cadas.

Di Indonesia lukisan cadas terutama ditemukan di bagian timur, antara lain di Sulawesi Selatan, Pulau Muna, Pulau Seram, Kei Kecil, Pulau Flores dan Lomblen, Timor Timur, dan Papua. Sampai sejauh ini pulau-pulau Indonesia bagian barat seperti Sumatera dan Jawa tidak ditemukan, sedangkan di Kalimantan baru-baru ini telah dilaporkan adanya situs lukisan cadas terutama di Kalimantan Timur dan Barat. Berdasarkan berbagai temuan lukisan cadas yang ada, tersirat adanya suatu runtutan baik dari segi kronologi maupun motif yang digambarkan. Hal tersebut menjadi indikasi

adanya alur yang melatarinya, sehubungan dengan proses migrasi yang terjadi.

Salah satu penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kajian lukisan cadas untuk mengetahui proses migrasi yang berlangsung pada masa prasejarah adalah penelitian pada gua-gua di Kalimantan Timur oleh Balai Arkeologi Banjarmasin yang bekerjasama dengan Pusat Arkeologi (Prasetyo 1997). Berdasarkan temuan lukisan cadas di wilayah Kalimantan Barat dan Timur yang dihubungkan dengan lukisan cadas di kawasan Timur serta di wilayah Asia Tenggara (Serawak, Thailand, dan Filipina), Bagyo Prasetyo mengajukan suatu hipotesis adanya jalur persebaran budaya lukisan cadas dari Asia Tenggara, Indonesia, dan Australia. Asumsi sementara menunjukkan ada 2 arus persebaran yaitu dari barat dan dari utara. Jalur barat ditunjukkan oleh temuan dari Kalimantan Barat dan Timur yang mungkin merupakan satu jalur dengan lukisan cadas dari wilayah Thailand Selatan dan Serawak. Selanjutnya persebaran tersebut menyeberang ke arah Sulawesi Tenggara, kemudian pecah menjadi 2 yaitu ke timur menuju Kepulauan Maluku terus ke Papua dan ke selatan menuju Flores (Lomblen) terus ke Timor Timur. Jalur utara dihubungkan dengan temuan lukisan cadas di Sulawesi Selatan dan Filipina (kemungkinan juga di Teluk Tomini yang diduga mempunyai data temuan lukisan cadas) yang kemudian bergabung dengan jalur dari barat untuk menuju ke arah timur.

Berbeda halnya yang diasumsikan oleh Koentjaraningrat (1995) berdasarkan temuan lukisan cadas yang sama di sebelah barat Papua seperti di Flores Barat dan Timor Barat. Hipotesis yang diajukan adalah adanya suatu daerah pengaruh dari penduduk Papua ke arah barat. Dugaan tersebut diperkuat dengan fakta bahwa fosil-fosil manusia yang ditemukan pada gua-gua di Flores Barat menunjukkan ciri-ciri Austro-Melanesoid. Berdasarkan hal tersebut, maka diperkirakan proses persebaran orang Austro-Melanesoid dari Papua ke kepulauan di sebelah barat daya dan kembali; persebaran orang Austro-Melanesoid dari Jawa ke barat dan utara sampai Vietnam Utara dan sebaliknya; persebaran orang Mongoloid dari Jepang melalui

Riukyu, Taiwan, dan Filipina ke Sulawesi dan kemudian percampuran ras (Austro-Melanesoid dan Mongoloid) dan kebudayaan di Sulawesi Selatan terjadi antara 10.000 -- 2000 SM.

Berkaitan dengan pembahasan proses migrasi, tidak terlepas dari persebaran manusia, dalam hal ini pendukung budaya yang sampai di Indonesia, hal ini telah disinggung oleh Koentjaraningrat sebagai dasar asumsi mengenai proses migrasi manusia. Penelitian paleoantropologi yang telah dilakukan berkenaan dengan migrasi yang sampai saat ini tetap diacu menunjukkan nenek moyang orang Indonesia dengan bukti-bukti rangka manusia adalah Austro-Melanesoid. Teuku Jacob (1967) menduga bahwa di zaman es yang terakhir kira-kira 800.000 tahun yang lalu, ketika Papua menyatu dengan Benua Australia penduduknya yang merupakan nenek moyang penduduk Papua, Melanesia, dan penduduk asli Australia memiliki ciri-ciri fisik Austro-Melanesoid. Ketika zaman es berakhir dan permukaan laut menjadi lebih tinggi, maka Australia terpisah dari Papua serta pulau-pulau Nusantara yang lain. Ciri-ciri penduduk Papua dan Melanesia berkembang menjadi ciri-ciri fisik ras Melanesoid yang kita kenal sekarang, sedangkan ciri-ciri fisik penduduk asli Australia berkembang menjadi ciri-ciri fisik ras Australoid sekarang. Adapun nenek moyang dari kedua ras itu, yaitu ras Austro-Melanesoid tersebut, masih sempat bermigrasi ke Kepulauan Nusantara bagian barat, dan ciri-ciri fisiknya masih tampak sisa-sisanya pada tengkorak manusia purba *Homo Wajakensis* yang ditemukan dalam penggalian di daerah Wajak di Jawa Timur yang menurut para ahli paleoantropologi hidup berkeliaran di Jawa Timur kurang lebih 400.000 tahun yang lalu. Pada masa selanjutnya, berdasarkan data rangka manusia yang ditemukan di gua-gua menunjukkan bahwa rangka manusia di gua-gua di Sulawesi Selatan (Leang Cadang dan Bola Batu) adalah ras Mongoloid sementara di gua-gua di Jawa (Marjan, Sampung, Bojonegoro, Tuban) adalah Austro-Melanesoid. Beberapa ahli baik arkeologi, linguistik, maupun antropologi menduga daerah Sulawesi Selatan merupakan daerah percampuran berbagai ras (Koentjaraningrat 1961).

Lebih lanjut Amir Sutaarga dan Koentjaraningrat (1994) dalam penelitiannya di Papua menyimpulkan bahwa penduduk Papua yang asli tersebut agaknya juga mendapat pengaruh ciri-ciri fisik para pendatang dari Asia Timur di zaman purba, atau dari orang-orang Asia yang tiba dalam zaman yang lebih muda. Campuran antara ciri-ciri fisik Austro-Melanesoid yang asli dengan ciri-ciri fisik yang berasal dari para pendatang di zaman-zaman yang lebih muda di berbagai tempat yang berbeda-beda itulah, ditambah dengan penyesuaian ekologi di berbagai daerah yang secara geografis terpisah (seperti yang terjadi pada orang Tapiro di Pegunungan Jayawijaya), yang agaknya mengakibatkan kebhinekaan ragawi penduduk Papua yang ada sekarang.

Sementara itu, teori Riesenfeld menyatakan bahwa Papua telah menerima pengaruh megalitik dari Asia Tenggara melalui 2 jurusan. Pengaruh pertama datang dari barat melalui Kepulauan Indonesia sebelah selatan, lewat Kepulauan Maluku menuju bagian barat Papua. Pengaruh kedua menyebar ke Mikronesia, sebelum membelok ke arah barat menuju daerah Sepik di Papua Niugini melalui Filipina, Sulawesi Utara, dan Halmahera. Arus dari arah barat mempengaruhi daerah pantai selatan, barat, dan utara Papua sampai ke Sungai Mamberamo, sedangkan arus dari arah Mikronesia mempengaruhi seluruh Papua dengan batas sebelah baratnya ditentukan di daerah Sentani, karena di sana terdapat pula beberapa unsur dari arus utara, seperti pemahatan-pemahatan pada batu, adat mas kawin, dan atap-atap rumah yang lengkung. Berdasarkan penelitian Riesenfeld, orang-orang migran ini membawa unsur-unsur kebudayaan, seperti adat perkembangan benda-benda megalitik, tanaman-tanaman yang dapat dimakan (terutama nyiur), babi, lesung batu dengan penumbuknya, serta kepandaian membuat barang tembikar dengan metode coiling, kapak persegi, adat istiadat mengayau, bermacam-macam adat upacara kematian, dan cerita-cerita asal usul nenek moyang. Migrasi terjadi dalam kelompok-kelompok dan gelombang-gelombang dalam jangka waktu yang panjang. Berdasarkan jenis dan corak penemuan prasejarah di Papua, migrasi ini dapat diperkirakan terjadi

berturut-turut sejak berakhirnya tingkat neolitik. Di Papua pengaruh kebudayaan dari luar ini terutama ada di daerah sekitar pantai (Soejono 1994).

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, tulisan ini mencoba untuk menjelaskan beberapa hal yaitu apa makna dan pesan yang tersembunyi dalam lukisan cadas dan bagaimana proses migrasi terjadi berkaitan dengan kajian lukisan cadas?. Dalam menjawab pertanyaan pertama akan dilakukan analisis struktural dan kajian etnografi. Sedangkan pertanyaan kedua akan dijelaskan dengan menghubungkan antara kajian etnografi dan bukti-bukti arkeologis, sehingga dapat menjelaskan proses migrasi yang terjadi.

II. PERSEBARAN LUKISAN CADAS DI INDONESIA TIMUR

Papua

Lukisan cadas di Papua pernah diteliti oleh A. Hahn, KW Galis, Goenadi Nh, dan Rored. Lukisan cadas terdapat di tebing Pulau Muamuram, Ogar, Roon, Teluk Berau, Teluk Arguni, Teluk Bitsyari, Teluk Triton, dan Seireri. Selain itu, lukisan cadas juga ditemukan di daerah barat sekitar Teluk Cendrawasih, yaitu di Pulau Muamuran dan Pulau Roon, dan di Gua Gumaimit (Jegriffi) dan Gua Pinfelu (Tainda) sekitar Danau Sentani. Di Namatote ditemukan banyak cap-cap tangan dan kaki yang sekelilingnya seolah-olah ditaburi cat merah. Di Daerah Kokas di Teluk Berau ditemukan motif-motif gambar orang, ikan dengan motif spiral di perutnya, perahu, binatang melata (kadal) dengan bentuk yang distilasi. Di daerah utara Papua sekitar Teluk Cendrawasih dan Danau Sentani, yang gua-guanya diteliti Galis, lukisan-lukisannya kebanyakan bersifat abstrak, berupa garis-garis lengkung lingkaran, spiral, dan kadang-kadang gambar binatang melata. Pada umumnya sekitar lukisan-lukisan itu terdapat sisa-sisa rangka-rangka manusia yang diletakkan di dalam gua-gua terutama gua-gua dekat laut, sungai, atau danau (Soejono 1994). Sementara itu, penelitian di Kaimana yang dilakukan oleh Goenadi Nitihaminoto berhasil menemukan lukisan cap tangan, orang, kepala burung, serta motif geometris berupa la-

yang-layang, garis lengkung, garis silang, dan titik-titik bersambung (Goenadi 1980).

P. Seram

Di Pulau Seram, lukisan cadas terdapat di sepanjang ceruk pantai utara teluk Seleman dan ceruk sepanjang sungai Tala. Roder yang meneliti lukisan di Teluk Seleman menemukan motif manusia dengan perisai pada tangan kirinya, cap tangan, kadal, burung, matahari, dan perahu. Di sepanjang Sungai Tala terdapat lukisan dengan motif manusia, rusa, burung, perahu, lingkaran, dan matahari.

Kei Kecil

Lukisan cadas pada ceruk di Dudumahan, Pulau Kei Kecil, diteliti oleh A. Langen dan Jacobson. Motif lukisan pada cadas tersebut berupa manusia dengan perisai, manusia dalam perahu, manusia jongkok dengan tangan ke atas, cap tangan, perahu, matahari, ikan, burung, binatang melata, dan motif geometris berupa garis-garis silang yang membentuk motif belah ketupat (Kosasih 1987; 1986).

Pulau Lomblen dan Pulau Flores

Di Flores, Verhoeven menemukan ekspresi seni berupa seni gores yang terdapat di Watu Weti (Batu bergambar) di Nuo Mbako. Pada batu bergambar tersebut terdapat motif manusia, ikan, perahu, kapak perunggu, dan pisau belati tipe Dongson (Kosasih 1986). Lukisan cadas pada dinding batu andesit ditemukan di Pulau Lomblen (sebelah timur Flores). Motif lukisan tersebut adalah manusia kangkang warna merah dan perahu warna putih (Sumijati 1984).

Sulawesi Selatan -- Kabupaten Maros; Pangkep

Lukisan cadas yang ditemukan di Sulawesi Selatan sebagian besar terdapat di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Di Kabupaten Maros

antara lain di gua Burung 2 dan PattaE terdapat dua jenis motif yaitu cap tangan dan babirusa yang sedang melompat dengan mata panah di bagian jantungnya. Sedangkan lukisan di Kabupaten Pangkep terdapat di gua-gua Sumpang Bita, Garunggung, Lompoa, Sapiria, Sakapao, dan Lasitae. Motif-motif yang dilukiskan meliputi cap tangan, cap kaki, babirusa, perahu, manusia, anoa, ikan, lukisan abstrak, bentuk-bentuk geometris, dan matahari (Nusantara 1989).

Sulawesi Tenggara -- P. Muna

Lukisan di Pulau Muna umumnya menampilkan adegan-adegan yang realistis dan dinamis, yang erat hubungannya dengan kegiatan hidup manusia penduduknya sehari-hari. Di Lasabo A dan B adegan berburu yang dilukiskan manusia bersenjata panah dan tombak sedang mengejar kawanan rusa. Di Tanggara Aru dilukiskan manusia sedang menunggang kuda. Dan di Metandono dan Koberi dilukiskan berbagai adegan dan jenis, antara lain adegan berburu, menari, dan berperang. Adegan berburu digambarkan berupa lukisan manusia dengan panah di tangannya, duduk di atas kuda sedang membidikkan senjatanya ke arah kerumunan rusa, atau mengepung seekor rusa jantan dengan memegang tombak dan panah, selain itu juga digambarkan berupa anjing yang menyerang rusa jantan. Adegan berperang digambarkan berupa lukisan seorang laki-laki yang menunggang kuda yang memegang tombak dan perisai. Secara keseluruhan, jenis-jenis yang dilukiskan pada dinding gua-gua di Pulau Muna adalah manusia, kerbau/sapi, kuda, rusa, babi, anjing, perahu, motif binatang, buaya, kadal, lipan, serta alat-alat senjata meliputi panah, tombak, pedang, dan perisai (Kosasih 1983; 1986).

Kalimantan

Lukisan cadas yang ditemukan di Kalimantan Barat yaitu di situs Batucap (Ketapang) meliputi motif cap tangan, manusia, perahu, ikan, lipan, ular, dan bentuk-bentuk geometris (Yondri 1996). Situs lainnya di Kalimantan Barat adalah di Desa Sungai Sungkung (Sambas) yang ber-

batasan dengan Serawak. Motif yang dilukiskan antara lain senjata seperti pedang, mata panah, tombak, perisai, selain itu juga ditemukan motif manusia dengan berbagai gaya (sepasang manusia, manusia sedang memegang parang dan perisai) dan burung. Selain itu juga ditemukan lukisan cadas di Liang Kaung (kapuas Hulu) dengan motif hiasan berupa matahari, panah, ikan, manusia, genderang, biawak, dan rusa (Chazine dalam Prasetyo 1997). Temuan lain di Kalimantan ada di Provinsi Kalimantan Timur yaitu di wilayah Sangkulirang (Kutai); motif yang dilukiskan meliputi cap-captangan, laba-laba, dan bentuk-bentuk geometris, serta pohon (Prasetyo 1997).

III. KAJIAN LUKISAN CADAS SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI

Lukisan cadas merupakan himpunan dari simbol-simbol dan lambang yang menyiratkan pesan dan penggambaran tentang kehidupan manusia masa itu. Sebagai hasil karya seni, lukisan cadas merupakan pengungkapan perasaan bathin manusia, penggambaran tentang apa yang dialami oleh seorang manusia, di samping mengandung nilai-nilai religius. Dalam penggambarannya, lukisan cadas sering tidak proposional dan tidak memperhatikan ketepatan anatominya, unsur yang diutamakan lebih bersifat simbol dan tanda. Dalam kaitannya dengan kajian lukisan cadas yang sarat simbol dan tanda tersebut, hal terpenting yang sebaiknya dilakukan adalah menerjemahkan apa tanda itu dan yang ditandai. Hal tersebut perlu pemahaman makna dari tanda dan simbol tersebut dari budaya yang melatarinya (Ahimsa 1997). Untuk itu, diperlukan pengetahuan tentang asal usul dan cerita-cerita suci yang dianut berkenaan dengan keberadaan lukisan cadas itu sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut, sebaiknya kajian lukisan cadas yang seharusnya dilakukan setidaknya meliputi lima aspek utama yang perlu diungkapkan yaitu keruangan (spasial), kronologi, sintaktik, semantik, dan pragmatik (Groenfeld dalam Tanudirjo 1997).

Dalam aspek keruangan hal yang perlu dikaji berkaitan dengan keletakan atau sebaran lukisan cadas pada situs, ciri sifat situsnya, konteks ekologi situs secara lokal maupun regional. Berkaitan dengan aspek ini, beberapa hal yang secara lengkap belum dijabarkan adalah deskripsi tentang keletakan lukisan cadas, pada ruangan situs itu sendiri. Kajian dari aspek kronologi berkaitan dengan pertanggalan lukisan cadas baik secara mutlak (*absolut*) maupun relatif, baik yang diperoleh melalui kajian penampalan (*tumpang tindih* atau *superimposition*), perubahan gaya, patinasi, C14, asosiasi dengan hasil ekskavasi, maupun identifikasi benda-benda yang digambarkan. Dalam aspek ini, masih dirasakanambatannya terutama berkenaan dengan kondisi lukisan yang sebagian besar sudah rusak dan tidak terawat, sehingga pengambilan sampel, baik untuk laboratorium maupun motif yang dilukiskan mengalami kesulitan. Aspek sintaktik berkenaan dengan ciri lukisan cadas itu sendiri yang meliputi ciri teknis, motif, gaya atau cara penggambaran, dan tata letak (*pengelompokan struktur*, komposisi, *thema berulang*, *latar*, maupun pola penampalan/*tumpang tindih*). Dalam aspek ini sering kali penafsiran masih dilakukan secara subyektif menurut selera peneliti, seperti kurang cermatnya dalam penafsiran lukisan tunggal atau merupakan suatu adegan yang saling terkait antara motif. Aspek semantik melibatkan hubungan antara “tanda” atau lambang dengan “apa yang ditandai”. Jadi, kajian aspek ini merupakan upaya mengungkapkan “arti” lukisan cadas, atau upaya menjelaskan (*eksplanasi*) gagasan-gagasan yang ingin disampaikan pembuatnya melalui bentuk-bentuk yang digambarkan dan kesepakatan “cara berekspresi” dalam budaya itu. Berkaitan dengan aspek ini, perlu dilakukan penelitian etnografi yang mendalam, mengingat dalam mengekspresikan suatu karya seni masing-masing etnis memiliki cara berekspresi sendiri-sendiri. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya setiap penelitian lukisan cadas dilengkapi dengan data mengenai cerita-cerita suci atau mitos, beserta tanda dan yang ditandai. Aspek pragmatik menyangkut hubungan antara “tanda” atau lambang dengan orang yang menggunakannya. Artinya, aspek ini berupaya mengungkapkan

tujuan atau “fungsi” lukisan cadas itu dengan mencoba menjelaskan apa perannya, mengapa dibuat, dan motivasi budaya yang melatarbelakanginya.

Dalam kenyataannya kelima aspek utama yang perlu diungkap dalam kajian lukisan cadas belum sepenuhnya terungkap. Namun demikian, kajian lukisan cadas yang masih terbatas tersebut dalam tulisan ini diupayakan untuk dijabarkan. Kelima aspek utama akan dijabarkan semaksimal mungkin, sehingga obyektifitas hipotesis yang diajukan nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

A. Tafsir Makna Motif

Kajian lukisan cadas untuk mengetahui makna motif yang dilukiskan adalah melalui aspek semantik. Tanda atau simbol yang dilukiskan tentunya memiliki arti dan makna, sehingga dari lukisan dengan motif tunggal atau berangkai akan mencerminkan makna dan pesan yang tersirat di dalamnya. Beberapa penelitian etnografi yang berkaitan dengan motif-motif sebagaimana yang terlukis pada lukisan cadas menunjukkan adanya unsur magis religius dan mitologi nenek moyang.

Dalam pendekatan struktural, rangkaian tanda atau simbol tersebut pada dasarnya merupakan suatu cerita yang bermakna apabila dihadapkan dalam satu konteks, sebagaimana halnya suatu rangkaian fonem yang akan memiliki makna apabila diletakkan dalam suatu kata. Suatu fonem pada dasarnya terdiri dari kumpulan distinctive features yang hanya mempunyai nilai bilamana berada dalam sebuah konteks, demikian pula halnya dengan tanda-tanda atau simbol-simbol yang lain. Makna tersebut tergantung pada relasi dengan fenomena lain yang setara. Suatu fonem tidak dapat didefinisikan kecuali dalam relasinya dengan fonem-fonem yang lain, sama seperti makna kata "pria", yang hanya akan bermakna jika ditempatkan dalam relasi dengan kata "wanita". Tanpa menempatkannya dalam relasi tersebut, istilah pria tidak punya arti, sebab hubungan antara suatu simbol, seperti kata "pria", dengan yang disimbolkannya, yaitu manusia dengan ciri-ciri

tertentu atau konsep manusia semacam itu dalam pikiran kita, bersifat arbitrar atau semena-mena (Ahimsa 1997).

Berdasarkan hal tersebut, untuk menafsirkan makna motif dalam lukisan cadas diperlukan suatu kajian etnografi tentang tanda dan yang ditandai dalam suatu konteks. Beberapa motif yang tergambar pada lukisan cadas secara keseluruhan dapat dikelompokkan dalam lukisan manusia, binatang, bentuk-bentuk geometris, dan hasil budaya manusia (artefak dan perahu). Motif fauna yang dilukiskan antara lain berupa babirusa, ikan, burung, kuda, kadal, dan kura-kura. Pada kenyataannya binatang-binatang tersebut bukan sekedar gambaran tentang jenis-jenis binatang yang hidup dan pernah dilihat oleh pelukis atau seniman pendukung budaya tersebut. Jenis-jenis binatang tersebut memiliki makna simbolis yang sarat pesan. Babirusa merupakan salah satu binatang buruan manusia masa itu yang sangat diharapkan dan menjadi sumber makan. Dalam penggambarannya babirusa dapat diartikan sebagai binatang buruan saja seperti penggambaran 2 ekor babirusa yang sedang berdekatan atau babirusa dalam posisi berlari, namun dapat juga berarti religius seperti penggambaran babirusa yang tertancap mata panah dan jantungnya. Penggambaran fauna lainnya seperti ikan, burung, kadal, biawak dan binatang melata lainnya lebih cenderung menggambaran segi religiusnya. Hal tersebut berkaitan dengan data etnografi yang menunjukkan bahwa binatang tersebut merupakan penggambaran mitologi nenek moyang atau pencapaian ke sumber totem. Dengan demikian, manusia saat itu sudah mengenal religi dan percaya adanya alam kehidupan atas - tengah - bawah; dunia arwah, dan mitologi nenek moyang mereka. Lukisan yang menarik dalam motif binatang adalah lukisan kuda yang ditemukan di Pulau Muna, sementara di pulau ini tidak ada kuda. Hal tersebut mencerminkan pendukung budaya ini setidaknya telah melakukan hubungan dengan orang luar yang mengenal kuda. Motif binatang lainnya yang terdapat pada lukisan cadas adalah anjing dan ayam. Binatang ini cenderung merupakan binatang yang bersifat lebih praktis dalam arti binatang jinak yang berhubungan dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Anjing dilukiskan dalam konteks suatu aktivitas perburuan, sehingga tidak mustahil binatang ini lebih bersifat profan saja yaitu sebagai gambaran mengenai aktivitas kehidupan sehari-hari.

Motif manusia atau sebagian tubuh manusia menunjukkan adanya makna tersendiri pula. Hampir seluruh situs-situs lukisan cadas ditemukan lukisan cap tangan baik lengkap maupun tidak. Data tersebut menunjukkan kemungkinan bahwa cap-cap tangan memiliki makna sosial budaya, sebagai pertanda bahwa suatu gua dihuni. Lukisan manusia baik utuh ataupun dalam suatu adegan tertentu memiliki makna tersendiri pula. Lukisan manusia kangkang dalam berbagai etnis merupakan perwujudan nenek moyang yang dipuja oleh keturunannya. Bagi penduduk Papua, manusia kangkang disebut *matutuo* yang berarti nenek moyang agung (*The Great Ancestor*). Cerita rakyat setempat menyebutkan bahwa nenek moyang itu datang dari arah matahari terbit. Kadal dianggap sebagai penjelmaan dewa atau nenek moyang, karena ada anggapan bahwa arwah nenek moyang merasuk ke dalam kadal.

Selain itu, lukisan cadas khususnya yang ditemukan dalam konteks penguburan, memiliki motif yang berbeda dari motif-motif tersebut di atas. Dalam konteks situs penguburan, lukisan cadas merupakan bagian yang penting dari seluruh rangkaian upacara kematian. Lukisan cadas dijadikan sarana untuk menceritakan kembali mitologi tentang nenek moyang. Pen cerita kembali mitologi dimaksudkan sebagai magi untuk menjamin agar roh orang yang mati mampu melalui tahap peralihan dan menempati kedudukannya yang baru dengan selamat. Jadi, jika adat perawatan mayat merupakan ritus yang menitikberatkan pada pemeliharaan unsur jasmaniah orang yang mati, pembuatan lukisan cadas adalah ritus yang menekankan pada perawatan atau perhatian terhadap unsur rohaniannya, yaitu roh yang mati (Tanudirjo 1997).

Berbeda halnya dengan motif perahu yang merupakan motif yang sangat berarti dalam lukisan cadas. Dari segi perkembangan teknologis dan

kompleksitas penggambarannya menyiratkan bukti yang perlu dikaji secara mendalam dan tersendiri. Makna perahu sepertinya merupakan makna yang sangat universal di Indonesia yaitu sebagai perahu arwah. Orang Yamdena di Tanimbar (Maluku) beranggapan nitu atau arwah pergi ke dunia roh yang ada di seberang lautan dengan naik perahu (Koentjaraningrat 1977). Konsepsi perjalanan arwah dengan perahu ini kemungkinan dilatari adanya proses migrasi penduduk dengan perahu. Selain itu, konsepsi tersebut juga diungkap dalam bentuk peti mati atau hiasan-hiasan pada peralatan upacara kematian (Soejono 1984; Hoop 1949). Namun demikian motif perahu juga memiliki makna sosial budaya yaitu sebagai sarana transportasi, utamanya dalam perpindahan suatu bangsa atau migrasi. Selain sebagai sarana untuk mencari ikan (aktivitas nelayan).

Dari berbagai motif lukisan cadas yang ada dan dihubungkan dengan data etnografi dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Roder dan Galis, diduga bahwa lukisan cadas dibuat bertalian dengan upacara penguburan, upacara penghormatan ruh nenek moyang, upacara kesuburan, upacara inisiasi, atau mungkin pula untuk keperluan upacara ilmu dukun, meminta hujan dan kesuburan. Dugaan tersebut didasarkan pada data etnografi yang masih berlangsung pada berbagai sukubangsa penduduk asli Australia (Soejono 1994). Selain itu, Roder juga menduga lukisan cadas ada kaitannya dengan serikat-serikat rahasia yang sangat bergantung pada peranan para leluhur mereka. Roder juga menambahkan bahwa perjalanan dan kedatangan para leluhur bukanlah kejadian sekali waktu saja, melainkan merupakan kejadian berulang dalam jangka waktu tertentu dan ini diwujudkan dalam pesta-pesta besar dan pesta inisiasi yang merupakan pesta utama dalam tradisi sebuah serikat rahasia (Roder dalam Arifin 1997). Dugaan tersebut didasarkan pada data etnografi di wilayah Melanesia yang masih melakukan serikat-serikat rahasia ini beserta segala pesta dan atribut-atribut yang menyertainya. Berdasarkan pengetahuan tersebut Roder mengemukakan bahwa lukisan-lukisan karang di Teluk Berau memiliki banyak kesamaan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepercayaan pada leluhur

dan upacara inisiasi. Roder menyebutkan bahwa dalam upacara-upacara serikat rahasia para leluhur selalu muncul dengan topeng-topeng aneh. Lukisan-lukisan cadas juga memperlihatkan motif manusia yang berwajah topeng seperti itu (Arifin 1997).

B. Cerita Rakyat dan Mitos

Cerita rakyat dan mitos yang berkaitan dengan lukisan cadas ini penting diungkapkan karena, berdasarkan analisis struktural mitos merupakan fenomena kebahasaan. Bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan, demikian pula halnya dengan mitos. Di dalam mitos terkandung berbagai macam pesan yang baru dapat difahami jika diketahui struktur dan makna berbagai elemen-elemen yang ada dalam mitos tersebut. Dalam masyarakat primitif (obyek kajian etnografi) mitos merupakan cerita-cerita suci yang tetap bertahan terus dan dipercaya secara turun temurun. Hal tersebut disebabkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang "dingin" dalam ruang dan waktu. Dingin yang dimaksud di sini adalah tidak menguras tunas energinya untuk mencapai suatu keadaan tertentu, untuk mencapai "kemajuan" tetapi untuk bisa tetap ada dan mengulangi apa yang pernah ada. Dalam masyarakat semacam ini segala sesuatu tetap bergerak aktif menjalankan fungsinya masing-masing. Dia memanfaatkan energi dalam dirinya tidak untuk bergerak ke lain tempat, melainkan bergerak seperti siklus kehidupan yang berawal dan kembali lagi begitu seterusnya. Dia memanfaatkan energi untuk mengulang kehidupan masa lampau yang suci dan wignit (Ahimsa 1997).

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang penting untuk mengkaji data etnografi yang masih berlangsung yang berkaitan dengan asal usul keberadaan lukisan cadas. Cerita suci dan mitologi dari data etnografi tersebut memang perlu kecermatan dan kehati-hatian dalam mengkaitkannya dengan data arkeologi. Hal tersebut disebabkan pada asumsi bahwa cerita tersebut muncul jauh setelah adanya data arkeologi. Untuk itu dalam analisis

struktural dibutuhkan perenungan dan analisis yang mendalam tentang tanda yang ditandai, dalam hal ini relasi antar elemen mitos itu sendiri.

Di Papua Lukisan-lukisan cadas sudah tidak diketahui lagi asal mulanya oleh penduduk, tetapi mereka mempunyai dongeng-dongeng suci yang dihubungkan para nenek moyang mereka. Di beberapa tempat lukisan-lukisan ini disebut *Ambersibui* (artinya: ditulis oleh orang asing), karena mereka tidak mengenal adat yang bertalian dengan lukisan-lukisan tersebut (Soejono 1994). Sementara itu, berdasarkan tafsir mitos yang telah dilakukan Indah A. Nurani (1998) diduga lukisan itu mengandung pesan tentang alur migrasi yang terjadi. Mitos tersebut menceritakan tentang adanya seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang datang dari arah matahari terbit. Sang laki-laki dan salah seorang perempuan, Omimin namanya, yang merupakan ibu seorang anak berkulit putih. Sedang perempuan lainnya berkulit hitam, mereka semuanya buta dan mencari jalannya dengan meraba-raba dinding karang yang mereka lalui. Mereka berjalan ke arah matahari terbenam, semakin dekat ke sana mata mereka semakin terbuka dan akhirnya mereka dapat melihat. Pada suatu hari terjadilah perselisihan antara kedua perempuan ini, sehingga berpisahlah mereka. Yang berkulit hitam tinggal di tempat ini dan menjadi nenek moyang orang Papua, sementara Omimin meneruskan perjalanannya ke tempat matahari terbenam dan di sana menjadi leluhur orang-orang kulit putih.

Selanjutnya berdasarkan mitos tersebut secara struktural ditafsirkan bahwa ada alur migrasi yang terjadi dari timur ke barat oleh orang berkulit hitam dan berkulit putih. Pada awalnya keduanya tidak saling mengenal budaya satu dengan lainnya. Semakin ke barat mereka menjadi kenal dan hidup berdampingan dengan budaya masing-masing. Sampai suatu saat terjadilah perselisihan sehingga keduanya saling berpisah perempuan yang berkulit putih meneruskan perjalanannya ke barat sementara wanita yang berkulit hitam tetap tinggal di timur.

Tafsir mitos tersebut menunjukkan bahwa proses persebaran lukisan cadas berasal dari timur dan menyebar ke arah barat. Sementara itu, pem-

bawa budaya tersebut adalah manusia berkulit hitam dan berkulit putih. Apabila dikaitkan dengan data ragawi yang ditemukan pada gua-gua di Indonesia Timur menunjukkan ada dua ras yang menduduki Indonesia Timur yaitu Mongoloid (gua-gua di Sulawesi Selatan) dan Austro-Melanesoid (Papua). Dengan demikian terdapat keterkaitan antara mitos dengan bukti ragawi tersebut. Selanjutnya bagaimana dengan motif-motif lukisan cadas sendiri dalam kaitannya dengan perkembangan tingkat kognitif dan kerumitan motif yang dilukiskan. Dalam hal ini semakin rumit dan kompleksnya motif-motif yang dilukiskan menunjukkan tingkat kognitif yang tinggi dan kronologi lebih kemudian.

C. Kronologi Lukisan Cadas

Dalam aspek kronologi hal yang perlu diperhatikan adalah pada penampalan (tumpang tindih) lukisan baik motif maupun warnanya, perubahan gaya, dan identifikasi benda-benda yang digambarkan. Selama ini kronologi lukisan cadas selalu dikaitkan dengan penghuni gua masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Sementara itu adanya alat serpih pada situs-situs yang mengandung lukisan cadas tidak menjamin kesamaan pertanggalan kedua tinggalan budaya itu. Hasil ekskavasi yang dilakukan Roder di Gua Dudumunir di Pulau Arguni (Teluk Berau) menunjukkan temuan artefaktual penghuni gua ditemukan pada kedalaman 2 sampai 3 meter dari permukaan tanah (Soejono 1994). Sementara itu lukisan cadas yang ditemukan pada gua tersebut berada di atas permukaan tanah sekarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelukis/seniman cadas tidak sekonteks dengan penghuni gua yang menghasilkan budaya mesolitik. Dengan kata lain pelukis cadas tidak akan leluasa melukis di luar jangkauan ketinggian tubuh mereka. Selain itu, sebagaimana yang telah diungkapkan sejak awal penelitian Roder di Teluk Berau diperkirakan lukisan-lukisan cadas paling tua berusia tidak lebih dari 1.000 tahun SM, atau hanya beberapa abad yang lalu. Adanya lukisan kapak Dongson, serta motif-motif perahu

arwah bergaya Dongson semakin menguatkan dugaan bahwa lukisan-lukisan di tempat tersebut berasal dari masa Perundagian (Tanudirjo 1997).

Sementara itu, dalam menentukan pertanggalan dari “apa yang digambarkan” diperoleh berbagai kelemahan yang amat tidak menguntungkan (Tanudirjo 1989) di antaranya adalah :

- a. Adanya kemungkinan bentuk tradisional masih digambarkan jauh sesudah apa yang digambarkan hilang atau tidak dilakukan lagi.
- b. kemungkinan adanya gaya pribadi dalam menggambarkan suatu benda sehingga menimbulkan salah tafsir bentuk.
- c. perbedaan antara pengetahuan (kognisi) pembuat lukisan cadas dengan peneliti.
- d. bias karena proses stilirisasi atau skematisasi.
- e. bias karena kegagalan penggambaran bentuk yang dimaksud, sehingga mengecoh.
- f. kondisi lukisan cadas yang tidak lengkap, kabur, bertumpangtindih.
- g. ketersediaan dan keabsahan data pembandingan bentuk-bentuk yang digambarkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam aspek kronologi yang akan dilakukan didasarkan pada kerumitan motif dan penampalan. Motif lukisan cadas yang dapat dijadikan parameter dalam kronologi adalah motif manusia, artefak dan perahu. Hal tersebut berhubungan dengan wawasan pelukis yang masih sangat dipengaruhi pada kondisi lingkungan saat itu, apa yang pernah dilihat dan dialamilah yang dilukiskan. Mereka tidak akan membuat lukisan di luar tingkat kognitif yang dimiliki. Selain itu dari motif warna yang tumpang tindih yang ditemukan di Papua dan Kei Kecil menyiratkan adanya beberapa kali pengaruh para migran. Sementara yang tunggal atau tidak tumpang tindih menunjukkan alur tersendiri pula. Jika motif yang ada memiliki indikasi muda atau tua maka secara tegas dapat diketahui bahwa para migran tersebut hanya sekali mempengaruhi daerah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Daud Aris Tanudirjo (1996) di wilayah Pasifik dan Asia Tenggara diduga pertanggalan lukisan cadas adalah 2.500 tahun yang lalu. Hal tersebut didasarkan pada situs-situs penguburan dan migrasi akhir orang-orang Asia Tenggara Kepulauan ke ujung Pasific. Ia menduga bahwa lukisan cadas terutama pada situs penguburan berkaitan dengan munculnya kepercayaan terhadap perjalanan arwah dengan menggunakan perahu dan tradisi kubur tempayan yang dibawa oleh pendukung budaya Dongson. Sementara itu A. Ariobimo Nusantara (1989) menduga pertanggalan lukisan cadas berkaitan dengan persebaran gerabah Lapita yaitu sekitar 2.000 -- 1.300 BC. Hartatik (1999) yang melakukan perbandingan antara lukisan cadas dengan nekara menyimpulkan bahwa motif nekara yang sama dengan motif-motif lukisan cadas menunjukkan kronologi muda (perundagian). Lukisan cadas di Sulawesi Selatan memiliki kronologi tua, sebab motif lukisan yang tertera prosentase persamaannya dengan motif nekara sangat rendah.

Selain itu, kronologi yang didasarkan dari motif perahu menunjukkan adanya perkembangan dan perubahan motif yang dilukiskan. Motif perahu yang dilukiskan pada dinding gua di Sulawesi Selatan (Pangkep) berupa perahu tanpa layar dan dengan layar. Dari segi bentuk dan teknologi perahu yang dilukiskan tampak sangat sederhana. Sementara warna yang digunakan berwarna merah (tanpa layar) dan warna hitam (dengan layar). Motif tersebut menunjukkan motif tertua di antara lukisan perahu pada daerah-daerah lainnya seperti lukisan perahu di Gua Sosorra. Motif perahu dari Gua Sosorra, Papua mirip bentuk perahu orang Maluku, sehingga diperkirakan lukisan tersebut dibuat setelah masuknya pengaruh kebudayaan Indonesia ke daerah Papua. Sementara itu, bentuk perahu yang terdapat pada lukisan cadas di Pulau Muna merupakan bentuk perahu yang sudah lebih maju. Dengan demikian, berdasarkan pada bentuk perahu Pangkep pertanggalannya lebih tua dibandingkan dengan lukisan perahu di Gua Sasorra, Papua, terlebih dengan lukisan perahu di Pulau Muna.

IV. SUATU HIPOTESIS PROSES MIGRASI BERDASARKAN KAJIAN LUKISAN CADAS

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya dapatlah ditarik suatu hipotesis sebagai berikut.

Teori-teori tentang migrasi yang selama ini dianut menunjukkan bahwa nenek moyang orang Indonesia adalah ras Austro-Melanesoid yang menyebar dari arah timur ke barat. Dari kajian etnografi ditunjukkan bahwa mitos atau cerita suci yang dipercaya menceritakan bahwa asal nenek moyang pembawa budaya lukisan cadas adalah dari timur ke barat. Berdasarkan hal tersebut diduga budaya lukisan cadas adalah dari benua Australia yang juga merupakan cikal bakal dari ras Austromelanesoid. Mereka menyebarkan budaya lukisan cadas ke Papua, Kei Kecil, Pulau Seram dan ke Sulawesi Selatan yang selanjutnya ke arah utara menuju Filipina. Hal tersebut didasarkan pada motif lukisan cadas antara Asia Tenggara Kepulauan yang memiliki pertanggalan yang lebih kemudian dibandingkan dengan lukisan cadas dari Australia. Selanjutnya berdasarkan adanya bukti ragawi pada gua-gua di Sulawesi Selatan yang menunjukkan ciri-ciri ras Mongoloid, maka diduga daerah ini merupakan percampuran ras yang datang dari utara (Mongoloid) dan dari timur (Austro-Melanesoid).

Arus migrasi tersebut di atas terjadi sebelum masa perundagian. Dalam gelombang berikutnya, terjadi arus berbalik yaitu dari barat ke timur. Gelombang migrasi ini menunjukkan pengaruh budaya Dongson (masa perundagian) lebih dominan yaitu dengan munculnya beberapa motif lukisan artefak dari perunggu dan perahu arwah tipe Dongson. Arus yang terjadi adalah dari Asia ke Kalimantan, Sulawesi Tenggara, dan menyebar ke wilayah Indonesia Timur bagian selatan yaitu Pulau Flores, Lombok, dan Timor Timur. Sementara itu lukisan dengan motif tipe Dongson ini tidak menyebar ke wilayah Papua dan Kepulauan Maluku. Hal tersebut didasarkan pada lukisan di wilayah ini yang tidak memiliki lukisan motif artefak perunggu. Hal yang menarik dari perkembangan lukisan cadas di wilayah ini adalah adanya lukisan cadas yang berkaitan dengan berbagai upacara dan serikat-serikat rahasia.

Segi motif lukisan cadas yang ada menunjukkan adanya perubahan gaya dari motif yang sangat sederhana ke motif yang kompleks. Berdasarkan kajian lukisan cadas ditunjukkan bahwa motif sederhana ditemukan pada gua-gua di Sulawesi Selatan yaitu motif cap-cap tangan, kaki, manusia, perahu, dan bentuk-bentuk geometris. Sementara motif yang paling kompleks ditemukan pada cadas-cadas di Kalimantan dan Sulawesi Tenggara yaitu berupa motif lukisan yang menggambarkan suatu adegan seperti berperang, menari, atau perburuan. Selain itu, berdasarkan motif lukisan berupa artefak tampak bahwa motif yang dilukiskan adalah artefak logam. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan arus migrasi yang mempengaruhi antara motif lukisan yang memiliki pertanggalan tua (Sulawesi Selatan) yang tidak ditemukan motif lukisan artefak perunggu dengan motif lukisan yang memiliki pertanggalan muda (Kalimantan dan Sulawesi Tenggara). Selain itu, adanya pada motif perahu menunjukkan bahwa perahu tertua (perahu tanpa layar dan perahu dengan layar) ditemukan di Pangkep, Sulawesi Selatan, selanjutnya perahu dari Gua Sosorra, Papua (mirip perahu orang Maluku yang masuk ke Papua), dan perahu yang termuda dan sudah maju ditemukan di P. Muna (Sulawesi Tenggara).

Secara tegas dapat diasumsikan bahwa lukisan cadas tidak satu konteks dengan penghuni gua pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Hal tersebut didasarkan pada kondisi permukaan tanah yang terlalu rendah pada saat gua dimanfaatkan sebagai hunian. Sementara temuan lukisan cadas berada jauh di atas permukaan tanah pada saat gua dihuni. Berdasarkan kondisi tersebut dan melihat motif-motif lukisan cadas yang cenderung mencerminkan adanya unsur magis religius, diduga pendukung budaya lukisan cadas memanfaatkan gua sebagai tempat yang sakral. Peralihan fungsi gua dari profan (tempat tinggal) ke sakral ini didasarkan pada data arkeologis di situs Batucap, Kalimantan Barat yang tidak didukung dengan data gua hunian, selain itu juga dari data etnografi di Papua yaitu sebagai tempat untuk mengadakan upacara-upacara yang sampai saat ini masih berlangsung.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arifin, Karina

- 1997 *Penelitian Rock Art di Indonesia dari Deskripsi sampai Makna*. Makalah disampaikan dalam **Seminar Hasil Penelitian** tanggal 24 November, Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.

Driwantoro, Dubel

- 1989 *Gambar Telapak tangan di Soppeng, Suatu Upacara Religi : Kaitannya dengan Tradisi Budaya Prasejarah di Sulawesi Selatan (Etnoarkeologi)*. **PIA V** : hlm. 190--204.

Hartatik

- 1999 Perbandingan Motif Hias Nekara dan Lukisan Cadas di Indonesia Timur (Sebuah Data Bantu untuk Kronologi Lukisan Cadas), **Naditira Widya Bulletin Arkeologi**, Banjarmasin: Balai Arkeologi. halaman 14 -- 32.

Hoop, A.N.J.Th. A.Th. Van de

- 1949 **Ragam-ragam Perhiasan Indonesia**. Ninklijke Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

Koentjaraningrat

- 1977 **Beberapa Pokok Antropologi Sosial**. Bandung : Dian Rakyat.
- 1961 **Metode-metode Antropologi dalam Penyelidikan-penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia (Sebuah Ichtisar)**. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- 1995 *Pendahuluan*, dalam Koentjaraningrat et.al., **Manusia dan Kebudayaan di Indonesia**, Jakarta : Penerbit Djambatan

Kosasih

- 1983 Lukisan Gua di Indonesia Sebagai Sumber Data Penelitian Arkeologi, PIA III. Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Halaman 158--175.

Prasetyo, Bagyo

- 1997 *Gambar Cadas di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur : Indikasi Sebaran di Kawasan Indonesia Barat*, **Naditira Wijaya Bulletin Arkeologi Nomor 02**. Banjarmasin: Balai Arkeologi. halaman 44 -- 51

Nusantara, A. Ariobimo

- 1989 *Kronologi Lukisan Dinding Gua di Kabupaten Maros dan Pangkep, Sulawesi Selatan. Tinjauan Berdasarkan Analisis Kontekstual*. **Skripsi Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada**.

Santoso, S. Budhi

- 1981 *Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan, Analisis Kebudayaan Tahun I No. 2*, hlm. 63 --67.

Soejono, R.P.

- 1994 *Prasejarah Irian Jaya, dalam Koentjaraningrat, et.al., Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta : Djambatan. halaman 23 -- 43.

Subagya, Rachmat

- 1981 **Agama Asli Indonesia**. Jakarta : Yayasan Cipta Loka Caraka Penerbit Sinar Harapan.

Sulistiyanto, Bambang

- 1989 *Proses Perkembangan Kesenian Dalam Perubahan Kebudayaan*. **Berkala Arkeologi Tahun X No. 2**. Yogyakarta : Balai Arkeologi. Halaman 31 -- 51.

Sutaarga, Moh Amir dan Koentjaraningrat

- 1994 *Kebinekaan Ras di Irian Jaya* dalam Koentjaraningrat et.al., **Irian Jaya Mambangun Masyarakat Majemuk**. halaman 110 -- 118.

Tanudirdjo, Daud Aris

- 1985 *Lukisan Dinding Gua sebagai Salah Satu Unsur Upacara Keamatan*. **Berkala Arkeologi Tahun VI No. 1**. Yogyakarta : Berkala Arkeologi. Halaman 1 -- 13.
- 1996 *Problema dan Prospek Kajian Seni Cadas Prasejarah di Indonesia*, **Seminar Prasejarah Indonesia I**, Yogyakarta 1-3 Agustus 1996.

EKSISTENSI ARKEOLOGIS INDONESIA DAN LEGALITAS KERJASAMA PENELITIAN ARKEOLOGI MENYONGSONG ERA GLOBALISASI ABAD KE-21

Kristantina Indriastuti

1. PENDAHULUAN

....”Apabila identitas diri itu rusak dan terlebih jika hilang sama sekali, maka bangsa yang bersangkutan akan menerima trauma yang mendalam. Kehilangan atau kehancuran identitas diri itu membawa kepada disintegrasi komuniti atau bahkan membawa kepada situasi aliansi yang mudah tunduk... (Sedyawati 1992)

“JATI DIRI BANGSA” , Kata-kata itulah yang menjadi sumber inspirasi bagi penulis pada penulisan makalah ini yang sangat relevan dengan tema yang diberikan pada pertemuan EHPA di Bedugul , Bali dengan judul “Peran Arkeologi Dalam Peningkatan Apresiasi Nilai Budaya Nasional Menghadapi Tantangan Abad ke- 21”.

Berangkat dari data arkeologis yang ada di daerah Pasemah, yang secara umum disebutkan sebagai “Budaya Pasemah” dengan bentuk bangunannya antara lain berupa : bangunan tradisi megalitik, arca-arca megalitik, kubur tempayan, bilik kubur batu, beliang persegi, dan gerabah (Hoop 1932). Kontak interaksi bangsa asli kita dengan bangsa lain telah lama terjadi sejak zaman prasejarah. Bukti-bukti peninggalan prasejarah

dapat kita asumsikan keberadaannya akibat adanya interaksi dengan bangsa luar, yang akan memberikan nuansa-nuansa dan warna tersendiri bagi eksistensi budaya asli bangsa kita.

Dalam penulisan makalah ini, penulis mencoba mengetengahkan bagaimana sikap bangsa kita sejak zaman prasejarah mampu mengadakan interaksi dengan dunia luar melalui kontak perdagangan sehingga terjadi *interchange cultural* dan budaya sebagai dinamika kehidupan mereka yang memperkaya nuansa serta warna bagi budaya asli bangsa kita. Selanjutnya nilai-nilai dari kultur budaya asli bangsa kita akan menjadikan inspirasi bahkan sumber data bagi arah kebijakan pembangunan bangsa kita dan masyarakat dalam menghadapi era globalisasi mendatang.

Bila kita menyimak pendapat para ahli seperti W. Howells dalam bukunya yang berjudul "*Back to History*" yang pada intinya mengatakan peranan bangsa kulit cokelat (Bangsa Indonesia) pada persebaran orang-orang Asia, (Sukendar 1998). Sehubungan dengan penulisan makalah ini penulis menggunakan data arkeologis yang terdapat di Pasemah, umumnya, kiranya dalam pembahasan makalah ini penulis ingin menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat dan secara lebih spesifik ingin memperkenalkan keberadaan arkeologi serta para arkeolog kita menjadi nyata eksistensinya di mata dunia Internasional.

2. PERMASALAHAN

Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan baik oleh peneliti-peneliti bangsa kita maupun bangsa asing secara umum ingin mengetahui kultur bangsa kita pada masa lampau. Salah seorang peneliti yang melakukan penelitian studi perbandingan seperti A.B Meyer & W. Fox (1897) dalam bukunya "*Bonze Pauken Aus Sudost Asten*" (R.P.Soejono 1984) mengatakan nekara perunggu yang tersebar di Indonesia pada Zaman Neolitik mempunyai persamaan dengan jenis nekara perunggu yang ada di dataran Khmer. W.G. Solheim II mengemukakan tentang tradisi pembuatan gerabah Sahuyn - Kalanay yang terletak 140 km ke arah Tourane Vietnam sama dengan gerabah yang ada di Indonesia. Pendapat serupa di kemukakan

oleh Van Hekeeren yang mengatakan pembuatan gerabah di Indonesia menunjukkan persamaan dengan Asia Tenggara.

Di lain pihak apabila kita mengacu kepada gagasan atau pemikiran Muharjo yang menyitir pendapat Murdock yang mengatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa kita bukan dari Bangsa Austronesia, sehingga pola pikir kita harus dibalik yaitu asal-usul nenek moyang kita berasal dari Indonesia dan menyebar ke daratan Asia (Sukendar 1998). Dari beberapa perbedaan pendapat, ada satu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan yaitu tentang adanya persamaan budaya yang tercermin dari tinggalan-tinggalan benda arkeologinya. Oleh karenanya apabila kita melakukan penelitian terhadap obyek arkeologis, maka kita akan menghadapi obyek arkeologis yang memiliki dimensi waktu dan ruang yang sangat luas/independen.

Adapun permasalahannya adalah:

1. Legalitas bentuk kerjasama apakah yang dilakukan dalam penelitian maupun konservasi terhadap peninggalan-peninggalan benda-benda arkeologis.
2. Eksistensi data arkeologis bangsa kita dengan arkeolog-arkeolog-nya di mata Internasional dan juga terhadap aspirasi masyarakat mengenai nilai-nilai budaya asli bangsa kita dalam menghadapi era globalisasi abad ke-21

3. PEMBAHASAN

Sejak zaman dahulu telah banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti bangsa asing maupun bangsa sendiri, yang menemukan berbagai macam tinggalan tradisi megalitik berupa beliung persegi dan sebagainya. Dari keanekaragaman peninggalan tersebut, para peneliti sering menjulukinya sebagai “Budaya Pasemah” Peneliti berkebangsaan Belanda yang melakukan penelitian di daerah ini salah satunya adalah Van Der Hoop secara lengkap menggambarkan tinggalan-tinggalan tradisi megalitik dalam

bukunya *Megalithic Remains in South Sumatera, th 1932*. Seorang arkeolog berkebangsaan Jerman menggambarkan dinamika masyarakat pendukung tradisi megalitik di daerah Pasemah ini sebagai "*the strongly dynamic agitated*" (Geldern 1945). Menurut Geldern, Budaya Pasemah mendapatkan pengaruh dari Asia yang masuk secara perlahan-lahan dengan perahu bercadik, dan mempengaruhi pola pikir Bangsa Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan aspirasi masyarakat kita terhadap nilai-nilai budaya bangsa asli bangsa Indonesia yang pada akhirnya menunjukkan "jati diri bangsa Indonesia" dalam menghadapi tantangan globalisasi abad ke-21 ini penulis mencoba mengkaji data arkeologis di daerah Pasemah yang mendukung eksistensi diri bangsa Indonesia. Pendapat Drs. Muharjo ini menggelitik pertanyaan penulis, apakah keberadaan peninggalan purbakala di daerah Pasemah ini merupakan hasil maha karya nenek moyang bangsa kita sendiri ?

Apabila kita mengamati lebih mendalam tentang pendapat dari arkeolog Von Heine Geldern yang melakukan studi tipologi tentang difusi suku bangsa dan budaya Asia ke Indonesia. Studi ini diawali dengan observasi terhadap tinggalan – tinggalan dari masing-masing wilayah kemudian di generalisasikan dan akhirnya memperoleh gambaran umum yang dijadikan hipotesa kerja. Dari kesimpulan studi tipologi dengan berdasar atas sejumlah data berbagai tinggalan budaya material di Indonesia maupun di Asia, Von Heine Geldern menyimpulkan adanya persebaran bangsa dan perembesan budaya dari daratan Asia ke Indonesia.

Bertolak belakang dengan pendapat Murdock & W. Howells yang menyatakan dalam bukunya "*Back to History*" masing-masing mengatakan bangsa Indonesialah yang mempengaruhi budaya di Asia Pendapat ini didukung oleh James Ferguson (1872) mengatakan : yang disebarkan ialah pengaruh yang bersifat megalitik dan bukan perpindahan penduduk pendukung tradisi itu. Hal serupa dikemukakan oleh : De Mortillet (1874) yang mengatakan tradisi megalitik yan ditemukan di tempat-tempat yang berbeda dibangun oleh ras yang berbeda, yang mempunyai kebudayaan yang berbeda. (Daniel 1962: hal 20-24).

Sehubungan dari beberapa pendapat arkeolog-arkeolog diatas, arkeolog bangsa kita pula mengatakan hal serupa seperti I Made Sutaba (1995) mengemukakan penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli arkeologi Indonesia sendiri selama dua dasawarsa yang lalu ternyata tidak menemukan bukti-bukti yang mendukung teori Von Heine Geldern. Beberapa hasil penelitian Harry Truman Simanjuntak yang bekerja sama dengan museum Perancis yaitu Museum National d' Histoire Naturelle (MNHN) di Situs Song Keplek secara tidak langsung menghasilkan adanya bangsa asli kita dengan berbagai peninggalan alat-alat batu sebelum Bangsa Austronesia datang. (Simanjuntak 97).

Aktivitas manusia itu tidaklah hanya mencapai periode teoritis hunian gua pada masa pasca Plestosen sejak 10.000 tahun silam, bahkan manusia telah menghuninya sejak minimal akhir kala Plestosen sekitar 16.000 tahun lalu. Distribusi alat-alat litik pada level ini juga dilengkapi dengan oleh eksistensi alat serpih, serut batu inti, yang kelak akan tetap diteruskan pemanfaatan dan pembuatannya oleh manusia selanjutnya yaitu Ras Austromelanesoid dan Mongoloid sekitar 8000 tahun yang lalu. (Handini & Widianto 1998). Kosasih (1995) dalam bukunya "*Notes on Rock Paintings In Indonesia* " mengatakan "The more progressive technology in boat making resulted in boats using sails, which formed the most dominant means of sea-transportation through out the world. Dalam penelitian gua-gua di Sulawesi Tenggara, Kosasih membuktikan aktivitas bangsa asli kita dalam kemajuan teknologi membuat perahu yang divisualisasikan pada lukisan dinding gua (Kosasih 1995).

Pendapat Von Heine Geldern yang tidak melihat beberapa alternatif yang menjadi faktor persamaan-persamaan hasil budaya material seperti:

1. Persamaan hasil budaya manusia antar tempat satu dengan tempat lainnya terjadi karena persebaran budaya

2. Persamaan budaya terjadi karena kontak antar bangsa melalui kontak perdagangan
3. Persamaan karena terjadi transformasi ide dari bangsa
4. Persamaan karena mempunyai pola pikir yang sama (*elementary gedanken*)
5. Persamaan hasil budaya karena dibawa.

Dari beberapa alternatif tersebut von Heine Geldern hanya mengambil alternatif yang pertama (Sukendar 1998). Dengan membandingkan hasil budaya di Jepang, berdasarkan hasil penelitian Namio Egami pada kubur batu di Jepang, mengatakan kubur peti batu di Jepang sama dengan yang ada di Korea, Taiwan, Indonesia, atau Serawak, jika demikian nenek moyang mereka adalah sama? Bangunan megalitik yang ada di Pasemah, Nias, Sulawesi, Jawa, adalah mempunyai nenek moyang yang sama dengan di Asia Tenggara? berdasarkan penelitian tipologi yang dilakukan Von Heine Geldern secara implisit sebenarnya membantah teori nya dengan mengatakan bangunan megalitik di Pasemah lebih "*sophisticated*" dibandingkan dengan di Asia. Bangunan megalitik di Pasemah diungkapkannya sebagai "strongly dynamic agitated". (Geldern 1945).

Haris Sukendar (1998) mengatakan bukti-bukti perahu bercadik di Asia ukurannya sangat kecil dan tidak akan mampu untuk mengarungi laut Cina Selatan yang ganas. Keadaan ini memberikan bukti bahwa sulit diterimanya pemikiran bahwa telah terjadi migrasi besar-besaran bangsa Austronesia ke kepulauan Indonesia. Budaya pantai yang tampaknya ditandai cara-cara mencari ikan, dan mengenal rumah panggung juga pembuatan perahu, begitu pula kehidupan di dalam gua-gua telah terjadi sebelum pengaruh budaya Austronesia masuk. (Simanjuntak 1995-1996), Bernet Bronson (1972), Verhoeven (1968), Peter Bellwood (1972), Sukendar (1998).

Berdasarkan teori dan pendapat tersebut, maka untuk sementara penulis menyimpulkan keberadaan bangunan megalitik, arca-arca megalitik, kubur tempayan dan lain-lain. Di daerah dataran tinggi Pasemah akibat adanya interaksi bangsa asli kita melalui kontak perdagangan ke Asia

Tenggara dan dengan perjalanan perdagangan itu mereka melihat budaya orang Asia, kemudian dengan alam pikiran bangsa kita sendiri, kita menciptakan bangunan-bangunan megalitik yang lebih maju (*sophisticated*) serta dengan adanya perembesan budaya terjadi akibat kontak perkawinan (*non material*) sehingga menambah kemajuan budaya bangsa kita.

Penemuan-penemuan rangka dalam kubur tempayan yang oleh Retno Purwanti ditemukan di Situs Muara Betung di identifikasikan sebagai Ras Mongoloid dan juga peninggalan sisa-sisa penguburan di Mahat (Sumatera Barat) bukanlah berarti terjadinya perpindahan Ras Mongoloid ke Indonesia, tetapi apakah tidak menutup kemungkinan karena adanya kontak perdagangan Bangsa Indonesia ke Asia Tenggara juga membawa beberapa budak keturunan Ras Mongoloid yang dibuktikan dengan letak penguburan di Situs Muara Betung rangka manusia Ras Mongoloid ini ditemukan di luar tempayan kubur yang diperkirakan sebagai bekal kubur atau budak dari tuannya yang dikubur di dalam tempayan (Purwanti 1997). Dengan sedikit pandangan tersebut, kiranya para peneliti-peneliti kita lebih dapat berbicara dalam mengungkapkan jati diri bangsa, oleh karena keberadaan Bangsa Indonesia asli telah ada sebelum datangnya Bangsa Austronesia sehingga lebih layak kita anggap sebagai nenek moyang kita.

Dari cetusan ungkapan jati diri bangsa, dalam keadaan sekarang ini menjelang era globalisasi akan membawa pengaruh-pengaruh yang lebih bebas baik dalam hal positif dan negatif, sehingga akan sedikit banyak dapat menggoyangkan sendi-sendi kehidupan sosial, budaya, dan pola pikir masyarakat kita. Oleh sebab itu perlu kiranya usaha merekonstruksi kembali kebudayaan asli bangsa kita dengan obyek-obyek dari data arkeologis yang menjadi warisan nenek moyang bangsa kita dari jaman prasejarah sampai saat ini. Dalam penelitian tentang obyek-obyek arkeologi yang mempunyai kesamaan tipologi dengan Asia Tenggara dan atas dasar obyek arkeologi itu independen dalam ruang dan waktu, maka perlu diadakan ker-

jasama penelitian atau konservasi dengan negara-negara lain, kalangan universitas atau lembaga-lembaga di bawah naungan PBB.

Dengan mengacu kepada penilaian tentang masing-masing negara mempunyai karakter kultur dan sejarah sendiri-sendiri, maka setiap negara seharusnya mengadakan kerjasama mengenai suatu isu yang berkembang kemudian mengadakan (*guideline*) pedoman bersama dalam survei, ekskavasi maupun konservasi. Adapun aspek legalitas dalam penelitian survei dan ekskavasi maupun konservasi harus berdasarkan hukum, perundangan dan kebijakan (*policy*) pemerintah masing-masing.

Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan dan dikembangkan seperti yang dipelopori Prof Dr. RP. Soejono dengan Jepang, kemudian dilanjutkan oleh Prof. Dr. Hasan Muarif Ambary dalam bentuk kerjasama penelitian dengan Perancis dilakukan dalam bentuk formal dengan EFEO (Ecole Francais e d' etr^eme orient) dan MNHN (Museum National d' Histoire Naturelle) yang dilakukan oleh Dr. Harry Truman Simanjuntak. Selain itu secara informal Pusat Arkeologi bekerjasama dengan (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) EHESS dan (Institut de Paleontologie Humaine) IPH di Perancis.

Di kawasan regional Asean pada tahun 1995 telah diadakan pula pertemuan untuk melihat pedoman dalam penelitian dan konservasi arkeologi di kawasan Asia Tenggara. Begitu pula dengan negara-negara seperti Belanda, Australia, Amerika. Perjanjian bilateral, dan unilateral, dalam melakukan penelitian arkeologi pertama-tama harus berlandaskan hukum dan perundangan negara masing-masing, kemudian berlandaskan konsesi Dewan PBB yaitu UNESCO yang dideklarasikan di India, New Delhi. (*Recommendation on Monumental Principles applicable to archaeological excavation, 9th session, New Delhi. 1956*).

Di samping berlandaskan konsesus piagam PBB di bawah lembaga UNESCO, kiranya perlu sekali pemerintah sebagai suatu lembaga negara yang berdaulat segera mungkin meratifikasi setiap per undang-undangan yang menjadi suatu konsesus bersama antar negara-negara di bawah lem-

baga PBB yaitu UNESCO itu sendiri , sehingga keberadaan arkeologi dan menjadi lebih eksis di mata dunia Internasional.

Salah satu tujuan mengadakan kerjasama dengan negara-negara asing serta ahli-ahli asing ialah mempersiapkan Sumberdaya Manusia di masa depan, agar SDM kita tidak hanya menjadi sumber informasi mentah dan menjadi pengantar atau pembantu ahli-ahli asing. (T. Jacob 1998), tetapi pada prinsipnya bentuk kerja sama dengan benar berlandaskan pada asas kesetaraan tanpa membatasi dan mencampuri kebijakan negara-negara masing-masing. Lebih jauh lagi dari penelitian-penelitian yang sebagian besar dananya didukung dari pemerintah dan masyarakat, oleh sebab itu kita tidak dapat melepas tanggung jawab dalam memberikan informasi dan sumbangan yang berarti bagi pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat jati diri bangsa (Mundardjito 1995).

4. PENUTUP

Nilai-nilai asli bangsa kita telah tertanam dan mengakar pada masyarakat kita sejak zaman prasejarah. Bukti-bukti peninggalan tradisi megalitik di dataran tinggi Pasemah berupa bangunan-bangunan megalitik, tempayan kubur, arca-arca megalitik, kubur batu, manik-manik, gerabah atau alat batu maupun logam, kesemuanya itu merupakan hasil cipta dan karsa nenek moyang kita yang didukung oleh struktur organisasi sosial, teknologi, seni maupun religi, sehingga dengan semangat kebersamaan, persatuan dan gotong royong mereka dapat membangun bangunan megalitik tersebut.

Nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tercermin dari nilai-nilai budaya bangsa kita diwujudkan dalam berinteraksi dengan negara-negara lain dan melalui kontak perdagangan kedalam atau ke luar negeri, sehingga nenek moyang kita mendapatkan ilham dalam menciptakan suatu bangunan yang mirip dengan negara asalnya namun dalam bentuk yang lebih maju (*sophisticated*). Dengan mempelajari dan memperdalam nilai-nilai budaya asli bangsa kita yang mempunyai persamaan budaya dengan di daerah-dae-

rah tanah air sampai ke Asia Tenggara membawa kepada rasa persatuan dan kesatuan yang dilandasi riwayat yang sama.

Berlandaskan riwayat yang sama tersebut, maka peranan dan eksistensi dalam penelitian arkeologi dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan disintegrasi bangsa yang menipiskan jati diri bangsa dalam menyongsong globalisasi mendatang. Kerja sama dengan pemerintah asing atau lembaga-lembaga terkait seharusnya berlandaskan kepada legalitas hukum dan perundangan negara-negara masing-masing tanpa mencampuri kebijakan masing-masing negara dengan azas kesetaraan. Di samping itu pula dapat mempersiapkan sumber daya manusia kita yang lebih profesional dalam ilmu dan operasional.

Akhirnya ini penulis ingin menunjukkan rasa memiliki (*sense of belonging*) negara Republik Indonesia berdasarkan atas kesamaan budaya nenek moyang yang tercermin dari benda-bendainggalan masa lampau yang dapat menunjukkan jati diri bangsa kita, dan nenek moyang kita adalah asli dari bangsa kita bukan dari bangsa lain (Austronesia) keberadaan Bangsa Austronesia merupakan kontribusi bagi kebudayaan yang telah ada sebelum mereka datang, sehingga akan timbul suatu jati diri yang kokoh dalam membentengi diri dari pengaruh-pengaruh kebudayaan asing menjelang era globalisasi dan sebagai sumber data dalam menentukan arah kehidupan bangsa kita di masa mendatang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daniel. Glyn

1962 **The Megalithic Builders of Western Europe**, Penguin Books.

Depdikbud

1995 **Report of The Asean Meeting of Expert For Formating Guidelines for Archaeological Field Procedure and Techniques**, Depdikbud, Jakarta.

Handini, Retno & Hari Widiyanto

tt. **Song Keplek Okupasi Intensif Manusia Pada Periode Pasca Pleistosen di Gunung Sewu.**

Heine Geldern, Robert. Von

tt. **"Prehistoric Research in Netherlands Indies," Science and Scienties in Hoskins Janet Netherlands Indies** , New York.

Hoop, A.N.J.Th.a.Th. Van Der

1932 **Megalithic Remains In South Sumatera**, Trans, by W.Shirlaw. Zuthpen: W.J.Thieme.

Hurst Thomas David:

1979 **Archaeology**; Holt, Rinehart and Winston Europe.

Jacob, T

1998 **Dinamika Budaya Asia Tenggara Perspektif Dalam Perjalanan Sejarah**, IAAI, Komda Jawa Barat

Kosasih, S.A

- tt. **Lukisan dinding Gua di Sulawesi Bagian Selatan, Refleksi Kehidupan Masyarakat Pendukungnya**, Thesis, Fakultas Sastra UI.
- 1991 **Notes on The Rock Painting in Indonesia**.

Keppres no 100

- 1993 **Izin Penelitian Bagi Orang Asing**, Sek Ditjen Kebudayaan Depdikbud.1993

Mundarjito

- tt. "Kebijakan Penelitian Arkeologi Indonesia" dalam Seminar **Nasional Metodologi Riset Arkeologi**, Fakultas Sastra, Jurusan Arkeologi U.I.

Purwanti, Retno

- tt. **Laporan Penelitian Arkeologi Survey dan Ekskavasi Situs Kubur Tempayan di Muara Betung**, Balai Arkeologi Palembang .

Shinitger, FM

- 1939 **Forgotten Kingdoms in Sumatera**, Leiden Ej Brill.

Sedyawati, Edy

- 1992 Arkeologi dan Jati diri Bangsa, **Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI**, Malang. Puslitarkenast Jakarta.

Soejono, R.P.

- tt. **Sistem-sistem Penguburan Pada Akhir Masa Prasejarah di Bali**, Disertasi UI, Jakarta.
- 1994 "Jaman Prasejarah di Indonesia" dalam **Sejarah Nasional Indonesia, Jilid I**, Balai Pustaka, Jakarta

Sukendar Haris

- tt. "Dinamika dan Kepribadian bangsa yang tercermin dari tradisi megalitik di Indonesia," **Jurnal Arkeologi Indonesia. Jilid I.** IAAI. Jakarta.
- 1997 **Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi.** Puslitarkenas Jakarta.

UNESCO

- tt. **Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavation Adopted by The General Conference at its ninth session chapter VII,** New Delhi.

MODERNISASI DALAM VISI GLOBAL BUGIS DAN MAKASSAR: PERSPEKTIF ARKEOLOGI SEJARAH

Moh. Ali Fadillah

Ce sont tous ces peuples qui concourent à constituer la nation indonésienne, une mais riche d'une diversité qu'elle ne doit pas perdre, car c'est elle qui permettra de ne pas échanger son identité ? c'est à dire son indépendance culturelle? contre une "culture" mondiale aseptisée, à quoi la modernité ne saurait se réduire (Christian Pelras 1995: 44).

PENDAHULUAN

Konstruksi Indonesia, karena lahir bersamaan dengan semangat kebangkitan bangsa-bangsa yang terjajah untuk merdeka, idealnya menjadi negara bangsa yang bebas dari segala tekanan dan dominasi bangsa lain. Selama dua periode kepemimpinan nasional, kelihatannya integrasi bangsa dalam bingkai Indonesia yang multi-kultural bisa berjalan dengan semangat "pembangunan" di segala bidang. Namun, setelah lebih dari separuh abad usia Republik, ternyata kemerdekaan itu masih menjadi tuntutan sebagian warga negara Indonesia. Alasan utama yang sering dikemukakan banyak "pengamat" adalah karena faktor ketidakadilan. Tetapi masalahnya tidak sesederhana itu, sebab yang menjadi tuntutan bukan lagi keadilan semata, melainkan "kemerdekaan" yang dilandasi kepentingan etnik-regional dengan spesifikasi identitas budaya masing-masing yang justeru menjadi akar identitas budaya nasional. Terlepas dari polemik apakah gejala itu disebabkan oleh gerakan elit politik tertentu atau tumbuhnya nasionalitas tradi-

sional, saat ini kita sedang dihadapkan pada masalah bagaimana sesungguhnya bangsa Indonesia mengaktualisasikan faham kebangsaan dalam era “globalisasi” sekarang ini.

Dalam konteks ini, jati diri yang sering menjadi acuan identitas, bisa dipandang sebagai fondasi paling penting bagi suatu bangsa, sebab, seperti diprediksi Prof. Sedyawati dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI* di Batu, Malang, apabila suatu bangsa mengalami kerapuhan apalagi kehilangan identitas, akan terjadi disintegrasi (Sedyawati 1993/4: 23). Menghadapi masalah itu, Poespowardojo (1993/4) pada kesempatan yang sama, pernah menggagas suatu bangun bangsa di mana kebudayaan menjadi tumpuan eksistensial dengan harapan bahwa kebudayaan mampu memberikan identitas yang dapat mengintegrasikan semua aspek kehidupan dalam format negara bangsa. Pendekatan ini mau tidak mau mengharuskan konstruksi identitas senantiasa mengacu pada sejarah, sebab kesadaran diri diperoleh melalui proses yang harus dilalui dalam sejarahnya. Persoalan yang timbul kemudian, sebagai konsekuensi proses itu, setiap masyarakat, disamping mempunyai pengalaman sejarah yang sama juga ada unit-unit waktu dan ruang yang telah membentuk identitas unik; kedua pengalaman sejarah itu telah dengan sendirinya merefleksikan pluralisme budaya dalam ruang geografi Indonesia.

Keberagaman budaya ini sesungguhnya telah menjadi format negara bangsa Indonesia sejak kelahirannya seperti terkandung dalam prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, tetapi sejauh ini “perbedaan” yang ditempatkan pada awal slogan itu belum jelas betul terakomodasikan dalam mengisi kemerdekaan; yakni melalui pembangunan dan modernisasi. Persoalannya mungkin terletak pada dualisme format negara, di satu pihak Indonesia menunjukkan negara bangsa yang modern yang secara teoretis selalu menafikan identitas kedaerahan yang nota bene bermuatan etnik dan di lain pihak, identitas kedaerahan sering tidak menjadi dasar terbentuknya negara. Mengingat Indonesia senantiasa berusaha menjadi salah satu negara bangsa yang

pluri-etnik dan religius, kendati rasionalitas teritorial dengan penduduk homogen hakekatnya tidak membuka peluang untuk bersikap lain misalnya penyeragama: sistem politik-pemerintahan, ekonomi dan bahasa, dalam banyak hal nilai-nilai tradisi dimodifikasi agar sesuai dengan identitas kolektif. Namun, ketika sebagian nilai atau budaya dalam proses penyeragaman tidak terserapkan, nilai-nilainya akan membentuk identitas parsial kelompok minoritas. Dr. Ivan A. Hadar, Presiden *Indonesian Institute for Democracy Education* (Jakarta), dalam surat kabar *Kompas* (20 Mei 2000) mensinyalir menguatnya isu etnisitas-regionalitas itu karena gejala “penyepelean” identitas etnik-regional: salah satunya disebabkan oleh perhatian berlebihan pada percepatan pembangunan. Jika akhir-akhir ini kita melihat semakin mencuatnya sentimen kesukuan, bagi Hadar bukan melulu sebagai akibat dari supremasi identitas nasional, tetapi lebih karena (1) pelecehan budaya lokal, (2) kegagalan pembangunan sosial, (3) kekecewaan akibat tak terpenuhinya janji kemakmuran. Ketiga konsekuensi itu malahan membawa implikasi pada penggerogotan ketahanan sosial pra-pembangunan (Hadar 2000: IV). Dalam kondisi seperti itu, wajar apabila etnisitas menjadi “oposisi” terhadap penyeragaman lewat modernisasi. Ironisnya, mungkin bisa disebut sejenis ancaman terhadap integritas negara bangsa, etnisitas menjadi mudah direkayasa dalam dimensi vertikal, yakni mengkonfrontasikan dua faktor antagonis: nasionalitas-etnisitas, sentralitas-regionalitas dan tradisi besar-tradisi kecil; yang sesungguhnya merupakan dua sisi dari sekeping mata uang. Pada gilirannya, etnisitas menjadi acuan utama untuk dua opsi: orientasi etnik dalam struktur pemerintahan negara bangsa (biasanya dalam lingkaran pertama suatu jabatan birokratis) dan lepas atau keluar dari negara bangsa.

Hasil pengamatan tersebut sudah tentu memberi kita wacana sosial politik yang agak pragmatis, namun sekaligus juga menyadarkan kita bahwa ada implikasi teoretis dalam dikotomi modernitas dan tradisionalitas. Kita tahu bahwa identitas “pusat” mengacu pada “tradisi besar”; ukuran segala nilai modernitas, karena kedudukan dan perannya itu, maka menjadi biasa apabila ada generalisasi nilai-nilai ke dalam “tradisi kecil”; karakter

identitas kedaerahan, bahkan lebih sering etnik ketimbang sebaliknya. Dalam keadaan tertentu, kesannya menjadi “pemaksaan” nilai-nilai nasionalitas pada nilai-nilai tradisional. Opini kita sering berangkat dari asumsi bahwa identitas etnik wataknya tradisional (*autochtone*) sedangkan modernitas adalah asing (*allochtone*) yang identik dengan Barat. Pendeknya, nilai-nilai universal menurut visi sentralitas-nasional mesti menjadi acuan visi regionalitas-etnik.

Dalam perspektif sejarah, asumsi ini pula yang mendasari pikiran kita, bahwa pembaharuan Indonesia dan juga Asia Tenggara diperoleh setelah kedatangan Bangsa Eropa, baik melalui kolonisasi (subordinasi politik) maupun melalui monopoli perdagangan (dominasi ekonomi) yang dengan kedua aliran gerakan itu membawa perubahan pada aspek-aspek sosial budaya secara berkelanjutan dan akibatnya seolah-olah menjadikan kepulauan sebagai salah satu wilayah di dunia yang memiliki model-model budaya, cara hidup dan tipe perilaku yang global. Jadi buah dari “westernisasi” yang menjadi acuan nilai nasionalitas, telah membawa perubahan radikal dalam tatanan masyarakat kita. Betul, sejak pertengahan kedua abad XIX, tidak ada yang bisa menghindari peran yang dimainkan modernisasi ekonomi dan teknik Barat dalam mengakselerasi perubahan-perubahan itu: kehidupan material, kondisi kerja, mentalitas atau tipe-tipe baru hubungan sosial: urbanisasi dan industrialisasi yang sedang tumbuh. Dari permasalahan di atas, paling tidak dapat ditarik tiga asumsi umum yang dipikirkan kebanyakan orang bahwa: (1) esensi modernitas berasal dari Barat, (2) modernitas dan tradisionalitas eksklusif, dan (3) modernitas berimplikasi pada risiko pemudaran identitas budaya. Dalam sebuah artikelnya, Pelras (1995: 36) berfikir sebaliknya, coba menunjukkan sebuah subyek sosial budaya Bugis (paradoks dengan pendapat bahwa grup etnik ini berada di luar *sphere* peradaban besar) dapat dipandang sebagai bentukan modernitas yang dilandasi nilai-nilai yang tampak bersebalikan dengan tiga asumsi di atas, yaitu: (1) modernitas diterima sepanjang abad-abad lamanya jauh se-

belum datangnya bangsa Eropa, (2) modernisasi berlangsung secara otonom ditekankan pada inovasi dan adaptasi, sehingga ada koeksistensi mutual antara elemen modernitas dan nilai-nilai tradisi, dan (3) modernitas justru dapat membentuk karakter identitas.

SULAWESI SELATAN: RUANG GEO-ETNIK

Banyak ahli coba membuat definisi operasional tentang etnisitas, namun pada umumnya etnisitas dipahami sebagai semua fenomena sosial dan psikologis yang terasosiasi dengan identitas kelompok masyarakat yang terbentuk secara kultural melalui interaksi antar kelompok pembawa identitas tersebut (Jones 1997). Saya setuju dengan pendapat bahwa etnisitas dipandang bukan faktum yang ada dengan sendirinya, tetapi muncul secara bertahap dalam proses “kesadaran” yang membedakan “kita” dan “mereka”. Dalam keadaan biasa konsep itu tidak berperan penting, tetapi dalam situasi lain, kesadaran “laten” itu menjadi mengental dan mengedepan. Pada gilirannya, etnisitas menjadi prasyarat utama bagi munculnya strategi politik dalam membedakan “kita” dan “mereka” dalam setiap interaksi (Hadar 2000: IV). Ini artinya, etnisitas secara rasional bisa direkayasa oleh pembawa identitas etnik (grup etnik) itu untuk aksesnya ke sumber-sumber material, politik dan sosial (Perret 1995).

Seperti di daerah lain di kepulauan atau Semenanjung Melayu, memasuki wilayah Sulawesi Selatan dari *angle* “sejarah identitas”, peneliti dihadapkan pada lapangan di mana terdapat individu-individu pembawa identitas etnik. Untuk mendapatkan gambaran komprehensif, perhatian kita mula-mula akan diarahkan pada diskursus geo-etnik regional; yang ditekankan pada masalah etnisitas, dan bukan berangkat dari grup-grup yang dikatakan pembawa identitas tertentu, tetapi dari situasi-situasi yang ada dalam ruang dan waktu. Selanjutnya perhatian diarahkan pada pertukaran ekonomi; yang dengan optik ini, kita coba melokalisir ruang-ruang produksi yang kemungkinan dapat menggambarkan zona-zona ekonomi khusus dari produk-produk tertentu yang terasosiasi dengan ruang-ruang

bersifat negara atau politik serta yang bersifat religius yang terasosiasi dengan proses ekspansi Islam.

Dalam penggambaran Sulawesi Selatan dari pendekatan sejarah etnik ini, sintesis antropologi Pelras dalam bukunya *The Bugis* (1996) dapat digunakan sebagai acuan utama. Menurutnya, kondisi geografis dan ekologis semenanjung barat daya Sulawesi mempunyai faktor-faktor dominan dalam sejarah dan identitas Bugis dari masa-masa yang sangat kuna. Kendati Sulawesi merupakan pulau keempat terbesar setelah Kalimantan, Sumatra dan Jawa, pulau itu memiliki karakter yang kontras: banyak memiliki semenanjung tetapi hampir tidak ada jalur darat yang menyambung keempat semenanjung yang runcing seperti jari-jari yang keluar dari telapak tangan berbukit-bukit terjal. Lebih kontras lagi dengan pulau-pulau besar lain, Sulawesi tidak banyak memiliki sungai yang bisa dilayari sampai ke pedalaman. Kekecualian terdapat di daratan tengah Sulawesi Selatan; di mana terdapat Sungai Cenrana; akses menuju daratan subur dengan produk padinya di sekitar Danau Tempe, dan bahkan bisa memotong semenanjung untuk sampai ke Selat Makassar melalui Pare-pare. Selain itu hanya sungai-sungai kecil yang sulit dilayari kapal-kapal besar. Semua rute itu: laut dan darat, penting dalam memperoleh akses ke sumber-sumber alam: besi, tembaga, emas, cendana, rotan, getah, dan ikan serta hasil-hasil laut seperti sirip penyu, mutiara dan membawanya ke titik-titik hubungan dalam jaringan niaga antarpulau pada mana orang Sulawesi menguasainya untuk waktu relatif sangat kuna. Posisi Pulau Sulawesi yang terletak antara Kalimantan dan Maluku menjadikannya penting sebagai pelabuhan alam dalam rute tua antara Selat Malaka dan Kepulauan Maluku. Kepentingannya telah lama diberitakan oleh Tome Pires baik karena produk eksotiknya maupun keunggulan pedagangnya, khususnya para pelaut Bugis (Cortesao 1944).

Sampai tahun 1990, seperti dicatat Pelras, Sulawesi Selatan dengan keluasan 83.000 km² berpenduduk 7 juta jiwa [84 jiwa/km²] memang tidak

sebanding dengan tingkat kepadatan Jawa, tetapi lebih padat dari Kalimantan dan Sumatra. Di semenanjung ini, bagian terpadat berada di bagian tengah semenanjung yang sering disebut Tana Ugi (Tanah Bugis) dan di dua kota pelabuhan utama: Makassar dan Pare-pare. Kedua kawasan padat ini sejak lama diokupasi dua suku besar: Bugis dan Makassar. Sementara daerah utara merupakan pegunungan Latimojong tempat bermukimnya orang Toraja dan sub-sub grup linguistik yang lain. Pembagian geografi ini tampak semakin memperjelas peta geo-etnik di Sulawesi Selatan.

Di Sulawesi Selatan perbedaan etnik sesungguhnya lebih mudah ditandai dengan jejak linguistik. Dengan kategori itu, ada empat grup etnik terbesar: Mandar, Toraja, Bugis dan Makassar, yang kesemuanya memiliki sub-grup linguistik Austronesia. Orang Mandar (sekitar 400.000 jiwa) mendiami pantai barat Sulawesi Selatan, sedangkan orang Toraja (60.000 jiwa) terutama tinggal di pegunungan Latimojong. Sementara orang Bugis (sekitar 4 juta jiwa) menguasai dataran rendah dan areal perbukitan ke arah selatan dari dua grup etnik di atas; sebagian lagi ada yang mendiami daratan pantai kepala Teluk Bone, sedangkan tempat tinggal orang Makassar (sekitar 2 juta jiwa) berada di ujung selatan baik di pantai maupun lereng selatan pegunungan Lompobattang. Setiap grup linguistik itu dibagi lagi ke dalam subgrup lokal dengan lebih kurang dibedakan oleh dialek. Grup lain yang paling berbeda adalah orang Bajo, yang disebut juga orang Sama yang menurut teksiran Pelras (1996) berjumlah sekitar 800.000 jiwa. Kelompok inilah yang sebenarnya disebut sebagai *sea people* atau *sea gypsies* di Asia Tenggara, karena pada umumnya mereka tidak memiliki basis pemukiman di darat. Kecuali di pantai-pantai Sulawesi, mereka juga mendiami pantai-pantai Kepulauan Sulu, Kalimantan Timur dan pulau-pulau kecil sekitar gugusan pulau Selayar dan Buton (Liebner 1998).

Sebagian besar penduduk Sulawesi Selatan mempunyai hubungan internal, bukan hanya linguistik, tetapi juga dalam banyak pertalian budaya dan sejarah. Di antara keempat suku besar itu, orang Bugis telah menunjukkan dirinya sebagai kelompok yang paling mobil dan meskipun selalu membedakan dirinya dengan kelompok lain, tetapi mereka mempunyai ke-

samaan dengan tetangganya, kecuali Toraja, mereka termasuk penganut Islam yang kuat; memberinya identitas baru sekurang-kurangnya sejak awal abad XVII bersama-sama dengan orang Makassar.

Dalam skematisasi sejarah Sulawesi Selatannya, Dr. Pelras (1995) telah menggarisbawahi pentingnya Protosejarah (sepanjang seribu tahun pertama Masehi) sebagai era kemunculan awal entitas etnik: Bugis, Makassar, Mandar, Toraja dan sub-subgrup linguistiknya. Dalam periode itu, diperkirakan komunitas desa telah terbentuk; yang jejak-jejak tradisinya mungkin mirip dengan masyarakat Toraja sekarang. Dalam ruang-ruang pemukiman itu masyarakat telah terbagi ke dalam dua kelas utama: bangsawan dan petani atau nelayan. Interaksi mungkin telah berlangsung dengan komunitas lain sebagai konsekuensi dari migrasi antarpulau.

Periode sejarah dimulai dengan satuan waktu yang disebut Pelras sebagai jaman arkaik; sebuah fase awal sejarah dari abad IX-XIII. Periode ini lebih dikenal sebagai jaman *La Galigo*, karena sebagian besar sejarah Bugis diberikan oleh sebuah epos yang bersumber pada mitologi lokal. Dalam epos I *La Galigo* tersebut telah dikenal konsep "negara" dari suatu peradaban yang berkembang di pesisir yang penguasa-penguasanya terdiri dari keluarga-keluarga bangsawan yang mengambil ideologi kahyangan (*fratri langi*) untuk memerintah di bumi (*peretiwi*). Negara yang utama pada periode ini diperkenalkan sebagai Luwu, yang mengontrol eksploitasi sumber-sumber mineral terutama besi dan hasil hutan serta hasil-hasil laut.

Periode kedua berkenaan dengan sejarah kuna (abad XIV-XVI); suatu jaman di mana orang Bugis dan Makassar telah memiliki sejumlah besar kronik dinasti (lontara) yang terutama mencatat berbagai peristiwa dan tokoh dari negara-negara sejarah. Yang penting dari periode ini adalah okupasi intensif teritorial di mana masyarakat terikat pada tanah-tanah pertanian dan pada suatu tempat yang memusat dengan dasar ekonomi pertanian padi sawah. Pembukaan sawah-sawah di pedalaman semakin meningkatkan pertukaran ekonomi yang membawa implikasi pada integrasi

masyarakat dalam model-model budaya baru dan bentuk-bentuk organisasi politik yang mengarah pada demokrasi aristokratik dalam unit-unit politik dan teritorial konfederatif (Pelras 1996; Caldwell 1995).

Mengakhiri abad XVI sampai akhir abad XVII; suatu periode singkat tetapi penting bagi masuknya orang Bugis dan Makassar ke dalam *sphere* Islam yang telah menjadi identitas umum di Nusantara. Periode ini merupakan puncak perkembangan Makassar, sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan budaya Islam yang memancar ke hampir seluruh Sulawesi Selatan. Namun jatuhnya Makassar ke tangan VOC pada tahun 1667 malah melahirkan model budaya baru di tanah Bugis; sebuah konsolidasi Islam menghadapi ekspansi ekonomi politik Belanda (akhir abad XVII-awal abad XIX), sebelum okupasi total seluruh Sulawesi Selatan mulai pertengahan pertama abad XIX sampai pertengahan kedua abad XX. Kemustahilan untuk mengembangkan ekonomi politik kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan telah memberi semangat baru bagi pengembangan aktivitas maritimnya, memperluas jaringan niaga ke luar dari negerinya, terutama ke arah barat kepulauan dan sekaligus memberi mereka identitas sebagai kelas pedagang dan juga elit politik di perantauan.

Dengan mengikuti skema sejarah itu, perubahan dan kesinambungan tampaknya merupakan realitas sejarah Sulawesi Selatan. Melalui transformasi ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama yang paling radikal, seperti resume yang singkat di atas, orang Bugis telah mendukung banyak jaman dalam sejarahnya (pada lahirnya kerajaan arkaik, dalam perjalanan sejarah kuno, islamisasi dan seterusnya). Identitas masyarakat ini tampak cukup kuat untuk bertahan, dengan mempraktekkan sejumlah unsur-unsur yang permanen, yang sedikit sekali bisa beradaptasi, tetapi mereka betul-betul telah terikat pada pencarian untuk tetap bertahan dengan baik (Pelras 1995: 39).

MODERNITAS DALAM SEJARAH BUGIS DAN MAKASSAR

Kesan pertama setelah memaknai skema sejarah di atas adalah bahwa apa yang diperkenalkan tentang orang Bugis dan Makassar sebagai *sea-*

farer, pedagang budak apalagi sebagai perompak (bajak laut) menjadi tidak kontekstual lagi (Lombard 1979). Titik baliknya terjadi setelah Islam menjadi anutan resmi kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar, mereka menjadi muslim yang kuat dan bahkan mampu merubah citranya menjadi pedagang yang sukses di Nusantara. Hubungannya dengan dunia luar telah memberi mereka berbagai pandangan tentang kecenderungan global dari setiap periode sejarah dan keluasan jelajah yang dilaluinya.

Pembentukan identitas budaya Bugis dan Makassar dengan begitu merupakan hasil proses sejarah yang panjang. Namun seperti diakui Pelras, rekonstruksi proses perubahan itu sepertinya hampir tidak nampak sebelum masuknya pengaruh Eropa. Sebaliknya orang Bugis dan Makassar (dalam arti yang terbatas) telah menyediakan cukup sumber sejarah dan bukti arkeologi untuk mengungkapkan masalah tersebut. Dari perspektif historis, tampak bahwa dalam visi Bugis dan Makassar, transisi dari tradisionalitas ke modernitas merupakan sebuah proses *fade-out fade-in*. Ditegaskan oleh Pelras bahwa banyak elemen budaya spesifik yang mereka warisi dari masa lalu tetap bertahan dan ada pula elemen lain yang terserap pada abad-abad terakhir yang masuk melalui proses transformasi yang lambat yang berkoeksistensi dengan fakta-fakta masa lalu yang justru telah menjadi bagian dari budaya lokal modern (Pelras 1998).

Namun, ada pula elemen-elemen yang bahkan belum pernah dialami sebelumnya merupakan obyek-obyek, fakta-fakta, norma-norma dan pola-pola perilaku baru secara terus-menerus membentuk tampilan mereka; sering tidak berarti apa-apa bagi identitas mereka, tetapi kebanyakan merupakan manifestasi Sulawesi Selatan secara keseluruhan, atau Indonesia bahkan juga Asia Tenggara yang asalnya merupakan elemen-elemen budaya dunia. Semua elemen heterogen itu telah menjadi kesaksian dari bentuk *global environment* Bugis dan Makassar. Dengan tetap mengindahkan *leading role* Eropa dalam proses modernisasi yang mendunia, kita tetap memandang bahwa dalam proses modernisasi itu tampak beberapa sub-kul-

tur dunia yang saling terkait dan melengkapi, termasuk budaya Islam yang sekarang dimasuki orang Bugis dan Makassar.

Semakin jelas sejak pertengahan pertama abad XX, terutama setelah kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, modernisasi telah diakselesasikan melalui hubungan politik eksternal; seperti juga melalui islamisasi, perkembangan tulisan dan pendidikan di Indonesia dan sebuah integrasi masyarakat semakin meningkat ke dalam sistem ekonomi dunia, tetapi dalam proses itu, orang Bugis dan Makassar telah mempersiapkan diri lebih baik untuk menanggulangnya; sesungguhnya merupakan penghargaan pada eksistensi tradisi mereka, yakni modernitas yang terus berjalan dalam semua sejarahnya. Menurut pengamatan Pelras (1998: 22-27), elemen-elemen modernitas itu pada umumnya terdiri dari: (1) pemikiran rasional, (2) peningkatan aktivitas produksi, (3) spesialisasi keahlian, (4) keluasan komunikasi, (5) keterbukaan budaya, (6) hubungan sosial dan (7) keutamaan individual. Sebagian besar dari elemen tersebut telah cukup tua, paling tidak berkembang sebelum masuknya pengaruh Barat.

Elemen Modernitas 1: Perkembangan Pemikiran Rasional

Kesaksian utama dari elemen ini adalah tulisan, baik orang Bugis maupun Makassar telah lama mengenal mitos-mitos, kepercayaan dan praktek-praktek ritual yang berakar dari masa pra-Islam. Beberapa bukti arkeologis telah menunjukkan pengenalan yang luas kremasi dalam sistem penguburan orang Bugis sedangkan Makassar lebih mengutamakan penguburan sekunder melalui wadah-wadah kubur kayu [*duni*] atau melakukan praktek inhumasi dengan berbagai bekal kubur (Tjandrasasmita 1970; Bulbeck 1996/7). Ikatan yang kuat pada tradisi itu ternyata bukan hanya terpelihara dalam tradisi tutur tetapi dalam rekaman tulisan sejumlah besar volume lontara yang mungkin sudah dikenal sejak abad XIV (Caldwell 1995; Pelras 1986). Sejumlah lontara, sebagian besar salinan di atas kertas, masih dipegang oleh banyak keluarga hampir di semua desa Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Fakta ini memberi kejelasan melazimnya suatu tingkatan tulisan yang relatif tinggi di antara orang dewasa sekurang-

kurangnya sejak abad XVIII. Meskipun lontara lebih mengarah pada pemeliharaan tradisi: mencatat sejarah [Bugis: *attoriolong*], hukum, adat-istiadat, upacara ritual, pengetahuan tradisional tentang pertanian, astronomi, migrasi, kapal, konstruksi rumah, tetapi mereka juga memberi tempat bagi inovasi: pengadopsian pengetahuan dan hukum agama, teknologi, pengetahuan Portugis tentang senjata api dan perhitungan waktu ala Barat. Sebagian besar inovasi ini diintroduksi melalui tingkatan kebangsawanan, lalu secara progresif diserap masyarakat luas, karena menurut Pelras (1998) tidak ada *cultural barrier* yang berarti antara bangsawan dan masyarakat biasa. Inovasi lain, sebagian besar dalam lapangan budaya material, juga berjalan sepanjang abad lampau bisa diketahui melalui bukti-bukti perbandingan bahasa dan teknologi, meskipun proses introduksi mereka tidak diketahui. Perlu detil panjang dari semuanya, tetapi Pelras cukup menyebut konstruksi kapal dan rumah, tenun dan pertanian sebagai bidang-bidang yang mengalami perubahan penting sepanjang 200 tahun lalu dan bukan hanya dalam dekade terakhir.

Elemen Modernitas 2 dan 3: Peningkatan Aktivitas Produksi dan Spesialisasi Keahlian

Di antara gambaran budaya Bugis yang dominan dan permanen, yang terpenting adalah tekad mereka untuk merubah sasaran ekonominya dari yang sekadar *self-sufficiency* ke *exchange-oriented*, mungkin sejak abad-abad awal milenium pertama. Dari pendekatan sosio-linguistik, dihipotesiskan bahwa Selat Makassar merupakan salah satu ruang interaksi suku-suku yang sebelumnya penutur proto-Melayu; yakni nenek moyang orang Makassar dan Bugis [termasuk Toraja] dan suku-suku di bagian timur dan tenggara Kalimantan (Grimes & Grimes 1987). Pada kedua sisi Selat Makassar itu telah berlangsung proses ekspansi jaringan perdagangan yang meluas sampai pesisir selatan Sumatra. Melalui jaringan ini mereka berada dalam kontak langsung atau tidak langsung dengan Asia Tenggara

dan bagian barat laut India. Bukti-bukti dari abad XIII dan menunjukkan grafik naik pada abad XV-XVI, barang-barang keramik Cina dalam sejumlah situs arkeologi Sulawesi Selatan menjadi petunjuk penting aktivitas itu, memberi bukti pada koneksi tak langsung dengan Cina, kemungkinan melalui pedagang-pedagang baik dari pesisir selatan Sumatra maupun Filipina. Demikian pula beberapa arca buddha perunggu (Dupont 1957) dan manik-manik kornelian yang ditemukan di pesisir barat dan selatan (Bulbeck 1996/97; Fadillah 1999) menunjukkan hubungan langsung dengan dunia selat Malaka dan secara tak langsung dengan India selatan.

Barang-barang dagangan daerah ini yang dapat memenuhi permintaan pasar terdiri dari biji (terutama emas dan besi), produk hutan (cendana, lilin, madu, pewarna tumbuhan, ikan dan obat-obatan), produk laut (kulit penyu, mutiara dan tripang) (Pelras 1995; 1996). Perdagangan ini mungkin dikontrol oleh beberapa orang penguasa yang asalnya bangsawan. Dari sini Pelras membuat spekulasi bahwa kekayaan mungkin telah menjadi stimulan kelahiran peradaban Bugis awal, seperti secara cerdas digambarkan oleh *La Galigo*, satu di antara karya sastra besar Indonesia (Enre 1999). Jejak peningkatan produksi itu telah didukung oleh kemunculan spesialisasi dalam keahlian teknologi. Tradisi itu sampai kini masih tetap dikenang dalam masyarakat Bugis dan beberapa masih terus berlangsung dengan inovasi teknologi mutakhir, yakni dikenalnya para *panre (pande)*: tukang batu di Allekuang (Sidenreng-Rappang), tukang tembakau di Cabenge, Soppeng, tukang tembikar di Kampiri (Pammana, Wajo) dan Patani, Takalar, tukang besi di Maseppe (Sidenreng-Rappang) dan Suli (Luwu), dan tukang perahu di Ara (Bulukumba).

Elemen Modernitas 4: Keluasan Komunikasi

Dari abad XIV, dalam awal perkembangan lokal, terkait dengan kemajuan teknologis dan peningkatan demografis, produk pertanian terutama padi, ternak dan dua produk kerajinan (tenun dan senjata besi) telah menjadi komoditas ekspor penting yang terkontrol memberi keuntungan kerajaan-kerajaan besar. Semakin menungkat mulai akhir abad XVI dan awal

abad XVII, boleh disebut aktivitas niaga dalam skala besar, memberi reputasi orang Makassar dan terutama Bugis dalam perniagaan maritim. Awalnya mereka hanya *navigator* di antara lainnya, tetapi dari awal mereka tak hanya menguasai teknologi kelautan itu, tetapi tradisi *ilao sompe* (kendati harafiahnya *to set sail*), namun mempunyai makna *looking for adventure*, perdagangan, perkapalan bahkan bermukim di lautan jauh "*in search of good fortune*" (Lineton 1975). Trend itu merefleksikan suatu masyarakat yang menguasai jaringan maritim yang luas. Keluasan komunikasi ini merupakan salah satu fakta sosial yang bisa dikategorikan sebagai elemen modernitas. Nyata bahwa periode ini merupakan awal ekspansi Bugis dan Makassar ke seluruh kepulauan, hal itu terkait dengan pemukiman mereka dalam komunitas pedagang yang meluas di sejumlah besar pelabuhan besar dan kecil atau bahkan *establishment* mereka pada sebuah tempat di mana, mereka dapat membuat ekspektasi keuntungan dari kontrol dan eksploitasi produk-produk khusus: hutan, laut, bijih emas, timah, besi dan yang kerap menjadi *boom* ekonomi lada, tembakau, kopi, kelapa, minyak sawit, pertanian dan sekarang kakao.

Elemen Modernitas 5: Keterbukaan Kultural

Sebuah *moment* yang singkat dari seluruh kelanjutan yang panjang adalah adopsi Islam orang Makassar dan Bugis sejak awal abad XVII; menjadikan mereka bagian dari jaringan baru dalam kontak dengan separuh planet kita (di antara mereka menjadi peziarah sebagai bentuk kesadaran pada aspek religius dalam sejarah mereka). Fakta bahwa merekalah yang membawa elemen Islam ke dalam budaya mereka yang memberi lebih banyak unsur modernitas. Penting dipertimbangkan kenyataan bahwa di dunia Melayu, ekspansi Islam secara tajam terkait dengan eksistensi jaringan perdagangan dari mana pedagang Bugis dan migrannya menjadi bagian itu. Ini mengingatkan kita pada abad pertengahan di Eropa di mana mentalitas modern muncul karena kekayaan perdagangan. Di antara wilayah teritorial

Bugis dan Makassar, bangsawan memang memegang peran penting dalam perdagangan. Implikasinya, perdagangan membawa kelahiran dan perkembangan akses bagi para elit bangsawan untuk lebih mau meninggalkan agama asli dan mitologinya, membuka diri pada ideologi Islam yang lebih egaliter dan lebih reseptif pada etika tanggung jawab individual dan kompeten di dunia usaha.

Elemen Modernitas 6: Transisi dalam Hubungan Kekeluargaan

Di antara orang Bugis, pertalian keluarga tidak mempunyai kepentingan yang sama seperti masyarakat Indonesia lainnya. Sistem *kinship* dalam masyarakat Bugis dan Makassar tidak memunculkan ikatan sedarah yang *discrete*. Masyarakat Bugis merupakan satu di antara yang paling kompleks dan tampak hierarkis di kepulauan dengan strata yang jelas, mencakup beberapa derajat kebangsawanan; yang paling tinggi dipilih berdarah putih (*dara takku*) yang dianggap sebagai turunan dewa-dewa pra-Islam. Menurut kelahirannya, seseorang memiliki peringkat spesifik dan tak berubah. Setelah dewasa, mobilitas sosial dimungkinkan melalui strategi perkawinan yang memberi salah seorang keturunannya menjadi lebih tinggi dari dirinya sendiri dalam hierarki atau melalui usaha individual (Caldwell 1995). Kelaziman ini membolehkan seseorang, dalam kondisi-kondisi tertentu, menjadi sederajat atau bisa dengan rangking lebih tinggi. Misalnya melalui tampilan individu sebagai seorang "pemberani" (*tu barania* atau *to-warani*), orang kaya (*to sugi*), orang pintar (*to acca*) atau ahli agama (*to panrita*). Dalam kondisi tertentu, pengakuan sosial yang diberikan pada bangsawan, dapat diberikan pula kepada tentara yang berjaya, pedagang yang sukses, ahli lontara atau *palontara* (sekarang: sarjana) dan kepada ulama (imam, khatib, ustadz). Kompetisi ke arah posisi itu telah menempati rangking tinggi di antara motivasi-motivasinya (Pelras 1995; 1998).

Elemen Modernitas 7: Keutamaan Individual

Modernitas di Sulawesi Selatan sesungguhnya lahir dalam *rural settlement* (*wanua*); satuan ruang yang sejauh ini dikategorikan sebagai tradisi

kecil (*little tradition*) dan dalam lingkungan komunitas niaga maritim. Sebelum Belanda menentukan kedaulatannya, sebenarnya tidak ada yang benar-benar menampakkan kota dalam arti fisik. Bahkan, menurut Pelras (1998), apa yang disebut kota Makassar pada abad XVII bukanlah kota dalam arti *unified city*, tetapi sebuah kompleks desa yang nyaris tersebar di antara tanah-tanah pertanian dan pohon kelapa milik *domain* berbeda, dengan nama dan bangunan berbeda (Korn 1933; Ossenbrugger 1918; Bulbeck 1992). Menurut Pelras (1998: 26-27), orang Bugis tidak sepenuhnya mempunyai institusi komunitas desa seperti misalnya desa-desa di Bali. Badan-badan pemerintahan didirikan pada level tinggi, misalnya *wanua*: domain yang ditempatkan di bawah seorang bangsawan (*arung*) yang dipilih dan kepala-kepala kerajaan federatif, yang menggiring pengamat abad XIX untuk menyebutnya aristokrasi demokratis. Kemapanan prinsip federatif, yang menjadi dasar kerajaan, mendukung eksistensi jaringan kliental. Tentu ada banyak perbedaan lokal, misalnya otoritas paling sentralis ditekankan di Bone, sedangkan paling desentralisasi ada di Wajo. Negara dalam hal ini memiliki landasan struktural berupa undang-undang legal, hasil pembahasan sejenis dewan *pabicara* (*legist*) yang membandingkan mereka jika perlu, dengan ketentuan hukum Islam (*syara'*) dan mendasarkan apresiasi mereka pada aturan-aturan terdahulu (*ade pura onro*). Ini merupakan situasi yang benar-benar sama dengan praktek legal modern.

Selain itu, kendati raja-raja dan para pembesar Bugis dan Makassar menarik legitimasi mereka dari mitos-mitos kedewaan yang sangat berpengaruh (mengingatkan kita pada raja-raja lain di Indonesia yang mendapat pengaruh India) sejak periode sejarah kuna, tetapi legitimasi kekuasaannya terbentuk melalui pemilihan dewan adat. Kedudukan raja dengan demikian menjadi terbatas, karena kekuasaannya ditentukan dalam kontrak yang mengukuhkan kewajiban dan hak masing-masing (*contractual partnership*) yang nantinya menjadi acuan bagi praktek peradilan. Sekurangnya dari abad XVI, lontara-lontara Bugis telah memformulasikan hak-hak individu

yang diaplikasikan pada suatu monarki konstitusional modern: *maradeka to Wajo-e, adenami napopuang* (orang Wajo itu merdeka, yang dipertuan adalah hukum); sehingga karenanya James Brooke menjuluki Wajo sebagai negara dengan sistem demokrasi aristokratik, setelah ia tahu sistem itu masih berlangsung sampai awal abad XIX.

KESIMPULAN

Modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas yang dilakukan warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan waktu dan ruang. Pengertian itu dikembangkan dari *notion* modernitas sebagai elemen-elemen yang berkenaan dengan kebaruan atau kemutakhiran; hasil gerakan penafsiran kembali doktrin tradisional untuk disesuaikan dengan paham dan aliran modern dalam filsafat, sejarah dan ilmu pengetahuan. Jadi modernisasi berhubungan dengan pembaharuan/kemutakhiran gagasan yang menghasilkan perilaku dan mentalitas masyarakat agar dapat *survive* sesuai dengan tuntutan kontekstual. Ini berarti bahwa dalam proses itu terkandung perubahan yang mencakup dua sisi yang kontras: tradisional dan modern. Kedua sisi itu sering konfrontatif dan kerap menjadi sumber kesenjangan budaya (*cultural gap*). Namun, fakta-fakta sosial yang kita temukan pada komunitas Bugis dan Makassar sejak masa-masa yang kuna, justru telah memberi kita adanya proses modernisasi yang otonom: interaksi, adaptasi dan inovasi.

Dengan kualitas etnisitas itu, komunitas Bugis dan Makassar mestinya siap menghadapi *contemporary global order*. Tradisi menulis yang telah mereka temukan dan mengembangkannya sendiri telah menunjukkan inovasi yang luar biasa untuk acuan masa depan mereka sebelum meluasnya aksara latin yang dibawa bangsa Eropa. Lebih dari itu, secara praktis kemampuan membaca dan menulis yang demikian luas di dunia Bugis dan Makassar memungkinkan mereka menguasai perkembangan pengetahuan dan teknologi, kepastian hukum dan keseimbangan hak dan kewajiban; yang pada awal masa penjajahan telah mengagetkan para pengamat Barat,

karena komunitas Bugis, khususnya Wajo telah mampu mengemansipasi dirinya dari segala kekangan despotisme.

Keluasan jaringan ekonomi Bugis dan Makassar adalah juga sebuah inovasi bagi pengembangan budaya yang terbuka bagi perubahan. Tradisi itu menjadi sangat penting bagi mentalitas modern, baik mengacu pada situasi politik maupun sosial ekonomi yang diterapkan menurut nilai-nilai universal yang sampai hari ini masih berjalan mengikuti baik visi sentralitas-nasional maupun visi etnik-regionalitas. Jika dikembalikan pada kekhawatiran umum tentang *rouleau compresseur* modernitas atas nilai-nilai tradisional, maka orang Bugis dan Makassar telah memberi jawaban melalui kesaksian-kesaksian sejarah dan arkeologinya, bahwa kedua grup etnik itu telah lama memiliki visi modernitas; pengaruh modernisasi Eropa baik selama periode kolonial maupun setelah kemerdekaan yang dipancarkan melalui Batavia ataupun Jakarta, bukanlah sesuatu yang baru. Modernitas itu, nyatanya, dapat berjalan berdampingan seperti sebuah sedan BMW yang melintas di depan kita dan pada saat bersamaan melintas pula sebuah pedati. Dengan koeksistensi itu, terbukti bahwa modernitas dan tradisionalitas justru semakin menguatkan identitas Bugis dan Makassar yang telah tertanam selama berabad-abad lamanya; dasarnya memang etnik, tetapi bukannya identitas budaya itu selalu dibangun dan dibangun kembali yang memungkinkannya untuk komunikasi dan interaksi dengan pembawa identitas lain. Dengan demikian, jika etnik menjadi dasar diferensiasi yang membedakan “kita” dan “mereka” tidak selalu harus dipandang dari dimensi vertikal (pembatas sosial), tetapi dalam dimensi horizontal, identitas itu dengan sendirinya bisa sebagai kreativitas kultural; potensial menghadapi modernisasi.

Kita memang tidak mengatakan bahwa modern itu baik atau tidak, tetapi aset paling bernilai dari orang Bugis dan Makassar adalah bahwa sejarah nenek moyang mereka telah membekali orang Bugis dan Makassar sebuah pandangan keberagaman dan adaptabilitas yang telah menyiapkan

mereka untuk *survive* melewati abad-abad sejarah, selalu berubah dan hampir selalu sama. Singkatnya, dalam lapangan ekonomi dan politik, mereka termasuk komunitas yang memiliki visi global: dalam *economic gap*, situasi sosial-politik yang baru, dan beradaptasi serta membuat inovasi yang mereka bentuk untuk tujuan “kemerdekaan budaya” mereka. Semua inovasi itu menjadi saksi seluruh elemen pragmatisme yang penting dalam mentalitas Bugis dan Makassar, tidak terbatas hanya di Sulawesi tetapi juga di kepulauan Asia Tenggara di mana mereka bisa berlayar, berdagang dan bermukim.

Akhirnya, jika boleh, kita bisa mengatakan bahwa keluasan komunikasinya dengan dunia kepulauan dan Asia Tenggara daratan, semestinya menjadi aset berharga untuk sebuah “kesadaran” dan “jati diri” yang telah membentuk mereka sebagai salah satu warga dunia Melayu (*Malay world*). Dan, sejak masa-masa perjuangan kemerdekaan, kedua grup etnik itu telah mewarisi nasionalitas Indonesia dalam sebuah *potpourri* etnik nusantara. Fakta-fakta sejarah itu telah meyakinkan Dr. Christian Pelras untuk mengatakan seperti tertera pada awal karangan ini, “Mereka berlomba membentuk kebangsaan Indonesia, satu tetapi kaya dengan keberagaman, yang tidak menginginkan kepunahannya, karena ia (Indonesia) sendiri yang tidak memungkinkan merubah identitasnya, yakni ‘kemerdekaan budaya’, untuk menghadapi kebudayaan dunia yang disterilkan dengan modernitas yang tak pernah menyusut”.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ambo Enre, Fahkrudin.

1999. **Ritumpanna Welenrenge, sebuah Sastra Klasik Galigo.**
Jakarta: EFEO-FSUI-Yayasan Obor Indonesia.

Andaya, Leonard Y.

1978. "Treaty Conceptions and Misconceptions: A Case Study from South Sulawesi", **BKI**, 137: 275-295.

Bulbeck, David F.

1992. **A Tale of Two Kingdoms: The Historical Archaeology of Gowa and Tallok, South Sulawesi, Indonesia**, Unpublished PhD. Thesis, Canberra: ANU.

- 1996-97. "Ancient Chinese and Southeast Asian Bronze Age Cultures", Noel Barnard (ed., transl.), **The Proceeding of a Conference held at the Edith and Joy London Foundation Property, Kioloa, NSW: 8-12 February 1988.**

Caldwell, Ian.

1995. "Power, State and Society among the Pre-Islamic Bugis", **BKI**, 152.

Cortessão, Armando (ed., transl.).

1944. **The Suma Oriental of Tome Pires**, London: Society Hakluyt.

Dupont, Pierre.

1957. "A Propos de Deux Buddha en Bronze de Célèbes", **Bulletin van de Vereniging van Vrienden der Aziati**, 8: 121-126.

Fadillah, Moh. Ali.

1999. "Survei dan Ekskavasi Bontoa-Bontoa, Bantaeng Timur: Investigasi Awal", **Walennae Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara**, 3: 13-38.

Grimes, Charles F. And Barbara D. Grimes.

1987. **Languages of South Sulawesi**, Canberra: Australian National University Pacific Linguistic Series D, 78.

Hadar, Ivan A.

2000. "Etnisitas dan Negara Bangsa". **Kompas**, 29 Mei 2000: 4-11.

Hadimuljono & Macknight, C.C.

1983. "Imported Ceramic in South Sulawesi", **Review of Indonesian and Malaysian Affairs**, 17: 66-91.

Jones, Siân.

1997. **The Archaeology of Ethnicity, Constructing Identities in the Past and Present**, London and New York: Routledge.

Liebner, Horst H.

1998. "Four Oral Versions of a Story about the Origin of the Bajo People of Southern Selayar", in Kathryn Robinson & Mukhlis Paeni (eds.), **Living Through Histories, Culture, History and Social Life in South Sulawesi**, Canberra: ANU & ANRI.

Lineton, Jacqueline.

1975. "Pasompé Ugi': Bugis migrants and Wanderers", **Archipel** 10: 173-201.

Lombard, Denys.

1979. "Regard nouveau sur les pirates malais (première moitié du XIXe siècle)" **Archipel**, 8: 231-249.

Macknight, C.C.

1993. "The Rise of Agriculture in South Sulawesi before 1600", **Review of Indonesian and Malaysian Affairs**, 17: 92-116.
- "The Emergence of Civilisation in South Celebes and Elsewhere", A. Reid & L. Castles (eds.), **Pre-Colonial State Systems in Southeast Asia**, MMBRAS, 6: 126-135.

Pelras, Christian.

1995. "Les Bugis et la Modernité", **Perspectives Indonésiennes**, Paris: L' Ambassade de la République d'Indonésie.
1996. **The Bugis**, Oxford: Blackwell Publishers.
1998. "Bugis Culture – A Tradition of Modernity", in Kathryn Robinson & Mukhlis Paeni (eds.), **Living Through Histories, Culture, History and Social Life in South Sulawesi**, Canberra: ANU & ANRI.

Perret, Daniel.

1975. **La Formation d'un Paysage Ethnique, Batak & Malais de Sumatra Nord-Est**, Paris: EFEO.

Poespowardojo, Soerjanto.

- 1993/4. "Arkeologi dan Jatidiri Bangsa", **Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI**, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional: 15-21

Reid, Anthony.

1983. "The Rise of Makassar", **Review of Indonesian and Malaysian Affairs**, 17: 117-160.

Sedyawati, Edi.

1993/4. "Arkeologi dan Jatidiri Bangsa". **Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI**, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional: 23-36

Tjandrasasmita, Uka.

1970. **The South Sulawesi Excavation Project Final Report**, Jakarta: Jajasan Purbakala.

MASA KLASIK INDONESIA DALAM LINGKUP ASIA TENGGARA

Sri Soejatmi Satari

PENDAHULUAN

Indonesia, merupakan gugusan kepulauan yang bersama-sama dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, Benua, telah mencapai taraf budaya yang tinggi sejak masa prasejarah, kecuali di bidang pertulisan, ketika terjadi kontak dengan dua negara yang memiliki tradisi besar, ialah India dan Cina.

Sumbangan besar yang diberikan India adalah agama Siwa-Buddha dan pengenalan tulisan beserta perangkat atau budaya materi yang menyertainya, misalnya bangunan, arca, alat-alat upacara dan sebagainya. Taraf budaya yang telah dicapai sebelum masuknya pengaruh budaya dari India, mempermudah adaptasi budaya Hindu-Buddha menjadi budaya lokal. Sebagai contoh, pantheon agama Hindu di masing-masing negara ditambah dengan dewa dan tokoh lokal, seperti *nath* di Myanmar, arca Panji dan Purnakawan di Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga pada beberapa negara di Asia Tenggara, terutama Asia Tenggara Benua/Daratan. Negara-negara di sini yang secara intensif mendapat pengaruh agama dan budaya Hindu-Buddha adalah Myanmar yang dahulu disebut Ramanyadesa (Coedes 1968) atau Suwarnabhumi (Krom 1926) Thailand, Kamboja dan Campa, Laos dan Vietnam, yang kemudian menguasai Cam-

pa. lebih banyak mendapat pengaruh Cina. Di samping bahasa Sanskerta masuk pula karya sastra; yang terpenting di antaranya adalah Ramayana dan Mahabharata.

Pengaruh yang didapatkan dari Cina terutama dalam bidang politik dan ekonomi yang keduanya saling berhubungan. Kewajiban negara di Asia Tenggara untuk mengirim upeti ke Cina, kecuali sebagai pengakuan atas kedaulatan Kaisar Cina, sebenarnya juga merupakan perdagangan terselelubung. Sebagai balasan atas barang-barang yang dikirimkan, kaisar Cina akan menghendahkan berbagai benda yang berharga. Di dalam sektor ekonomi, mata uang kepeng menjadi mata uang yang berlaku di seluruh Asia Tenggara sebagai alat tukar resmi, meskipun ada di antaranya yang mempergunakan mata uang kepeng untuk menghemat pembuatan dan pemakaian mata uang lokal (Wicks, Holtzappel). Hal ini misalnya terjadi di Majapahit dengan tujuan menghemat bahan baku mata uang lokal.

Sejak awal masa Hindu-Buddha, tampak kesejajaran dalam perkembangan negara pertumbuhan dan perkembangan negara-negara di Asia Tenggara (Suwadi Sjafei). Hubungan politik, keagamaan dan kebudayaan terjadi antara Indonesia dan negara-negara lain, terutama dengan Kamboja, Thailand dan Champa. Tidak semua satuan kebangsaan atau negara di Asia Tenggara mengambil alih citra kehinduan secara serempak dan sama rata (Edi Sedyawati 1998: 13-16).

Di dalam makalah ini akan dibahas hubungan antara Indonesia yang di sini kami batasi sekitar pulau Jawa dengan kerajaan di Kamboja, Thailand dan Champa. Setiap kali akan dibahas bersama salah satu kerajaan, dengan sejarah singkat kerajaan tersebut, serta disebutkan titik-titik temu antara kerajaan tadi dengan kerajaan atau salah satu bagian dari periode Klasik di Jawa.

1. Hubungan Jawa dengan Kamboja

Kamboja terletak di antara Thailand di barat, Laos di utara, Champa yang sekarang disebut Vietnam di timur dan Teluk Siam di selatan. Di ut-

ra terdapat Danau Besar dengan persediaan ikan yang melimpah ruah dan dialiri oleh Sungai Mekhong. Sejarah Kamboja terdiri dari dua tahapan, yaitu :

1. Masa Pre-Angkor, yang dibagi atas Masa Funan (abad I-VI) dan Masa Chen-la (abad VII-VIII)
2. Masa Angkor (abad VIII-XIV).

Funan (abad I-VI)

Menurut berita Cina yang disampaikan oleh Kang Tai (abad III), Kerajaan Funan didirikan oleh *Hun-tien* atau *Kaundinya*, yang datang dari India, jazirah Melayu atau pulau di Selatan. Ia diberi busur ajaib oleh “dewa pelindung”nya, dan dipesan untuk pergi ke arah timur dengan naik kapal yang mendarat di Funan. Ratu setempat yang bernama Liu-Yeh, berusaha merompaknya. Dengan panah dan busur ajaibnya *Hun-tien* berhasil menundukkan Liu-yeh, dan dengan Ratu ini sebagai pendampingnya *Hun-t'ien* menjadi penguasa di Funan.

Cerita ini merupakan versi Cina dari cerita serupa yang dituliskan pada Prasasti di Mi-son (Campa) yang berasal dari abad X. Di dalam prasasti tersebut diuraikan bahwa Kerajaan Funan didirikan oleh *Kaundinya* yang berasal dari India. Dengan tombak pemberian *Aswattama*, anak *Drona*, ia berangkat ke arah timur. Dengan melemparkan tombaknya ia menandai kerajaan yang akan didirikannya. Ia menikah dengan putri seorang raja naga yang menguasai delta Sungai Mekhong, bernama *Soma* dan anaknya bernama *Soma*. *Kaundinya* dan *Soma* menurunkan *Somawangsa* (*Finot*, *Coedes*). Wilayah Funan meliputi Vietnam Selatan, Mekhong Tengah dan Selatan, sebagian dari daerah aliran sungai *Menam* dan sebagian dari Jazirah Melayu.

Funan terletak 500 li (200 km) dari laut (*Coedes* 1968: 36-37). Pelabuhan internasional kuno di wilayah ini adalah *Oc-eo*, sekarang terdapat di Vietnam. Raja Funan bergelar *Parwatabhupala* atau *Sailaraja* (*Skt*), atau *Kurung Bnam* (*Khmer*) yang artinya Raja Gunung. Ibu kotanya ada di

Wyadhapura (=Te-mu kota pemburu) dekat Bukit Ba Phnom, tempat didirikan bangunan suci yang menyimpan arca Siwa dalam bentuk lingga. Di Funan berkembang agama Hindu maupun Buddha.

Pada awal abad VII, Funan dikuasai oleh Chenla, bekas vasalnya. Di dalam berita T'ang disebutkan bahwa Funan (seperti halnya kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara) tetap mengirim utusan ke Cina sampai paruh pertama abad VII, tetapi seterusnya sumber tersebut juga menyebutkan bahwa ibu kota sang raja ada di kota Te-mu. Tiba-tiba kota ini di kalahkan oleh Chenla dan raja harus pindah ke Na-fu-na atau Waranaranagara yang terletak di daerah selatan.

Chenla adalah kerajaan yang terletak di barat daya Lin-yi (Campa) (Hall 1970: 94). Kerajaan ini tadinya terletak di utara Funan, meliputi wilayah Mekhong Hilir dan Mekhong Tengah, yang sekarang masuk wilayah Kamboja Utara dan bagian selatan dari Laos. Sebelum menaklukkan Funan, ibu kota Chenla terletak dekat Gunung "Ling-kia-po-p'o atau Lingaparwata yang dipuncaknya dibangun bangunan suci yang disebut P'o-to-li atau Bhadreswara. Untuknya raja setiap tahun mengadakan upacara kurban manusia.

Dalam Prasasti Baksei Chamkrong (abad X), disebutkan bahwa raja-raja Chenla merupakan keturunan dari pendeta Kambu Swayambhuwa dan bidadari Mera. Nama lain dari Chenla adalah Kambuja (=keturunan Kambu). Kalau raja-raja Funan termasuk Somawamsa, maka raja-raja Chenla termasuk dalam Suryawamsa. Keluarga raja-raja Chenla juga mengadaptasi legenda tentang Kaundinya dan Nagini. Hal ini terjadi karena salah seorang raja Funan, Bhawawarman menikah dengan putri dari Chenla. (Coedes 1986).

Kepercayaan kepada Nagini sebagai pelindung kerajaan akan terus berlangsung hingga masa Angkor dalam abad XIII, seperti dilaporkan oleh Chou-ta-kuan. Karena adanya Kaundinya sebagai penakluk dan Soma atau Lin-yeh sebagai pemilik sah dari wilayah di Kamboja, maka pergantian takhta dilakukan secara patriarkhal, tetapi melalui jalur matrilineal.

Tanggapan tentang Wangsa Sailendra di Jawa

Berdasarkan gelar yang disandang raja-raja Funan, ialah Saileraja atau Parwatabhupala, yang artinya sama dengan gelar raja-raja Sailendra di Jawa, Coedes dalam "Indianized States of Southeast Asia" (mengajukan hipotesa bahwa mungkin raja-raja Sailendra di Indonesia merupakan keturunan dari raja-raja Funan, pertama karena gelar kedua *wamsa* tadi mempunyai arti sama, ialah Parwatabhupala atau Saileraja (Funan) dan Sailendra (Jawa) dan kedua agama Budha Mahayana menjadi agama pokok di kerajaan tersebut. Pendapat ini diperkuat oleh isi Prasasti Kelurak (de Casparis 1950: 191-192) yang menyebut istilah "*narawarasamskara*" (= upacara penobatan raja), yang mirip nama ibukota Funan yang baru, *Narawaranagara* (=Nafu-na) yang terletak di selatan. Kemudian prasasti Plaosan dalam huruf Pre-Nagari, yang di bagian akhirnya menyebutkan tentang "Sailendram Waranaradhirajaram yang berarti "raja seluruh adhiraja (yang menguasai) manusia-manusia utama", yang menurut de Casparis mengacu kepada pendiri dinasti tersebut (ibid hal. 104).

Ditambahkan oleh Coedes, bahwa dalam salah satu prasasti berlatar agama Buddha tertua di Kamboja, ialah prasasti Vat Prei Val, tercantum nama "Naravaraganagara", yang berarti tempat tinggal raja. De Casparis juga berpendapat bahwa waktu jatuh dan berpindahnya Ibukota Funan ke selatan pada akhir abad VII sesuai dengan munculnya Sailendra di Jawa pada awal abad VIII. Dan pendaratan dari Funan ini mengalahkan keluarga dinasti Sanjaya Mataram yang beragama Saiwa.

Poerbotjaroko menentang pendapat ini. Menurutnya, Sanjaya dan keturunannya adalah raja-raja dari dinasti Sailendra, yang asli Indonesia, dan penganut agama Siwa, tetapi sejak Rakai Panangkaran memerintah, mereka menjadi pemeluk agama Buddha. Pendapat ini diperkuat oleh adanya temuan Prasasti Sojomerto (Buchari 1966: 241-251), yang ditulis dalam bahasa Melayu Kuno dan menyebutkan nama Dapunta Selendra. Nama, gelar, maupun bahasa yang dipergunakan jelas-jelas menunjukkan unsur Indonesia asli. Nama Selendra berasal dari nama Sailendra. Dapunta Selendra ini beragama Hindu. Karena adanya pemakaian bahasa Melayu, diduga dinasti

ini berasal dari Sumatra. Kemudian raja-raja wangsa Sailendra ini memeluk agama Buddha, yang buktinya didapatkan dalam prasasti lain. Jadi di sini ada dua pendapat mengenai dinasti Sailendra yang ada di Indonesia. Pendapat pertama Dinasti Sailendra berasal dari Funan. Yang kedua, Dinasti Sailendra adalah asli Indonesia.

Sebenarnya ada pendapat lain, yang menyatakan bahwa Dinasti Sailendra berasal dari India, tetapi pendapat ini sudah lama tidak lagi diikuti para pakar. Peristiwa kedua mengenai adanya kontak antara Kamboja dan Jawa kita dapatkan dari berita Arab. Seorang pedagang Arab, Sulayman pada tahun 851 melaporkan kisah pelayarannya dan kejadian yang menimpa Kamboja, atau disebut juga Khmer. Dan kisah ini merupakan pengantar ke masa Angkor.

Dahulu ada seorang raja Khmer yang masih muda dan berkuasa dan suka bertindak tanpa berpikir panjang. Bersama para menterinya ia membicarakan kejayaan Maharaja Zabag, tentang kejayaan, rakyatnya yang banyak dan pulau-pulau yang dimilikinya. Raja Khmer, yang terdorong rasa iri, ingin melihat kepala sang maharaja dipersembahkan kepadanya di atas piring. Maharaja yang mendengar keinginan raja Khmer, mengirimkan 1000 perahu dengan prajurit bersenjata lengkap ke Khmer. Setelah mennggal kepala raja Khmer yang pongah, Maharaja Zabag kembali ke negaranya tanpa mengusik rakyat Khmer atau harta benda mereka sedikitpun. Kepala raja tersebut diawetkan dan dikirim kembali ke Khmer. Tindakan Maharaja ini mengangkat derajatnya di mata raja-raja India dan Cina. (Briggs 67-68).

Kemungkinan besar yang disebut Maharaja Zabag ini adalah Raja Sailendra. Kemudian Maharaja memerintahkan para menteri Khmer untuk memilih raja baru. Pilihan jatuh kepada Jayawarman II. Untuk sementara calon raja ini tinggal di istana Maharaja di Jawa.

Masa Kerajaan Angkor

Sesudah lama tidak ada kabar berita mengenai Kamboja, maka muncul sebuah prasasti yang sangat penting mengenai genealogi raja-raja Khmer bersama para pendeta pendampingnya yang mempunyai peran besar

dalam kehidupan raja. Prasasti ini dikenal dengan nama Prasasti Sdok Kak Thom (abad XI). Sesuai dengan tradisi sesudah tahun 802, raja-raja Kamboja disebut dengan nama anumertanya.

Prasasti ini terutama menyebutkan bangunan-bangunan suci yang didirikan oleh keluarga pendeta Siwakaiwalya yang secara turun-temurun bertindak sebagai "hotar" (pendeta istana) dan "purohita" (pemimpin pendeta) dewaraja selama $2\frac{1}{2}$ abad, dari tahun 802 hingga 1052. Bagian awal dari prasasti ini menyebutkan bahwa:

"Kemudian Sri baginda Sang Parameswara (=Jayawarman II, pen.) datang dari Jawa untuk menjadi Kurung (=raja) di kota suci Indrapura. "Steng an" Siwakaiwalya, nenek moyang yang bijak, menjadi "guru", menjadi "rajapurohita" Sri Paduka Parameswara".

Jadi Indrapura merupakan ibu kota Jayawarman II yang pertama. Dari isi prasasti Sdok kak Thom selanjutnya dapat diketahui berbagai rencana besar Jayawarman II. Yang pertama adalah untuk menyatukan Kamboja yang terpecah-belah, bahkan akan memperluasnya, bila waktunya sudah tiba. Kedua, ia ingin melepaskan dirinya dari kekuasaan Maharaja dengan mengambil langkah-langkah berikut:

Memindahkan ibukota berkali-kali (sebanyak 5 kali), ialah Indrapura, Hariharalaya, keduanya merupakan kota lama, kemudian mendirikan ibu kota baru di Amarendrapura. Baik Hariharalaya maupun Amarendrapura terletak di sekitar Danau Besar, tempat sumber ikan yang tak kunjung habis dengan daerah subur di sekitarnya.

Kota keempat yang ditinggalkannya adalah Mahendraparwata atau Phnom Kulen yang agak terpencil di bagian timur laut, kemudian ia kembali lagi ke Hariharalaya atau Roluos, tempat ia meninggal dunia dengan nama anumerta Parameswara yang menandakan bahwa ia seorang Saiwa.

Dari lima ibu kota tadi, maka Phnom Kulen yang terletak di atas bukit merupakan kota yang terpenting, karena di sinilah Jayawarman menyatakan dirinya lepas dari Jawa pada tahun 802 melalui sebuah upacara Tantris, dengan mengundang seorang brahmana dari India, bernama Hiranyadama yang ahli dalam ilmu magi. Upacara ini berdasarkan 4 naskah Tantris,

ialah Sirascheda, Vinasikha, Sammoha dan Nayottara yang diajarkannya kepada Siwakaiwalya. Dengan upacara ini ia menjadi seorang *cakrawartin*, penguasa dunia, yang tidak usah tunduk kepada raja-raja lain. Kecakrawartinannya ini dilambangkan dengan pendirian sebuah lingga, serta menciptakan kultus dewaraja sehingga raja dianggap sebagai pengejawantahan dewa Siwa. Mungkin pendirian lingga ini dipelajarinya dari Jawa.

Di Phnom Kulen ia mendirikan bangunan-bangunan suci yang kemudian dikenal dengan Gaya Kulen, yang sangat dipengaruhi oleh seni arsitektur Campa yang berbentuk kubus dan mulai tampak pengaruh Jawa, meskipun belum menonjol, khususnya dalam seni hiasnya. Bahan yang dipakai adalah *sandstone* (batu pasir).

Sejak masa Jayawarman II pemberian nama anumrta menjadi tradisi, meskipun sebenarnya nama anumrta ini sudah ditemukan pada masa Pre-Angkor. Dengan pemerintahan Jayawarman II mulailah periode Angkor di Kamboja dengan pusat sekitar wilayah Siem Reap yang terletak di sebelah utara Danau Besar. Pengaruh gaya seni dari Jawa baru tampak pada masa pemerintahan Indrawarman I (877-889) (Briggs 1951: 100). gaya seni masa ini disebut juga Gaya Seni Indrawarman. Pengaruh dari Jawa ini meliputi :

1. Hiasan ambang pintu atas berupa kala dengan makara yang menghadap ke luar (divergent makaras) seperti yang terlihat pada lintel pada bangunan Preah Ko. Sebaliknya Kamboja juga mempengaruhi gaya seni Jawa dengan makara yang menghadap ke dalam (convergent makaras), misalnya seperti pada lintel Candi Sari.
2. Penggambaran tokoh-tokoh dengan hiasan raya, seperti kita lihat pada arca-arca jaman Sailendra di Jawa Tengah.
3. Penggambaran Wisnu di atas garuda.
4. Dwarapala sebagai pengapit pintu masuk dan penjaga halaman bangunan suci serta apsara sebagai relief pada dinding luar.

Perkiraan adanya kontak sejarah antara Indonesia dan Kamboja didapatkan dari Carita Parahyangan yang berasal dari abad XVI yang menurut Poerbotjaroko masih dapat diacu untuk penelitian sejarah. Dalam

kitab tersebut diceriterakan bahwa raja Sanjaya yang berasal dari Jawa Barat, kemudian berpindah ke Jawa Tengah, telah mengalahkan beberapa kerajaan, antara lain Kemir (=Khmer, Kamboja) dan Cina (mungkin daerah Campa atau Vietnam). Meskipun belum dapat dibuktikan bahwa Sanjaya betul menyerang Kamboja, mungkin serangan Maharaja Jawa terhadap Kamboja pada abad VIII dapat dijadikan perbandingan.

FDK Bosch pernah mengajukan suatu hipotesa tentang hubungan Kamboja dengan Jawa Timur dan Bali. (Briggs 1951: 147-148) (Bosch 1961:47-107)

Pada tahun-tahun terakhir abad X, terjadi kekacauan di Kamboja. Kakak permaisuri Raja Jayawarman V, yang sedang mengandung bayi yang kelak akan menjadi raja, mengungsi ke Jawa Timur bersama anaknya, yang bernama Narapatiwirawarman. Anak yang baru lahir di Jawa diberi nama Udayadityawarman. Kedua anak tersebut dibesarkan di Jawa atau Bali. Udayadityawarman, yang kemudian disebut Udayana menikah dengan Mahendradatta, putri raja keturunan Dinasti Mataram, dan bersama-sama mereka memerintah di Bali dan mempunyai anak Airlangga. Ketika Raja Jayawarman V dari Kamboja meninggal, maka Udayana dan istri serta kakaknya dipanggil pulang ke Kamboja. Udayana diangkat menjadi raja dengan gelar Udayadityawarman I, dan Narapatiwirawarman dijadikan panglima yang selalu meraih kemenangan sekitar tahun 1001. Sekitar tahun itulah tidak ada lagi prasasti yang dikeluarkan oleh Mahendradatta dan Udayana. Udayadityawarman digantikan oleh Jayawirawarman yang oleh Bosch disamakan dengan Narapatiwirawarman. Sesudah memerintah setahun saja, Udayadityawarman rupanya kembali ke Bali. Pada tahun 1011 muncul lagi prasasti yang dikeluarkan Udayana. Sementara itu anaknya, Airlangga, yang sempat mengungsi karena Pralaya, dengan bantuan pengiringnya yang setia, Narottama, berhasil merebut lagi tahta mertuanya. Oleh Bosch, Narottama ini diidentifikasi sebagai Narapatiwirawarman, yang kembali ke Jawa setelah kalah bersaing dengan Raja Suryawarman I. Kami serahkan kepada para pakar apakah akan menerima atau menolak hipotesa ini.

SUMBER-SUMBER TERTULIS YANG TERDAPAT DI JAWA

Prasasti Kamalagyan

Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Airlangga (abad-11), yang memerintahkan membuat bendungan di Sungai Brantas sehingga menyebabkan kegembiraan pemilik-pemilik perahu yang mengambil muatan ke Hujung Galuh, dan juga menyenangkan hati para nakhoda kapal, dan pedagang dari negara-negara yang berkumpul di Hujung Galuh (Krom 1926:261).

Di samping itu banyak orang asing yang disebut *wargga kilalan*, bertempat tinggal di dalam Kerajaan Airlangga, misalnya Kling, Singhala, Drawida, dari India dan dari daratan Asia Tenggara, orang-orang Campa, Rêmên (= Ramanyadesa = Pegu atau Myanmar), dan Kmir (= Khmer) (ibid:260).

Sebuah prasasti yang berasal dari zaman Majapahit, Prasasti Wurudu Kidul, berisi penolakan tuduhan dari seseorang yang bernama Pu Danadhi bahwa ia bukan orang asing (*wargga kilalan*) keturunan Khmer, melainkan seorang penduduk asli. Kemudian Pu Danadhi mengadu lagi karena dia diharuskan menarik pajak sebagai seorang asing atau *wargga kilalan*, yaitu orang Kmir, padahal ia penduduk asli. (Sejarah Nasional Indonesia II 1984).

Sumber tertulis lain berupa naskah lontar Nagarakrtagama Bab 3 tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia yang mengirim upeti ke Majapahit dan kerajaan lain yang merupakan kerajaan tetangga. Yang disebut belakangan ini meliputi: Syanka (= Siam), Ayodhyapura, Dharmanagari (=Nakhon Si Thammarat), Marutma (= Myanmar), Rajapura (menurut Robson = Ratburi), Singhanagari (menurut Robson = Singburi), Campa, Kamboja, dan Yawana (= Annam) (Pigeaud 1960: III: Sarga 15, pupuh 1-4). Di samping itu, pada waktu diadakan perayaan tahunan di Kraton Majapahit berdatanganlah para tamu dari negara lain, ialah bhiksu dan brahmana yang menumpang kapal-kapal pedagang, dari Jambudwipa (= India), Kamboja, Cina, Yawana, Campa, Karnataka, Goda (= Gauda), Syangka.

Salah satu komoditi yang penting dari Kamboja adalah keramik Khmer (Dawn Rooney: *Khmer Ceramics*. Singapore, Oxford University Press, 1984). Sebaliknya, suatu "ekspor" budaya yang penting dari Jawa ke Kamboja dan Thailand adalah ceritera Panji pada abad XVII, dengan tokoh utamanya Inao (= Inu Kertapati) dan Bossaba (Candra Kirana).

HUBUNGAN JAWA DENGAN THAILAND

Thailand terletak di antara Myanmar di barat dan barat laut, Laos di utara dan timur laut, dan Kamboja di timur, sedang di selatan terletak Teluk Siam. Sungai terbesar di sini adalah Sungai Menam atau Sungai Chao Praya, dan Thailand merupakan satu-satunya negara yang belum pernah dijajah bangsa barat.

Secara garis besar, sejarah Thailand masa Hindu-Buddha dibagi atas dua tahap:

1. sebelum dominasi bangsa Thai
2. sesudah dominasi bangsa Thai (Diskul, Subhadradis 1986)

Untuk menguraikan sejarah sebelum dominasi bangsa Thai lebih sulit daripada sejarah sesudahnya, karena sejarah dari masa tersebut tidak dapat dikotak-kotakkan melalui pembagian wilayah, ataupun genealogi raja-raja, tetapi lebih banyak ditentukan oleh kelompok etnis, pengaruh-pengaruh budaya dari luar maupun yang asli, yang tersebar antar wilayah. Itu sebabnya, misalnya, ada perbedaan pendapat antara Subhadradis Diskul dengan Piriya Krairiksh tentang seni Sriwijaya. Bila yang dimaksud oleh Diskul dengan gaya Sriwijaya adalah gaya seni yang berpusat di Chaiya dan Nakhon Si Thammarat, yang oleh Satyawati Suleiman disebut Gaya Sailendra, maka Piriya lebih suka menyebutnya dengan Gaya Peninsular, karena ciri-ciri gaya tersebut tersebar di seluruh Thailand. Dan sesungguhnya belum banyak bukti-bukti kita temukan mengenai hubungan yang ada antara Indonesia, khususnya Jawa, dengan Thailand masa Hindu-Buddha kecuali seni Sriwijaya, dan beberapa toponim yang masih harus dicari kaitannya.

Di Thailand sendiri, pada tahap sebelum adanya dominasi bangsa Thailand, awal sejarahnya dimulai dengan adanya hubungan dengan India pada abad IV, yang dibuktikan oleh temuan arca-arca Hindu dari masa itu.

Kemudian muncul kegiatan budaya yang berpusat di Dwarawati dari suku bangsa Mon yang menghasilkan arca-arca baudha, meterai, dan tinggalan di Nakhon Pathom dengan stupa dan arca-arca Buddha. Bangunan utamanya adalah stupa. Dalam membangun stupa adakalanya dibangun lebih dari satu kali dengan cara melapisinya (*par emboitement*).

Arca-arca khas Dwarawati, misalnya arca Panasbati, yang menggambarkan Buddha berdiri di atas binatang yang merupakan percampuran antara wahana Brahma, Wisnu, dan Siwa. Arca ini membuktikan bahwa Buddha lebih tinggi kedudukannya dari agama-agama lainnya. Ada pula arca/relief yang menggambarkan Buddha turun dari surga *Tawatimsa*, dengan *cattra* dan diapit oleh dewa Indra dan Brahma. Banyak pula ditemukan roda cakra dari batu yang dilengkapi dengan arca kijang. Relief lain menggambarkan mukjizat di Srawasti, di mana Buddha membuktikan keunggulan dirinya kepada mereka yang tidak percaya dengan menggandakan diri.

Arca-arca Hindu berupa arca Wisnu, Kresna, Surya dan Ardhanareswari, Ganesa, serta lingga ditemukan tersebar di berbagai tempat, hingga ke wilayah utara. Gaya seni Sriwijaya, yang jelas menunjukkan agama Mahayana, antara lain diperlihatkan oleh torso Awalokiteswara di Chaiya yang menampakkan pengaruh pasca-Gupta dan seni Pala-Sena. Ditemukan pula arca Buddha yang duduk dinaungi oleh naga. Sebagian daripadanya menunjukkan pengaruh Khmer.

Masa dominasi bangsa Thai berlangsung dari abad XIII-XV, yang disebut Gaya Sukhothai, yang merupakan puncak keindahan seni Thai, kemudian Gaya Chiangsaen, Uthong, Ayuthya, dan Bangkok. Gaya Bangkok telah dipengaruhi Gaya Cina dan Eropa. Dua wilayah yang terkait dengan Jawa ialah Dwarawati dan Ayuthya yang akan kami uraikan di bawah ini.

BEBERAPA KETERKAITAN ANTARA JAWA DAN THAILAND

1. Temuan Arkeologi

Temuan ini berupa bangunan-bangunan dan meterai tanah liat di Situs Blandongan, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Kerawang (Pieter Ferdinandus 1998:185-190). Penelitian di Blandongan dimulai pada tahun 1985, dan pada tahun 1995 ditemukan bagian bangunan dengan beberapa anak tangga berupa batu andesit dan batu bata. Beberapa anak tangga terdiri atas pipisan. Ditemukan pula meterai, baik utuhan maupun fragmen, dan keramik. Meterai dibagi atas 2 jenis. Jenis pertama bergambarkan 6 arca Buddha tanpa tulisan, dan kelompok kedua berupa relief arca-arca Buddha dengan tulisan di bawahnya. Pada relief tergambar 3 arca Buddha Amitabha di deretan atas dalam sikap bersila, sikap tangan *abhaya-mudra*, dan sederet arca berjumlah 3 di bawahnya. Arca yang duduk di tengah dengan salah satu kaki terjuntaikan dan sikap tangan *witarka-mudra*, diapit oleh dua orang Buddha yang berjalan dengan posisi badan *tribhanga*. Relief ini menggambarkan mukjizat Srawasti (O'Connor 1974, Ferdinandus 1995).

Sesudah membandingkan dengan temuan-temuan meterai lain yang pernah diteliti, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, serta sumber-sumber tertulis, maka Pieter Ferdinandus memperkirakan bahwa meterai-meterai tersebut bergaya Dwarawati dari abad VII. Ada hal yang ingin kami kemukakan di sini, tentang relief yang baik oleh Coedes O'Connor maupun Ferdinandus dianggap sebagai adegan keajaiban Srawasti. Dalam hal itu maka sikap tangan Buddha harus dalam *Bhumisparsa* atau *Dhyana-mudra*, dan Buddha dikelilingi Buddha-Buddha lain dalam berbagai sikap.

Tetapi adegan pada meterai Batujaya agak lain, Buddha digambarkan dengan sikap tangan kanan *witarka mudra* dan diapit oleh dua orang yang mengenakan *Kirita makuta*. Di dalam adegan Buddha berada di surga *Tawatimsa* untuk memberi wejangan kepada ibunya ia digambarkan dengan sikap tangan kanan dalam *witarka mudra* dan dia diapit oleh dua Brahma dari Indra (Lihat Diskul 1986, 9b.6 dan catatan hal 37. Relief ini ditemukan di *Nakhon Pathom* terdiri dari 3 bagian yang berurutan dari atas ke bawah.

1. adegan Surga Tawatimsa 2. Adegan Srawasti 3. Adegan Surga Tawatimsa. Mungkin saja karena ukurannya kecil, maka 2 adegan ialah Tawatimsa dan Srawasti dijadikan satu; 3 Budhha yang duduk di deretan atas menggambarkan Srawasti, sedang kedua dewa menggambarkan Indra dan Brahma (lihat juga O'Connor hal. 80).

Nama Thailand atau dahulu disebut Sangkya, yang terdapat di prasasti maupun dalam naskah Nagarakrtagama telah diuraikan di depan. Hanya perlu ditambahkan sedikit bahwa Marutma atau Martaban, pusat Kerajaan Mon awal (abad XIV) pernah diduduki Sukhotai sebentar, sedangkan Ratburi terletak di barat daya Bangkok, dan Singburi ada dekat Ayudhya (Robson).

Perlu ditambahkan di sini bahwa nama Syam, yang artinya sama dengan Siam, ditemukan dalam Prasasti Campa abad XI dan dalam prasasti di Kamboja abad XIII (Coedes 190-1), sedangkan Ayuthya atau Ayodhya didirikan pada tahun 1350, saat kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya.

III. HUBUNGAN JAWA DENGAN CAMPA

Campa

Campa masa Hindu-Buddha selama berabad-abad merupakan sebuah kerajaan, yang terbentang sepanjang Laut Cina, yang kini termasuk dalam wilayah Vietnam. Kerajaan yang pernah jaya dari abad II-XV, musnah karena serangan bangsa Vietnam, dan kini hanya meninggalkan reruntuhan tinggalan arkeologis, dan sisa ± 40.000 orang Campa yang menetap di Vietnam Tengah, Vietnam Selatan, dan Kamboja (P.B. Lafont: Kerajaan Campa 1981: 263-284).

Kerajaan Campa di masa jayanya berbatasan dengan Kerajaan Laos dan Annam di utara (sekarang juga masuk Vietnam), Laut Cina Selatan di timur dan selatan, dan Kamboja di barat. Dalam berita Cina, Campa disebut Lin-yi, dan disebutkan pula bahwa Jawa terletak di barat daya Lin-yi (Groeneveldt 1960:34). Jauh lebih banyak tinggalan Hindu daripada Buddha di Campa.

Tidak ada bukti-bukti tentang masuknya budaya Hindu-Buddha ke Campa. Campa dibagi atas provinsi-provinsi yang terbagi secara alami sesuai dengan keletakannya di daerah pantai (Coedes 1967:43).

Yang dianggap tempat suci di Campa karena banyaknya situs-situs arkeologi di sana adalah Quang-nam, dengan situs-situs di Tra-kien, Mi-son, dan Dong-duong. Dong-duong disebut juga Amarawati, tempat ditemukannya sebuah arca Buddha yang indah.

Di selatan Amarawati, situs-situs yang penting adalah Binh-dinh (=Wijaya), Kauthara (di dataran Nha-trang) dan Pandurangga (di daerah Phanrang). Raja-raja Campa merasa dirinya keturunan Maharsi Bhrgu, yaitu tokoh dalam Mahabharata.

Lin-yi selalu berusaha menolak pengaruh Cina. Serangannya ke arah utara selalu ditahan oleh orang-orang Vietnam yang berusaha mendesak ke selatan. Vietnam ini pada abad XIV berhasil menduduki Campa. Pusat-pusat Kerajaan Campa bermula di utara, yaitu di Thuc-thien, kemudian di Quang-nam (abad II-VIII).

Abad VIII pusat kerajaan berpindah ke selatan: Panduranga (Phanrang) dan Kanthara (Nha-trang). Pada saat kerajaan berpusat di selatan, dimulailah penggunaan nama Anumrta bagi seorang raja. Pada abad IX kerajaan berpindah lagi ke utara, yaitu di Indrapura, provinsi Quang-nam. Abad X pusat kerajaan berpindah lagi ke selatan, yaitu ke Vijaya (Binh-dinh), dan sejak abad XI mulailah tahap terdesaknya agama dan budaya Campa-Hindu oleh budaya Cina yang didukung oleh Vietnam.

Gelar yang dipakai oleh raja-raja di Campa masa Hindu-Buddha, di samping dalam Bahasa Sanskrita juga memakai gelar yang mirip dengan di Indonesia, serta wiracarita Ramayana dan Mahabharata digemari. Kedua wiracarita tersebut sering dibacakan atau di"nyanyi"kan dalam upacara-upacara di bangunan suci.

Umumnya di Benua Asia Tenggara, atau Asia Tenggara Daratan Ramayana lebih dikenal dan digemari daripada di Indonesia. Di Thailand, misalnya, raja-rajanya memakai gelar Rama karena Rama dianggap tokoh seorang raja yang sempurna. (Raja Rama I- รามาที่ ๑).

Salah seorang Raja Campa, Prakasadharmā, yang sangat menggemari ceritera Ramayana, pada abad VII mengeluarkan prasasti untuk memperingati pendirian candi untuk Valmiki, penggubah Ramayana. Di situ tampak unsur pemujaan terhadap Wisnu, yang merupakan pengaruh dari Khmer. Pertama karena ibunya seorang putri dari Kamboja, dan kedua karena ia pernah mengungsi ke negara tersebut. Di Tra-kien ditemukan 4 relief yang menggambarkan cerita Rama.

Dua versi Ramayana ditemukan di Panduranga, yang masing-masing berjudul "Dalikal Pram Dit Pram Lak" (Dongeng Pram Dit = Rama dan Pram Lak = Laksmana), dan Damnuy Po Keidai Maherasih (Cerita Keidai Maherasih).

HUBUNGAN JAWA-CAMPA

Dalam agama tampak adanya kesejajaran, karena baik di Jawa maupun di Campa berkembang agama Mahayana Tantra (\pm abad XI-XIV), serta kecenderungan pemujaan kepada Avalokitesvara.

Pengaruh Jawa tampak pada seni Tra-kieu dan Mi-son dalam abad X, yaitu masa berkembangnya seni Jawa Tengah, terutama pada pemahatan hiasan pada bangunan. Di Kuong my, misalnya, terdapat relief-relief bangunan di atas pintu, yang ditemukan juga di Jawa, demikian pula cara penempatan kala-makara di Mi-son mirip dengan pemahatan di Prambanan dan Candi Sari. Di samping tampak adanya pengaruh Jawa pada arca Garuda di Tra-Kieu.

Hiasan sulur gelung dan untaian bunga/mutiara (*guirlande*) yang di Jawa dihias dengan kinnara-kinnari, di Campa dihias dengan mahluk separuh badan yang bersayap.

Ada persamaan pula dalam pengungkapan ceritera Rama di kedua wilayah tersebut. Pada relief di Tra-kieu digambarkan ceritera Rama pada empat panel. Cerita di sini hanya merupakan episode Alengka. Episode *Alengka dengan ditemukan sebagai relief di Pe-* nanggungan.

Episode-episode sejarah di Campa banyak menampilkan hubungannya dengan Jawa, walaupun tidak selalu dalam konteks positif.

- Tahun 774 Candi Po Nagar di Nha-trang diserang orang-orang Jawa. Dari penggambaran fisik dan kebiasaan makan dan tingkah lakunya, mungkin saja para penyerang ini berupa bajak laut. Raja Satyavarman berhasil mengusir bajak laut tadi, dan membangun sebuah candi baru dari bata yang selesai pada tahun 784.
- Tahun 787 Armada dari Jawa merusak candi di Bhadradhipatiswara, yang terletak di barat ibu kota Virapura, dekat Nha-trang. Raja Indravarman, adik Satyavarman yang memerintah saat itu, pada tahun 799 memugar candi tersebut.
- Tahun 898 Po Klung Pilih Rajadwara, salah seorang kerabat Ratu Tribhuvanadevi, permaisuri Raja Jaya Simhavarman I, diutus ke Jawa (*Yawadwipapura*) untuk melaksanakan *siddhayatra*. Karena *siddhayatra* ini pada umumnya berarti mengalap berkah ke tempat suci, maka mungkin karena ia pergi ke ibu kota, juga untuk meminta restu atau bahkan juga untuk mempelajari seluk-beluk pemerintahan kepada raja Yawadwipapura, karena sesudah itu Po Klung Pilih Rajadwara memegang jabatan tinggi di bawah tiga orang raja yang memerintah berturut-turut.
- Tahun 902 Sekali lagi Pilih Rajadwara diutus *bersiddhayatra* ke ibu kota Yawadwipa, kini oleh raja lain, ialah Bhadravarman II. Pada masa-masa inilah masuknya pengaruh Jawa di Campa.
- Tahun 1292 Raja Krtanegara di Singasari mengirim seorang putri, Tapasi, yang dalam Prasasti Po Sah, Campa (1228 Saka) disebut putri Raja Yawadwipa, (Majumdar 1927:219-220) untuk menikah dengan Raja Campa, Jaya Singhavarman III.

Nama Tapasi mengingatkan kita pada seorang pendeta wanita. Mungkin pengiriman putri ini oleh Krtanegara merupakan siasat untuk mempererat hubungan dengan Campa guna mencegah serangan Mongol ke Jawa. Se-

(lihat h. 160, bab 9 →

Abad XIV Nagarakrtagama menguraikan tentang orang-orang dari India dan Asia Tenggara yang datang ke Majapahit dalam acara perayaan tahunan.

Adanya Candi Pari di Porong, Jawa Timur, yang mirip candi di Campa, mungkin dibangun oleh orang-orang Campa di Majapahit, juga seorang arsitek dari Jawa (Krom, Lombard). Pada Candi Pari tertera tahun Saka 1293/1317 Masehi.

panjang pantai Campa merupakan jalur pelayaran yang strategis untuk berlayar dari Cina ke Indonesia. Tindakan serupa pernah dijalankan oleh Kertanegara terhadap Melayu, yang juga menjadi incaran Mongol, dengan mengirim arca Amoghapasa ke sana guna mempererat tali persahabatan. Arca ini sekaligus menjadi lambang kecakrawartiannya. Baik Tapasi maupun arca Amoghapasa merupakan lambang perluasan wilayah Krtanagara secara Yogatantra, sesuai dengan agama yang dianut Krtanagara.

Raja Campa juga berusaha mencari bantuan dari Vietnam dengan menikahi putri Raja Vietnam dengan mas kawin berupa dua buah provinsi di Col de Nuages.

Prasasti pada bangunan suci Po-Klong Garai, juga dari masa Raja Jaya Sinhawarman antara lain menyebutkan tentang persembahan untuk bangunan suci tersebut berupa budak belian, yang diantaranya dari Jawa (mungkin Malayu atau Jawa) dan dari Ywan^c (Annam).

Tahun 1318 Che Nang dari Campa berusaha merebut kembali dua provinsi tersebut dari Vietnam, namun dikalahkan dan terpaksa mengungsi ke Jawa.

Abad XI Prasasti Kamalagyan memuat tentang pedagang-pedagang dari Campa (lihat uraian tentang Kamboja dan Thailand) yang tinggal dalam Kerajaan Airlangga.

*mulan
lecan!*

Tahun 1448M Seorang putri Campa beragama Islam yang dalam Serat Kanda bernama Dwarawati, menikah dengan Raja Majapahit. Makamnya terdapat di Trowulan.
Raden Rahmat, kemenakan Dwarawati, menikah dengan putri Adipati Tuban, dan menurunkan Sunan Drajat dan Sunan Bonang.

PENUTUP

Sepanjang periode Klasik atau Hindu-Buddha di Asia Tenggara, lebih-lebih antara abad VII-VIII hingga abad XIV, selalu terjadi kontak antar kerajaan-kerajaan, khususnya antara Jawa, Kamboja, Thailand, dan Campa. Kontak tersebut dilandasi oleh kepentingan politik, agama, ekonomi, maupun budaya.

Penerimaan unsur-unsur budaya dan agama dari India tidak selalu dengan kadar intensitas yang sama. Di Jawa, intensitas agama Hindu dan Buddha seimbang, sedangkan Kamboja lebih menekankan pada agama Hindu, demikian pula Campa.

Di Thailand berkembang Buddha Theravada meskipun Buddha Mahayana, yang secara serentak terdapat di Jawa, Kamboja, dan Campa, bercampur dengan unsur Tantris, pernah berkembang pula.

Saling mempengaruhi tampak pula pada tinggalan arkeologisnya, misalnya tinggalan berupa meterai, arca, relief hias, maupun bangunan. Satu hal yang menarik adalah bahwa Jawa seringkali menjadi tempat pengungsian keluarga raja, terutama dari Funan, Angkor, dan Campa Selatan.

Hal ini mungkin disebabkan karena Jawa, yang berupa pulau, dianggap aman dengan pemerintahan yang dianggap stabil, serta dirasakan adanya ikatan primordial.

Dua karya sastra yang terkenal, Ramayana dan Mahabharata, diterima dan dikembangkan di Jawa, Kamboja, Thailand, dan Campa, dan hingga kini masih dikenal. Sedang di Thailand terutama Ramayana sangat dihormati rakyat. Sebaliknya, dari Jawa telah dimasukkan cerita-cerita Panji ke Thailand dan Kamboja. (Poerbatjaraka).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Boisselier, J.

- 1963 **La statuaire du Champa. Recherches sur les culte et l'icographie.** E.F.E.O. Paris

Bosch, F.D.K.

- 1961 Selected Studies in Indonesian Archaeology. **KITLV.** Translation Series 5.

Briggs, L..P.

- 1951 **The Ancient Khmer Empire. Transactions of the American Philosophical Society.** Philadelphia

Coedes, G.

- 1968 **The Indianized States of Southeast Asia.** Transl. by Susan Brown Cowing. University of Malaya Press

Diskul, M.C.

- 1986 **Art in Thailand: A Brief History.** Six ed.

Edi Sedyawati

- 1988 **Dinamika Budaya di Asia Tenggara Masa Hindu-Budhha.** Sebuah kerangka analisa dalam **Dinamika Budaya Asia Tenggara-Pasifik dalam perjalanan Sejarah.** IAAI KOMDA Jawa Barat

Ecole Francaise d'Extreme-Orient

- 1981 **Kerajaan Campa.** P.N. Balai Pustaka

Ferdinandus.PEJ.

- t.t Meterai-meterai tanah liat dari Situs Blandongan. **Dinamika Budaya,** hal. 185-190.

Finot, L.

- t.t. "L" Incription de Sdok Kak Thom". **BEFEO.** XV,2.

Krairikas,

- 1979-1980 **Piriya Das Heilige Bildnis/The Sacred Image. Skulpturen aus Thailand/Sculptures from Thailand Exhibition Organized** by the Museum for East-Asian Art of the City of Cologne in collaboration with the Dept. of Fine Arts and the National Museum, Bangkok.

Krom, N.J.

- 1926 **Hindoe-Javaansche Geschiedenis**. Gravenhage Martinus Nijhoff.

Kulke, Hermann

- t.t "The Early and the Imperial Kingdom in Southeast Asian History", dalam : **Southeast Asia in the 9 th. to the 14 th. Century**. Research School of Pasifik Studies. Australian National University and the Institute of Southeast Asian Studies Singapore.

Majumdar, R.C.

- 1927 **Ancient Indian Colonies in the Far East**. Vol.I. Champa. Greater India society Publication. The Punjab Sanskrit Book Depot. Lahore

O'Connor

- 1974 Stanley Buddhist Votive Tablets and Caves in Peninsular Thailand, dalam "Art and Archaeology in Thailand" **In Commemoration of the 100 th. Anniversary of the National Museum**.

Pigeaud, Th.G.Th.

- 1960 **Java in the 14 th. Century. The Nagara-Kertagama by Rakawi Prapanca of Majapahit**. 1365 A.D. Vol.I-IV. Martinus Nijhoff.

Poerbatjaraka, R.M.Ng

1940 Pandji-verhalen onderling vergeleken. Bandung (**Bibliotheca Javanica 9**).

Poerbatjaraka, R.M.Ng

1920 "De Carita Parahijangan", **TBG LIX**, hal. 403-416.

Robson, Stuart.

1997 Brief Communications. "Thailand in an Old Javanese source". **BKI**, dell 153, 3e afl

Sjafei, Soewadji.

1977 Kesejajaran dalam Sejarah Asia Tenggara Kuno dan akibat-akibatnya. **PIA**. Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional "980:424-442.

Satari, Sri Soejatmi

1986 Perkembangan peranan Garuda dalam seni di Asia Tenggara. **Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV**. Hal. 416-429.

Sumadio, Bambang (ed).

1984 **Sejarah Nasional Indonesia II**. Balai Pustaka

Wicks, Robert S.

1992 Money, Markets and Trade in Early Southeast Asia. The Development of Indigenous Monetary Systems to ad 1400. **SEAP** Cornell University, Ithaca, New York.

DAFTAR SINGKATAN :

BEFEO	Bulletin de l'Ecole Francaise d'Extreme-Orient
BKI	Bijdragen tot de Taal-, Laal- en Volkenkunde
KITLV	Koninklijk Instituut voor Ta-, Land- en Volkenkunde

PERSPEKTIF GLOBAL PRASEJARAH INDONESIA

Truman Simanjuntak

Prasejarah Indonesia merupakan bagian dari prasejarah global. Pencapaian tahap-tahap evolusi perkembangan budaya selalu memiliki keterkaitan regional dan mondial, mulai dari kolonisasi awal hingga perkembangan teknologi dan metalurgi sebagai tahap terakhir. Kenyataan ini membuat prasejarah Indonesia memiliki spektrum kepentingan luas, tidak hanya dalam lingkup nasional tetapi juga internasional. Seiring dengan itu, pengembangan prasejarah Indonesia harus berwawasan global untuk lebih memberikan kontribusi terhadap prasejarah kawasan regional dan dunia. Berbagai upaya pengembangan di bidang kebijakan, penyiapan ketenagaan, dan aspek-aspek pendukung lainnya merupakan tuntutan pokok untuk ditingkatkan dalam mencapai kemajuan-kemajuan yang lebih berarti di masa datang.

Istilah global (globalisasi) sangat marak dalam wacana publik sejak dasa warsa terakhir dan pasti masih akan terus diperbincangkan di masa mendatang. Saya sendiri agak heran ketika pertama kali mendengarnya karena begitu gencarnya kata ini sebagai sebutan publik. Sejak awal tahun 1990-an kata itu hampir setiap hari muncul dalam media cetak dan media elektronik, bahkan pada perbincangan "man on the street", namun yang diperbincangkan tetap tidak memperlihatkan wujud nyata. Seketika saya berpikir: apakah globalisasi sama dengan gombalisasi? Segera saya pahami bahwa itu tidak sama. Global dengan gombal jelas berbeda, yang memper-

lihatkan kesamaan semu hanya karena sifatnya yang sulit diwujudkan dalam seketika sehingga seolah-olah janji atau pemikiran belaka.

Globalisasi dengan imbuhan “sasi” jelas mengartikan adanya suatu proses, yaitu proses pengglobalan. Lebih jauh dapat diartikan bahwa kata global berasal dari kata “globe” yang berarti dunia. Jika demikian globalisasi dapat diartikan sebagai proses penduniaan atau sesuatu yang berhubungan dengan aspek keruangan yang luas, melewati batas-batas administratif kenegaraan. Dari pengertian dasar ini maka istilah pengglobalan mengandung nilai-nilai universal, nilai-nilai yang ditemukan pada horison yang luas, di seluruh dunia atau sebagian besar dunia. Sesuatu yang bernilai lokal atau sektarian tentu saja “putus hubungan” dengan konteks global, kecuali jika nilai-nilai tersebut kemudian mengalami proses perambahan horisontal hingga melingkupi konteks ruang yang luas dan bahkan mendunia.

Jika pengertian di atas lebih bersifat statis, pengertian globalisasi mengandung aspek dinamis. Artinya dalam proses pengglobalan tersirat makna keterkaitan antarlokasi: ada dinamika melalui perilaku penggerakannya. Suatu konteks skala lokal terlibat dalam jaringan hubungan dengan konteks-konteks lokal lainnya dan berinteraksi satu sama lain hingga menjadi suatu konteks geografis yang sangat luas. Globalisasi yang sekarang memperlihatkan secara jelas aspek statis dan dinamis. Disini berbagai pelosok dunia tidak lagi mengenal batas dan terlibat dalam jaringan interaksi didukung oleh teknologi tinggi. Teknologi transportasi membuat kita dengan mudah dan cepat dapat mengunjungi berbagai tempat, teknologi komunikasi dan informasi membuat kita dengan mudah berhubungan dan menyerap informasi atau mengetahui berbagai peristiwa di belahan dunia lain.

Implikasi lebih jauh dari globalisasi sekarang adalah terbukanya peluang interaksi budaya yang semakin membatasi dan menghilangkan keterisolasian. Proses ini tidak akan berlangsung seketika atau dalam waktu terbatas, tetapi akan terus berlanjut ke masa depan dengan intensitas yang semakin meningkat, seiring dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Dalam konteks ini kita harus memahami proses globalisasi, di samping membawa nilai-nilai positif dengan kemudahan-kemudahan dan kemajuan-kemajuan

yang ditimbulkannya, pasti juga mengandung nilai-nilai negatif yang dapat merusak sendi-sendi tatanan budaya asli. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, sejauh mana kemampuan dan kejelian kita menangkap aspirasi dan nilai-nilai positif serta mengesampingkan nilai-nilai negatif. Dengan kata lain kita dituntut memanfaatkan peluang-peluang yang ada demi kemajuan, karena suka- tidak suka, mau- tidak mau kita harus berhadapan dengannya, sementara penolakan total justru cenderung membawa kerugian pada kita.

GLOBALISASI DALAM ARKEOLOGI

Sekarang coba kita lihat dunia garapan kita - dunia arkeologi- agar kita dapat lebih memahami makna peristiwa globalisasi dalam kehidupan sekarang dan dalam pengembangan arkeologi. Jika kita mengacu pada pengertian di atas, maka globalisasi sebetulnya bukan barang baru, tetapi sudah terjadi berulang-ulang dalam perjalanan sejarah hidup manusia di Indonesia. Globalisasi telah terjadi pada jaman prasejarah dan berlanjut pada jaman sejarah hingga sekarang. Oleh sebab itu secara tegas dapat dikatakan bahwa globalisasi bukan hal baru. Perbedaannya pada masa sekarang globalisasi ditopang oleh produk-produk teknologi tinggi yang tentu saja membawa dampak yang lebih dahsyat dan luas dari masa sebelumnya.

Faktor geografis Indonesia yang strategis dalam lintasan Asia – Australia menjadi salah satu pendorong proses pengglobalan berulang sepanjang rentang hunian. Kepulauan menjadi lintasan migrasi dan budaya dari kawasan Asia ke kawasan Australia -Pasifik atau sebaliknya. Kenyataan ini menjadikan kepulauan kita sebagai bagian dari prasejarah global yang sangat penting untuk pemahaman sejarah kehidupan manusia di dunia. Proses pengglobalan telah berlangsung sejak awal hunian seiring dengan kolonisasi Nusantara, sejak jutaan tahun lalu. Motor globalisasi pada saat itu adalah manusia purba (*Homo erectus*) sebagai kolonisator yang diduga menyebar dari benua Afrika dengan membawa budayanya. Manusia purba bukanlah manusia yang tiba-tiba muncul di Jawa, tetapi manusia yang bermigrasi

ke Jawa dan menghuninya dalam rentang jutaan tahun. Selain di Afrika, manusia serupa terdapat di beberapa bagian dunia, antara lain beberapa negara Eropa, India, dan Cina. Keberadaannya di berbagai tempat menunjukkan adanya proses migrasi yang melintasi antar benua di kala kehidupan tertua.

Jika manusia purba diperkirakan bermigrasi ke Indonesia maka mereka seharusnya membawa budaya yang dimiliki. Salah satu di antaranya yang sampai kepada kita adalah peralatan dari batu. Penemuan alat-alat batu khas paleolitik tertua di wilayah sebaran *Homo erectus* dengan ciri-ciri yang pada hakekatnya sama semakin meyakinkan adanya proses migrasi dari satu asal (diyakini sebagian besar para ahli dari Afrika) dan menyebar ke berbagai bagian dunia (Sartono 1992). Kesamaan peralatan di atas seperti kapak genggam, kapak pembelah, kapak perimbas, bola batu dan lain sebagainya di Afrika, Eropa, dan Asia menunjukkan adanya universalisme budaya manusia tertua (Simanjuntak 1998). Selama ini memang ada pendapat yang mengatakan adanya perbedaan budaya manusia purba antara Afrika, Eropa dan semenanjung India di satu pihak dan Asia Timur di pihak lain (Movius line). Dikatakan bahwa paleolitik Eropa dicirikan oleh kapak genggam sementara paleolitik Asia Timur dicirikan kompleks kapak perimbas-penetak (Movius 1944). Namun penemuan-penemuan yang terjadi, khususnya sejak dasawarsa terakhir kurang mendukung pendapat tersebut. Penelitian-penelitian yang berlangsung di Sangiran dan situs paleolitik lainnya menemukan peralatan-peralatan yang justru mendukung ke arah universalisme budaya. Kapak genggam yang dicirikan sebagai peralatan khas paleolitik Afrika dan Eropa dalam kenyataan juga terdapat di Sangiran, Kali Baksoka dan situs lain, demikian juga peralatan khas paleolitik Eropa lainnya seperti kapak pembelah, alat batu berfaset (*polyedric tools*), bola batu. Alat-alat ini bercampur dengan kapak perimbas, kapak penetak, dll yang dianggap sebagai alat khas paleolitik Asia Timur.

Hal yang sama kapak perimbas dan kapak penetak juga terdapat dalam budaya paleolitik Eropa. Jika demikian apa perbedaannya? Manusia pendukungnya sama-sama *Homo erectus* serta unsur-unsur budayanya (per-

alatan litik) juga sama, baik dari sudut morfologi, teknologi dan tipologi. Perbedaan hanya bersifat sekunder yang banyak dipengaruhi faktor adaptasi lokal (kemampuan membuat dan kondisi sumberdaya lingkungan), misalnya dalam bahan yang digunakan, kuantitas masing-masing jenis, dan variasi morfo-teknologis.

Peristiwa globalisasi berikut tampak pada akhir Plestosen-awal Holosen, kurang lebih 40.000 taun yang lalu. Fenomena yang tampak sejak kala itu bahwa Homo sapiens muncul menggantikan Homo erectus dan secara kontemporer telah mendiami daratan dan kepulauan Asia Tenggara hingga Australia dan Melanesia barat (Simanjuntak 1997). Dalam waktu bersamaan terlihat suatu "trend" baru dalam pola hunian, yaitu hunian gua-gua dan ceruk yang mencapai puncaknya pada paruh pertama Holosen. Budaya yang dikembangkan diwarnai oleh unsur paleolitik sebagai tradisi berlanjut dari masa sebelumnya dengan alat-alat yang cenderung kasar dan pengerjaan secukupnya bercampur dengan alat-alat serpih. Gua dan ceruk menjadi ruang multifungsi: sebagai tempat tinggal, dan kegiatan "workshop" pembuatan alat-alat batu. Dalam perkembangan kemudian dimanfaatkan sebagai tempat pembuatan alat-alat tulang serta tempat penguburan.

Peristiwa globalisasi berikutnya secara nyata dapat dilihat pada budaya mesolitik. Pada periode ini khususnya sejak awal Holosen lintas perkembangan budaya semakin ramai, sehingga Indonesia yang berada di antara Asia dan Australia menerima unsur-unsur global regional dari beberapa arah. Pendapat yang paling umum mengatakan arus persebaran datang dari Asia daratan ke kepulauan, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya arus global dari timur ke barat. Lukisan gua yang banyak ditemukan di Indonesia Timur, termasuk Kalimantan, juga ditemukan di Asia Tenggara daratan hingga Australia dan Pasifik. Ada kalangan yang berpendapat lukisan ini berasal dari Australia. Unsur universal yang paling menonjol dari periode ini adalah alat-alat mikrolit yang bercirikan bentuk geometris dan berukuran kecil. Di Indonesia ditemukan di berbagai daerah, antara lain di Jambi, Paso (Sulawesi Utara), Dataran Tinggi Bandung, dan Sulawesi Se-

latan. Di samping itu perlu disinggung keberadaan unsur inovasi lokal yang tampak di beberapa daerah, berupa alat-alat serpih berciri khas, seperti bilah bertangkai di Timor, mata panah bergerigi di Sulawesi Selatan, retus bersap di Timor Barat, dan mata panah berdasar cembung di Jawa Timur. Kertas kerja ini tidak akan membahas masalah ini secara mendalam kecuali ingin menunjukkan adanya proses pengglobalan, di samping tumbuh dan berkembangnya unsur-unsur khas lokal.

Proses pengglobalan berikutnya muncul dalam budaya neolitik dengan spektrum budaya universal. Kehidupan yang telah mengenal komunitas-komunitas kecil dalam kelompok melahirkan perkampungan-perkampungan pertama dengan unsur-unsur budaya pokok berupa kapak batu, beliung, dan gerabah (Soejono 1984). Jenis-jenis peralatan ini bukan merupakan milik neolitik Indonesia saja, tetapi ditemukan secara universal di berbagai belahan dunia. Dalam budaya ini dapat ditambahkan adanya pengembangan teknologi pelayaran dan tenunan. Dalam kaitannya dengan beliung dan kapak batu tampak persebaran tipologi yang luas tidak hanya di Asia Tenggara tetapi meluas hingga Pasifik. Diperkirakan globalisasi neolitik berlangsung dari Asia Tenggara daratan dan Cina Selatan merambah ke Taiwan dan Asia Tenggara kepulauan hingga Pasifik.

GLOBALISASI ARKEOLOGI TERPENTING

Periode	Karakter	Spektrum sebaran
Kolonisasi awal	Kehidupan pengembaraan	Universal: Afrika, Eropa, Asia
(Kehidupan tertua) jutaan tahun lalu	Alat-alat serpih besar dan alat batu inti, Homo erectus	(terutama India, Cina, dan Indonesia)
Menjelang akhir Plestosen	Manusia sapiens Kehidupan di gua dan ceruk Alat-alat serpih dan batu int	Asia Tenggara- Australia- dan Pasifik
Paruh I Holosen (preneolitik/mesolitik)	Mikrolit Lukisan gua	Universal, khususnya Asia Tenggara- Pasifik
Paruh II Holosen (neolitik)	Perkampungan, gerabah, kapak, beliung, pelayaran, dll.	Universal, khususnya Asia Tenggara- Australia-Pasifik
Menjelang tahun Masehi (paleometalik)	Pertukangan alat-alat perunggu alat-alat besi, dan konsepsi kepercayaan (megalit)	Universal, khususnya Asia Tenggara

Globalisasi terakhir untuk periode prasejarah berlangsung pada budaya logam yang berasal dari Asia Tenggara daratan dan menyebar ke kepulauan Nusantara hingga Indonesia bagian timur. Ditemukan pertama kali di daerah Dongson, budaya ini menjadi terkenal sebagai Budaya Dongson (Heekeren 1958). Alat-alat logam khususnya perunggu dan besi diperkirakan masuk bersamaan ke Indonesia menjelang akhir hingga sekitar awal Masehi. Dalam periode ini agaknya budaya megalit diperkenalkan dan mengalami perkembangan dalam beragam bentuk di tanah air. Budaya ini memiliki karakter universal yang ditemukan di berbagai bagian dunia.

GLOBALISASI DAN PENGEMBANGAN PRASEJARAH INDONESIA

Paparan contoh-contoh tadi jelas menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara Nusantara dan Asia daratan, Australia, Pasifik dan bagian dunia lainnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak pernah terlepas dari proses pengglobalan. Keterkaitannya dapat dilihat dalam lingkup regional (Asia Tenggara-Pasifik) bahkan mondial (Eropa dan Afrika). Perkembangan budaya dalam rentang prasejarah didorong oleh masuknya pengaruh-pengaruh luar yang diadopsi di samping tentunya faktor inovasi lokal. Dalam konteks ini prasejarah Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi bersama prasejarah regional dan kawasan membentuk prasejarah global. Disini kita mendapat pelajaran berharga bahwa kita memiliki pengalaman dalam proses global yang sangat berharga dalam membawa negara kita pada kondisi sekarang. Tanpa peristiwa globalisasi yang telah terjadi sepanjang perjalanan sejarah, Indonesia bukanlah Indonesia yang sekarang atau mungkin Indonesia yang masih dalam ketertinggalan. Pengalaman masa lampau menjadi nilai-nilai yang sangat berharga sebagai bangsa yang membuka diri terhadap pengaruh luar untuk mencapai kemajuan-kemajuan.

Belajar dari sejarah di atas, bagaimana sikap kita dalam menghadapi globalisasi sekarang ? Sifat terbuka dan tidak menutup diri secara eksklusif, agaknya sikap terbaik dalam arti merenspons secara positif dan memanfaatkan

kan peluang-peluang yang ditawarkan. Penyaringan unsur-unsur luar memang perlu untuk tidak mengadopsi nilai-nilai negatif yang merupakan eksek lain dari globalisasi. Pemanfaatan nilai-nilai positif globalisasi, sebagaimana dalam perjalanan sejarah, merupakan sikap terbaik untuk kemajuan-kemajuan di masa datang.

Bagaimana di bidang penelitian arkeologi? Nilai-nilai global yang dimiliki menuntut pengembangan prasejarah Indonesia agar berwawasan global (dan nasional) dalam arti harus dapat memberi kontribusi terhadap prasejarah global- regional, dan tentu saja nasional. Untuk dapat mencapai itu kita harus membuka diri terhadap agen-agen kemajuan yang datang dari luar sembari memotivasi dan memberdayakan potensi internal. Sebagai landasan pokok dari semuanya adalah perlunya kebijakan yang jelas dan tegas yang berorientasi pada pencapaian tujuan: pengungkapan nilai-nilai arkeologi sebagai kontribusi terhadap pengembangan arkeologi (khususnya prasejarah global), pemasarcatannya untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan lokal dan nasional. Istilah "ngetrendnya" pemberdayaan eksternal dan internal. Tanpa kebijakan yang jelas akan sangat sulit memperoleh hasil optimal. Dalam hal ini sangat diperlukan suatu perencanaan jangka pendek dan jangka panjang dengan rumusan pencapaian yang jelas. Berpedoman pada perencanaan inilah semua kegiatan dilaksanakan dan diarahkan untuk pencapaian tujuan.

Berwawasan global juga mengandung pengertian bahwa pengembangannya harus memperhatikan konteks regional yang tidak terbatas pada lingkup nasional. Penjenjangan konteks keruangan dapat dimulai dari konteks lokal-nasional-regional (Asia Tenggara-Australia/Pasifik). Dunia yang berarti nilai-nilai lokal dapat memberi kontribusi terhadap prasejarah nasional, kawasan regional hingga global. Kini saatnya kita semakin memikirkan untuk "keluar kandang" dengan memahami prasejarah makro: keterkaitan lokal dan regional di masa lampau, tanpa melihat batas-batas kenegaraan. Tanpa sikap seperti ini pemahaman kita terhadap prasejarah Indonesia hanya sebatas lingkup nasional yang terputus dengan dunia luar. Di sisi lain nilai-nilai global yang dimiliki prasejarah Indonesia selalu menjadi

pusat perhatian para peneliti asing untuk melakukan penelitian di Indonesia. Para peneliti inilah nanti yang cenderung lebih memahami prasejarah regional jika kita tidak menaruh perhatian terhadapnya.

Sejarah telah mencatat besarnya ketertarikan peneliti asing terhadap prasejarah Indonesia. Beberapa nama besar dapat disebutkan di sini, seperti Van Stein Callenfels, Von Koenigswald, Van der Hoop, Van Heekeren, dll yang telah menjelajahi Indonesia sejak tahun 1920-an. Mereka telah berjasa besar dalam memelopori lahirnya arkeologi (prasejarah) Indonesia. Penelitian-penelitian yang mereka lakukan harus diakui sebagai agen kemajuan untuk arkeologi Indonesia. Belajar dari sejarah ini menurut hemat saya ketertarikan peneliti asing terhadap prasejarah kita justru akan semakin meningkat pada jaman globalisasi sekarang dan merupakan hal yang tidak bisa kita hindari dalam era “dunia tanpa batas” ini. Tinggal kita harus dapat menyikapinya secara arif untuk dapat menyerap dan memanfaatkan nilai-nilai positifnya secara optimal dan menghilangkan nilai-nilai negatif yang mungkin terjadi.

Dalam konteks eksternal ini, “kerja sama” merupakan program yang sangat penting dilaksanakan baik instansi dalam maupun luar negeri dalam membuka diri untuk menyerap kemajuan-kemajuan yang ditawarkan. Kerjasama dalam negeri menyangkut instansi terkait, khususnya lingkungan universitas. Kegiatan yang dilaksanakan seperti meminta bantuan tenaga ahli, melatih mahasiswa, “training”, yang sudah berjalan selama ini perlu ditingkatkan di masa datang dan dikembangkan dalam berbagai kegiatan. Pada intinya kerja sama dengan instansi terkait hendaknya ditujukan tidak hanya untuk kemajuan sekarang, tetapi justru yang terpenting untuk pengembangan arkeologi masa depan melalui penyiapan arkeolog-arkeolog muda yang diharapkan lebih berperan dari masa sekarang (lihat isu pengembangan prasejarah di halaman depan).

Kerjasama luar negeri perlu mendapat perhatian khusus dalam kesempatan ini mengingat manfaat besar yang dapat diperoleh untuk kemajuan prasejarah Indonesia. Syarat terpenting bahwa kerja sama ini mutlak

memberi manfaat bagi kita, bukan sebaliknya. Kerjasama dapat dikembangkan dalam berbagai kegiatan. Penelitian menjadi salah satu kegiatan yang paling menonjol selama ini dan telah memberi hasil yang nyata dalam pengembangan prasejarah Indonesia dan dalam transfer ilmu pengetahuan dan ketrampilan. Kita banyak memperoleh pengetahuan di bidang metodologi, data base, analisis, dan pendokumentasian. Penelitian kerja sama jangka panjang dengan pihak Muséum National d'Histoire Naturelle, Prancis merupakan salah satu contoh kerja sama yang paling solid dan mendaftarkan hasil yang nyata (Simanjuntak 1997). Penelitian yang mengambil sasaran di Sangiran dan di Song Terus telah memberikan penemuan-penemuan baru dan melahirkan interpretasi baru dalam prasejarah Indonesia. Berbagai tulisan berupa makalah telah dipresentasikan secara bersama-sama dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional, termasuk tulisan lain yang sudah dipublikasikan menjadi referensi penting dalam wacana manusia purba, lingkungan, dan budayanya. Penulisan monografi lengkap tentang kedua penelitian ini sedang dalam penggarapan tim dan diharapkan dapat diterbitkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Berkenaan dengan peringatan 100 tahun penemuan *Pithecanthropus*, kerja sama ini telah sukses menggelar pameran dan seminar keliling dalam penyebarluasan hasil-hasil penelitian di beberapa kota (Solo, Jakarta, Medan, Jambi) pada awal tahun 1990-an (Sémah et al 1990).

Kerja sama internasional di bidang penelitian dapat dikembangkan ke bidang lain dan salah satu di antaranya di bidang pendidikan. Kita harus berusaha memanfaatkan kerja sama untuk memberi kesempatan bagi peneliti atau teknisi untuk mengikuti program degree atau non-degree untuk studi lanjut dan peningkatan keahlian. Dalam dua dasawarsa terakhir kegiatan ini telah memberikan hasil yang cukup menonjol di mana beberapa peneliti kita telah berhasil menyelesaikan program doktor melalui beasiswa pemerintah asing di luar negeri, khususnya Perancis. Demikian juga dengan program non-degree di beberapa negara, seperti Belanda, Prancis, Amerika, Australia. Suatu kecenderungan pada akhir-akhir ini, yaitu semakin berkurangnya kegiatan serupa. Untuk itu perlu upaya-upaya untuk meningkat-

kannya di masa depan. Masih dalam bidang pendidikan perlu ditingkatkan kemungkinan program kunjungan studi banding ke luar negeri serta pemberian bimbingan bagi mahasiswa asing yang mengambil studi tentang Indonesia.

Penyebarluasan hasil-hasil penelitian termasuk bidang kegiatan yang dapat dimanfaatkan dari kerja sama luar negeri. Keikutsertaan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah internasional merupakan suatu keharusan jika kita dan karya kita ingin ikut memberi kontribusi terhadap prasejarah global. Demikian juga publikasi bahasa asing, merupakan suatu cara yang paling baik memperkenalkan prasejarah kita. Publikasi bahasa asing yang sudah berjalan masih terlalu minim dan mendesak untuk ditingkatkan di masa datang. Pengadaan pameran internasional juga merupakan kegiatan yang masih sangat perlu ditingkatkan di masa datang.

Kerja sama lainnya yang sangat diperlukan tetapi masih sangat minim dilaksanakan, adalah di bidang pengadaan peralatan (lapangan dan laboratorium). Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk menyediakan peralatan canggih yang kita butuhkan jelas harus menuntut upaya-upaya untuk selalu mencari peluang kerja sama di bidang pengadaan peralatan. Kesulitan yang muncul bahwa beberapa negara asing atau sponsor justru tidak membuka peluang untuk pengadaan prasarana dan sarana di dalam kerja sama.

Pengembangan berwawasan nasional menyangkut internal Pusat sendiri dan jajarannya. Isu pertama yang menjadi sasaran pengembangan menyangkut keberadaan laboratorium yang representatif yang siap dan mampu menunjang kebutuhan penelitian dan pengembangan arkeologi (Simanjuntak et al 2000). Sebagai lembaga penelitian adalah hal yang janggal jika kita tidak memiliki laboratorium yang memadai, karena kerja laboratorium merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penelitian itu sendiri. Untuk pencapaian ini perlu perjuangan yang sungguh-sungguh kepada pemerintah. Sebagai bandingan kita dapat melihat betapa besar kekurangan sarana lembaga kita dari lembaga-lembaga penelitian lainnya yang pada

umumnya cukup representatif. Bahkan beberapa lembaga penelitian, misalnya Lembaga Eijkman telah memperlihatkan level internasional dengan dukungan sarana, prasarana, dan ketenagaan yang sangat baik.

Namun betapapun lengkapnya prasarana dan sarana yang kita inginkan tidak akan berarti jika tidak ditunjang ketenagaan yang cukup handal dari berbagai keahlian. Pembinaan dan *rekrutmen* pegawai baru menuntut seleksi yang ketat untuk tidak membeli "kucing di dalam karung". Barangkali dalam hal *rekrutmen* sistem "talen scouting" perlu dilakukan melalui pengikutsertaan mahasiswa di dalam penelitian dan memperjuangkannya untuk masuk pegawai negeri jika sudah menyelesaikan pendidikannya. Pembinaan ketenagaan yang baik akan menghasilkan stratifikasi peneliti yang kualitasnya berjenjang, dari yang pemula hingga yang paling handal. Unsur pimpinan perlu membuat ranking perlapisan untuk para peneliti dalam pengembangan karir dan keahlian.

Salah satu upaya yang paling penting dalam peningkatan kemampuan ketenagaan adalah lewat jalur formal dan non formal. Seyogyanya para peneliti yang memiliki motivasi dan kemampuan diberi peluang melanjutkan studi atau mengikuti program-program non-degree. Para peneliti juga perlu diberi ruang gerak untuk berkreasi dalam pengembangan penelitian. Pencarian dana atau sponsor dari luar perlu diberi peluang baik atas nama perorangan maupun atas nama instansi mengingat keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Tentu saja dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Upaya-upaya pembinaan ketenagaan di atas tidak akan berhasil jika para peneliti tidak meresponsnya secara baik. Semuanya berpulang pada peneliti dan untuk itu diperlukan motivasi yang kuat untuk peningkatan dan pengembangan kemampuan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka. Para peneliti dituntut untuk berwawasan tidak hanya nasional tetapi juga internasional.

Paradigma penelitian sebagai tema sentral kegiatan perlu direvisi. Titik lemah yang paling menonjol selama ini dalam penelitian menyangkut konsepsi penelitian itu sendiri. Terbentuk suatu "image" di kalangan kita bahwa penelitian adalah kegiatan lapangan yang berakhir pada penyusunan

laporan sekedarnya. Anggapan ini jelas harus kita ubah menjadi penelitian yang mengikuti proses lengkap mulai dari perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan lapangan, analisis dan pengolahan data analisis dan interpretasi hingga penulisan dan penerbitan hasil-hasilnya. Banyak penelitian yang kita laksanakan bersifat lepas dalam arti tidak terkonsepsi dalam suatu jaringan mata rantai pengembangan studi atau topik tertentu. Penelitian multidisipliner harus selalu diutamakan untuk mencapai hasil yang lebih komprehensif. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kurang mengunggungkannya sistem pendanaan untuk penelitian yang berlaku selama ini. Sistem lumpsum yang menyamakan waktu dan tenaga penelitian untuk setiap sasaran penelitian kurang memberi tanggung jawab pada para peneliti untuk menyelesaikan penelitian tuntas. Tujuan penelitian menjadi semakin kabur oleh penyeragaman waktu pelaksanaan dan menimbulkan kesan ke arah perolehan imbalan finansial.

Penelitian sebaiknya jangan berorientasi pada kuantitas sasaran yang harus dilaksanakan setiap tahun, tetapi pada kualitas untuk memberi hasil konkrit. Mestinya lebih baik melaksanakan 3 sasaran penelitian dalam setahun, tetapi dilaksanakan dengan waktu yang cukup panjang dan tenaga yang memadai dengan hasil mendalam daripada penelitian 6 sasaran dengan laporan penelitian yang kurang ditunjang data. Dalam hal ini sistem paket yang memberi tanggung jawab besar bagi setiap peneliti untuk melakukan penelitian intensif menjadi alternatif penting untuk kita laksanakan. Melalui sistem paket penelitian tidak lagi berjalan “machinal” tetapi menuntut pengujian-pengujian dan tanggung jawab dari peneliti. Melalui sistem paket, peneliti dapat merencanakan pemanfaatan dana untuk berbagai keperluan penelitian. Kelemahan selama ini penelitian tidak ditunjang dana untuk kegiatan di luar lapangan, seperti berbagai kegiatan analisis, termasuk analisis pertanggalan absolut yang menjadi kelemahan mendasar penelitian prasejarah selama ini. Di masa datang kegiatan analisis pertanggalan dan analisis lainnya seharusnya menjadi salah satu sasaran pokok penting penelitian, ditunjang oleh pendanaan yang cukup.

Isu berikutnya yang sangat penting untuk pengembangan prasejarah Indonesia adalah mutlak perlunya sinergi Pusat dan Balar yang dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Salah satu di antaranya yang sangat penting dan akan memperoleh hasil konkrit adalah perlunya program terpadu antara masing-masing Bidang dan Balai-Balai, setidaknya pada salah satu situs terpenting di setiap wilayah kerja Balar. Penelitian ini menjadi program pokok Bidang dan Balar dan dilaksanakan secara intensif. Dengan keberadaan 10 Balar, maka akan terdapat 10 situs terpenting yang menjadi "high lights" penelitian prasejarah di Indonesia. Jika pelaksanaannya memerlukan 4-5 tahap untuk setiap situs, maka dalam waktu 5 tahun akan diperoleh 10 karya monografi terbit tentang prasejarah Indonesia: bukan main. Jika model ini diterapkan juga pada bidang-bidang lain, maka sedikitnya terdapat 30 situs pokok yang ditangani secara intensif dan bersamaan antara Pusat dan Balar. Program semacam ini menjadi bagian dari pengembangan arkeologi kewilayahan di mana setiap wilayah memperoleh kesempatan untuk diteliti sesuai dengan corak atau potensi yang dimiliki. Sinergi lain dalam penelitian Pusat - Balar adalah pembentukan pangkalan data dan jaringan informasi yang dengan mudah dapat diakses baik oleh Pusat maupun oleh Balar. Penerapan sistem pendataan dan analisis yang telah ditentukan di "buku hitam" akan memudahkan kita memasukkan dan memanfaatkan data analisis dari setiap Balar atau Pusat untuk penelitian kewilayahan atau regional.

Isu terakhir yang ingin diangkat dalam hal pengembangan prasejarah menyangkut penyebaran hasil penelitian. Salah satu di antaranya adalah penerbitan hasil-hasil penelitian. Sekedar evaluasi sejauh ini publikasi laporan penelitian sangat rendah di Pusat Arkeologi, yaitu hanya satu nomor pertahun. Jika masing-masing Bidang melaksanakan penelitian di 6 sasaran, berarti dihasilkan 24 laporan penelitian. Ini berarti persentase terbitan laporan hanya sekitar 4% atau satu dari 24 laporan: persentase yang sangat rendah dan yang mutlak harus ditingkatkan. Kenyataan ini mendorong perlunya kita meningkatkan kuantitas terbitan. Untuk langkah pertama perlu menerbitkan satu nomor untuk masing-masing bidang, sehingga 4

nomor terbit setiap tahun (Jika keempat bidang digabung menjadi dua berarti dua nomor perbidang setiap tahun). Jumlah inipun masih sangat kurang, tetapi melalui peningkatan gradual harus terus diprogramkan peningkatannya di masa datang. Berkaitan dengan ini anggaran penerbitan hendaknya ditingkatkan untuk memfasilitasi penerbitan.

Penyebarluasan hasil penelitian lainnya adalah keikutsertaan para peneliti pada setiap pertemuan ilmiah nasional atau jika memungkinkan internasional. Kenyataan selama ini, pertemuan-pertemuan ilmiah merupakan faktor pendorong penting untuk memotivasi para peneliti menulis karya ilmiah. Penyebarluasan lainnya dapat berupa penulisan artikel, monografi atau jenis tulisan ilmiah lainnya untuk dipublikasikan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Dan yang terakhir adalah kegiatan penyuluhan yang dapat dilakukan di kala penelitian serta pameran arkeologi, seperti yang sekarang sedang berlangsung di Denpasar bersamaan dengan EHPA ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Heekeren, H.R. Van

- 1958 **The Bronze-Iron age of Indonesia**, 'S-Gravenhage- Martinus Nijhoff

Movius, Hallam Jr

- 1944 Early man and Pleistocene stratigraphy in **Southern and Eastern Asia**, vol.XIX, no.3, Cambridge: Peabody Museum Pithécanthropus de Java à la découverte du chaînon manquant, Les dossiers d'Archéologie, no.184, 1993 (kumpulan karangan).

Sartono

- 1992 "Betulkah wilayah asal manusia dari Afrika ?, kertas kerja pada **Seminar Peringatan 100 Tahun Penemuan Pithecanthropus**, di Jambi.

Sémah, François, Anne-Marie Sémah, Tony Djubiantono

- 1990 Mereka menemukan Pulau Jawa, **Katalog Pameran 100 Tahun Penemuan Pithecanthropus**, Jakarta.

Simanjuntak, Truman

- 1993 **Strategi Pengembangan Bidang Prasejarah**, (tidak diterbitkan)
- 1993 "Prasejarah PJP II", Kertas kerja pada **EHPA**, Yogyakarta.
- 1997 **Hasil-hasil Pokok Penelitian Prasejarah Indonesia**, hasil kerja sama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Muséum National d'Histoire Naturelle, Naditira Widya, no. 02, Balai Arkeologi Banjarmasin.
- 1997 "Akhir Plestosen dan awal Holosen di Nusantara", *Proceedings PIA VII*, jilid 2, Puslit Arkenas.
- 1998 "New insight on the tools of the Pithecanthropus", kertas kerja pada **Kolokium Internasional Tentang Sangiran**, Solo
- 1998 "Penelitian Prasejarah dalam perspektif kewilayahan", kertas kerja pada **EHPA Cipayung**, 16-20 Februari
- 2000 **Naskah Akademis Pembentukan Laboratorium Pusat Arkeologi**, (tidak diterbitkan).

Puslit Arkenas

- 2000 **Pedoman Metode Penelitian Arkeologi**, Jakarta: Puslit Arkenas

Soejono, R.P. (ed)

- 1984 **Sejarah Nasional Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka

DI BALIK LIMA TEMA UTAMA PENELITIAN ARKEOLOGI INDONESIA

Mundardjito

Saya diminta untuk menulis makalah mengenai harapan dan kenyataan arkeologi Indonesia dengan membicarakan Lima Tema Utama Penelitian Arkeologi Indonesia (disingkat LTUP) yang dirumuskan dalam rapat Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi (EHPA) di Kaliurang tahun 1993. Sebagaimana diketahui LTUP kemudian dijadikan arah kebijakan penelitian arkeologi Indonesia untuk 25 tahun mendatang. Setelah itu sudah tentu LTUP dikenal oleh para peneliti di Puslitarkenas atau Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (sekarang: Pusat Arkeologi) dengan ke-10 balarnya. Namun, kebanyakan arkeolog yang berada di luar instansi tersebut kurang bahkan tidak mengenalnya apalagi memahaminya dan mengaitkan penelitian mereka dengan tema-tema itu.

Harus diakui bahwa saya termasuk arkeolog yang kurang banyak mengetahui hal-hal berkenaan dengan kebijakan penelitian arkeologi di instansi tersebut. Itulah sebabnya lebih baik jika saya di sini menempatkan diri sebagai pengamat luar yang mengamati dari jauh perihal LTUP tanpa masuk terlalu jauh ke dalam seluruh pemasalahan. Dalam pada itu beberapa komentar mengenai lima tema ini telah pernah saya kemukakan tahun 1994

dalam Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Sastra dan Seni (disingkat Forkom)¹ dan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII tahun 1996².

Setelah EHPA 1993 itu, rapat evaluasi hasil penelitian arkeologi diadakan berturut-turut sebagai berikut:

1. Tahun 1994, mengevaluasi metode penelitian;
2. Tahun 1996, mengevaluasi hasil penelitian kajian wilayah (strategi perencanaan dan pengembangan penelitian);
3. Tahun 1998, mengevaluasi hasil penelitian mengenai potensi sumberdaya arkeologi-wilayah dalam skala penelitian lokasional dan regional;
4. Tahun 1999, mengevaluasi lagi metode penelitian;
5. Tahun 2000, akan mengevaluasi peran arkeologi dalam peningkatan apresiasi nilai budaya nasional menghadapi tantangan abad ke-21.

Perlu dikemukakan juga di sini bahwa makalah-makalah yang dibicarakan dalam setiap EHPA itu, sepanjang pengetahuan saya, tidak diterbitkan seperti halnya AHPA (Analisis Hasil Penelitian Arkeologi tahun 1987, 1988, 1989 dan 1991) sehingga hasil evaluasi itu tidak tersosialisasikan secara luas.

LIMA TEMA UTAMA

Dalam makalahnya yang disampaikan di Forkom tahun 1994³, Hasan Muarif Ambary menyatakan bahwa Puslitarken dalam kurun waktu 25 tahun antara tahun 1969-1994 (PJPT I) telah dapat membuahakan penjelasan atas permasalahan-permasalahan arkeologi yang meliputi:

¹ Diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada 28 November—1 Desember 1994 di Ciloto, Bogor.

² Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tanggal 12—16 Maret 1996 di Cipanas, Bogor.

³ Lihat Catatan 3

1. proses dan aliran-aliran migrasi-migrasi besar, terutama dari Asia Tenggara (khususnya) daratan ke Asia Tenggara kepulauan, yang mungkin disertai proses tumbuhnya puak-puak;
2. prakondisi dan proses-proses persentuhan budaya-budaya lokal Nusantara dengan tradisi besar Hindu, Islam dan Eropa;
3. adaptasi, sosialisasi, tumbuh dan berkembangnya budaya-budaya lokal, dan diversifikasi budaya;
4. proses integrasi nasional.

Secara garis besar Hasan Ambary dalam makalahnya menguraikan hasil penelitian dari setiap bidang (Ambary 1994). Sebagai contoh, untuk bidang Arkeologi Islam telah dapat digambarkan proses, alur, dan jalur sosialisasi Islam di berbagai wilayah termasuk yang sedikit atau tidak disentuh kebudayaan Hindu-Budha. Diketahui pula surutnya pusat kultural Hindu-Budha berkoinidens dengan introduksi dan sosialisasi Islam di Indonesia, semakin intensnya perdagangan internasional jarak jauh dan persentuhan dengan para pedagang atau musafir Arab, Persia, Gujarat, dan Cina, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Diketahui juga tumbuh dan surutnya *enclaves* Muslim yang berkoeksistensi damai dengan komunitas Hindu-Budha. Tergambar pula tumbuh dan surutnya pusat kekuatan Islam di Giri, Demak, Cirebon, Banten, Gowa-Tallo, Banjar, Lombok, Bima, dan Ternate-Tidore. Juga terdapat penggunaan dan pengembangan aksara dan bahasa Arab, penciptaan bangunan arsitektur peribadatan yang mengadaptasi rancang bangun lokal sebelumnya serta penggunaan dan pengembangan seni tulis kaligrafi yang tinggi nilainya.

Dikemukakan pula olehnya bahwa atas dasar keberhasilan dalam kurun waktu hingga tahun 1994 itu, Puslitarkenastelah menyusun arah kebijakan penelitian arkeologi di Indonesia untuk kurun waktu 25 tahun mendatang dari tahun 1995 sampai 2020 (PJPT II), yang disebut sebagai **Lima Tema Utama Penelitian** (LTUP). Kelima tema utama tersebut diharapkan

agar digunakan sebagai kerangka utama dan merupakan prioritas dalam menyusun program kerja Puslitarken dalam Pelita VI tahun 1995--2000, yang meliputi tema-tema sebagai berikut:

1. proses dan aliran migrasi nenek-moyang bangsa Indonesia dan keturunannya sampai dengan tumbuhnya puak-puak;
2. proses persentuhan budaya Nusantara dengan tradisi-tradisi besar (Hindu-Budha, Islam, dan Eropa);
3. adaptasi dan tumbuhnya budaya-budaya lokal yang diperkaya oleh masuknya anasir-anasir budaya dari luar ('*local genius*');
4. proses terjadi dan berlangsungnya diversifikasi kultural;
5. proses dan kelangsungan integrasi budaya dalam lingkup dan wawasan nasional.

Jika kita bandingkan kedua daftar di atas, jelas terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang besar di antara tema-temanya bahkan dapat dikatakan serupa benar. Jelas pula dapat diketahui bahwa tema-tema itu terus digunakan sebagai dasar kebijakan penelitian dalam PJPT II. Dengan kata lain butir-butir yang sudah dilaksanakan dalam PJPT I, menurut saya, belum membuahkan penjelasan atas permasalahan-permasalahan itu secara tuntas. Kalau tidak, tema-tema itu tentu tidak akan dilanjutkan sebagai kebijakan penelitian dalam kurun waktu berikutnya. Mungkin yang dimaksudkan oleh Hasan Ambariy ialah dalam PJPT II masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan LTUP.

Kebijakan penelitian yang diwujudkan dalam LTPU tersebut dilengkapi dengan delapan butir arah kebijakan sesuai dengan paradigma arkeologi (?), yaitu:

1. pendekatan yang bersifat interdisipliner, holistik, dan kawasan;
2. pemanfaatan teori-teori kesinambungan dan perubahan (*continuity & change*) kebudayaan secara optimal dan rasional, berdasarkan wawasan pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan sumberdaya arkeologi;

3. data diperoleh dengan survei, ekskavasi, dan wawancara melalui metode tertentu sesuai dengan tujuan penelitian;
4. analisis data arkeologi bersifat interdisipliner. Oleh karena itu pelaksanaan penelitian yang terpadu agar hasilnya yang optimal;
5. penanganan dokumentasi di lingkungan Puslitarken as diselenggarakan dalam suatu sistem manajemen yang diorientasikan untuk mendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM);
6. manajemen dokumentasi di atas dijabarkan melalui suatu mekanisme penanganan (sistem) perangkat teknis (metode) yang baku dan berkesinambungan;
7. sistem informasi manajemen (SIM) di lingkungan Puslitarken as diselenggarakan dengan penggunaan teknologi informatika;
8. menyiapkan pangkalan data arkeologi guna pembentukan Sistem Informasi Arkeologi (SIA) yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna informasi, baik di lembaga pemerintah, akademis, dan masyarakat.

REKAAN IMAJINER

Dengan lima tema utama dan delapan arah kebijakan tersebut di atas terbayang dalam benak saya bahwa para peneliti di Puslitarken as memecah setiap tema itu ke dalam beberapa subtema dan serangkaian program penelitian yang dirancang secara bertahap dan berkesinambungan sehingga pada tahap tertentu tercapai tujuan penelitian berkenaan dengan tema dan subtema yang memayunginya. Program-program penelitian itu dapat berupa penelitian besar dengan jumlah peneliti dan dana yang besar, atau sejumlah penelitian berskala menengah atau kecil-kecil. Saya juga membayangkan bahwa sejumlah penelitian itu dirancang sedemikian rupa untuk beberapa wilayah tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan mengenai pokok kajian tertentu. Setelah itu hal yang sama dilakukan pada wilayah lain, dalam kurun waktu lain, dan pokok kajian lain atau yang serupa.

Saya membayangkan ada beberapa peneliti yang memusatkan pikirannya pada penyusunan satu atau beberapa rancangan penelitian yang didasarkan atas studi kelayakan penelitian sehingga tidak menjadikan proposal itu lebih indah dari kenyataan. Proposal ini selanjutnya didiskusikan secara terbuka di antara para peneliti agar diperoleh kemantapan dan kesatuan pendapat dalam hal pilihan atau penetapan pokok kajian, luas daerah penelitian, jenis data yang diperkirakan dapat dikumpulkan, teori/hipotesis/asumsi yang akan digunakan, pendekatan, metode, teknik, dan sebagainya. Dalam rancangan ini sudah tentu para peneliti memberi penjelasan secara rinci langkah-langkah penelitian yang efisien dan efektif sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penelitian (kerangka acuan operasional). Program penelitian itu disusun sedemikian rupa sehingga dalam jangka waktu tertentu tercapai sasaran-sasaran antara dan sasaran akhir. Tergambar dalam pikiran saya ada beberapa tenaga trampil yang berkemampuan menyelenggarakan manajemen data dengan program komputer yang tepat agar semua informasi dalam pangkalan data dapat dikendalikan.

Setelah itu terbayang ada beberapa peneliti yang melaksanakan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data kontekstual yang (terutama) relevan dengan pokok kajian. Tergambar pula bahwa sejumlah peneliti secara bersama-sama mengolah data dan merekamnya, serta menyimpannya ke dalam pangkalan data di komputer dengan menggunakan taksonomi yang disepakati bersama. Mereka memusatkan perhatiannya pada manajemen data guna dapat mengorganisir dan mengelola data sedemikian rupa sehingga sewaktu-waktu mudah diakses, ditambah, diperbaiki, dan dikembangkan.

Saya membayangkan pula ada beberapa peneliti senior yang memusatkan perhatiannya pada pengintegrasian seluruh data yang relevan untuk pencapaian tujuan penelitian dan menyimpan data yang kurang atau tidak relevan untuk kemudian didaurulang jika diperlukan. Selanjutnya mereka membahas hasil penelitian dengan para peneliti melalui diskusi-diskusi terbuka untuk menyimpulkan, menjelaskan, dan merangkum hasil-

hasil penelitian, serta mengaitkannya dengan tema atau subtema yang menjadi payung penelitiannya.

KERAGUAN

Kita tentu tidak mengharapkan bahwa LTUP 1993 itu seperti selembar cek kosong, yang bisa dan boleh diisi apa saja oleh siapa pun, atau sebagai selembar cek yang selamanya tidak pernah diisi. Dalam pada itu saya belum mendapat informasi dari Pusat Arkeologi apakah imajinasi yang saya ceritakan itu terwujud; apakah operasionalisasi lima tema utama dengan delapan butir arah kebijakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai harapan dan tanpa banyak masalah. Saya pun belum mengetahui apakah untuk melaksanakan penelitian atas dasar tema-tema dan kebijakan itu para peneliti di Pusat Arkeologi sudah dibekali petunjuk pelaksanaan yang jelas dan dapat dipraktekkan.

Timbul pula pertanyaan-pertanyaan antara lain; apakah kita sudah cukup puas dengan hasil yang telah dicapai dalam PJPT I berkenaan dengan proses migrasi, proses persentuhan budaya (seperti teori kasta), proses berlangsungnya diversifikasi kultural, dan proses integrasi budaya. Apakah bukti-bukti arkeologis yang dijadikan dasar penjelasan-penjelasan itu sudah cukup sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis dan metodologis. Untuk proses migrasi timbul pertanyaan misalnya; bagaimana proses itu terjadi; bergerak atau bahkan mengalir dari lokasi tertentu di Asia Tenggara ke daerah tertentu di Indonesia; atau mengalir dari sejumlah daerah di Asia Tenggara ke sejumlah daerah tertentu di Nusantara. Apa sebabnya terjadi migrasi; faktor atau sejumlah faktor apa yang mendorong terjadinya migrasi oleh komunitas di Asia Tenggara; ke mana kecenderungannya. Seberapa cepat penyebarannya; apakah migrasi itu mengalir satu kali, atau berkali-kali; apakah mendadak atau berkesinambungan; apakah gerakan migrasi hanya satu arah atau beberapa arah, atau bahkan timbal balik. Seberapa cepat aliran migrasi itu berlangsung.

Marilah kita kini menyimak suara lain dari dalam Puslitarken as sendiri, yaitu Haris Sukendar dalam Forkom tahun 1994⁴. Secara transparan Sukendar menyatakan bahwa memang benar telah terjadi peningkatan jumlah penelitian di Puslitarken as dalam PJPT I, tetapi peningkatan itu ternyata tidak secara otomatis mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Selain terdapat kenyataan adanya ketidakseimbangan yang mencolok antara jumlah kegiatan lapangan dengan jumlah laporan (apalagi dengan yang bermutu), terdapat pula ketimpangan antara pengumpulan data artefaktual di lapangan dengan kegiatan analisis temuan. Menurut Sukendar (1994), faktor-faktor yang menyebabkannya antara lain:

1. Wawasan teori dan metode penelitian belum dikuasai para peneliti secara maksimal;
2. Sumberdaya manusia belum cukup, baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya;
3. Ilmu pengetahuan penunjang penelitian arkeologi belum dimanfaatkan secara maksimal;
4. Sarana dan prasarana untuk analisis laboratoris belum memadai.

Selain itu Sukendar juga menyatakan bahwa penyusunan program penelitian sampai akhir PJPT I dan awal PJPT II masih berorientasi pada skala prioritas dari masing-masing bidang (Prasejarah, Arkeologi Klasik, Arkeologi Islam, dan Arkeometri), dan biasanya merupakan target-target yang lepas sehingga tidak mencapai suatu hasil penelitian yang mencerminkan satu kesatuan yang utuh. Penelitian yang telah dirinci disesuaikan dengan keadaan dan keperluan setiap bidang. Program-program penelitian disusun tidak terpadu, tetapi parsial, tidak merata secara spasial, dan lebih didasarkan atas jenis minat dan tingkat kemampuan tertentu. Program-program yang disusun masih bersifat eksploratif dan artefaktual. Wawasan teori dan metode penelitian belum diketahui para peneliti secara mendalam; dan belum dimanfaatkan secara akurat dalam operasionalisasinya, baik da-

⁴ Lihat Catatan 3

lam teori maupun praktek di lapangan. Kelemahan-kelemahan ini berakibat langsung pada kualitas laporan-laporan penelitian dan karya ilmiah para peneliti.

KATA AKHIR

Pusat Arkeologi yang semula memiliki empat bidang, kini diciutkan menjadi dua bidang saja. Bidang Prasejarah dijadikan satu dengan Arkeometri, Bidang Klasik dijadikan satu dengan Bidang Islam. Penyederhanaan ini mengingatkan kita pada pembidangan arkeologi antara *Prehistoric Archaeology* dan *Historic Archaeology*, karena sifat datanya berbeda yaitu tanpa teks dan dengan teks (*text-aided archaeology*), memerlukan seperangkat pengetahuan dan cara pengkajian yang berbeda. Dengan pengurangan jumlah bidang itu, maka tembok batas antarbidang dengan demikian juga berkurang sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya dialog antarbidang yang lebih menyeluruh dan tersusunnya program penelitian yang lebih padu.

Sebagaimana banyak dikonstatir orang, sumberdaya manusia bidang arkeologi dianggap masih kurang, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, terutama di beberapa balar. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan program penelitian yang porsinya mungkin akan diberikan jauh lebih banyak di daerah-daerah sebagai pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas saya menduga bahwa tema utama penelitian arkeologi yang dicetuskan tujuh tahun yang lalu hingga tahun 2000 ini belum dapat terselenggara sesuai dengan harapan. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai kondisi di dalam maupun di luar Pusat Arkeologi. Saya berpendapat, perlu ada peninjauan kembali atas pelaksanaan program penelitian sesuai dengan kondisi Pusat Arkeologi dan kondisi

umum negara kita dewasa ini serta menyusun kembali secara lebih ketat skala prioritas yang lebih masuk akal.

Agaknya penyusunan LTUP 1993 banyak dipengaruhi oleh paradigma prosesual⁵ yang dikembangkan aliran "Binclarke" (singkatan dari Lewis R. Binford di Amerika Serikat, dan David L. Clarke di Inggris). Jika benar demikian, maka proses-proses yang dipelajari biasanya berkenaan dengan perubahan budaya yang mengkaji tiga hal pokok, yaitu: faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan budaya, arah perkembangan, dan kecepatan perkembangannya. Penelitian prosesual semacam itu memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi lebih dulu seperti pertanggalan yang cukup akurat, yang tidak semata-mata didasarkan atas hasil analisis tipologis atau stilistik, tetapi juga dengan konteks stratigrafis, dan jika mungkin didukung penanggalan absolut (C 14). Hal ini berarti bahwa temuan yang meskipun *in situ*, tetapi tidak diketahui konteksnya dengan temuan-serta atau dengan stratigrafinya, perlu dipertimbangkan untuk tidak diolah dalam 'mesin olah analisis' karena dapat melahirkan penafsiran alur pergerakan benda atau arah perkembangan budaya yang keliru. Penggunaan paradigma prosesual dalam strategi umum penelitian arkeologi di Indonesia sebagaimana digambarkan dalam LTUP agaknya perlu didiskusikan lebih jauh secara sungguh-sungguh bagaimana melaksanakannya dalam kondisi umum sekarang ini.

Perkembangan arkeologi seringkali dipengaruhi atau tergantung kepada siapa yang menyusun program, sebagaimana bunyi judul buku Norman Yoffee dan Andrew Sherratt: *Archaeological theory: who sets the agenda?* Demikian juga perkembangan teori arkeologi di dunia belum tentu dapat diikuti atau dilaksanakan di suatu negara karena adanya perbedaan kondisi obyektif, sejarah perkembangan penelitian arkeologi di negara itu, dan data yang ada. Kita bebas menentukan aliran atau paradigma arkeologi mana yang akan kita pilih. Yoffee dan Sherratt mengingatkan kita:

⁵ Dugaan serupa juga dikemukakan Sumijati Atmosudiro (periksa Atmosudiro 1994)

"There has never been a unified school of archaeology: just as to day, the subject has always been characterized by competing theoretical stances that often arise from different bodies of data and attendant problems of interpretation" (Yoffee & A. Sherratt 1993:1).

Nilai ketepatan data *in situ* untuk keperluan penanggalan seringkali sedemikian menentukan. Tanpa mengetahui penanggalan yang lebih akurat, aliran benda dari satu tempat ke tempat lain tidak dapat ditentukan. Apalagi jika pergerakannya tidak ke satu arah tetapi ke berbagai arah. Demikian pula perubahan atau perkembangan bentuk suatu benda tidak hanya ditentukan oleh seriasi bentuk dan gaya, tetapi lebih tepat jika dilengkapi dengan tarikhnya sebab perkembangan itu tidak selalu harus dari sederhana ke yang kompleks tetapi juga bisa sebaliknya. Ini berarti masalah penanggalan yang lebih akurat dapat diandalkan menjadi salah satu program yang perlu diutamakan. Data penanggalan ini tidak hanya bermanfaat bagi kajian yang sifatnya prosesusal tetapi juga yang menggunakan paradigma arkeologi lainnya.

Program penelitian etnoarkeologi (bukan etnografi) dengan prinsip *'new analogy'* tetap bernilai penting karena merupakan salah satu sumber interpretasi arkeologi. Di Indonesia banyak sekali suku bangsa yang masih dapat diteliti berkenaan dengan permasalahan arkeologi yang perlu dipecahkan. Peluang ini dapat hilang jika modernisasi dan perubahan budaya masyarakat berjalan cepat.

Mengingat luasnya pekerjaan dan tuntutan yang kita hadapi barangkali ada baiknya jika ada sekelompok arkeolog yang memusatkan perhatian pada tema-tema utama yang sudah ada atau yang telah disesuaikan dengan keadaan negara kita dewasa ini, dan ada pula yang memusatkan perhatian pada kajian-kajian di luar tema tertentu karena selain harus memperdalam kajian, arkeolog Indonesia juga harus kreatif mengembangkan wawasannya agar kemampuan profesionalnya semakin tinggi dan dapat menghadapi tantangan yang penuh kompetisi di abad ke-21.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ambary, Hasan Muarif

- 1994 "Kebijakan Penelitian Arkeologi Indonesia yang Dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional". Makalah disampaikan dalam **Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Sastra dan Seni**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Atmosudiro, Sumijati

- 1994 "Arah dan Ragam Penelitian Arkeologi: Studi Kasus di Jurusan Arkeologi UGM". Makalah disampaikan dalam **Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Sastra dan Seni**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Mundardjito

- 1994 "Kebijakan Penelitian Arkeologi di Indonesia". Makalah disampaikan dalam **Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Sastra dan Seni**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 1996 "Perluakah Reorientasi Kebijakan Penelitian Arkeologi Indonesia?" Makalah disampaikan dalam **Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII** Cipanas, Bogor; Puslitarken.

Sukendar, Haris

- 1994 "Penelitian Arkeologi di Indonesia". Makalah disampaikan dalam **Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Sastra dan Seni**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Yoffee, Norman & Andrew Sherratt

- 1993 **Archaeological theory: who sets the agenda?** New Directions in Archaeology Series. Cambridge: Cambridge University Press.

BIO-ARKEOLOGI, HARAPAN DAN KENYATAAN

Arfian S

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ilmu arkeologi, menurut pandangan yang umum berlaku, diakui adanya dua paradigma utama yang selama ini menjadi pautan pengikutnya. Kedua paradigma itu adalah sejarah budaya (*cultural history*) yang didukung oleh Arkeologi Tradisional, dan proses perubahan budaya (*cultural proses*) yang dianut oleh Arkeologi Pembaharuan. Para pengikut paradigma sejarah budaya bertujuan untuk mengungkapkan tahap-tahap perkembangan budaya dan kehidupan masa lampau sedangkan paradigma proses perubahan budaya lebih memusatkan perhatian untuk menjelaskan proses-proses perubahan budaya. Dari kedua penganut paradigma tersebut, perbedaan yang mendasar terdapat pada pengujian kebenaran gagasan secara eksplisit yang dilakukan oleh penganut arkeologi pembaharuan. Adanya pengujian data secara eksplisit ini maka tafsiran-tafsiran yang didasarkan pada kerangka teori, dapat di nilai tingkat kesahihannya. Jika memang tidak sesuai dengan data yang ada maka perlu dicari penjelasan yang lain (Daud Aris Tanudirjo 1993).

Dalam proses pengujian seperti di sebut di atas diperlukan gagasan perantara (*bridging argument*) karena teori tidak mungkin diujikan secara langsung. Untuk mendapatkan gagasan perantara, arkeolog harus melakukan penelitian tingkat menengah (*middle range research*) seperti etnoarkeologi,

arkeologi percobaan, kajian budaya bendawi modern, bahkan kajian-kajian di bidang ilmu lainnya. Penelitian tingkat menengah akan memberikan petunjuk tentang prinsip interpretasi yang ilmiah dan data yang relevan dalam pengujian hipotesis-model-teori (Binford 1989; Thomas 1989, dalam Daud Aris Tanudirjo 1993).

Selanjutnya Clarke (1972) sebagaimana yang dipaparkan oleh Daud Aris T Dalam tulisannya Restropeksi Penelitian Arkeologi Di Indonesia mengatakan bahwa gerakan arkeologi pembaharuan telah mengembangkan 4 paradigma, yaitu.

1. *Paradigma Morfologis*, paradigma ini lebih banyak mengkaji data arkeologi itu sendiri. Tentu saja bahan kajian utamanya adalah tingkat-tingkat data yang ada beserta hubungannya.
2. *Paradigma Antropologis*, paradigma ini lebih mengkaji hubungan antara data arkeologi, pola, dan atau keanekaragamannya dengan pola keanekaragaman aspek sosial yang melatarbelanginya.
3. *Paradigma Ekologis*, paradigma ini tertuju pada kajian hubungan antara data arkeologi (terutama yang berkaitan dengan lingkungan seperti pollen, sisa-sisa fauna dan flora) dengan lingkungan yang telah membentuknya. Jadi, aspek adaptasi lingkungan menjadi sasarannya.
4. *Paradigma Geografis*, paradigma ini lebih memusatkan perhatian pada kajian keruangan dalam kaitannya dengan pola aktifitas di dalam situs maupun diantara situs dalam suatu bentang alam tertentu seperti yang tercermin dalam pola sebaran data arkeologi.

Dari empat paradigma yang dikembangkan dalam arkeologi pembaharuan di atas, sudah tentu pada *paradigma ekologis* diperlukan kajian-kajian dari ilmu lain terutama biologi, yang khusus mempelajari seluk-beluk makhluk hidup di atas dunia ini, jadi, untuk mengungkapkan data arkeologi yang berupa sisa-sisa makhluk hidup baik yang berasal dari fauna (hewan) maupun yang berasal dari flora (tumbuhan) diperlukan kajian-kajian dari biologi, tanpa kajian dari ilmu ini tidaklah mungkin dapat diungkapkan data arkeologi yang berasal dari makhluk hidup tersebut. Dengan adanya kajian biologi yang dimanfaatkan dalam kegiatan arkeologi menunjukkan bahwa

kajian lintas disiplin ilmu antara arkeologi dan biologi dikenal dengan **Bio-Arkeologi**.

II. BIOLOGI DAN TINGKATAN KEKERABATAN MAKHLUK HIDUP

Biologi sebagaimana yang telah kita ketahui adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk makhluk hidup di atas dunia ini. Untuk mempelajari masing-masing permasalahan dalam kehidupan makhluk hidup tersebut, ilmu ini mempunyai sub-subdisiplin ilmu yang secara umum terbagi atas dua pembagian utama yaitu pembagian secara vertikal dan horizontal. Pembagian vertikal melingkupi kelompok sub-subdisiplin utama dalam biologi seperti *Zoologi* (ilmu yang mempelajari tentang hewan), *Botani* (ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan), dan *Mikrobiologi* (ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang mempunyai ukuran tubuh yang sangat kecil (mikro) sedangkan pembagian secara horizontal merupakan kelompok ilmu-ilmu dasar dalam kehidupan makhluk hidup seperti *Morfologi* yaitu ilmu yang mempelajari ciri-ciri struktur yang terdapat pada tubuh luar makhluk hidup, *Anatomi* ilmu yang mempelajari ciri-ciri struktur yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup, *Fisiologi* ilmu tentang fungsi organ tubuh, *Taxonomi* ilmu tentang pengelompokkan makhluk hidup, *Ekologi* ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup sesamanya atau makhluk hidup dengan lingkungannya serta ilmu-ilmu dasar kehidupan lainnya (Arfian S 1994).

Kedua kelompok pembagian di atas baik pembagian secara vertikal maupun pembagian secara horizontal mempunyai hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya karena kelompok dalam pembagian vertikal adalah merupakan kelompok ilmu yang mempelajari makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri strukturnya sedangkan kelompok dalam pembagian horizontal merupakan kelompok ilmu-ilmu yang mempelajari dasar-dasar dari seluruh kehidupan makhluk hidup. Jadi, masing-masing kelompok ilmu makhluk hidup yang tergolong dalam pembagian vertikal dapat dipelajari melalui masing-masing kajian dalam pembagian kelompok ilmu secara horizontal.

Berdasarkan ciri-ciri struktur, Soemarwoto, dkk (1992) mengelompokkan makhluk hidup ke dalam tiga golongan utama yang disebut dengan "Dunia" yaitu *Dunia hewan*, *tumbuh-tumbuhan* dan *mikroorganisme* atau yang sekarang lebih dikenal dengan *Dunia protista*. Dasar-dasar kehidupan dari masing-masing dunia makhluk hidup inilah yang dipelajari melalui masing-masing kajian dalam kelompok ilmu pada pembagian horizontal seperti morfologi, taxonomi, fisiologi, anatomi, evolusi, dan ekologi tetapi dalam kajian ekologi masih diperlukan kajian-kajian dari bidang ilmu lain seperti fisika, kimia dan geologi, hal ini dikarenakan dalam menjalani kehidupannya, makhluk hidup tersebut saling berinteraksi, interrelasi dan interdependensi baik sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungan alam tempat ia menjalani kehidupan tersebut. Ciri-ciri struktur dari setiap makhluk hidup tidak saja dipergunakan dalam pengelompokkan "dunia" tetapi selalu merupakan dasar dalam pengelompokkan makhluk hidup hingga ke tingkat jenis makhluk hidupnya (*spesies*). Kajian pengelompokkan ini kita kenal dengan ilmu taxonomi, berdasarkan ciri-ciri struktur makhluk hidup maka di dalam biologi dikenal adanya tingkatan kekerabatan makhluk hidup seperti *Phylum* (dalam dunia hewan) dan *Divisio* (dalam dunia tumbuh-tumbuhan) sedangkan tingkatan kekerabatan makhluk hidup selanjutnya dikenal dengan *Kelas*, *Ordo*, *Familia*, *Genus* dan *Spesies*. Menurut Heywood (1967) dalam sistem pengelompokkan tingkatan kekerabatan makhluk hidup (klasifikasi ilmiah) yang modern telah mempergunakan semua data ciri struktur seperti ciri-ciri struktur fisiologi, embriologi, penyebaran di muka bumi dan dasar-dasar lainnya yang kemudian dijelaskan dengan teori evolusi. Semua ciri-ciri struktur yang dipergunakan dalam pengklasifikasian makhluk hidup ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan kekerabatan (*relationship*) serta untuk mempermudah dalam mempelajari jenis makhluk hidup (*spesies*).

Secara umum, pengamatan ciri-ciri struktur makhluk hidup baik secara morfologi maupun secara anatomi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi makhluk hidup tersebut dengan spesimen-spesimen yang ada atau mendeterminasikannya dengan buku-buku kunci determinasi.

Secara ilmiah, pemberian nama jenis makhluk hidup (*spesies*) dalam biologi diatur berdasarkan sistem Nomenklatur Linnaeus yang dikenal de-

ngan Sistem Binomium (*Binomium system*). Sistem ini merupakan sistem dua suku kata dalam bahasa latin atau yang dilatinkan, kata pertama menunjukkan suatu kelompok spesies (*genus*) yang diawali dengan huruf besar sedangkan kata yang ke dua menerangkan kata pertama dan ditulis dengan huruf kecil. Sistem ini sudah dipakai sejak ilmu biologi mulai berkembang. Walaupun telah sering mengalami perbaikan, kaidah dasar dua kata tetap tidak berubah. Penulisan nama jenis makhluk hidup dengan sistem dua suku kata (sistem binomium) ini mutlak dilakukan untuk menghindari bermacam-macam nama daerah (negara) yang diberikan untuk satu spesies (*synonym*) atau satu nama yang diberikan untuk bermacam-macam spesies (*homonym*). Disamping itu, sistem ini juga untuk memudahkan atau menyederhanakan nama-nama spesies yang telah diberikan para ahli sebelum diberlakukannya sistem ini. Menurut Soemarwoto (1992) dan Yasin (1987), sebelum diberlakukannya sistem binomium, para ahli botani dan zoologi menulis nama jenis dengan sistem polynomial (nama dengan keterangan yang panjang), seperti **Caspar Bauhin** (ahli botani Swiss) memberi nama untuk Tomat dengan *Solanum pomiferum fructu rotunda striato molli* yang artinya tumbuhan *Solanum* yang berbuah lebat, buahnya bulat beralur-alur dan lunak, kemudian nama ini disederhanakan oleh Linnaeus menjadi *Solanum lycopersicum*.

III. BIO-ARKEOLOGI HARAPAN DAN KENYATAANYA.

Secara umum bio-arkeologi adalah studi tentang makhluk hidup pada masa lampau, studi ini dapat dilakukan jika ditemukan adanya sisa-sisa makhluk hidup baik berupa fosil, cetakan jejak pada batu atau lapisan tanah maupun berbentuk lukisan makhluk hidup di dinding-dinding gua atau candi karena kesemuanya itu merupakan bukti-bukti dari adanya kehidupan makhluk hidup pada masa lampau. Pendapat seperti ini juga pernah dikatakan oleh Soemarwoto (1990) bahwa fosil adalah suatu bukti langsung dari adanya makhluk hidup yang hidup di bumi pada pada jaman dahulu. Meskipun bagian-bagian fosil sering menyerupai bagian-bagian organisme sekarang, fosil umumnya mewakili individu spesies yang sudah lama punah. Umumnya yang menjadi fosil adalah bagian tubuh makhluk hidup yang keras

seperti kayu, cangkang, tulang, kadang-kadang bagian ini menjadi fosil tanpa mengalami perubahan.

Dalam kajian arkeologi khususnya paradigma ekologis, data tentang makhluk hidup (terutama hewan dan tumbuhan) pada masa lampau merupakan salah satu data arkeologi yang perlu diungkapkan untuk melihat atau mengetahui hubungannya dengan data arkeologi yang lain karena aspek adaptasi manusia merupakan sasaran kajian dalam paradigma ini. Untuk mengungkapkan perihal kehidupan makhluk hidup pada masa lampau melalui sisa-sisa bagian tubuh yang memfosil ini maka diperlukan suatu kajian melalui ciri-ciri struktur anatomi tubuh makhluk hidup yang masih sekerabat dengan fosil atau sisa yang ditemukan. Dari pengamatan ciri struktur pada tiap-tiap sisa ini dapat diketahui nama jenis masing-masing sisa dan jika dianalisis lebih lanjut akan dapat diketahui nama jenis dari makhluk hidup yang memiliki sisa tersebut. Kajian taxonomi anatomi ini hanya dapat dilakukan untuk sisa hewan tingkat tinggi sedangkan untuk sisa hewan tingkat rendah (Moluska) yang selalu ditemukan adalah cangkang maka kajian taxonomi yang dapat diterapkan adalah ciri-ciri struktur morfologi (bentuk luar cangkang). Untuk mengungkapkan sisa-sisa tumbuhan, penerapan kajian taxonomi juga dilakukan berdasarkan ciri-ciri struktur morfologi. Hal ini dilakukan mengingat sisa-sisa tumbuhan yang ditemukan itu umumnya merupakan salah satu dari ciri-ciri struktur bentuk luar tubuh dari tumbuhan seperti biji, cetakan daun, dan kayu. Di samping sisa-sisa tumbuhan yang disebutkan ini, masih ada satu lagi jenis sisa tumbuhan yang terendapkan di dalam tanah dan tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang yaitu sejenis alat perkembangbiakan generatif tumbuhan yang kita kenal dengan "fosil polen dan spora". Untuk mengamati bentuk dan jenis fosil polen dan spora ini diperlukan satu proses kegiatan laboratoris. Penentuan nama jenis tumbuhan melalui analisis fosil polen dan spora ini sangat diperlukan sekali terutama dalam upaya mengungkapkan kondisi iklim pada masa lampau karena pertumbuhan tanaman sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh keadaan iklim pada masa itu.

Upaya untuk mengetahui nama jenis (*spesies*) dari sisa makhluk hidup ini agak sukar dilakukan karena ciri-ciri struktur yang ditemukan pada sisa-

sisa makhluk hidup dalam kegiatan arkeologi kurang lengkap. Oleh karena itu, sesuai dengan metode sistematik biologi maka untuk identifikasi sisa-sisa makhluk hidup dalam arkeologi harus dilakukan sesuai dengan tingkatan kekerabatan makhluk hidup yang memiliki sisa tersebut. Dengan perkataan lain, pengidentifikasiannya harus dimulai dari tingkatan kekerabatan yang paling tinggi seperti *Philum* atau *Divisio*, *Kelas*, *Ordo*, *Famili*, *Genus* dan akhirnya *Spesies*.

Hasil kajian *taxonomy* ini kemudian ditindak lanjuti dengan kajian ekologi baik ekologi hewan maupun ekologi tumbuh-tumbuhan karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup di atas dunia ini dapat hidup dengan baik pada habitat yang dikehendaknya. Jadi dengan diketahuinya nama jenis makhluk hidup dan habitatnya ini maka kita mendapatkan suatu gambaran tentang lingkungan alam secara umum, tempat sisa-sisa makhluk hidup itu ditemukan. Data ini sangat diperlukan dalam kajian arkeologi pembaharuan terutama pada kajian yang bertitik tolak pada paradigma ekologis untuk mengungkapkan pola hidup manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan alam pada masa lampau di situs yang diteliti.

Dari uraian di atas terlihat bahwa dengan adanya kajian *bio-arkeologi* diharapkan dapat mengungkapkan nama jenis dan habitat makhluk hidup serta kondisi lingkungan alam pada masa lampau melalui sisa-sisa makhluk hidup yang ditemukan dalam berbagai macam kegiatan arkeologi.

Apakah kajian *bio-arkeologi* seperti yang diharapkan itu sudah dapat diwujudkan?, secara menyeluruh dapat dikatakan belum karena dari hasil penanganan temuan sisa makhluk hidup yang berupa sisa hewan umumnya baru sampai tingkat penentuan nama kelompok jenis baik dalam tingkatan *famili* ataupun *genus* makhluk hidup dan belum sampai ke tingkat nama jenis individunya serta belum dapat mengungkapkan tentang habitat hewan itu hidup. Begitu pun dalam penanganan sisa temuan dari tumbuh-tumbuhan juga baru mencapai tingkat identifikasi jenis tumbuhan sementara dari hasil analisis fosil polen dan spora pun belum dapat mengungkapkan kondisi iklim pada masa lampau di suatu situs arkeologi yang diteliti. Hal ini dikarenakan oleh masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kajian ini secara maksimum sesuai dengan apa yang diharapkan, se-

perti kurangnya referensi-referensi yang dapat menunjang kegiatan kajian dan peralatan serta ruang laboratorium yang belum memadai. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu upaya untuk memenuhi kekurangan-kekurangan sarana dan prasarana yang diperlukan tersebut. disamping itu, perlu diadakan suatu studi perbandingan ke laboratorium atau ke instansi lain yang telah memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Peningkatan mutu tenaga analis di bidang kajian ini perlu dikembangkan dalam bentuk traning atau pelatihan.

Segala bentuk kekurangan ini perlu mendapat perhatian kita bersama terutama dari unsur pimpinan untuk dapat memikirkan bagaimana caranya melengkapi kekurangan tersebut sehingga kajian bio-arkeologi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

IV. PENUTUP

Sengaja atau tidak keterintegrasian ilmu arkeologi dan biologi sangat erat sekali terutama dalam membahas masalah kehidupan manusia sebagai makhluk hidup di atas dunia ini karena dalam menjalani kehidupannya manusia itu tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam, tempat mereka menjalani kehidupan tersebut. Hal ini dikarenakan sumber energi (makanan) manusia berasal dari sumberdaya alam yang terdapat di sekitar lingkungan hidup mereka, manusia akan memanfaatkan sumberdaya alam itu semaksimal mungkin.

Hewan dan tumbuhan merupakan sumberdaya alam yang selalu dimanfaatkan oleh manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya sudah sejak dahulu kedua sumberdaya alam ini dimanfaatkan oleh manusia, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sisa-sisa dari kedua sumberdaya alam ini yang ditemukan dalam penelitian arkeologi. Sisa-sisa dari kedua sumberdaya alam ini perlu diteliti guna mengetahui jenis dan habitat hidupnya serta hubungannya dengan data arkeologi yang lain. Untuk mengungkapkan hal ini diperlukan suatu kajian dari ilmu biologi.

Adanya pemanfaatan kajian biologi dalam arkeologi merupakan suatu kegiatan kajian lintas disiplin ilmu yang akhir-akhir ini dikenal dengan **Bio-arkeologi**, melalui kajian ini diharapkan segala sesuatu yang berhubungan

dengan makhluk hidup terutama hewan dan tumbuh-tumbuhan pada masa lampau dapat diungkapkan, data ini sangat diperlukan dalam kajian arkeologi terutama dalam meneliti pola hidup manusia pada masa lampau di suatu situs arkeologi.

Selama ini kajian bio-arkeologi di Indonesia belum begitu sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini dikarenakan masih banyak kekurangan untuk melaksanakan kegiatan dalam kajian ini seperti kurangnya referensi, sarana dan prasarana laboratorium, serta tingkat pengetahuan tenaga analis di bidang ini. Keadaan ini perlu segera diatasi sehingga apa yang diharapkan dari hasil kajian bio-arkeologi dapat terpenuhi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arfian.

- 1994 *"Prinsip-Prinsip Dasar Biologi Dalam Arkeologi. Makalah Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi.* Palembang 11-16 Oktober 1994.

Clarke, David L.

- 1972 *"Model And Paradigms in Contemporary Arhaeology". dalam Model in Archaeology.* David L Clarke. London Methuen and Co Ltd.

Daud Aris Tamudirjo.

- 1993 *"Retropeksi Penelitian Arkeologi di Indonesia". Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI.* Puslit Arkenas. Jakarta.

Heywood

- 1967 **Modern Method In Plant Taxonomy.** Botanical Society Of British Isles And The Linnean Society Of London by Academic Press. London and New York.

Jasin M.

1987 **Sistematik Hewan (Invetebrata dan Vertebrata)**. Sinar
Wijaya. Surabaya.

Soemarwoto, dkk.

1990 **Biologi Umum I**. Cetakan ke VII. PT Gramedia Jakarta

1992 **Biologi Umum II**. Cetakan ke IX. Gramedia Pustaka Utama.
Jakarta.

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ARKEOLOGI INDONESIA: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

E.A. Kosasih

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya menjelaskan bahwa Pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap bidang kebudayaan, khususnya terhadap budaya masa lampau melalui kajian benda-benda cagar budaya (Kosasih 1993). Pertimbangan yang disampaikan di dalam **UUCB** adalah benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional. Dengan demikian kehadiran Pusat Arkeologi dan balai-balai arkeologi di daerah memiliki peranan sangat menentukan dalam pelaksanaannya ke depan. Suatu momentum yang tepat bahwa di satu pihak Pusat Arkeologi sedang mengembangkan sayap kewilayahan penelitiannya di kawasan Asia-Pasifik, sementara di pihak lain kita harus menghadapi beban tugas yang bertambah berat sebagai wujud nyata Pemerintah untuk membangun bidang kebudayaan, agar sejajar dengan kegiatan pembangunan di berbagai bidang lainnya.

Kebudayaan nasional yang kita miliki merupakan integrasi dari seluruh proses dan produk kultural yang dihasilkan dari berbagai gelombang migrasi besar dan kecil, mulai dari Asia Tenggara Daratan sampai ke seluruh kepulauan nusantara (Ibid., 1993). Salah satu sasaran yang utama adalah mengungkapkan konfigurasi kebudayaan nasional yang dibentuk dari puncak-puncak kebudayaan daerah, puncak-puncak budaya yang tinggi dan luhur, sekaligus memperlihatkan proses-proses pembentukan kebudayaan secara nasional. Pusat Arkeologi sangat berperan memberikan masukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena melalui arkeologi kita dapat membuat proyeksi ke masa depan, mengingat bahwa sejarah masa lampau merupakan pedoman untuk menyambut masa kini dan menyongsong masa yang akan datang. Masukan tersebut diharapkan dapat lebih memantapkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, yang antara lain harus ditelusuri akarnya melalui kajian arkeologi.

Apabila selama ini kita membicarakan masalah arkeologi, maka kita lebih banyak bergerak dalam ruang lingkup profesionalisme yang terbatas (Soediman 1983). Dalam era pembangunan dewasa ini, perlu adanya pengembangan visi bagi dunia arkeologi di Indonesia. Pengembangan visi yang dimaksud ialah mencanangkan perspektif yang lebih luas tentang peranan dan fungsi arkeologi di dalam pembangunan nasional, agar arkeologi dapat lebih bermakna bagi kehidupan bermasyarakat secara lebih luas. Satu hal yang tidak dapat dihindarkan adalah bahwa pembangunan selalu membawa perubahan terhadap lingkungan sosial-budaya dan lingkungan alam. Akibatnya timbullah perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yang selanjutnya dapat menimbulkan berbagai dampak, baik yang positif maupun negatif. Dengan mempertimbangkan perkembangan sosial-budaya masyarakat perlu dipersiapkan suatu cara pemasaran kepentingan dan hakekat arkeologi, melalui jalur-jalur kehidupan sosial-budaya masyarakat secara optimal (Soebadio 1996). Dalam kaitan ini perlu ada kesadaran terhadap arkeologi sebagai ilmu yang patut berkembang, sebab sa-

ngat berkepentingan dengan tinggalan fisik masa lampau. Apabila tinggalan fisik ini memperoleh perhatian yang serius, maka besar kemungkinan upaya pengungkapan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya mampu memperjelas gambaran mengenai sejarah bangsa suatu negara. Patut pula disadari bahwa tinggalan fisik budaya bukan saja menjadi monopoli kegiatan penelitian arkeologi, tetapi juga menjadi tanggungjawab Pemerintah dan masyarakat untuk membangunnnya kembali secara nasional.

2. PERMASALAHAN

Kebijakan penelitian arkeologi di Indonesia yang sekarang dibuat oleh Pusat Arkeologi, sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengarahkan, membina, melaksanakan serta mengembangkan penelitian arkeologi adalah dilandasi oleh kebijakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan spiritual bangsa (Mundardjito 1995). Kebijakan penelitian arkeologi di negara kita dikaitkan dengan kebijakan pengembangan kebudayaan nasional. Dengan demikian kebijakan penelitian arkeologi tersebut didasarkan pada tujuan dari ilmu arkeologi itu sendiri secara umum dan tujuan pembangunan nasional Indonesia secara khusus. Hal ini membuktikan bahwa Pusat Arkeologi berupaya keras untuk sedapat mungkin melakukan penelitiannya di seluruh wilayah propinsi, meskipun dalam kenyataannya belum mencapai hasil yang optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu perlu segera diperhatikan mengenai cara pengaturan pelaksanaannya, agar di wilayah-wilayah kerja yang intensitas situs penelitiannya relatif kecil dapat dilakukan penelitian yang lebih berkualitas, sedangkan sebaliknya di wilayah-wilayah kerja yang situs-situsnya sudah sering diteliti justru hasil penelitiannya harus makin ditingkatkan lagi secara lebih terintegratif.

Masyarakat hanya mengetahui bahwa arkeologi berkaitan dengan pra-sejarah, penggalian candi dan bangunan kuno (Dharmaputra 1995). Secara langsung mereka juga mengetahui bahwa arkeologi atau ilmu purbakala

berkenaan dengan sejarah manusia masa lampau yang terungkap melalui budaya material yang ditinggalkannya. Namun merekapun banyak yang belum menyadari bahwa masih terdapat sejumlah budaya yang masih hidup (*living cultures*), yang merupakan kelanjutan dari masa prasejarah, bahkan masih ada bukti-buktinya hingga menjelang abad ke-21 ini. Arkeologi sudah lama menyadari adanya budaya tradisional yang masih hidup sampai sekarang, tetapi baru selama tiga dasawarsa terakhir ini saja mereka menyadari kepentingannya dalam mencapai berbagai eksplanasi mengenai kehidupan manusia pada masa lampau. Dalam kaitan ini muncul sejumlah metodologi riset terhadap budaya tradisional yang masih hidup tersebut, guna menjelaskan berbagai aspek fungsional, spatial, temporal dan formal dari hasil-hasil kebudayaan yang masih hidup, agar dapat ditempatkan dalam konteks budaya di masa lampau.

Orientasi penelitian arkeologi tidak terfokus pada artefak atau benda saja, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga terhadap lingkungan alam yang mendukung kelangsungan hidup manusia dengan kebudayaannya. Pemikiran lingkungan dalam arkeologi sudah ada sejak abad XV, tetapi pengkajian yang mendalam tentang hubungan dan pengaruh antara kebudayaan dengan lingkungan baru terjadi pada pertengahan abad XX (Mundardjito 1984). Sekarang di berbagai belahan dunia makin banyak kegiatan penelitian arkeologi yang menggunakan metode pendekatannya dengan model ekologi, meskipun belum mencapai taraf yang luas, komprehensif dan integratif. Salah satu kajian arkeologi yang memakai metode ini misalnya ialah studi tentang budaya gua (*cave cultures*) yang di dalamnya tidak saja ditemukan artefak dan non-artefak, tetapi juga sejumlah gambar atau lukisan yang diterakan pada dinding-dindingnya sebagai ungkapan makna perilaku manusia dalam mengolah lingkungan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik fisik-material maupun mental-spiritual (Kosasih 1998). Oleh karena itu gua secara keseluruhan dipakai sebagai acuan penelitian arkeologi secara lebih intensif, mengingat di dalam ruang yang terbatas itu pernah pula tinggal manusia pendukung budaya

gua tersebut. Apabila penanganan yang serius dan terencana ini tidak segera kita lakukan, maka masyarakat akan beranggapan bahwa kita tidak memiliki *sense of responsibility* terhadap kelestarian sumberdaya alam dan sumberdaya budaya yang kita miliki ini (Nasution 1999).

Pemanfaatan yang paling pokok melalui dan paling strategis terhadap sumberdaya budaya adalah untuk penelitian, oleh karena penelitian pengelolaan sumberdaya budaya dapat diitngkatkan secara terus-menerus (Masi-nambow 1995). Melalui penelitian kekosongan data dapat dihilangkan, dugaan-dugaan dapat diubah menjadi fakta dan keragu-raguan dapat menjadi kepastian. Hal ini berarti bahwa melalui penelitian pengelolaan sumberdaya budaya dapat disempurnakan, sehingga pada gilirannya kegiatan penelitian itu sendiri dapat memperoleh sumber data yang lebih lengkap dan handal guna lebih memperdalam pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian antara usaha pengelolaan dengan kegiatan penelitian terdapat hubungan yang timbal-balik melalui suatu siklus untuk saling menyempurnakan. Keeratan hubungan antara masyarakat dengan sumberdaya budaya memungkinkan para peneliti dapat memperoleh pengetahuan yang akurat tentang simbolik atau makna yang terkandung di dalam pola dan unsur-unsur kebudayaan material.

3. ARKEOLOGI DAN LINGKUNGAN

Manusia dalam kehidupannya di bumi ini ternyata memiliki kemampuan pengetahuan yang ekstensif mengenai iklim, cuaca, musim, lingkungan alam (pegunungan, dataran dan sungai) dan sumber daya alam (air, flora dan fauna) sebagai bahan olahan untuk memenuhi kebutuhannya (Suyatno L 1990). Manusia memperoleh informasi faktual tentang alam di sekitarnya, yang memungkinkan mereka dapat mengatur hidupnya secara efektif, bahkan dengan alam gaib sekalipun. Penaklukan alam oleh manusia ini merupakan kelanjutan dari keberhasilannya sejak awal mereka hidup, sebagai upaya untuk memperoleh kemanfaatan yang lebih besar la-

gi dari sumber daya alam yang tersedia. Namun pada akhirnya manusia mulai melupakan tentang konsekuensi lingkungan akibat kegiatan-kegiatannya yang berlebihan. Hanya dalam tempo beberapa dasawarsa yang lalu sementara orang, terutama sekali para ilmuwan dan cerdik pandai, mulai menyuarkan suatu catatan peringatan akan timbulnya bencana besar akibat krisis lingkungan yang sudah melampaui ambang batas, sebagai konsekuensi logis terhadap kegiatan-kegiatan manusia dalam menaklukkan alam secara berlebihan.

Sejak awal pemerintah sudah menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, namun secara harafiah baru menyentuh sebatas kulitnya saja, belum sempat mencapai inti permasalahannya. Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama, di dalam lingkungan itu sendiri terdapat berbagai unsur yang mendukungnya, antara lain unsur **biotik**, **abiotik** dan **sosial-budaya**. Oleh karena itu harus ada hubungan timbal-balik antara pembangunan dengan lingkungan, lingkungan dengan sosial-budaya, dan sosial-budaya dengan pembangunan. Semuanya ini untuk kepentingan bangsa secara nasional, di mana yang satu bergerak di bidang fisik-material dan yang lainnya di bidang mental-spiritual. Diperlukan kerjasama terpadu agar kedua bidang ini meraih sukses yang diharapkan. Sejumlah kasus yang menimbulkan masalah bagi arkeologi tidak lain akibat kurangnya pengertian dan pemahaman masyarakat dan instansi-instansi Pemerintah terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mengenai pentingnya warisan budaya bangsa bagi perkembangan nasional.

Tema sentral dalam studi arkeologi adalah merekonstruksi kebudayaan pada masa lampau (Jacob 1977; Kosasih 1998). Kebudayaan dalam arkeologi biasanya diartikan sebagai segala hasil karya manusia. Lingkungan yang terdiri dari benda hidup (**biotik**) dan benda mati (**abiotik**) membentuk suatu ekosistem yang memberikan penjelasan kepada kita mengenai kehidupan manusia di dalamnya. Dengan kebudayaan inilah manusia melakukan adaptasi terhadap lingkungannya, sebab kebudayaan itu sendiri merupakan sarana bagi manusia untuk beradaptasi dengan lingku-

ngannya. Ketiga faktor ini, yaitu manusia, kebudayaan dan lingkungan, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam upaya untuk menggambarkan kembali suatu masa kehidupan manusia melalui sisa-sisa materi yang dahulu memegang peranan penting dalam melaksanakan kegiatan hidupnya (Soejono 1981).

Arkeologi-ekologi atau dapat disebut juga arkeologi lingkungan adalah salah satu bidang di dalam studi arkeologi yang mempelajari serta mengkaji hubungan antara manusia beserta kebudayaannya dengan aspek lingkungan alam (Mundardjito 1994). Dari aspek manusia dengan kebudayaannya, para peneliti arkeologi mempelajari wujud kebudayaan materi yang ditemukan di situs-situs, baik berupa himpunan benda arkeologi yang memiliki dimensi (bentuk, ruang dan waktu) maupun tanda-tanda (jenis, tipe, ukuran, gaya, teknologi). Sebaliknya dari lingkungan alam mereka dapat mempelajari wujud benda biotik (flora dan fauna) dan benda abiotik (lahan, air, iklim). Dalam studi arkeologi, aspek lingkungan yang melibatkan kajian data temuan terdapat istilah yang kemudian dikenal dengan nama "ekofak", yang biasanya didefinisikan sebagai benda alam yang bukan artefak, tetapi memiliki relevansi dengan manusia dan kebudayaan. Data ekofak ini kadang terabaikan, sehingga tidak jarang para peneliti arkeologi kehilangan konteks data pendukung yang sebenarnya sangat diperlukan sekali dalam menyelusuri aspek kehidupan manusia dan kebudayaan secara keseluruhan.

Aspek lingkungan (*environment*) sudah lama menjadi perhatian dalam penelitian arkeologi (Ibid 1994). Di satu pihak banyak arkeolog yang memiliki kesadaran tinggi terhadap konteks lingkungan, sedangkan di pihak lain para ahli lingkungan sudah lama berperan-serta di dalam kegiatan penelitian arkeologi, baik survei dan ekskavasi maupun secara langsung dan tidak langsung. Meskipun demikian masih banyak arkeolog yang belum menempatkan aspek lingkungan pada posisi yang sebenarnya. Mereka beranggapan bahwa variabel lingkungan hanya sebagai sesuatu yang

konstan dan statis, yang hanya dipakai untuk ilustrasi di dalam setiap menyusun laporan penelitian saja. Padahal lingkungan harus dianggap sebagai faktor yang dinamis dalam melakukan analisis kontekstual, sebab para peneliti arkeologi sudah sepakat dan meyakini bahwa data arkeologi adalah artefak beserta konteks lingkungan alamnya. Hal ini tampak jelas dalam kehidupan manusia yang cenderung selalu dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya (Nasruddin 1994). Dalam upaya beradaptasi, manusia memiliki seperangkat pola kebudayaan untuk menyematani hubungan antara kegiatannya dengan lingkungan alamnya. Dengan memanfaatkan budaya material berupa artefak, manusia dapat mengolah lingkungan alam guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Kenyataan menunjukkan bahwa pengetahuan kita tentang hubungan antara lingkungan hidup dengan kebudayaan masa lalu masih sangat sedikit, baik dalam skala lokal maupun nasional dan internasional (Mundardjito 1984). Oleh karena itu perlu kiranya kita memberikan perhatian sepenuhnya kepada usaha untuk memahami kearifan lingkungan yang ada di berbagai aspek kehidupan masyarakat masa lampau. Usaha sejumlah ahli kebudayaan, khususnya para ahli arkeologi, perlu memperoleh dukungan dari berbagai pihak dan berbagai ahli dari disiplin ilmu lain. Usaha itu akan sia-sia belaka apabila data kebudayaan masa lalu yang justru merupakan sumber pengetahuan dan pemahaman masyarakat masa lampau, kemudian dirusak oleh kegiatan manusia itu sendiri. Sementara para konservator berusaha keras menyelamatkan, mengamankan, memelihara, melindungi dan melestarikan tinggalan budaya bangsa, di pihak lain para pembangun fisik tanpa disadari telah, sedang dan akan menyalakan data kebudayaan masa lalu dengan semena-mena. Tinggalan hasil pemikiran nenek-moyang kita yang amat tinggi itu seyogyanya harus senantiasa dipikirkan secara terus-menerus, sebab benda-benda tersebut merupakan sumberdaya budaya nasional yang tidak dapat dibuat ulang (*non-renewable*).

4. UPAYA ARKEOLOGI DALAM PELESTARIAN

Keberhasilan pembangunan nasional dewasa ini tampaknya telah melahirkan berbagai masalah, antara lain masalah pelestarian benda cagar budaya yang sering berbenturan dengan pembangunan itu sendiri (Anom 1996). Konflik perbedaan kepentingan ini terjadi akibat ketidaksamaan persepsi dalam wawasan, atau dalam memberikan arti dan makna terhadap benda cagar budaya. Pembangunan fisik yang tak terkendali sering menimbulkan kerusakan, kehancuran serta hilangnya data arkeologi yang sesungguhnya sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kebudayaan kita masa lalu. Dampak dari gagalnya upaya pelestarian benda cagar budaya, baik secara langsung maupun tidak langsung, sungguh sangat fatal sekali dan ini dapat dianggap sebagai gambaran terhadap kurang mampunya kita memahami jatidiri bangsa. Oleh karena itu dalam rangka lebih meningkatkan kepentingan nasional, maka warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan harus dilestarikan.

Sifat pembangunan ini tidak saja mendirikan gedung yang baru semata-mata, melainkan dilakukan juga pembongkaran dan penghancuran terhadap gedung-gedung yang lama, kemudian mendirikannya kembali dengan bangunan yang baru. Namun tidak semua gedung yang lama dibongkar atau dihancurkan, melainkan ada beberapa kriteria yang menyebabkan gedung itu tidak boleh dibongkar, bahkan sebaliknya harus dipugar kembali, dibina dan dilestarikan. Bangunan yang demikian biasanya memiliki latar belakang historis, atau umurnya relatif tua sehingga perlu dijaga keutuhannya sebagai bangunan yang tergolong kuno. Di dalam *Monumenten Ordonantie (MO) Staatsblad 238* Tahun 1931 Pasal 1 disebutkan bahwa yang dianggap sebagai monumen dalam peraturan ini adalah bagian benda-benda atau kelompok benda-benda yang bergerak atau tidak bergerak, yang dibuat oleh tangan manusia, yang pokoknya berumur se-

dikit-dikitnya 50 tahun, dan dianggap mempunyai nilai penting bagi pra-sejarah, sejarah atau kesenian.

Aksi penghancuran terhadap bangunan-bangunan kuno dan bersejarah ini sesungguhnya sudah merupakan kisah yang sangat klasik, bahkan sering menimbulkan kontroversi di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Peristiwa seperti ini dialami juga oleh banyak negara di dunia, jauh sebelum ilmu purbakala atau arkeologi dikenal orang secara luas. Ketika pada suatu saat sisa-sisa bangunan kuno tersebut dimunculkan ke permukaan tanah, namun tidak berapa lama kemudian sudah diratakan kembali, sebab dianggap tidak berguna dan bermakna. Peristiwa yang menyedihkan dunia sejarah dan purbakala itu tidak saja dikerjakan oleh Pemerintah selaku pihak pengambil keputusan, tetapi juga oleh masyarakat yang memang kurang memahami betapa pentingnya suatu keharusan untuk ikut menyelamatkan bangunan-bangunan sejarah dan purbakala, sebagai bahan penulisan rangkaian kisah masa lampau. Semuanya itu dapat dijadikan bukti konkrit, terutama sekali untuk diperlihatkan kepada generasi penerus sebagai pewaris-pewaris bangsa.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menaruh perhatian terhadap benda cagar budaya, sehingga sering terjadi berbagai ancaman pengrusakan, pencurian dan vandalisme terhadap bangunan-bangunan kuno, baik yang terdapat di pusat-pusat perkotaan maupun di daerah. Bangunan-bangunan kuno ini banyak yang dibongkar paksa oleh Pemerintah hanya karena ingin mengikuti perkembangan era globalisasi di bidang pembangunan modern. Hal ini tidak saja akan menimbulkan hilangnya nilai-nilai luhur budaya bangsa dan jatidiri bangsa, tetapi juga dapat melenyapkan panorama wajah Indonesia yang bernuansa arkeologis. Kita patut merasa cemburu dan iri hati kepada negara-negara lain, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang begitu gigih mempertahankan tinggalan-tinggalanbudaya masa lalunya, sekalipun dibangun oleh bangsa asing, hanya sebagai sikap untuk menghormati karya besar orang lain dalam usaha menegakkan nilai-nilai luhur budaya bang-

sa. Tinggalan-tinggalan bersejarah yang demikian ini tentu saja memiliki nilai harga yang sangat tinggi sebagai aset nasional, tidak hanya untuk kepentingan pariwisata tetapi juga pendidikan, pengetahuan umum dan sosial-budaya. Kondisi tersebut di atas jelas membuktikan bahwa timbulnya ancaman terhadap pelestarian akibat belum terpenuhinya keperluan hidup sebagian besar masyarakat, di samping kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya upaya pelestarian terhadap benda-benda cagar budaya.

Suatu hal yang menjadi keprihatinan kita sampai sekarang adalah masih sangat kurangnya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai warisan budaya bangsa yang seharusnya kita lestarikan (Soediman 1983). Bukan rahasia umum lagi apabila kita sering mendengar adanya pencurian, pengrusakan, pencemaran serta vandalisme terhadap benda-benda tinggalan arkeologi dan situs-situs budaya beserta lingkungannya, yang justru dilakukan oleh masyarakat bangsa kita sendiri. Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap benda-benda tinggalan sejarah dan purbakala sudah tertuang sejak lama di dalam *Monumenten Ordonantie (MO) Staatblad 238* Tahun 1931, yang kemudian sekarang telah diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Kecuali itu sudah banyak pula dikeluarkan berbagai instruksi oleh Pemerintah dalam upaya menyelamatkan, mengamankan, melindungi serta melestarikan benda-benda arkeologi tersebut melalui karya nyata seperti informasi di media massa, ceramah dan pameran dengan tujuan untuk menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya. Tetapi sejauh itu tidak mengurangi perilaku mereka untuk melanggarnya, sehingga timbul kesan bahwa yang menjadi sebab utama adalah sikap mental manusianya sendiri yang sudah rusak.

Upaya untuk melestarikan warisan budaya bangsa bukan tidak pernah dilakukan secara gencar. Masih banyak kendala yang perlu dibenahi, tidak saja yang timbul dari pihak Pemerintah tetapi juga dari masyarakat yang belum menyadari arti dan pentingnya makna warisan budaya bagi

seluruh rakyat Indonesia secara nasional. Beberapa unit kerja yang diberi wewenang untuk melestarikan warisan budaya ini antara lain Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah), yang secara nasional merupakan instansi tertinggi yang memegang kendali administrasi kesejarahan dan kepurbakalaan Indonesia. Sementara itu Pusat Arkeologi (Pusar; dahulu Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Puslit Arkenas) mempunyai hak mutlak untuk melakukan penelitian, baik survei maupun ekskavasi, terhadap benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala. Satu unit lagi yang menjadi mitra kerja keduanya adalah Direktorat Permuseuman yang tugas pokoknya menginventarisir benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yang sudah selesai diteliti dan dipugar, yang kemudian menyimpannya di Pusat (benda-benda bergerak) dan di Daerah (benda-benda bergerak dan tidak bergerak). Di daerah juga terdapat unit-unit pelaksana teknis (UPT), yang memiliki tugas pokok dan wewenang yang sama di bidangnya masing-masing serta berperan sebagai kantor cabang. Pendelegasian tugas seperti itu merupakan usaha untuk meringankan beban Pusat yang begitu banyak dan sangat berat melaksanakan tugasnya yang menjangkau wilayah kerja di seluruh Indonesia. Sayang sekali bahwa upaya ketiga unit kerja dalam menangani masalah-masalah kesejarahan dan kepurbakalaan ini belum berjalan sesuai dengan harapan, sebab masih banyak kendala yang sesungguhnya tidak terlalu prinsipil menghadangnya.

Kegiatan pelestarian berupa pemugaran bangunan, penanganan situs serta pembuatan taman purbakala dapat terselenggara berkat dorongan moral dan materil dari Pemerintah dan masyarakat. Melalui program-program pelestarian benda cagar budaya, kiranya dapat dicari kemanfaatannya bagi ilmu pengetahuan, khususnya arkeologi yang kemungkinan besar dapat melakukan penelitiannya secara berkelanjutan di situs-situs yang sudah siap pakai itu. Pelestarian benda cagar budaya inipun dapat dimanfaatkan sebagai bahan bukti hasil budaya nenek-moyang kita, dalam rangka memperkuat jatidiri bangsa melalui arus informasi yang konkrit kepada generasi

yang akan datang. Kegiatan pelestarian tersebut dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk lebih memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada dunia umumnya, serta meningkatkan pemahaman masyarakat kita sendiri terhadap tinggalan-tinggalan arkeologi khususnya.

5. INFORMASI KEPADA MASYARAKAT

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, maka kawasan suaka alam dan cagar budaya merupakan kawasan yang memiliki ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan, dengan fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis flora dan fauna beserta ekosistemnya (Kosasih 1996). Tujuan perlindungan terhadap suaka alam dan cagar budaya ini adalah untuk melindungi keanekaragaman biota, abiota, tipe ekosistem, gejala serta keunikan alam bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan pada umumnya. Kriteria kawasan suaka alam dan cagar budaya adalah berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional serta keragaman bentukan geologi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh proses alam atau perbuatan manusia.

Faktor-faktor di atas barangkali tidak begitu mencemaskan jika dibandingkan dengan lajunya pembangunan nasional dewasa ini, yang notabene dampaknya sangat memprihatinkan kita semua, khususnya di bidang kebudayaan. Bagaimana gencarnya Pemerintah mengumandangkan upaya pelestarian terhadap tinggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional sebagai khasanah budaya bangsa, namun di sisi lain percepatan pembangunan di segala sektor kepentingan secara langsung atau tidak langsung telah mengganggu keselamatannya. Sejumlah data arkeologi dan sejarah sudah banyak yang lenyap dari muka bumi ini, dan kini kawasan suaka alam serta cagar budaya berada di bawah bayang-bayang kehancurannya. Gua-gua alam sebagai media terwujudnya karya seni manusia

dalam bentuk lukisan misalnya, sekarang ini sudah terancam keamanannya. Pembangunan pabrik semen dan batu pualam di Sulawesi Selatan yang mengutamakan gamping sebagai bahan bakunya, merupakan ancaman yang serius terhadap keberadaan lukisan-lukisan gua yang terdapat di Maros dan Pangkajene. Mungkin saja kasus ini dapat menimpa situs-situs gua lainnya di luar Sulawesi Selatan, mengingat bahwa sumberdaya alam yang satu ini tergolong potensial dalam menunjang pembangunan nasional.

Sejumlah fakta ini ternyata telah menimbulkan gangguan stabilitas nasional, terutama sekali di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum (Untoro Dradjat 1992). Kebijakan-kebijakan di empat bidang ini mulai mengalami distorsi, sehingga perlu adanya langkah-langkah yang antisipatif, persuasif dan konstruktif untuk melakukan pencegahan lebih awal, antara lain dengan secara konsekuen menerapkan berbagai peraturan, keputusan, edaran serta undang-undang yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya merupakan langkah nyata untuk mencegah timbulnya pencemaran terhadap benda-benda budaya dalam bentuk pengrusakan, pencurian dan vandalisme. Undang-undang inipun berusaha keras untuk menyelamatkan, mengamankan serta melindungi, agar benda-benda budaya tersebut tetap lestari untuk selamanya.

Terkait dengan hal-hal di atas ternyata memang sudah banyak situs arkeologi yang menjadi rusak dan bahkan lenyap, meskipun tidak sedikit di antaranya yang memperoleh penanganan khusus (Ibid 1992). Keberadaan situs-situs arkeologi yang kemudian ada yang dibenahi menjadi "Taman Purbakala", dianggap tepat dan layak untuk terus dikembangkan secara berkelanjutan, untuk memenuhi berbagai kepentingan nasional. Berdasarkan kenyataan ini maka berbagai pihak yang merasa bertanggung-jawab dan mengetahui serta memahami bahwa situs-situs arkeologi merupakan warisan budaya bangsa yang perlu dilindungi dan dilestarikan, di-

anggap perlu untuk memperhatikan cara-cara penanggulangannya dari kerusakan yang makin parah. Upaya pencegahan terhadap tindak pengrusakan situs-situs arkeologi perlu digalakkan dengan berbagai cara, antara lain melalui kegiatan temu ilmiah lintas sektoral, mengadakan pameran arkeologi secara berkala, melakukan penyuluhan tentang benda cagar budaya kepada seluruh lapisan masyarakat, menyebarluaskan berita pengrusakan benda-benda budaya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab lewat sejumlah media massa dan jelaskan mengenai kerugian-kerugiannya secara nasional. Atau dapat pula berupa ancaman hukuman serta penerapannya secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Benda Cagar Budaya, sehingga upaya sosialisasi yang bernada himbauan dan sekaligus peringatan dan ancaman hukuman itu diharapkan mampu memasyarakatkan dan menyadarkan masyarakat secara keseluruhan.

Apresiasi masyarakat Indonesia, khususnya terhadap bangunan kuno serta gedung bersejarah sulit sekali untuk ditimbulkan, mengingat bahwa sebagian besar bangunan tersebut bukan warisan budaya asli bangsa Indonesia, melainkan merupakan peninggalan bangsa asing, terutama Belanda dan Cina yang pada masa lampau mempunyai hubungan yang kurang baik dengan orang-orang pribumi. Sedikit sekali yang dapat menerima kehadiran kolonialisme Belanda sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Sikap ini mempengaruhi pandangan masyarakat luas terhadap bangunan kuno dan gedung bersejarah yang dilihatnya sebagai "lambang kolonialisme" yang menyakitkan hati bangsa Indonesia, sehingga menjadi acuh tak acuh terhadap usaha pelestariannya. Dengan sikap yang demikian terasa sulit bagi pihak yang peduli terhadap pelestarian untuk memperoleh dukungan. Dalam hubungan ini barangkali perlu adanya semacam kampanye "sadar warisan sejarah dan budaya bangsa", perlu sikap keterbukaan dan kejujuran untuk menerima kehadiran orang-orang asing selama penjajahan, sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia, dan memang ini merupakan fakta sejarah.

Arkeologi dalam upaya untuk merekonstruksi kebudayaan pada masa lampau makin memusatkan perhatian terhadap manusia sebagai pelaku utamanya (Soekatno Tw 1983). Benda-benda kuno semata-mata hanya sebagai sarana saja untuk mempelajari sejarah manusia dengan berbagai aspek kehidupannya. Dengan dimasukkannya unsur manusia sebagai bahan studi pokok, maka ruang lingkup serta jangkauannya menjadi lebih luas lagi. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran bahwa bidang garapan arkeologi memang seharusnya melibatkan banyak disiplin ilmu lain sebagai unsur penunjangnya, dan juga banyak pihak. Keterlibatan banyak pihak di dalamnya berarti bahwa tidak saja mengikutsertakan para ahli sejarah, antropologi, geologi, biologi, fisika serta ilmuwan lainnya, tetapi juga masyarakatpun turut bertanggungjawab terhadap kemajuan dan perkembangan arkeologi Indonesia. Arkeologi sebagai salah satu ilmu sosial-budaya dapat memberikan sumbangan yang besar kepada masyarakat dan bangsa Indonesia yang sedang membangun, dan justru yang dibangun itu adalah manusia Indonesia seutuhnya.

Upaya penyebarluasan bidang arkeologi tidak saja dilakukan secara langsung melalui informasi timbal-balik antara dua pihak, tetapi juga dapat dilaksanakan dengan berbagai pihak yang terkait, terutama sekali dengan disiplin-disiplin ilmu lain, termasuk informasi di antara para arkeolog sendiri. Cara lainnya adalah melalui pertemuan-pertemuan ilmiah dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu dari berbagai instansi, sehingga dapat menghasilkan ramuan kebudayaan yang obyektif dan sarat dengan nuansa arkeologis yang sangat kita harapkan sebagai konsumsi pokok masyarakat yang cinta khasanah budaya bangsa. Di sisi lain dapat pula dilakukan sistem informasi tidak langsung, antara lain melalui publikasi arkeologi ilmiah dan populer, laporan-laporan penelitian, majalah dan pameran. Meskipun jangkauannya belum maksimal, namun dalam rangka pengembangan ilmu arkeologi sendiri maka bentuk informasi yang demikian ini sudah tergolong efektif dan efisien. Satu bentuk informasi yang belum sempat ditampilkan ialah berupa peragaan kehidupan masyarakat

manusia masa lampau dengan segala aktivitasnya baik **indoor** (dalam bentuk diorama) maupun **outdoor** (dalam bentuk aspal, asli tapi palsu). Bentuk informasi yang satu ini sudah memasyarakat di beberapa negara maju, sehingga masyarakat akan merasa dibawa ke alam kehidupan masa lampau dan sudah barang tentu yang kita harapkan adalah pemahaman mereka terhadap dunia arkeologi akan bertambah mantap lagi.

6. KEPENTINGAN PARIWISATA

Pembangunan nasional tidak semata-mata mengacu pada produk fisik saja, tetapi juga perlu peningkatan dengan mengembangkan serta mendayagunakan sumberdaya budaya serta potensi kepariwisataan nasional menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan devisa negara. Pembangunan pariwisata perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, sehingga dapat menunjang keberhasilannya secara optimal. Pembinaan dan pengembangan pariwisata terus diarahkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa semangat dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kecuali itu diperlukan juga peningkatan kualitas kebudayaan nasional, memperkenalkan kekayaan peninggalan sejarah dan purbakala di seluruh tanah air Indonesia. Tidak kalah penting adalah perlunya menghimbau kesadaran dan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan kepariwisataan ini melalui usaha penyuluhan dan pembinaan kelompok-kelompok seni budaya dan industri kerajinan, dengan tetap menjaga citra kepribadian dan martabat bangsa, serta mencegah hal-hal yang dapat merugikan kehidupan masyarakat.

Masalah pengembangan industri pariwisata tampaknya tidak lepas dari rangka pembangunan nasional, sehingga sering menimbulkan permasalahan yang bersifat dilematis (Kodhyat 1990). Permasalahannya terletak di antara usaha pelestarian dengan penggusuran atau bahkan pemusnahan bangunan-bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah dan purba-

kala, yang kemudian diganti dengan bangunan-bangunan baru yang dirasakan akan lebih “bermanfaat” sesuai dengan perkembangan jaman. Permasalahan ini umumnya bersumber pada perbedaan pendapat, atau bahkan konflik kepentingan yang dilatar-belakangi oleh faktor-faktor yang bersifat politis, ekonomis dan pragmatis. Persoalan ini merupakan masalah yang bersifat universal, artinya tidak saja dihadapi oleh Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah perkotaan, tetapi juga oleh kota-kota besar di negara-negara lain di dunia.

Pemerintah bukan tidak peduli terhadap lingkungan alam, Pemerintah bukan tidak memperhatikan pembangunan di segala bidang dan Pemerintah bukan tidak mau menolong pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan bantuannya. Pemerintah telah banyak melakukan apa yang terbaik, termasuk melakukannya pada saat-saat yang tepat di mana perhatian sedang beralih ke sektor pariwisata, sebagai salah satu sektor yang sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar dalam bidang perekonomian di masa yang akan datang. Obyek-obyek wisata dengan lingkungan yang menarik dapat mengundang minat para investor serta masyarakat untuk berkunjung ke kawasan ini, bahkan ada kecenderungan untuk meluaskannya menjadi kawasan pemukiman, mengingat bahwa industri pariwisata memiliki efek “multiplier” yang luar biasa. Langkah-langkah yang perlu segera diambil ialah melindungi kawasan tersebut dengan suatu Peraturan Pemerintah, sehingga obyek wisata yang berada di ambang kehancuran tidak bakal menjadi hancur samasekali di tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan yang hanya mementingkan keuntungan pribadi saja.

Apresiasi dan kesadaran itu tidak saja dicetuskan atau diucapkan dalam bentuk-bentuk slogan atau spanduk, melainkan diwujudkan dan bahkan tercermin secara nyata dalam sikap, tindakan, perbuatan dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Minat mereka sangat besar terhadap hal-hal yang kuno dan bersejarah, baik dalam bentuk pameran, pertunjukan seni budaya dan museum maupun terhadap gaya arsitektur

bangunan-bangunan kuno dan bersejarah lainnya. Sikap yang demikian menimbulkan kepedulian yang besar sekali untuk ikut melestarikan serta memelihara bangunan kuno dan bersejarah, yang dirasakan mulai terancam oleh kebutuhan yang makin mendesak dan meningkat terhadap bangunan-bangunan modern yang secara fungsional lebih efektif dan secara ekonomis lebih efisien dan menguntungkan.

Usaha pelestarian bangunan kuno dan bersejarah rupanya telah menimbulkan lahirnya berbagai organisasi perlindungan, antara lain organisasi konservasi yang didukung oleh para ahli budaya, cendekiawan dan kaum intelektual yang makin merasa cemas melihat ancaman terhadap eksistensi bangunan kuno dan bersejarah yang mulai sakit-sakitan itu. Salah satu dunia usaha yang tergerak hatinya adalah industri pariwisata, yang melihat bangunan kuno dan bersejarah ini sebagai obyek wisata yang menguntungkan. Wisatawan masa kini rupanya tidak lagi tertarik pada obyek-obyek pantai dengan mandi pasir dan mandi sinar matahari, melainkan lebih terpesona pada bangunan-bangunan yang megah dan kuno, sehingga sanggup menggetarkan hati mereka.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa obyek-obyek wisata di tanah air makin lama kondisinya makin mencemaskan. Lingkungan alam yang rusak akibat ulah manusia terasa sulit untuk dipulihkan kembali, sehingga timbul kerawanan-kerawanan bencana alam yang langsung atau tidak langsung mengancam keselamatan obyek-obyek wisata. Belum lagi menghadapi sikap mental manusia Indonesia yang makin tidak peduli terhadap lingkungan hidupnya, sehingga dengan seenaknya mengambil dan bahkan merusak benda-benda milik umum dan milik negara yang seharusnya justru ikut berpartisipasi, ikut memiliki dan bertanggung-jawab. Mereka sudah tidak lagi mempunyai rasa etik, seni, moral dan agama, bahkan kejujuran dan keterbukaan, sehingga makin sulit untuk dikontrol secara rasional, dan bahkan makin berat untuk disembuhkan karena sudah menjadi penyakit masyarakat atau penyakit sosial yang mendarah-daging.

Dibalik itu semua tampaknya Pemerintah masih berusaha keras untuk membenahi dan memperbaikinya, minimal memulihkannya kembali mendekati bentuknya yang asli. Pemerintah juga menghimbau kepada para pemilik modal guna ikut membantu membenahi serta melanjutkan pengembangannya, sehingga dengan demikian pihak-pihak swasta juga ikut melestarikan benda-benda atau kekayaan milik negara, baik yang bernilai sejarah maupun karena umurnya yang sudah tua. Di samping itu mereka juga dititipi untuk ikut-serta dan berperan-serta dalam melestarikan lingkungan alam, sebab lingkungan yang baik, indah, nyaman dan aman merupakan aset wisata yang berharga dan yang tiada akan habis-habisnya. Dipihak lain, dalam ruang lingkup yang lebih luas, pembangunan yang pesat telah mendorong kebutuhan untuk melakukan kontak usaha dengan pihak-pihak dari seluruh dunia, dan ini dapat mengundang para "business visitor" untuk datang ke sini.

Di negara-negara yang sudah maju di mana aktivitas pembangunan juga terus berlangsung, kita saksikan bhwa bangunan-bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah dan purbakala ternyata tetap dipertahankan, kemudian dipelihara, dilindungi dan dilestarikan dengan sangat baik. Sikap mereka yang demikian ini bukan berarti tidak pernah ada permasalahan yang dilematis seperti kasus-kasus di negara kita sekarang. Pelestarian bangunan kuno versus peremajaan, pembangunan dan pengembangan kota merupakan produk dari berbagai permasalahan yang terjadi di mana-mana. Hasil penyelesaian berbagai masalah ini biasanya melalui suatu proses dan perjuangan yang didukung oleh berbagai faktor kepentingan yang saling berbeda. Keberhasilan negara-negara maju dalam mengatasi masalah ini ditunjang oleh dua faktor pokok, yaitu:

1. Apresiasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap warisan budaya dan sejarah bangsa
2. Kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa dan jatidiri bangsa melalui kecintaan yang tinggi pula terhadap

bangunan-bangunan kuno serta benda-benda kuno lainnya, yang perlu dipelihara, dilindungi dan dilestarikan sebagai warisan bangsa

Akhirnya diharapkan sekali bahwa seluruh kerjasama yang sudah terjalin hendaknya segera diproyeksikan dan dilaksanakan, agar ketinggalan-ketinggalan yang mungkin terjadi dapat ditekan dengan seminimal-minimalnya. Dengan memperoleh dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak, baik Pemerintah, swasta maupun BUMN, mudah-mudahan gerakan bersama di bidang jasa pariwisata ini dapat lebih meningkatkan prestise dan prestasinya di forum nasional atau forum internasional. Demikian pula para arsitek, perancang kota, budayawan, ahli ekonomi serta ahli-ahli sejarah dan purbakala tetap dihimbau untuk ikut berpartisipasi di dalam mengembangkan wawasan nasional demi suksesnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

7. PENUTUP

Tampaknya dalam banyak hal kita tidak perlu lagi melakukan penelitian yang semata-mata hanya untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin, melainkan sudah waktunya sekarang kita melakukan pemilihan dan pemilahan yang relevan dengan tujuan penelitian itu sendiri, baik yang mengandung permasalahan-permasalahan umum maupun yang khusus atau spesifik. Kiranya sudah waktunya pula kita perlu memikirkan secara cermat, hati-hati dan terintegrasi dalam melakukan pemilihan masalah penelitian, pemilihan sasaran situs dan obyek yang akan diteliti, pemilihan teori dan metodologi serta teknik penelitian yang tepat sasaran, agar dapat diperoleh data yang berkualitas dan bermanfaat melalui sistem penggarapan yang efektif, efisien dan rasional. Hasilnya sudah barang tentu berupa naskah laporan penelitian yang tuntas dan berbobot, yang dapat dipertanggungjawabkan mutunya secara akademik dan ilmiah. Sudah seyogyanyalah laporan-laporan penelitian yang demikian ini dapat segera diterbitkan dan dipublikasikan secara luas, sebagai upaya untuk menso-

sialisasikan arkeologi kepada masyarakat sebagaimana yang mereka harapkan selama ini.

Sebaliknya arkeologi juga sudah waktunya untuk membuka diri terhadap aspirasi lingkungan hidup yang mendukung tumbuh dan berkembangnya sumberdaya alam, sumberdaya budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kita tidak “ketinggalan jaman”. Keterlibatan arkeologi dalam masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah dirintis sejak lama, melalui kerjasama dengan Departemen PPLH pada waktu itu. Kerjasama yang baik ini harus segera diintensifkan, sebab kalau tidak demikian kemungkinan besar arkeologi akan jauh tertinggal oleh cepatnya laju pembangunan fisik dewasa ini, yang seringkali tidak memperhatikan masalah arkeologis. Demikian pula kerjasama dengan departemen-departemen lainnya, atau dengan lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga ilmiah lainnya sebagai disiplin ilmu penunjang, termasuk instansi-instansi Pemerintah dan swasta yang terkait serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Kerjasama yang makin intensif dan terpadu dengan pihak mereka ini tidak saja menguntungkan pihak arkeologi sendiri dalam pengembangannya di tanah air, tetapi juga dapat membuka mata para pakar non-arkeologi terhadap eksistensi arkeologi di Indonesia dewasa ini. Dan lebih daripada itu, langsung maupun tidak langsung, masyarakat secara keseluruhan akan menilai bahwa arkeologi ternyata memang bertanggung-jawab terhadap keselamatan dan kelestarian benda-benda cagar budaya milik bangsa.

Namun yang masih kita perlukan adalah memberikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai bentuk media massa, termasuk penyuluhan, penerangan dan pameran kepurbakalaan, dengan tujuan menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya, menanamkan rasa cinta kepada benda-benda tinggalan nenek-moyangnya serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap pelestarian khasanah budaya bangsa. Meskipun demikian semuanya ini tidak mengurangi perilaku sebagian masyarakat untuk tetap melanggar UUBCB, bahkan sampai sekarangpun tin-

dakan-tindakan orang yang tidak bertanggung-jawab dalam melakukan pencurian, pengrusakan serta memperjual-belikan benda-benda kuno secara ilegal masih terus berlangsung. Masalahnya bukan hanya dipicu oleh krisis moneter atau tekanan ekonomi saja, melainkan lebih disebabkan oleh sikap mental manusia itu sendiri yang sudah rusak, sehingga menimbulkan keserakahan yang berkepanjangan. Di samping itu sebagian masyarakat lagi ada yang berperan sebagai aktor penadah, yang hanya memikirkan keuntungan pribadi ketimbang harus menjiwai benda-bendainggalan nenek-moyangnya yang wajib dilestarikan, sehingga lahir lah sindikat jual-beli barang-barang kuno yang tetap marak hingga saat ini. Yang sangat memprihatinkan lagi adalah bahwa kita juga harus menghadapi sebagian masyarakat lainnya yang ternyata mereka ini merupakan golongan individu yang tidak peduli terhadap khasanah budaya bangsa dan bahkan apatis terhadap lingkungan hidupnya. Dalam keadaan seperti ini mekanisme-mekanisme penolakan terhadap warisan budaya cenderung dapat mempengaruhi hilangnya jatidiri bangsa serta kebudayaan nasional. Oleh karena itu langkah yang perlu segera kita ambil adalah pertama mengumpulkan, menginventarisasi dan menilai secara rasional dan intelektual terhadap benda-benda warisan budaya, kedua menyebar-luaskan penerangan di kalangan masyarakat tentang "nilai-nilai luhur" yang terkandung di dalam benda-benda warisan budaya dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna, dan ketiga mensosialisasikan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian terhadap benda-benda cagar budaya serta penerapan sanksi-sanksi hukumnya secara tegas dan konsekuen. Mudah-mudahan pemahaman masyarakat terhadap arkeologi Indonesia dapat lebih mendalam lahir dan bathin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Anom, I.G.N.

- 1996 "Pengamanan Benda Cagar Budaya". **Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII**, Ciloto, Bogor

Dharmaputra, Nick G.

- 1995 "Kebudayaan Hidup dan Arkeologi". **Seminar Nasional Metodologi Riset Arkeologi**. Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok

Jacob, Teuku

- 1977 "Pengembangan Ilmu tentang Lingkungan dalam Penelitian Arkeologi". **Seminar Arkeologi**, Jakarta

Kodhyat, H.

- 1990 "Pelestarian Bangunan Bersejarah dan Peremajaan Kota Jakarta dalam Konteks Pengembangan Pariwisata". **Seminar Pengelolaan dan Pengembangan Warisan Budaya Kota Jakarta**, Erasmus Huis, Jakarta

Kosasih, E.A.

- 1993 "Pengembangan Sumber Daya: Penunjang Kebijakan dan Program Penelitian Arkeologi". **Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi**, Yogyakarta.
- 1996 "Seni Lukis Gua di Indonesia dalam kaitannya dengan Penyelamatan Lingkungannya". **Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi**, Ujungpandang
- 1998 "Data Lukisan Gua dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara: Kajian Makna Motif Lukisan dalam Kehidupan Masyarakat Pendukungnya". **Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi**, Cipayung, Bogor.

Masinambow, E.K.M.

- 1995 "Sumberdaya Budaya dan Masalah Pengelolaannya". **Seminar Nasional Metodologi Riset Arkeologi**, Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok

Mundardjito

- 1984 "Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Masa Lalu". **Kursus Dasar-Dasar Analisis Dampak Lingkungan Angkatan V**, Jakarta
- 1984 "Arkeologi-Ekologi: Perspektif Ekologi dalam Penelitian Arkeologi". **Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi**, Palembang
- 1995 "Kebijakan Penelitian Arkeologi Indonesia". **Seminar Nasional Metodologi Riset Arkeologi**. Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok.

Nasruddin

- 1994 "Gua-Gua Hunian: Kajian Arkeologi Permukiman". **Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi**. Palembang

Nasution, Muslimin

- 199 "Pendataan dan Pemanfaatan Kawasan Karst dan Gua di Indonesia". **Lokakarya Penyusunan Konsep Nasional Pendetaygunaan Kawasan Karst Indonesia**, Jakarta.

Soebadio, Haryati

- 1996 "Arkeologi dan Dinamika Masyarakat". **Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII**, Cipanas, Bogor.

Soediman

- 1983 "Peranan Arkeologi dalam Pembangunan Nasional". **Pertemuan Ilmiah Arkeologi III**, Ciloto, Bogor.

Soejono, R.P.

- 1981 **Tinjauan Tentang Pengkerangkaan Prasejarah Indonesia. Aspek-Aspek Arkeologi Indonesia**, Jakarta.

Soekatno TW.

- 1983 "Arkeologi dan Komunikasi Massa". **Pertemuan Ilmiah Arkeologi III**, Ciloto, Bogor.

Suyatno K.

- 1990 "Organisme Manusia dalam Lingkungan Hidup yang Berubah". **Seminar Nasional Peringatan 100 Tahun Pithecanthropus**. Universitas Sebelas Maret-Puslit Arkenas, Surakarta.

Untoro Dradjat, Hari.

- 1992 "Pelestarian dan Pemanfaatan Situs". **Diskusi Ilmiah Arkeologi VIII**, Puslit Arkenas, Jakarta.

SUMBER DAYA ARKEOLOGI
“PROBLEMATIKANYA DALAM PELAKSANAAN
UU NOMOR 22 TAHUN 1999”

Lutfi Yondri

I. LATAR BELAKANG

Tanpa terasa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang ditetapkan pada bulan Mei 1999 telah bergulir setahun lebih. Bila dilihat jangka waktu sejak dikeluarkan, berarti hanya tinggal beberapa bulan lagi yakni tahun 2001, undang-undang ini akan secara efektif dilaksanakan. Banyak memang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengantisipasi pelaksanaan undang-undang ini, walaupun masih banyak daerah yang setengah hati untuk melaksanakannya, bahkan pesimis menghadapinya.

Ditilik dari isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di masa mendatang pengelolaan sektor kebudayaan tidak lagi diurus oleh pusat, akan tetapi sudah menjadi tanggung jawab daerah untuk melaksanakannya, disamping sektor-sektor lain, seperti yang termaktub dalam pasal 9 ayat 2 “Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan daerah Kota meliputi pekerjaan umum,

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja”.

Bila dikaitkan dengan TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, khususnya arah kebijakan yang akan dilakukan di bidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata, antara lain dinyatakan bahwa arah kebijakan bidang kebudayaan ditujukan untuk mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional, yang mengandung nilai-nilai universal, termasuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup masyarakat dan membangun peradaban bangsa. Dengan dasar ini melalui penerapan UU No. 22 Tahun 1999, tentunya pengelolaan sektor budaya di daerah yang ideal dan selaras akan mampu memberikan dorongan terhadap budaya nasional.

Begitu juga dengan apresiasi serta sikap yang dimiliki masyarakat untuk melestarikan nilai dan warisan budaya. Hal ini dapat dijadikan sebagai satu tolak ukur bagi kemantapan suatu bangsa. Warisan budaya yang lestari itu, disamping dapat dijadikan sebagai aset budaya bangsa yang memiliki potensi besar dalam gerak langkah bangsa, baik dalam skala besar maupun dalam skala yang lebih kecil yaitu daerah. Warisan budaya, selain menjadi sumber dari penggalan jatidiri, juga dapat dijadikan sebagai perekat satu generasi dengan generasi berikutnya. Bahkan apabila dikembangkan lebih lanjut akan dapat menghasilkan devisa tersendiri, yang nantinya mampu untuk membiayai kebutuhan daerah.

II. PELESTARIAN TINGGALAN BUDAYA BANGSA

Secara mendasar usaha pelestarian sumber daya arkeologi sebagai bagian dari benda-benda warisan budaya bangsa, tidak terlepas dari usaha-usaha pelestarian lingkungan yang seringkali berbenturan

dengan kegiatan pembangunan. Tanpa disadari proyek pembangunan yang telah dilakukan selama ini tidak sedikit yang akhirnya dapat merusak lingkungan serta menggusur lokasi-lokasi sumberdaya arkeologis yang sebelumnya sudah merupakan bagian dari satu lingkungan.

Sampai sekarang di Indonesia usaha pelestarian lingkungan tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup atau terkenal dengan sebutan UULH. Undang-undang tersebut tidak hanya sebatas mengenai pengelolaan sumberdaya alam semata (ps. 11, 12), tetapi juga meliputi sumber daya buatan (ps. 13), dan sumberdaya budaya (ps. 14). Sebagaimana juga dengan NEPA (*National Enviromental Policy Act*) yang dimiliki Amerika serikat sejak 1 Januari 1972. UULH juga diikuti oleh Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Dalam PP 29 tersebut digariskan tentang berbagai ketentuan-ketentuan untuk penyusunan suatu analisis mengenai dampak lingkungan bagi setiap pemrakarsa kegiatan (investor) sebelum melaksanakan suatu pembangunan yang memberikan dampak penting bagi lingkungan (ps. 2 dan 3), serta penggarisan tentang penyusunan evaluasi dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah berjalan sebelum PP ini diberlakukan (ps.1 ayat 5 dan 6). Dengan juga merujuk kepada UULH Nomor 4 Tahun 1982, khusus untuk mewadahi pasal 14 yang bertujuan untuk melindungi potensi sumberdaya budaya, pada bulan Maret 1992, diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992, tentang Benda Cagar Budaya. Undang-undang ini juga diikuti oleh Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993, ten-

tang pelaksanaan UU Nomor. 5 Tahun 1992. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa perlindungan benda cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jatidiri bangsa. Sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional.

Selaras dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta peraturan-peraturan pemerintah yang kemudian menjabarkannya, maka sudah selayaknya sumberdaya arkeologi yang terdapat di daerah untuk dipertahankan kelestariannya. Arti kelestarian disini bukan semata menjaga keutuhan situs tersebut, akan tetapi situs tersebut dapat didayagunakan lagi baik untuk kepentingan sektor lainnya.

III. PENANGANAN SUMBER DAYA ARKEOLOGIS SECARA LINTAS SEKTORAL

Pembangunan yang dilaksanakan di suatu kota dan wilayah di satu daerah, umumnya nyaris melenyapkan ciri, identitas atau karakter budaya materi dari daerah tersebut. Hal ini seringkali terjadi sebagai akibat dari ketidakpedulian, adanya proses akulturisasi pada masyarakat perkotaan, serta standarisasi fasilitas perkotaan yang sering diberi embel-embel kata modern. Inilah akhirnya akan berakibat akan hilangnya makna budaya dan ekologis serta keramahan alami dan manusiawi pada ruang suatu wilayah.

Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah, perkotaan maupun pedesaan, sebaiknya, tidak harus melenyapkan nilai-nilai lama, spesifik, dan unik dari wilayahnya. Semua nilai positif yang

dimiliki satu kawasan kota atau desa, merupakan cerminan dari identitas, struktur dan budaya. Hendaknya tinggalan yang demikian dapat dipelihara dan diakomodasikan menjadi suatu monumen budaya dan kesejarahan yang in situ di kawasan tersebut.

Tinggalan arkeologis yang begitu banyak terdapat di satu daerah baik berupa tinggalan prasejarah, Klasik, Islam dan Kolonial, bila ditarik benangmerahnya dapat merupakan penggambaran bagaimana proses perkembangan budaya yang pernah berlangsung di daerah itu dari masa lalu. Dari data ini dapat ditelusuri bagaimana cara adaptasi masyarakat masa lalu dalam menghadapi tantangan alam, sehingga kehidupan mereka sehari-hari dapat selaras dengan lingkungan alamnya. Begitu juga dengan tinggalan-tinggalan arkeologis yang terdapat di sekitar kota baik berupa bangunan tempat tinggal, gedung pemerintahan, tempat-tempat pertahanan, merupakan kekayaan ragam budaya yang dapat ditata serta dipelihara secara spasial berpeluang meningkatkan kualitas ruang dan lingkungan satu kawasan. Oleh sebab itu, tindakan perencanaan pembangunan yang dilakukan harus diarahkan melalui serangkaian kajian yang dilakukan oleh tim terpadu dengan melibatkan tenaga peneliti budaya. Dari hasil kajian yang demikian diharapkan pembangunan yang dilakukan tersebut, selain akan menghasilkan atau memberikan kenikmatan dan kebanggaan psikologis bagi masyarakat, juga dapat menghasilkan satu bentuk pembangunan yang mampu mengakomodasikan adanya arus kesinambungan budaya masa lampau, kini dan yang akan datang. Dalam hal ini mengutip apa yang dikemukakan oleh Cleere (1989), pada dasarnya pengelolaan warisan budaya yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan daerah, akan meliputi 3 kepentingan pokok yang yakni kepentingan ideologi, kepentingan akademik dan kepentingan ekonomi (Kusumohartono 1993: 47).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya arkeologi di satu daerah, dari sisi kepentingan ideologi diharapkan dalam skala besar dapat dijadikan sebagai landasan untuk penggalan jati diri bangsa, kebanggaan nasional, yang pada akhirnya diharapkan dapat memupuk rasa persatuan. Sedangkan dalam skala kecil sumberdaya arkeologi merupakan ciri atau penanda dari satu daerah yang dapat memberikan kontras yang menarik antara daerah bersejarah dengan bangunan-bangunan modern berskala raksasa. Di sisi kepentingan akademik, sumberdaya arkeologis, merupakan bahan kajian dalam rekonstruksi sejarah kehidupan masa lampau, dengan adanya data arkeologis yang memadai dapat ditarik benang merah keberlanjutan budaya bangsa. Tidak kalah pentingnya sisi ekonomis, sumberdaya arkeologis dapat dijadikan sebagai daya tarik utama pariwisata dengan bentuk lingkungan yang memiliki identitas, keunikan, karakter, dan kesejarahan tersendiri. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan pola wisata yang berkembang di Indonesia dewasa ini, yang secara umum dapat dikelompokkan sebagai: kegiatan wisata sejarah/budaya, wisata alam, wisata edukatif, wisata religius, nostalgia dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan adanya pelestarian sumberdaya arkeologi di satu daerah dapat memiliki peran ganda, selain dapat dijadikan sebagai pemuasan kebutuhan wisatawan, juga dapat dijadikan sebagai sumber devisa dalam menarik wisatawan untuk datang ke daerah tersebut.

Adanya temuan harta karun berupa keramik-keramik kuno di dasar laut yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena banyak diminati oleh para kolektor, dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah Daerah harus sesegera mungkin mengakomodasikan UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ke dalam berbagai produk hukum dan peraturan-peraturan daerahnya. Dengan adanya Sehingga sumberdaya arkeologi tersebut tidak lepas begitu saja ke pihak-pihak lain, dan nantinya nilai eko-

nomi yang dimiliki temuan tersebut dapat dikonstruksikan dalam gerak maju pembangunan daerah.

IV. PENUTUP

Dengan diterapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 di tahun mendatang, yang menjadi pokok permasalahan mendatang adalah seberapa jauh keseriusan Pemerintah Daerah terhadap keberadaan tinggalan budaya khususnya tinggalan arkeologis, karena tidak sedikit kegiatan pembangunan yang selama ini dilakukan banyak akhirnya mengorbankan atau menghilangkan situs-situs penting. Tentunya dalam hal ini yang sangat diharapkan adalah kekonsistensian dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang ada, sehingga dalam mengambil satu kebijakan dapat mempertimbangkan berbagai aspek terkait, sehingga satu dengan lainnya tidak dirugikan.

Sebagai langkah awal dari penanganan sumberdaya arkeologi dalam rangka otonomi daerah, diharapkan dari pelaksana pemerintah di daerah sebagai penanggung jawab dari semua sektor yang ada, hendaknya memiliki dua kearifan yakni kearifan budaya budaya dan kearifan sejarah. Sehingga dalam gerak maju pembangunannya, Pemerintah Daerah akan selalu ingat akan pentingnya tinggalan-tinggalan arkeologis tersebut sebagai salah satu bagian dari nadi daerahnya.

Dari 2 macam faktor inilah, kontribusi lembaga arkeologi dapat melakukan peran aktifnya sebagai motivator bagi Pemerintah Daerah, terutama dalam menggali sumberdaya daerah yang diharapkan dapat menjadi pemasukan bagi daerah nantinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Childe, Gordon V

- 1975 "The Urban Revolution", dalam Mark P. Leone (ed.)
**Contemporary Archaeology, A Guide to Theory and
 Contributions**. Southern Illinois University Press.

Kusumohartono, Bugie M.H.

- 1986 "Menuju Perumusan Peranserta Arkeologi Dalam Pelak-
 sanaan Analisis Dampak Lingkungan". **Berkala Arkeo-
 logi VII** (2). Balai Arkeologi Yogyakarta.

Kusumohartono, Bugie M.H.

- 1993 "Penelitian Arkeologi Dalam Konteks Pengembangan
 Sumberdaya Arkeologi". **Berkala Arkeologi XIII** (2).
 Balai Arkeologi Yogyakarta.

**Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar
 Budaya**

**Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuang
 Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**Undang-Undang RI Nomor. 9 Tahun 1990, tentang Kepari-
 wisataan**

**Undang-Undang RI Nomor. 22 Tahun 1999, tentang Otonomi
 Daerah**

Widianto, Harry

- 2000 Perspektif Balai Arkeologi di Masa Depan dan Perannya Dalam Memajukan Kebudayaan Bangsa. Makalah pada **Rapat Kerja Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan**. Cipayung, 8 – 10 mei 2000

Yondri, Lutfi

- 2000 Sumberdaya Arkeologi di Propinsi Lampung: Potensinya Dalam Pengembangan Wisata Budaya. Makalah pada **Ceramah Permuseuman di Museum Negeri Prop. Lampung "Rua Jurai"**, 29 Februari 2000

KETIKA BIDANG ARKEOMETRI DILEBUR LABORATORIUM HARAPAN TERAKHIR

M. Fadhlan S. Intan

I. BIDANG ARKEOMETRI

Berbicara tentang Arkeometri dan Bidang Arkeometri, maka yang pertama harus diketahui adalah definisi dari kedua istilah diatas, yaitu *Arkeometri adalah bagian dari arkeologi, yang dalam mengolah data arkeologi menggunakan teknik sains. Sedangkan Bidang Arkeometri adalah bidang yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan/studi tentang teknis ukur mengukur yang berkaitan dengan arkeologi.*

Definisi tersebut bukan merupakan definisi yang baku, namun merupakan gabungan dari definisi yang diajukan oleh beberapa staf Bidang Arkeometri beberapa waktu yang lalu.

Keberadaan Bidang Arkeometri di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bermula dari gagasan Prof. Dr. R.P. Soejono pada tahun 1979, yang memandang perlunya dibentuk suatu unit kerja yang dapat membantu dan menunjang penelitian arkeologi dalam merekonstruksi kehidupan masa lampau. Gagasan tersebut terwujud dengan terbitnya SK Mendikbud RI No. 0222/g/O/1980. Pada pasal 126 dan 127 dari SK tersebut diatas, maka Bidang Arkeometri mempunyai tugas melaksanakan dan membina kegiatan teknis dan laboratoris di lapangan arkeometri. Sedangkan fungsinya adalah

mempersiapkan perumusan kebijakan teknis kegiatan arkeometri, serta melakukan dan membina kegiatan teknis dan laboratoris di lapangan arkeometri.

Dalam SK Mendikbud RI No. 001/O/1982, bagian kelima pasal 8, disebutkan bahwa tugas Bidang Arkeometri adalah: 1) Menyusun program kerja tahunan bidang; 2) Merumuskan kebijakan teknis kegiatan arkeometri; 3) Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan teknis dan laboratoris arkeometri; 4) Melaksanakan penelitian arkeometri yang meliputi bidang-bidang Prasejarah, Arkeologi Klasik dan Arkeologi Islam; 5) Mengembangkan metode dan teknik arkeometri, penyusunan klasifikasi, katalogus, indeks dan penataan bahan dokumentasi dan perpustakaan di Bidang Arkeometri; 6) Memberikan bimbingan pelaksanaan kegiatan teknik dan laboratoris arkeometri; 7) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan teknis dan laboratoris arkeometri; 8) Mengolah dan menyusun hasil pelaksanaan kegiatan teknis dan laboratoris arkeometri; 9) Mendokumentasikan dan mengatur hasil kegiatan arkeometri; 10) Memberikan pelayanan informasi pelaksanaan kegiatan teknis laboratoris arkeometri dan; 11) Menyusun laporan bidang.

Selain SK tersebut diatas, R.P. Soejono (1989), telah mengajukan garis-garis besar sasaran penelitian Bidang Arkeometri, yaitu:

1. Aspek-aspek lingkungan purba (batuan, tanah, fauna-flora)
2. Pertanggalan situs, artefak.
3. Rekonstruksi dan rehabilitasi benda temuan (artefak, non artefak)
4. Sampling contoh-contoh organik dan anorganik untuk analisis pertanggalan, pollen dan lain-lain

A. Laboratorium Bidang Arkeometri

Para sesepuh pendiri lembaga ini sejak semula telah menyadari pentingnya suatu laboratorium yang mendukung penelitian arkeologi dan hal ini terlihat pada keberadaan laboratorium tidak hanya di pusat, tetapi juga di balar-balar. Di pusat sendiri kegiatan laboratorium selama ini ditujukan

pada kegiatan Bidang Arkeometri. sehingga Bidang Arkeometri identik dengan laboratorium.

Bidang Arkeometri yang juga sebagai laboratorium, dapat dijelaskan berdasarkan beberapa hal, misalnya ketenagaan, peralatan, dan prasarana.

1. Ketenagaan

Sejak Bidang Arkeometri dibentuk hingga saat dilebur, mempunyai 17 orang staf dengan klasifikasi sebagai berikut: 5 orang S2 (Arkeologi); 1 orang S1 (Arkeologi); 1 orang S1 (Kimia); 3 orang S1 (Biologi); 1 orang S1 (Geologi) dan; 6 orang SLTA (STM dan SMA). Dilihat dari keragaman keahlian yang dimiliki, sudah barang tentu akan menjamin kelangsungan kegiatan laboratorium di Bidang Arkeometri.

Secara rinci kegiatan analisis dengan tenaga yang dimiliki Bidang Arkeometri adalah sebagai berikut:

1. Analisis arkeologi dilaksanakan oleh 6 orang tenaga analisis (arkeolog).
2. Analisis palinologi dilaksanakan oleh 3 orang tenaga analisis.
3. Analisis mikroforaminifera dilaksanakan oleh 4 orang tenaga analisis dan 2 orang tenaga asisten analisis.
4. Analisis unsur kimia dilaksanakan oleh 1 orang tenaga analisis dan 2 orang tenaga asisten analisis.
5. Analisis sedimentologi ini dilaksanakan oleh 1 orang tenaga analisis dan 3 orang asisten analisis.
6. Analisis petrologi dan petrografi ini dilaksanakan oleh 1 orang tenaga analisis dan 2 orang asisten analisis.
7. Analisis mineralogi dan mineral berat dilaksanakan oleh 1 orang tenaga analisis dan 2 orang tenaga asisten analisis.

2. Peralatan

Peralatan laboratorium yang dimiliki oleh Bidang Arkeometri dapat dikatakan sangat terbatas. Bahkan peralatan dari beberapa jenis analisis dan unit kegiatan yang direncanakan sama sekali belum tersedia. Jenis-jenis peralatan pokok yang saat ini dimiliki oleh laboratorium Bidang Arkeo-

metri adalah, mikroskopelektron, mikroskop binokuler, oven, lemari asam, centrifuge, spektrofotometer, pH meter, tabung reaksi, petridish, jarum ose, hotplate, objek dan cover gelas, desikator, ayakan, loupe, skala Mohs, lampu spiritus, sarung tangan, dan berbagai jenis peralatan gelas lainnya.

3. Prasarana

Prasarana yang dimiliki untuk kegiatan laboratorium Bidang Arkeometri adalah bangunan seluas 150 meter persegi, yang terbagi atas 2 ruangan, yaitu ruang analisis (sekaligus berfungsi sebagai tempat bahan/peralatan), dan ruang duplikasi yang dibagi dua menjadi ruang diskusi. Namun dengan kondisi yang sedemikian ini, tidaklah menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kegiatan analisis, sambil berharap akan adanya pengembangan laboratoris Bidang Arkeometri.

B. Kegiatan Bidang Arkeometri dan Kendalanya

Selama kurun waktu 20 tahun (6 tahun berstatus unit), Bidang Arkeometri telah melaksanakan beberapa kegiatan, baik yang bersifat penelitian maupun analisis laboratoris. Hal ini terlihat pada 10 tahun terakhir. Bidang Arkeometri, selain penelitian mandiri, juga melakukan penelitian yang bersifat menunjang penelitian bidang-bidang, dan balar-balar. Kegiatan penelitian dan analisis laboratoris yang bersifat menunjang balar, baru mencapai 9 balar dari 10 balar yang ada.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal, maka Bidang Arkeometri diberikan pula tugas untuk melaksanakan kegiatan penelitian, agar dapat melihat secara langsung keberadaan dari benda-benda yang akan di analisis, di samping itu dapat pula melihat bagaimana proses penemuannya, kondisi, konteks dan lain-lain. Kegiatan tersebut di atas telah dilakukan oleh Bidang Arkeometri sesuai dengan kemampuan yang ada. Berdasarkan tugas-tugas yang dituangkan dalam kegiatan tersebut, maka tercapailah hasil kegiatan Bidang Arkeometri yang tentunya masih belum tercapai secara menyeluruh sesuai yang diharapkan (Sukendar 1993).

Secara singkat perlu disampaikan di sini bahwa kegiatan penelitian arkeometri yang mencakup 2 (dua) aspek yaitu aspek penunjang (menunjang kepentingan bidang) dan aspek peningkatan kualitas peneliti arkeometri. Kedua aspek tersebut, belum dirasakan berkembang secara memadai, demikian juga tentang usaha pembinaan ke balar-balar, belum dilaksanakan. Ini menyebabkan perkembangan pengetahuan arkeologi tidak berkembang secara merata sampai ke daerah. Kurangnya sarana kegiatan analisis juga menjadi penghambat utama, karena kegiatan ini tidak dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tidak mengherankan jika analisis hasil penelitian tersendat-sendat. Pengembangan laboratoris yang merupakan tanggung jawab bidang Arkeometri juga mengalami hambatan, sehingga menjadi ganjalan dalam pengembangan arkeometri khususnya, maupun dalam pengembangan arkeologi di Indonesia umumnya (Sukendar 1993).

Kendala-kendala pencapaian target selalu ada. Kendala-kendala tersebut tidak hanya pada kegiatan-kegiatan pokok (penelitian dan analisis) tetapi juga mencakup unsur-unsur penunjang (sarana dan prasarana) maupun sumberdaya yang mendukung yang mencakup kelembagaan, manusia dan informasi. Dengan keadaan yang demikian ini, akan menimbulkan kendala yang sulit untuk segera dapat dipecahkan, seandainya tidak dilakukan peninjauan ulang tentang mekanisme dan sistem kerja serta mengadakan evaluasi terhadap program-program yang ada, bahkan jika perlu harus meninjau ulang tentang metode kerja arkeometri yang dianggap kurang mengigit (Sukendar 1993).

Kendala yang muncul, merupakan gambaran nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Arkeometri. Dengan kendala tersebut, maka terjadilah kondisi yang jauh dari yang diharapkan. Bidang Arkeometri belum dapat berperan sebagaimana mestinya, atau dengan kata lain, berjalan sangat lamban, baik dalam penelitian, pengelolaan temuan, analisis temuan dan analisis laboratoris yang lain. Hambatan dalam bidang-bidang belum dapat berjalan seirama, artinya bahwa belum semua kegiatan yang dilakukan oleh bidang dapat diikuti secara keseluruhan. Hambatan dalam penelitian lainnya adalah kurangnya tenaga yang mengkhususkan diri

dalam pengamatan lingkungan, sedangkan sementara ini penelitian tentang lingkungan pada akhir-akhir ini sedang menjadi perhatian besar bagi para arkeolog. Peningkatan kualitas bagi para peneliti arkeometri sementara ini berjalan sangat lamban, karena mereka tidak memperoleh program khusus yang dilaksanakan oleh mereka dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kajian yang mereka pilih. Tanpa adanya program pelatihan di lapangan, maka tidak mungkin para peneliti arkeometri dapat memperoleh data dan fakta lapangan yang dapat dijadikan obyek studi masing-masing peneliti. Karena penelitian hanya dilakukan terbatas dalam menyertai kegiatan bidang di pusat maka pengetahuan kearkeometrian terlambat sampai ke Bali. Oleh karena adanya keterlambatan tersebut, maka muncul ide dari daerah untuk meningkatkan sendiri kemampuannya untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan arkeometri. Dengan demikian, eksistensi arkeometri di pusat seakan lepas, tidak jelas kaitan kerjanya/koordinasi positifnya. Hal yang demikian ini disebabkan oleh mekanisme kerja dan koordinasi atau garis struktur yang kurang dibakukan dalam bagan organisasi secara mantap. Dengan demikian maka tugas-tugas kearkeometrian kurang terarah, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi tumpang tindih (Sukendar 1993).

II. LABORATORIUM PUSAT ARKEOLOGI

Seiring dengan perjalanan Bidang Arkeometri yang hasilnya dapat dikatakan belum maksimal dalam menunjang penelitian arkeologi di Indonesia, maka pada Februari 2000 muncul gagasan dari Dr. Haris Sukendar yang menjabat sebagai Kapuslit Arkenas (sekarang: Pusat Arkeologi) untuk membentuk suatu laboratorium yang handal, yang mampu menyelesaikan segala permasalahan arkeologi dalam analisis laboratoris.

Gagasan ini merupakan gagasan yang sangat ideal dalam mengantisipasi perubahan nama Puslitarkenas menjadi Pusat Arkeologi (Pusar) dan 4 bidang dilebur menjadi 2 bidang, yaitu Bidang Prasejarah – Arkeometri, dan Bidang Arkeologi Klasik - Islam. Perubahan Puslitarkenas menjadi Pusat Arkeologi berdasarkan SK Mendiknas No. 010/O/2000 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional, yang berlaku mulai 1 April 2000.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, Dr. Haris Sukendar membuat 1 tim kecil yang dipimpin oleh Dr. Harry Truman Simanjuntak untuk membuat Naskah Akademis dengan judul *Pembentukan Laboratorium Pusat Arkeologi Departemen Pendidikan Nasional*. Dalam naskah akademis itu, disebutkan bahwa keberadaan suatu laboratorium adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lembaga penelitian arkeologi, karena laboratorium merupakan bagian dari penelitian itu sendiri.

A. Dasar Dan Tujuan Pembentukan Laboratorium

Laboratorium Pusat Arkeologi yang dibutuhkan ditopang oleh lima tiang pokok yaitu: 1) Laboratorium yang mempunyai struktur organisasi yang jelas; 2) Laboratorium yang melakukan kegiatan analisis dan pengolahan data analisis, melakukan preservasi, duplikasi, rekonstruksi, pengujian dan eksperimen; 3) Laboratorium yang memiliki persyaratan modern dengan memanfaatkan peralatan produk teknologi canggih untuk menghasilkan suatu analisis yang akurat; 4) Laboratorium yang didukung oleh tenaga multidisiplin yang handal; 5) Laboratorium yang memiliki prasarana gedung yang memadai untuk melakukan berbagai kegiatan.

Dalam pembentukan laboratorium Pusat Arkeologi didasarkan atas dua dasar, yaitu dasar hukum dan dasar akademis. Dasar hukum pertama yang digunakan adalah SK Mendiknas No. 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional yang pada pasal 882 disebutkan bahwa Pusat Arkeologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang arkeologi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada dasar akademis disebutkan bahwa laboratorium adalah tempat untuk mengadakan analisis, pengolahan data analisis, pengujian, dan percobaan ilmiah.

Tujuan pembentukan laboratorium Pusat Arkeologi, secara umum adalah menciptakan suatu laboratorium yang representatif yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengolahan data arkeologi, didukung oleh sarana

fisik yang memadai, peralatan modern dan ketenagaan yang handal. Sedangkan secara khusus laboratorium tersebut akan memberikan pelayanan analisis laboratoris di lingkungan Pusat Arkeologi dan balai-balai arkeologi, serta masyarakat ilmiah maupun umum. Sebagai tempat pengembangan metode dan teknis analisis laboratoris, serta tempat pelatihan guna meningkatkan pengetahuan para analis dan peneliti khususnya dan kalangan akademis serta masyarakat umum dalam menghasilkan olahan data yang menunjang interpretasi.

B. Nama, Status, Dan Kedudukan

Nama: Laboratorium Pusat Arkeologi



Status: Laboratorium ini akan dipimpin oleh Kepala Laboratorium, dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pusat Arkeologi. Untuk dapat mengemban tugas-tugas pengelolaan la-

boratorium dengan baik. Kepala Laboratorium harus mempunyai jabatan struktural yang paling tidak setara dengan Kepala Bidang (eselon III). Laboratorium ini menjadi semacam laboratorium sentral bagi Pusat Arkeologi beserta jajarannya, tetapi tidak berarti menutup kemungkinan pengembangan laboratorium di balar-balar. Keberadaan laboratorium di balar-balar justru semakin mendukung pengembangan arkeologi, tetapi lebih diarahkan pada kegiatan analisis ringan yang dapat memenuhi kebutuhan praktis balar. Laboratorium pusat direncanakan melayani berbagai jenis analisis dari yang ringan hingga ke yang berat.

Kedudukan: Lokasi Laboratorium berada pada Pusat Arkeologi di Jakarta, yang didasarkan pada alasan praktis untuk lebih mudah melayani kebutuhan-kebutuhan pokok penelitian dan memudahkan proses kerja sama dan koordinasi. Untuk sementara laboratorium dapat menggunakan bangunan laboratorium Bidang Arkeometri sambil menunggu pengembangannya di masa datang.

C. Unit-Unit Kerja Laboratorium

Sesuai dengan ruang lingkup kebutuhannya, Laboratorium Pusat Arkeologi direncanakan memiliki empat unit kerja, yaitu Unit Analisis, Unit Preservasi dan Rekonstruksi, Unit Duplikasi, dan Unit Eksperimen.

a. Unit Analisis

Kegiatan unit analisis mencakup lima bagian analisis, yaitu biologi, kimia, geologi, pertanggalan, paleontologi, dan arkeologi. Masing-masing aspek tersebut terbagi atas beberapa jenis analisis. Kelima bagian beserta jenis-jenis analisisnya merupakan kebutuhan paling mendasar dalam menopang keberhasilan penelitian arkeologi. Jenis-jenis analisis adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Analisis Biologi

Kelompok analisis ini mencakup analisis palinologi, paleontologi, anthropologi ragawi, dan foraminifera.

2. Kelompok Analisis Kimia

Kelompok analisis ini mencakup analisis unsur kimia, sifat fisik, metalurgi, dan pertanggalan C-14.

3. Kelompok Analisis Geologi

Kelompok analisis ini mencakup analisis sedimentologi, petrologi, petrografi, mineral berat, dan mineralogi.

4. Kelompok Analisis Arkeologi

Kelompok analisis ini mencakup analisis morfologi (identifikasi bentuk dan ukuran), teknologi (proses pembuatan dari awal hingga akhir, teknik-teknik pembuatan atau pengerjaan), dan stilistik (mengidentifikasi aspek dekoratif). Secara umum terdapat dua jenis analisis, yaitu analisis khusus, dan analisis kontekstual. Analisis khusus merupakan analisis yang menitikberatkan pada ciri fisik artefak, sedangkan analisis kontekstual menitikberatkan pada hubungan antar data arkeologi.

b. Unit Preservasi Dan Rekonstruksi

Preservasi dan rekonstruksi merupakan suatu kegiatan tersendiri dalam laboratorium. Preservasi mencakup pengertian konservasi, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk merawat dan mengawetkan tinggalan arkeologi yang mengalami pelapukan atau kerusakan. Preservasi juga mencakup upaya preventif, yaitu perawatan atau pengawetan agar tinggalan arkeologi tidak mengalami pelapukan atau kerusakan, tetapi tetap dalam kondisi baik.

Kegiatan rekonstruksi (bina ulang) sangat berkaitan dengan preservasi dan dimaksudkan sebagai suatu usaha menyatukan kembali kepingan-kepingan yang ada sesuai dengan kondisi semula untuk mengenal kembali

bentuk asli tinggalan. Kegiatan rekonstruksi didahului oleh kegiatan preservasi. Dalam hal ini keberhasilan suatu rekonstruksi sangat ditunjang oleh kelengkapan dan kondisi baik tinggalan. Jika tinggalan sangat fragmentaris dan tinggal sebagian dari benda aslinya, maka hasil rekonstruksi akan sulit membina ulang bentuk utuh benda. Tetapi berdasarkan data banding dan perhitungan, kemungkinan rekonstruksi bentuk utuh dapat dihasilkan di atas kertas.

c. Unit Duplikasi

Unit ini mempunyai kegiatan di bidang pembuatan duplikasi atau penggandaan duplikasi suatu tinggalan untuk berbagai kepentingan. Pembuatan duplikasi pada umumnya ditujukan pada tinggalan yang memiliki nilai arkeologi yang sangat tinggi. Pentingnya pembuatan duplikasi suatu benda dapat dilihat dari beberapa sudut:

1. Dari Sudut penelitian, yaitu di kala tinggalan letaknya jauh atau sulit diakses, sehingga keberadaan duplikasi akan sangat praktis.
2. Dari Sudut keamanan, benda-benda asli tidak dapat diakses setiap orang yang membutuhkan, sehingga sebagai gantinya perlu duplikasi.
3. Dari sudut pemasyarakatan, baik melalui pameran, peragaan permanen di museum-museum, dan lain-lain sangat memerlukan duplikasi.

d. Unit Eksperimen

Unit kerja keempat dari laboratorium adalah eksperimen, yaitu percobaan-percobaan pembuatan suatu benda tiruan untuk mengetahui proses teknologi yang berlangsung dalam pembuatan suatu benda arkeologi, dari tahap awal sampai pada tahap akhir. Kegiatan ini juga dapat mengetahui teknik-teknik pemakaian atau fungsi suatu benda melalui percobaan-percobaan yang dilakukan. Eksperimen merupakan salah satu metode penting dalam arkeologi karena keterbatasan data arkeologi itu sendiri. Kekosongan data secara hipotesis dapat diisi melalui hasil eksperimen.

D. Kondisi Laboratorium Yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan untuk terciptanya sebuah laboratorium yang ideal dan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam menunjang penelitian arkeologi, maka persyaratan dasar adalah dapat memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi selama ini. Secara lebih rinci persyaratan tersebut meliputi enam unsur pokok, yaitu status kelembagaan, kegiatan, ketenagaan, peralatan, prasarana, dan pendanaan.

1. Status

- a. Laboratorium mempunyai status struktural eselon III, setara dengan bidang, agar dapat mengorganisasikan dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
- b. Ketenagaan dalam laboratorium sebaiknya dikhususkan para ahli disiplin lain dari arkeologi dibantu dengan tenaga asisten analis yang mencukupi. Analisis arkeologi dapat dilaksanakan dalam laboratorium, tetapi statusnya berada dalam organisasi bidang.

2. Kegiatan

- a. Menciptakan laboratorium yang mempunyai kegiatan lengkap untuk keberhasilan penelitian arkeologi, meliputi unit analisis, preservasi dan rekonstruksi, duplikasi dan eksperimen.
- b. Pelaksanaan berbagai kegiatan dalam setiap unit kerja menuntut organisasi yang lebih baik, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

3. Ketenagaan

- a. Untuk kelancaran pekerjaan analisis laboratoris, diharapkan tenaga-tenaga analis berkualitas yang sesuai dengan jenis analisis yang dibutuhkan dalam penelitian arkeologi.
- b. Menjadikan laboratorium Pusat Arkeologi sebagai suatu tempat pelatihan bagi tenaga-tenaga analisis dari instansi lainnya.

- c. Konsepsi pengembangan harus diawali dengan pembentukan laboratorium, kemudian pengembangan tenaga-tenaga analis maupun asisten analis, melalui pelatihan-pelatihan. Dengan pengembangan tenaga-tenaga tersebut, berarti kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada akhirnya bermuara kepada hasil-hasil penelitian arkeologi.

4. Peralatan

- a. Melengkapi peralatan analisis palinologi, antara lain centrifuge, polyethylene beker, waterbath, alat balance (kesetimbangan), touchmixer (alat pengocok endapan).
- b. Melengkapi peralatan analisis C-14, antara lain spektrofotometer massa, thermolyne, high temperatur muffle furnace, regulator tabung gas oksigen regulator untuk tabung gas CO₂, lineconditioner merk Phillips, deware, neraca table balance 5 digit dan elektronik sartorius.
- c. Melengkapi peralatan analisis unsur kimia, seperti cawan platina, cawan nikel, penjepit cawan, agate stone, lampu benzena, spektrofotometer sinar UV, pH meter, dan peralatan gelas.
- d. Melengkapi peralatan analisis metalurgi, seperti bola baja, gerinda, spektrofotometer sinar-X, dan alat-alat gelas.
- e. Melengkapi peralatan analisis sedimentologi, antara lain test sieve (ayakan).
- f. Melengkapi peralatan analisis petrografi, antara lain mikroskop polarisasi, tustel mikroskop, mesin pemotong batuan.
- g. Melengkapi peralatan analisis arkeologi, antara lain mikroskop, neraca analitik, kaliper, dan lain-lain.

Unit analisis lainnya telah memiliki peralatan dasar dalam arti dengan peralatan tersebut telah dapat melaksanakan analisis, walaupun masih membutuhkan peralatan baru. Di antaranya adalah analisis mikroforamini-fera, analisis sisa manusia, analisis sisa fauna, analisis sifat fisik, analisis petrologi, analisis mineralogi, dan analisis mineral berat, serta Unit dupli-

kasi dan eksperimen. Unit preservasi dan rekonstruksi masih membutuhkan peralatan, seperti vibrator, battery charger, ultrasonic cleaner, bak aluminium, desikator, vacuum pump, loupe, dan mikroskop.

5. Prasarana

- a. Pengadaan laboratorium untuk lantai laboratorium.
- b. Membagi ruang per-unit analisis yang memiliki alat pengontrol temperatur (AC, Exhaust fan) dan kelembaban.
- c. Menciptakan ruang dan rak penyimpanan bahan kimia dan peralatan laboratorium secara tersendiri, untuk memudahkan pengontrolannya.
- d. Membuat bak penampungan limbah (water treatment).
- e. Perluasan bangunan yang sudah ada dengan membangun satu tingkat di lantai III.

6. Pendanaan

Pendanaan yang cukup merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan kegiatan laboratoris, sehingga perlu menjadi perhatian pokok.

E. Laboratorium Ideal, Keharusan Bagi Kemajuan Arkeologi

Kehadiran sebuah laboratorium merupakan suatu keharusan bagi institusi penelitian Pusat Arkeologi. Uraian di muka telah menjelaskan berbagai kepentingan dan manfaatnya dan alasan yang paling mendasar karena kegiatan laboratorium merupakan bagian dari penelitian itu sendiri. Keberadaan laboratorium masih jauh dari kondisi ideal. Oleh sebab itu, pembentukan laboratorium tersendiri menjadi kebutuhan mendesak. Unsur-unsur pendukung pembentukan laboratorium ini sebagian sudah tersedia, sehingga kita tidak perlu lagi memulai dari awal. Unsur-unsur pendukung tersebut dapat dilihat pada keberadaan bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk sementara, tenaga-tenaga peneliti dari berbagai disiplin ilmu, dan sebagainya peralatan yang sudah ada. Faktor-faktor penghambat merupakan masalah-masalah yang selama ini dihadapi dan solusi pemecahannya telah

dirumuskan pada uraian tentang kondisi laboratorium yang diharapkan. Keberadaan laboratorium sekarang justru menjadi modal pokok yang memudahkan pembentukan laboratorium baru.

Kini saatnya untuk merealisasikan pembentukan laboratorium yang ideal dan representatif, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan penelitian arkeologi. Laboratorium yang mempunyai status struktural eselon III, didukung oleh prasarana yang memadai, peralatan dan bahan yang modern, ketenagaan yang profesional, kegiatan yang terorganisasi rapih, dan yang terpenting lagi pendanaan yang memadai. Realisasi rencana ini akan mendorong kemajuan dalam penelitian dan perkembangan arkeologi, meningkatkan kredibilitas Pusat Arkeologi sebagai lembaga penelitian di lingkup nasional dan internasional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arfian

1993 *Evaluasi Dan Pengembangan Kegiatan Analisis Fosil Pollen Di Bidang Arkeometri*. **EHPA Yogyakarta**, 26-30 Juli 1993.

Aziz A. Fadhila

1993 *Arah Dan Kebijakan Penelitian Arkeologi Di Bidang Arkeometri Selama PJPT I*. **EHPA Yogyakarta**, 26-30 Juli 1993.

1997 *Arah Dan Aplikasi Penerapan Metode Ilmu-Ilmu Keras Dalam Perspektif Penelitian Arkeologi*. **Buletin Arkeologi AMO-GHAPASA**. SPSP Prov. Sumatera Barat & Riau. No.6/III/Maret/1997.

Bidang Prasejarah

- 1993 **Strategi Pengembangan Bidang Prasejarah**. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta.

Eriawati, Y.J.

- 1993 *Penelitian Arkeometri Dalam Penelitian Arkeologi*. **EHPA Yogyakarta**, 26-30 Juli 1993.

Intan S. Fadhlan M., dan Marsudi Utomo

- 1991 Pelatihan Di Geologi Kuarter. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung. **Proposal Bidang Arkeometri**, 1991.

Intan S. Fadhlan M.

- 1992 *Pelatihan Analisis Laboratorium Di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung*. Proposal Bidang Arkeometri, 1992.

Intan S. Fadhlan M.

- 1993 *Pengembangan Sumberdaya Bidang Arkeometri*. **EHPA Yogyakarta**, 26-30 Juli 1993.

Intan S. Fadhlan M.

- 1994 **Teknis Penelitian Bidang Arkeometri Dalam Menunjang Penelitian Arkeologi**. Bidang Arkeometri, Puslit Arkenas, 1994.

Intan S. Fadhlan M., Sukendar Haris

- 1998 *Arah dan Strategi Kebijakan Bidang Arkeometri Dalam Menunjang Penelitian Arkeologi*. **EHPA Cipayung**, 16-20 Februari 1998.

Kebijakan Teknis Bidang Arkeometri Tahun 1991-1992; 1992-1993; 1993-1994; 1994-1995; 1995-1996; 1996-1997; 1997-1998.
Puslit Arkenas, Jakarta.

Kepmendikbud RI No. 0222/g/1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Depdikbud.

Kepmendikbud RI No. 001/O/1982 tentang Perincian Tugas Bagian, Subbagian, dan Bidang di Lingkungan Puslit Arkenas.

Mundardjito

1994 *Arkeologi-Ekologi: Perspektif Ekologi Dalam Penelitian Arkeologi.* **EHPA Palembang**, 11-16 Oktober 1994

Petunjuk Teknis Dan Laboratoris Bidang Arkeometri Tahun 1991-1992; 1992-1993; 1993-1994; 1994-1995; 1995-1996; 1996-1997; 1997-1998. Puslit Arkenas. Jakarta.

Rencana Dasar Kegiatan Puslitarkenas, Dalam **PJPTII 94/95-2005.**

Sedyawati Edi

1996 *Tantangan Untuk Sepuluh Tahun Lagi.* **PIA IAAI**, 12-16 Maret 1996.

Soejono, R.P.

1989 *Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sebagai Aparatur Pemerintah dan Lembaga Ilmiah.* **Penataran Intern Capeg Puslit Arkenas Tkt III 19-28 Oktober 1989.** Jakarta.

1996 *Langkah-Langkah Institusional Dan Masa Depan Arkeologi Indonesia.* **PIA-IAAI VII**, Cipanas, 12-16 Maret 1997

Sudiono

- 1993 *Orientasi Penelitian Arkeometri Dalam PJPT II*. **EHPA Yogyakarta**, 26-30 Juli 1993.

Sukendar Haris

- 1993 *Arkeometri Menjelang PJPT II*. **EHPA Yogyakarta**, 26-30 Juli 1993.
1996 *Sumbangan Arkeometri Dalam Studi Arkeologi*. **EHPA Ujung Pandang**, 20-26 September 1996.

Triwuryani R.R.

- 1993 *Arah Program Penelitian Bidang Arkeometri Selama PJPT I*. **EHPA Yogyakarta**, 26-30 Juli 1993.

Truman H. Simanjuntak, dkk

- 2000 **Pembentukan Laboratorium Pusat Arkeologi Departemen Pendidikan Nasional**. Naskah Akademis, Pusat Arkeologi, Depdiknas.

PEMANFAATAN PENELITIAN ARKEOLOGI BAGI PEMBANGUNAN DAERAH*

Muhammad Hidayat

I. MANFAAT SUMBERDAYA ARKEOLOGI DAN PERAN BALAI ARKEOLOGI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Keberadaan sumberdaya arkeologi merupakan salah satu aset budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dalam pengertian secara umum. Sumberdaya arkeologi dapat bermanfaat apabila makna keberadaan, nilai-nilai yang terkandung pada sumberdaya arkeologi tersebut diungkapkan. Makna keberadaan sumberdaya arkeologi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan baik berkaitan dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan ekonomi, penguatan jati diri, media apresiasi budaya, keagamaan, maupun sebagai simbol/citra daerah (*land mark*). Salah satu pengelolaan terhadap sumberdaya arkeologi telah dipercayakan kepada Pusat Arkeologi di tingkat nasional, dan balai arkeologi di tingkat daerah.

*) Makalah ini ditulis hanya berdasarkan keadaan di Balai Arkeologi Yogyakarta sampai saat ini, mungkin tidak sesuai dengan keadaan Balai Arkeologi lainnya.

Sebagaimana lembaga pemerintah lainnya balai arkeologi dibentuk dengan tujuan untuk ikut berperan dalam pembangunan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam SK Mendikbud RI No. 0207/O/1978 tanggal 23 Juni 1978 disebutkan bahwa balai arkeologi bertugas dan berfungsi melaksanakan penelitian arkeologi di wilayahnya masing-masing.

Dalam perkembangan selanjutnya tugas dan fungsi balai arkeologi diperluas seperti tertuang dalam SK Mendikbud RI No. 0290/O/1992 tanggal 1 Juli 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja balai arkeologi. Dalam SK ini disebutkan bahwa fungsi balai arkeologi adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian arkeologi.
2. Melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi dan pengkajian ilmiah yang berhubungan dengan hasil penelitian arkeologi.
3. Memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil penelitian arkeologi.
4. Melakukan bimbingan edukatif kultural kepada masyarakat tentang benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan arkeologi.

Mengacu pada kedua SK tersebut maka tugas pokok balai arkeologi adalah melakukan penelitian arkeologi dan menyajikan informasi hasil penelitian kepada masyarakat. Pengertian masyarakat disini adalah masyarakat yang mencakup masyarakat secara umum maupun lembaga.

Sesuai dengan kedudukannya yang berada di daerah, maka balai arkeologi diharapkan dapat berperan dalam pembangunan di daerah dalam kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berkaitan dengan hal ini, penerapan otonomi daerah yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini, diperkirakan akan memaksa semua sumberdaya yang berada di daerah untuk dapat berperan secara nyata dan maksimal bagi pembangunan daerah, termasuk keberadaan balai arkeologi. Seperti diketahui bahwa balai arkeologi yang telah dipercayai untuk mengelola salah satu aset daerah berupa

sumberdaya arkeologi melalui penelitian tentunya sangat diharapkan dapat menyumbangkan produknya yang dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

Masalahnya, apakah balai arkeologi telah siap menghadapi hal semacam itu? Selama ini produk balai arkeologi belum dapat berperan secara nyata dan maksimal bagi pembangunan daerah. Informasi arkeologi yang merupakan produk pokok balai arkeologi belum dapat dimanfaatkan secara nyata dan belum memenuhi kebutuhan daerah.

II. PRODUK BALAI ARKEOLOGI DAN PERMASALAHANNYA

A. Produk Balai Arkeologi

Produk balai arkeologi selama ini belum dapat dimanfaatkan atau berperan dalam pembangunan secara nyata disebabkan antara lain oleh program (penelitian), format, dan penyebarluasan informasi hasil penelitian di balai arkeologi belum memadai. Berikut adalah gambaran program penelitian dan pengelolaan hasil pelaksanaannya hingga saat ini.

1. Program penelitian

Selama ini, program penelitian balai arkeologi diajukan atau diusulkan untuk setiap tahun oleh masing-masing peneliti yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut. Program penelitian ini disusun berdasarkan minat, kemampuan, dan pengetahuan individual masing-masing pengusul/peneliti. Oleh karena itu, program juga terpengaruh oleh spesialisasi akademis masing-masing pengusul, sehingga muncul program penelitian dengan bidang studi prasejarah, klasik, islam, dan sebagainya.

Program penelitian yang diusulkan tersebut didasarkan pada permasalahan arkeologis yang bersifat akademis. Arah dan tujuan program bersifat akademis, hanya untuk kepentingan ilmu arkeologi. Luasan cakupan sasaran penelitian pada skala situs atau kawasan.

2. Pengelolaan Hasil Penelitian

Keluaran penelitian diwujudkan dalam bentuk Laporan Penelitian Arkeologi (LPA). LPA disusun dalam format ilmiah arkeologis, yaitu dengan menggunakan istilah-istilah arkeologis. Beberapa dari LPA tersebut (sekitar 25 %), khususnya yang menarik dan layak terbit dari segi akademis diterbitkan dalam bentuk Berita Penelitian Arkeologi (BPA). Dari segi format dan bahasa, BPA tidak berbeda dengan LPA yaitu bersifat akademis arkeologis.

Selama ini LPA didistribusikan secara terbatas, khususnya ke instansi yang terkait dengan balai arkeologi (dalam hal ini Pusat Arkeologi, BAPPEDA TK. I wilayah Balai Arkeologi, Kanwil Depdiknas, SPSP), atau instansi yang terkait di wilayah penelitian (BAPPEDA Tk. I dan II, Kandepdiknas Kabupaten). Sementara itu BPA didistribusikan ke jangkauan yang lebih luas, yaitu ke instansi yang terkait dengan arkeologi yang berada hampir di seluruh wilayah Indonesia, dan secara terbatas ke perorangan yang memerlukan (meminta).

B. Permasalahan Produk Balai Arkeologi

Dengan melihat program, serta sajian hasil penelitian dan penyebarluasannya selama ini tampak bahwa produk balai arkeologi belum optimal dan belum berdaya guna bagi kepentingan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan diantaranya seperti berikut.

1. Program Penelitian

Dalam proses penyusunan program tidak melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi lain yang terkait di daerah. Hal ini mengakibatkan program di masing-masing instansi berdiri sendiri/lepas dan hanya sesuai dengan kebutuhan serta kebijakan di masing-masing instansi tersebut.

Penyusunan program penelitian tidak didasari pada permasalahan kebutuhan pembangunan di daerah, dan secara umum kontekstualitas penelitian sangat kurang. Program penelitian cenderung didasari oleh ke-

butuhan akademis arkeologis. Oleh karena itu arah dan tujuan program penelitian belum mengacu kepada kepentingan atau yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Penelitian terhadap sumberdaya arkeologi di daerah dilakukan secara terpotong-potong yang dibatasi oleh ruang dan waktu obyek penelitian sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan dan spesialisasi akademis peneliti. Hasil penelitian semacam ini kurang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah lebih membutuhkan dan dapat memanfaatkan terhadap informasi secara menyeluruh terhadap sumberdaya arkeologi yang ada di daerahnya khususnya dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

2. Pengelolaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang berupa informasi yang disajikan dalam bentuk LPA atau BPA belum dapat memenuhi kebutuhan semua pihak, khususnya pihak pemerintah daerah dan masyarakat umum. Penulisan bahasa pada LPA atau BPA yang menggunakan istilah khusus arkeologi terkadang kurang informatif, sehingga kurang dapat dipahami secara maksimal oleh pengguna, khususnya pemerintah daerah. Selain itu penulisan yang bersifat ilmiah pada BPA dapat menyebabkan kurang diminatinya BPA tersebut oleh pembaca, terutama masyarakat umum.

Penerbitan LPA menjadi BPA yang baru sekitar 25 % masih sangat kurang, sehingga informasi hasil penelitian hanya dapat diketahui oleh kalangan terbatas. Demikian pula terhadap distribusi BPA yang selama ini hanya ke instansi yang terkait dengan arkeologi dan belum merata ke masyarakat umum. Hal ini menyebabkan kurang meluasnya informasi hasil penelitian.

III. BENTUK PENELITIAN YANG BERMANFAAT BAGI PEMBANGUNAN DAERAH

Bagi pemerintah daerah, informasi arkeologi yang berada di wilayahnya diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, agar produk balai arkeologi yang berupa informasi arkeologi ini

dapat bermanfaat dan berguna bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan maka sudah seharusnya balai arkeologi melakukan pembenahan-pembenahan terhadap program dan hasil pelaksanaannya yang berupa sajian informasi dan penyebarluasannya.

1. Arah dan Tujuan Program

Orientasi program hendaknya tidak lagi semata bersifat akademis namun juga memperhatikan kontekstualitas, dalam hal ini kepentingan atau kebutuhan daerah. Penyusunan program mengacu pada program pembangunan daerah (Propeda). Dalam proses penyusunannya dilakukan dengan koordinasi integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi/lembaga lain di daerah yang terkait.

Selain itu cakupan sasaran penelitian diperluas, dapat mencakup keseluruhan sumberdaya arkeologi yang ada tanpa terkotak-kotakan oleh waktu/masa obyek. Berkaitan dengan hal ini, maka dalam pelaksanaan penelitiannya dilakukan oleh tim yang terdiri dari bermacam-macam spesialisasi. Dan diharapkan nantinya didapatkan informasi arkeologi yang komprehensif, mencakup semua sumberdaya arkeologi yang ada.

2. Sajian Hasil Penelitian

Sesuai dengan konsumennya yaitu masyarakat yang heterogen latar belakang pendidikannya, maka LPA atau BPA yang merupakan sumber informasi hasil penelitian sebaiknya dikemas dengan format dan bahasa yang mudah dipahami dan menarik untuk dinikmati. Apabila format BPA memang sudah standard seperti saat ini (ilmiah arkeologis), perlu dipikirkan alternatif lain sajian hasil penelitian yang bersifat ilmiah populer.

Untuk dapat memberikan informasi arkeologi yang lebih banyak dan semestinya kepada masyarakat, maka frekuensi penerbitan laporan-laporan hasil penelitian (LPA) perlu diperbanyak. Penyebarluasan terbitan hasil penelitian ini perlu diperluas dari keadaan sekarang, khususnya agar dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Untuk itu perlu dipikirkan penyebarluasan

ke perpustakaan sekolah-sekolah, terutama di daerah (tingkat kabupaten) lokasi keberadaan sumberdaya arkeologi yang diteliti.

3. *Evaluasi Program*

Selama ini pada setiap tahun BAPPEDA Tingkat I meminta hasil pencapaian pelaksanaan program di masing-masing instansi, sebagai bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan atau rencana pembangunan. Berkaitan dengan hal ini, untuk mengetahui dan menjaga perannya dalam pembangunan di daerah, balai arkeologi harus melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program pada setiap tahunnya, khususnya terhadap pencapaian sasaran. Dimaksud sasaran disini adalah informasi arkeologi yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan atau dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan. Dalam evaluasi ini harus dapat diketahui secara pasti, konkret, dan nilainya dapat diukur terhadap manfaat hasil pelaksanaan program bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Anonim

1994 **Penelitian Arkeologi dalam Siklus Pengelolaan Benda Cagar Budaya**. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta

Hidayat, Muhammad

1997 *Penelitian, Pelestarian, dan Pemanfaatan Sumberdaya Arkeologi*, **Berkala Arkeologi**, Tahun XVII, No. 1 Mei, Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta.

_____, et.al.

- 1993 *Program Penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta pada PJPT I*, makalah apendiks pada **Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi 1993** di Yogyakarta, 25-30 Juli

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- 1993 **Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.**

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0207/O/1978, tanggal 23 Juni 1978.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya.

Nurhadi

- 1994 *Informasi Sebagai Sumberdaya dalam Manajemen Terpadu Penelitian di Lingkungan Balai arkeologi Yogyakarta*, makalah **Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi**, Palembang 10-16 Oktober 1994.

- 1996/1997 *Butir-butir Acuan Studi Arkeologi Wilayah - Satu Strategi Pengembangan Penelitian di Lingkungan Balai Arkeologi Yogyakarta Menghadapi PJP-II*, **Jurnal Penelitian Arkeologi No. 04**. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta.

Sedyawati, Edi

- 1997 *Arkeologi dalam Kaitannya dengan Pembangunan Kebudayaan Nasional*, makalah **Simposium Nasional Arkeologi** yang diselenggarakan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta bekerja sama dengan Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta, 22 September

PENELITIAN ARKEOLOGI, DARI GBHN KE GBHN*

Nurhadi

I. KERANGKA KONSEPTUAL

Mengkaitkan penelitian arkeologi dengan GBHN merupakan langkah politisasi kegiatan ilmiah. Hal ini bertolak pada kerangka pikir tentang 'ilmu amaliah' dan 'amal ilmiah' seperti pernah dinyatakan oleh Bapak Bangsa - Bung Karno. Bagaimanapun juga kegiatan dan hasil penelitian ilmiah barulah akan mempunyai makna apabila dapat dimanfaatkan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan umat manusia, khususnya manusia Indonesia. Dengan demikian sudah sewajarnya bahwa kegiatan penelitian - termasuk penelitian arkeologi - tidaklah cukup dilandasi perangkat ilmu saja, tetapi lebih dari itu diperlukan pula kemauan politik. Dalam kerangka penelitian sebagai satu proses politik akan lebih jelas apa yang harus dikerjakan, hasil yang diharapkan dan luasan lingkup manfaatnya bagi masyarakat luas. Tanpa kerangka konseptual ini dimungkinkan kegiatan penelitian akar sia-sia dan mubazir hasilnya. Kemauan politik dalam melakukan penelitian perlu dilandasi etos dan etika kerja yang tinggi, baik sebagai ilmuwan maupun sebagai anak bangsa dan abdi negara.

* Makalah ini melengkapi makalah kami sebelumnya: 'Arkeologi Indonesia, GBHN '98, Tantangan dan Peluang Abad 21' yang disajikan pada Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke VIII tahun 1999 di Yogyakarta.

Pusat Arkeologi sebagai unsur penyelenggara negara mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan teknis di bidang penelitian arkeologi. Sementara ini pelaksanaan tugas didukung dana melalui APBN - uang negara dan sekaligus juga uang rakyat. Dengan demikian sudah sewajarnya Pusat Arkeologi dituntut mampu memberikan akuntabilitas publik tanpa mengesampingkan akuntabilitas akademiknya. Untuk memenuhi akuntabilitas publik ini perlu diidentifikasi masalah-masalah yang sedang dihadapi bangsa ini dalam membangun dirinya seperti telah diamanatkan dalam GBHN. Salah satu masalah yang cukup - atau mungkin paling mendesak saat ini adalah ancaman disintegrasi bangsa. Rendahnya kepekaan masyarakat dalam membangun toleransi dan kebersamaan saat ini mengakibatkan kebhinnekatunggalikaan bangsa rentan konflik, hasutan dan gejolak politik internasional yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi bangsa.

Menjawab ancaman tersebut perlulah menengok kembali rumusan arah kebijakan penelitian arkeologi jangka panjang (25 tahun kedepan) Pusat Arkeologi selaku pembina penelitian arkeologi secara nasional. Dalam EHPA '93 di Kaliurang - Yogyakarta telah ditetapkan lima tema utama penelitian arkeologi. Setelah sekian tahun pada kesempatan EHPA-2000 ini barulah ditinjau implementasinya. Dari rumusan lima tema tersebut jelas bahwa empat tema pertama berlatar akademik. Tema pertama mengenai proses sebaran dan keragaman manusia Indonesia dalam ruang, sedangkan tema kedua, ketiga dan keempat mengenai proses terbentuknya kemajemukan dan keragaman budaya Nusantara dan dinamika budaya yang melatarinya. Sedangkan tema kelima merupakan tujuan politik untuk mampu melihat kemajemukan dan keragaman manusia dan budaya Nusantara tersebut dalam jaringan integrasi nasional. Harus diakui bahwa tema kelima ini paling jarang mendapat perhatian karena sementara ini oleh sekelompok ilmuwan dianggap kurang ilmiah - baca: tidak arkeologis, bahkan suara sumbang menyebutnya terlalu politis jauh di luar ranah ilmu arkeologi. Dalam kerangka pikir 'ilmu untuk ilmu' suara sumbang di atas harus diakui benar adanya. Namun apakah hal itu cukup etis mengingat bahwa tinggalan ar-

keologi - baca: benda cagar budaya - mempunyai nilai sosial bagi seluruh warga negara republik ini yang telah mengikhhlaskan uangnya untuk penelitian. Silahkan merenungi dan memposisikan diri.

II. PENELITIAN ARKEOLOGI DAN GBHN '99

Sebagai kesepakatan politik yang melandasi republik ini UUD '45 mengamankan empat sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai tujuan nasional, yaitu : (1) keutuhan persatuan bangsa dan kesatuan negara, (2) kesejahteraan umum, (3) kecerdasan kehidupan bangsa dan (4) peran serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia. UUD RI tahun 1945 mengamankan pula bahwa untuk penyelenggaraan negara perlu ditetapkan GBHN yang memberikan arah kebijakan pembangunan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara berkewajiban mengerahkan seluruh potensi dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan nasional.

Pada pelaksanaannya GBHN ini dijabarkan dalam bentuk program lima tahunan secara lebih rinci serta terukur, dan selanjutnya pada uraian rencana tahunannya. Bagi penelitian arkeologi merupakan satu tantangan, seberapa mampukah arkeologi menjangkau keempat sendi kehidupan bangsa dan negara di atas. Bagaimanapun juga GBHN perlu diangkat sebagai pusat orientasi dalam perumusan kebijakan penelitian. Untuk itu perlu telaah GBHN dalam konteks penelitian arkeologi, tidak terbatas pada bidang kebudayaan saja - tetapi kalau memungkinkan seluruh bidang-bidang pembangunan yang ada dalam GBHN. Dengan menempatkan penelitian arkeologi sebagai kegiatan hulu, maka keterkaitan manfaat keluarannya dengan bidang-bidang terkait akan semakin jelas.

Langkah-langkah telaah materi GBHN dan penelitian arkeologi secara sekuensial dapat berupa:

1. Posisi arkeologi sebagai satu disiplin ilmu dalam arah kebijakan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi - IPTEK. Bagaimanapun juga pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan pemanfaatan perkembangan dan kemajuan IPTEK.

2. Posisi arkeologi dalam pembangunan bidang kebudayaan, seberapa luas penelitian arkeologi dapat mengakomodasi arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan. Hal ini mengingat bahwa garapan arkeologi adalah warisan budaya khususnya yang berupa benda dan tradisi yang melatarinya, sedangkan keluarannya berupa sejarah budaya daerah dan bangsa.
3. Posisi arkeologi dalam pembangunan bidang terkait, dalam telaah ini perlu diidentifikasi bidang-bidang pembangunan terkait dimana penelitian arkeologi dapat ikut berperan. Selain sejarah budaya daerah dan bangsa, keluaran arkeologi yang lain berupa informasi potensi sumberdaya budaya yang dapat ditawarkan sebagai masukan dan digunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan kerja bidang-bidang terkait tersebut.

Diharapkan dengan memposisikan arkeologi seperti itu, peran serta dan lingkup manfaat penelitian arkeologi dapat dikembangkan lebih luas lagi. Hal ini tentunya memberikan konsekuensi logis bahwa arkeologi perlu mawas diri untuk terus mengembangkan keilmuannya agar posisi tawar dalam pembangunan nasional semakin kuat.

II.1. Penelitian Arkeologi dalam Pengembangan IPTEK

Berbeda dari GBHN sebelumnya, dalam GBHN '99 ini tidak ada penjabaran pembangunan bidang IPTEK. Meskipun tidak dalam bidang tersendiri kemajuan dan penguasaan IPTEK tetap diperhitungkan sebagai faktor yang mampu mempercepat laju pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, khususnya dalam menghadapi tantangan global. Kiranya masih relevan untuk masalah pengembangan IPTEK ini disimak kembali rumusan pembangunan bidang IPTEK pada GBHN '98 sebelumnya. Bertolak dari kerangka rumusan GBHN '98 arkeologi sebagai ilmu dasar dapat memberikan landasan terapan untuk pengembangan rekayasa sosial dan budaya. Teknologi rekayasa arkeologi membuka peluang yang lebih luas bu-

kan hanya pada pembangunan bidang kebudayaan tetapi juga bidang-bidang lain yang terkait.

Berkaitan dengan masalah disintegrasi yang mendesak dihadapi bangsa ini, perlulah disimak tantangan bagi arkeologi untuk menjawab prioritas topik pada bidang-bidang penelitian dalam riset unggulan terpadu (RUT) tahun 2000-2001 yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi bersama Dewan Riset Nasional. Dari 10 bidang penelitian dalam RUT 2000-2001 tersebut peluang arkeologi hanya pada bidang ke 10, Bidang, Dinamika Sosial, Ekonomi dan Budaya, itupun terbatas pada prioritas topik:

- a. Pembangunan negara berwawasan kemasyarakatan dan lingkungan.
- b. Pembangunan otonomi daerah dan internalisasi nilai demokrasi berdasarkan azas keadilan dalam membangun dan mengembangkan ekonomi pedesaan dan khususnya topik E. Mengatasi situasi konflik mencegah integrasi bangsa, satu topik yang sangat relevan dengan pokok bahasan makalah ini.

II.2. Arkeologi dan Pembangunan Bidang Kebudayaan

Dalam rumusan GBHN '99 dinyatakan bahwa sampai saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi - tentunya termasuk pula arkeologi - belum dimanfaatkan secara berarti dalam mewujudkan kehidupan sosial-budaya yang berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi. Dapat dipertanyakan apakah keluaran penelitian arkeologi belum memenuhi kualifikasi tertentu, ataukah telah memenuhi namun belum siap dimanfaatkan. Mungkin pula yang terjadi keluaran tersebut telah memenuhi kualifikasi dan telah siap dimanfaatkan, namun perangkat yang mengakselerasikan ke hilir belum ada - termasuk pula sumberdaya manusianya.

Dalam GBHN '99 ini kegiatan penelitian arkeologi tidak lagi dinyatakan secara baik eksplisit maupun implisitpun. Tidak ada lagi frase 'peninggalan sejarah' dan kata 'digali' yang menunjukkan kegiatan fisik penelitian terhadap tinggalan benda budaya. Arahan GBHN justru memberikan tan-

tangan bagi arkeologi untuk melangkah lebih jauh setelah penelitian selesai - setelah sejarah budaya terungkap, yaitu menyadap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tinggalan dan sejarah budaya tersebut. Nilai-nilai budaya inilah yang nantinya digunakan sebagai muatan dalam pembangunan bidang kebudayaan dan kualitas berbudaya masyarakat Indonesia.

Dari rumusan arah kebijakan pembangunan bidang kebudayaan (bab III.F.2) paling tidak terdapat tiga butir yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu butir :

- a) Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.

Dalam frase 'warisan budaya leluhur bangsa' ini termasuk pula pengertian tinggalan arkeologi yang menjadi garapan penelitian arkeologi. Kiranya perlu dipertegas bahwa hanya nilai-nilai universal-lah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional bangsa Indonesia.

- b) Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia sehingga mampu memberikan rujukan sistim nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.

Rumusan tersebut mengisyaratkan bahwa nilai-nilai kebudayaan Indonesia tidak seluruhnya serta-merta dapat digunakan, tetapi terbatas yang mampu memberikan rujukan terhadap, atau mungkin lebih tepat napas bagi totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan. Pemilahan dan perumusan nilai-nilai budaya tersebut merupakan proses politis yang harus dilandasi kemauan politik

dalam mengutamakan kepentingan publik. Lingkup kemanfaatan nilai-nilai budaya tersebut jelas harus menjangkau semua sendi kehidupan masyarakat.

- c) Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

Salah satu tantangan masa depan ini adalah globalisasi - termasuk intervensi luar pada segala bidang dan bentuk. Globalisasi yang kini tengah berjalan menggerogoti batas ruang antar negara dimana intervensi nilai-nilai budaya luar masuk dan nantinya merasuk dalam kebudayaan nasional. Pengalaman budaya dari masa lalu kiranya dapat menjadi acuan dalam mengembangkan sikap kritis dalam pemilahan dan pemilihan nilai budaya sesuai dengan rumusan GBHN di atas, khususnya dalam meningkatkan ketahanan budaya bangsa.

Nilai-nilai budaya yang dapat digunakan sebagai acuan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat dan peradaban bangsa tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Jalur komunikasi massa dan pendidikan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembudayaan anak bangsa. Pembudayaan anak bangsa ini perlu didukung integritas setiap pelaku pembangunan, dan bersifat sistemik baik jaringan perangkat maupun substansi muatan yang harus disosialisasikan.

II.3. Penelitian Arkeologi dan Pembangunan Bidang Terkait

Keluaran penelitian arkeologi adalah jasa berupa informasi tentang (1) sejarah budaya daerah dan bangsa dan (2) informasi tentang potensi sumberdaya arkeologi. Yang pertama cenderung lekat dengan masalah nilai budaya sebagaimana terurai dalam bab II.2 di atas, sedangkan yang kedua lebih menyangkut pada masalah pelestariannya. Dalam hal ini pelestarian meliputi perlindungan, pembinaan, pemanfaatan dan pengembangannya, baik sebagai sumberdaya bahan/aset penelitian, wahana pemahaman dan penghayatan nilai maupun sebagai sumberdaya dan acuan pembangunan

bidang lain yang terkait. Untuk yang terakhir ini perlu disimak lagi pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dalam hal ini pemanfaatan sumberdaya arkeologi atau sumberdaya budaya untuk pembangunan sektor lain tetap harus memperhatikan kelestarian potensi yang dikandungnya untuk berbagai kepentingan di atas. Potensi sumberdaya arkeologi yang terjaga baik menjamin kesinambungan pembangunan bidang-bidang yang memanfaatkannya, antara lain bidang ekonomi – pariwisata.

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup, tinggalan arkeologi dan situsnya merupakan komponen dari lingkungan hidup yang harus dilindungi. Perlindungan tersebut secara khusus diatur dalam UURI No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Meskipun masalah pelestarian sumberdaya arkeologi tidak dinyatakan secara eksplisit dalam kata-kata 'dibina' dan 'dipelihara' seperti halnya GBHN '98 - pelestarian tersebut tetap merupakan konsekuensi logis yang harus dilaksanakan. Tidaklah dimungkinkan pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional bangsa Indonesia ini dilakukan tanpa memperhatikan pelestarian sumbernya, yaitu warisan budaya leluhur bangsa. Secara teknis indikasi pelestarian dalam pembangunan antar bidang dapat di simak dalam perencanaan tata ruang, seberapa jauh aspek tinggalan budaya dan pelestariannya telah diangkat sebagai acuan secara proporsional dalam setiap rencana tata ruang pada berbagai tingkatan. Hal ini mengingatkan bahwa rencana tata ruang merupakan perangkat untuk menserasikan pembangunan antar bidang dan sekaligus perangkat untuk mengendalikannya.

III. PENELITIAN ARKEOLOGI, KERAGAMAN BUDAYA DAN INTEGRASI BANGSA

Lima tema utama penelitian arkeologi yang dirumuskan sebagai kebijakan penelitian pada EHPA '93 tentunya membawa konsekuensi bagi Pusat Arkeologi untuk mensikapinya. Khususnya tema kelima yang sementara ini

tidak banyak tersentuh pada setiap penyelesaian program penelitian dapat dianggap suatu tugas yang masih terhutang. Di sisi lain pembagian spesialisasi penelitian secara temporal atau per-zaman membawa konsekuensi baik positif maupun negatif dalam pencapaian tujuan politis tersebut.

Selama ini penjamanaan sejarah budaya Nusantara telah melembaga dalam pembagian bidang-bidang penelitian dan merambah pada spesialisasi pendidikan arkeologi - yang katanya berorientasi pasar. Penzamanan pra-sejarah, klasik dan islam - termasuk kolonial, tidak saja mengakibatkan alur sejarah budaya terpotong-potong karena transisi antara ketiganya seakan tabu untuk dirampah penelitian, secara politis juga kurang menguntungkan. Kenyataan obyektif di lapangan menunjukkan sebaran tinggalan masing-masing jaman tidak serupa atau bahkan terlalu senjang antara satuan ruang di Nusantara ini. Dengan demikian sejarah budaya yang telah berlalu pun tidak sejajar, ketidaksejajaran atau kesenjangan ini dapat mengundang prasangka politis bagi kelompok-kelompok masyarakat dari daerah satu dan lainnya.

Kesenjangan yang menonjol antara zaman-zaman tersebut antara lain :

Prasejarah

Pada jaman prasejarah terjadi proses penghunian bumi Nusantara secara bergelombang dan selanjutnya membentuk keragaman rasial/fisiologis antara kelompok masyarakat satu dan lainnya. Meskipun terdapat keragaman fisiologis kelompok-kelompok masyarakat tersebut masih menunjukkan keseragaman budaya yang cenderung lebih bersifat universal. Keseragaman budaya inilah yang menjadi dasar budaya Nusantara.

Klasik,

Pengaruh budaya India tidak menjangkau seluruh bagian Nusantara, yang terjangkau itupun tidak pada intensitas yang sama. Penetrasi budaya yang tidak merata dan faktor lingkungan yang berbeda memacu tumbuhnya keragaman budaya, Nusantara bagian barat memperoleh pengaruh lebih kuat dan menjadi lebih dominan dari bagian lain yang cenderung dipandang

Islam,

sebagai obyek sub-ordinasinya, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Pengaruh budaya dari dunia Islam menjangkau wilayah yang lebih luas dari pengaruh India sebelumnya. Sebagian wilayah Nusantara bagian timur tidak terjangkau pada awal masuknya budaya Islam ini. Proses perubahan dan perkembangan budaya zaman Islam mempertajam keragaman budaya yang telah berbentuk pada jaman Klasik, dan kelompok yang dominan lebih berkembang lagi. Subordinasi tidak hanya pada aspek ekonomi, politik dan sosial budaya, tetapi juga agama.

Kolonial,

Masuknya pengaruh Barat dan menguatnya dominasi politik kolonial makin meningkatkan kompleksitas keragaman budaya di Nusantara. Sebagai unsur asing dominasi politik kolonial tidak diterima dan mendapat perlawanan diseluruh berbagai daerah Nusantara. Perlawanan tersebut secara tidak langsung melahirkan keseragaman pengalaman sejarah dan mendorong terjalinnya jaringan antar kelompok masyarakat yang majemuk sebagai benih nasionalisme yang berkembang pada akhir masa kolonial.

Dari rangkaian penjamanan sejarah budaya tersebut, antara jaman prasejarah dan kolonial terdapat kesejajaran yaitu bentuk keseragaman budaya yang mendasari tumbuhnya budaya Nusantara dan keseragaman pengalaman sejarah yang mendasari tumbuhnya nasionalisme Indonesia. Kedua hal ini pada hematnya sangat relevan dalam pengkerangkaan integrasi budaya bangsa. Di sisi lain, penelitian arkeologi Klasik dan Islam perlu mendapat perhatian khusus mengingat masalah keragaman budaya dan lebih dari itu masalah subordinasi merupakan hal yang sangat beresiko

mengundang prasangka politis antara kelompok yang sementara ini menganggap dirinya telah diperlakukan sebagai obyek subordinasi terhadap kelompok lain yang dianggap secara tidak adil mendominasi. Sejarah budaya daerah dan bangsa ini merupakan kenyataan obyektif di lapangan yang harus disiasati dalam pencapaian tema utama kelima penelitian arkeologi. Terus terang - terang terus bahwa tujuan politis ini bukan suatu yang utopis.

IV. PESAN

Kemajemukan kelompok masyarakat dan keragaman budaya yang sangat rentan konflik dewasa ini merupakan masalah yang sangat mendesak untuk segera dipecahkan. Sebenarnya kemajemukan dan keragaman sosial-budaya merupakan suatu hal yang wajar, bagaimanapun pertumbuhan, perkembangan dan perubahan budaya daerah satu dan lainnya tidak akan menempuh proses yang sama dan tentunya keluarannya pun akan selalu berbeda. Masalah ketidakadilan rupanya telah meruntuhkan kesadaran masyarakat untuk hidup dalam kemajemukan yang seimbang dan serasi. Prasangka politik yang semula membayangi di bawah nasionalisme Indonesia muncul kuat karena faktor intern dan ekstern yang saling berkaitan. Faktor intern yang telah terakumulasi dalam beberapa dekade terakhir ini merebak dalam bentuk krisis multi-dimensional. Di sisi lain tidak dipungkiri bahwa skenario negara-negara besar dan maju untuk memanipulasi isu global, keterbukaan, demokrasi dan HAM dan menggunakannya untuk memantapkan dominasinya terhadap negara-negara berkembang - termasuk Indonesia.

Dalam menghadapi masalah besar ini penelitian arkeologi perlu berpartisipasi sesuai dengan ladang garapannya secara proporsional. Keragaman budaya dapat dianggap sebagai tampilan permukaan, di bawah keragaman tersebut terdapat jaringan keseragaman budaya yang harus selalu dimantapkan dan dimunculkan kepada masyarakat luas. Keseragaman tersebut terletak pada pandangan hidup - kesadaran budaya yang paling dalam - dalam memosisikan dirinya di alam semesta, dan sistim nilai normatif sebagai acuan dalam bertindak baik terhadap lingkungan alam sekitar, lingkungan sosial dan dunia metafisiknya.

Secara teknis arkeologi prasejarah diharapkan dapat lebih berperan dalam meletakkan dasar-dasar keseragaman budaya Nusantara. Sebaliknya arkeologi klasik dan arkeologi Islam perlu lebih berhati-hati dan berkeadilan dalam menyusun program-programnya. Orientasi penelitian pun perlu bergeser dari penelitian peradaban dan tradisi budaya besar ke budaya pinggiran khususnya di Indonesia bagian timur yang sementara ini kurang menarik perhatian dan hampir terlupakan. Lebih dari itu mungkin kini saatnya untuk mencari paradigma baru bagi penelitian arkeologi di Indonesia. Mungkin pengembangan arkeologi bahari sebagai arkeologi alternatif perlu dipertimbangkan kontekstualitasnya memecahkan masalah di atas. Laut dapat saja mengurai Nusantara dalam sejumlah pulau, tetapi budaya kelautanlah yang mampu menyatukan rangkaian pulau-pulau itu kedalam kesatuan budaya Bangsa Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Balai Arkeologi Yogyakarta

1993 **Laporan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi (EHPA) 1993**. Yogyakarta

Harry Widiyanto

2000 *Perspektif Balai Arkeologi di Masa Depan dan Perannya dalam Memajukan Kebudayaan Bangsa*, dalam **Rapat Kerja Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan**. Cipayang: Ditjenbud

Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi

1999 **Petunjuk Penyusunan Proposal Riset Unggulan Terpadu (RUT) VIII tahun anggaran 2000-2001.** Jakarta

MPR-RI, Ketetapan MPR-RI no. II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1998-2003

Ketetapan MPR-RI no. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004

Nurhadi

1995 *Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Arkeologi*, dalam **Seminar Nasional Metodologi Riset Arkeologi**. Depok: Fakultas Sastra UI, 1995

1999 *Arkeologi Indonesia, GBHN '98, Tantangan dan Peluang Abad 21*, dalam **Pertemuan Ilmiah Arkeologi - PIA ke IX**. Yogyakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia - IAAI